

BERKARYA TIADA HENTI

Tiga Lentera Bulaksumur

Persembahan untuk
Prof. Dr. Sunyoto Usman
Prof. Dr. Partini
Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi



Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada



**Berkarya Tiada Henti:
Tiga Lentera Bulaksumur**



Buku ini dipersembahkan atas dedikasi:

Prof. Dr. Sunyoto Usman

Prof. Dr. Partini

Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi



Berkarya Tiada Henti: Tiga Lentera Bulaksumur

Penyunting:
M. Falikul Isbah & A.B. Widyanta



Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2019

M. Falikul Isbah & A.B. Widyanta (Peny.)
Berkarya Tiada Henti: Tiga Lentera Bulaksumur
Yogyakarta: Departemen Sosiologi FISIPOL UGM
November 2019

ISBN: 978-602-6205-38-4

xiv + 250 hlm.

17,5 x 25 cm.

Diterbitkan oleh:
Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur,
Yogyakarta 55281, Indonesia
<https://fisipol.ugm.ac.id/> E: fisipol@ugm.ac.id
P: +62(274) 563362 F: +62(274) 551753

Daftar Isi

Kata Pengantar	
<i>Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto</i> (Dekan FISIPOL UGM)	ix
Terima Kasih, Prof... (Sebuah Pengantar)	
<i>Dr. Arie Sujito</i> (Ketua Departemen Sosiologi FISIPOL UGM)	xi
• Bagian 1	
Persembahan untuk Prof. Dr. Sunyoto Usman	1
Biografi Prof. Dr. Sunyoto Usman	3
Media Sosial dan Ruang Publik Virtual	
<i>Sunyoto Usman</i> (Departemen Sosiologi, FISIPOL UGM)	5
Dunia Sosial Baru di Era Digital	
<i>Dr. Hakimul Ikhwan, M.A.</i>	21
Media Sosial dan Ruang Publik Virtual: Tantangan bagi Masyarakat Informasi Mencapai Rasionalitas Tertinggi di Ruang Komunikasi Publik	
<i>Hermin Indah Wahyuni</i>	31
<i>Commentaries</i>	
Penetrasi Media Sosial	
<i>Drs. Ashadi Siregar</i>	37

Demokrasi dan Pluralisme	
<i>Dr. J. Kristiadi</i>	39
Demokrasi Digital di Dalam Media Sosial	
<i>Dr. Nurul Hasfi</i>	42
Media Sosial dan Agenda Kebijakan	
<i>Dr. Erwan Agus Purwanto</i>	46
• Bagian 2	
Persembahan untuk Prof. Dr. Partini	49
Biografi Prof. Dr. Partini	51
<i>Soft Masculinity</i> : Dekonstruksi Maskulinitas dalam Industri Musik Korea (K-Pop)	
<i>Dr. Harmona Daulay, M.Si.</i>	53
Memahami Generasi Z Melalui Etnografi Virtual	
<i>Diah Ajeng Purwani & Rama Kertamukti</i>	65
Perempuan di Pusaran Teknologi Digital	
<i>Sri Peni Wastutiningsih</i>	79
Femininitas Gajah Mada <i>Plus</i> Maskulinitas Prof. Partini	
<i>Mochamad Sodik</i>	93
Sosok “Kartini” itu Bernama ... PARTINI	
<i>Muhamad Sulhan</i>	107
Metodologi Feminis: Refleksi Penelitian terhadap Kelompok Perempuan Marginal	
<i>Fina Itriyati & Desintha Dwi Asriani</i>	113
• Bagian 3	
Persembahan untuk Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi	129
Biografi Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi	131

Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Kawasan Industri Pertambangan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah <i>Suharko, D.C. Mulyono, Triyono</i>	133
Pola Interaksi Desa Membangun Negeri (Masyarakat, Pemerintah dan Perguruan Tinggi) <i>Dr. Danang Purwanto</i>	157
Transisi Kerja Industrial Kaum Milenial: Dari Otomasi 3.0 Menuju <i>Cyberphysical System</i> 4.0 <i>Derajad S. Widhyharto</i>	169
Menyingkap Wajah Muram Buruh Sektor Tambang di Indonesia dalam Blokade Fundamentalisme Pasar <i>A.B. Widyanta</i>	187
Tentang Para Kontributor dan Penyunting	225



Kata Pengantar

Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto

(Dekan FISIPOL UGM)



Memasuki usia purna tugas merupakan dambaan setiap pegawai, tidak terkecuali juga dosen. Membayangkan akan memiliki hari-hari yang menyenangkan untuk dapat mengerjakan aktivitas yang menjadi *passion* atau hobi yang selama ini tidak ada waktu untuk mengerjakannya, seperti berkebun, olahraga, *travelling*, dll. tentu merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu. Setelah puluhan tahun bergelut dengan tugas mengajar, mengoreksi ujian, membimbing mahasiswa, menguji, dan berbagai *deadline* penulisan laporan maupun artikel, ketika purna tugas berarti terbebas dari itu semua dan pasti akan sangat melegakan.

Namun demikian, bagi seorang Guru Besar atau Profesor, purna tugas barangkali hanyalah sebuah jeda. Sebuah pemberhentian sejenak. Ada pepatah yang mengatakan: “*Old soldiers never die, they just fade away*”. Begitu juga seorang Guru Besar. Ketika seorang Guru Besar mencapai usia 70 tahun, meskipun secara administratif akan dinyatakan purna tugas, namun dalam kenyataannya tidak ada purna tugas yang sesungguhnya untuk berkarya bagi seorang Guru Besar. Guru Besar adalah obor bagi bangsa Indonesia yang membutuhkan penerang, serta merupakan penuntun ke mana langkah bangsa ini akan menuju.

Kumpulan karangan yang ditulis oleh para murid, sahabat, dan kolega tiga orang Guru Besar Departemen Sosiologi, yaitu: Prof. Dr. Sunyoto Usman, Prof.

Dr. Tadjuddin Noer Effendi, dan Prof. Dr. Partini yang akan memasuki purna tugas adalah sebuah “koma”, bukan “titik”. Tulisan-tulisan tersebut menggambarkan apresiasi perjalanan para Guru Besar kami dalam bergulat dengan berbagai pemikiran yang menjadi *concern* atau bidang keahlian masing-masing. Dan lebih dari itu, di dalam artikel-artikel tersebut juga tergambar berbagai hal yang terus menuntut untuk diurai, didiskusikan, dan tentu saja ditindaklanjuti dalam berbagai praksis: advokasi sosial, politik, maupun rekomendasi-rekomendasi kebijakan. Sebab konon, kata Gramsci, dosen apalagi Guru Besar adalah bagian dari intelektual organik: mereka tidak puas hanya berdiam diri menikmati *pre-villege* sebagai kaum terdidik di “menara gading”, namun akan ikut *cancut tali-wondo*, terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakatnya.

Dengan demikian, saya sangat yakin, tiga Guru Besar Sosiologi kebanggaan FISIPOL UGM, meskipun sudah purna tugas, namun beliau-beliau akan tetap terlibat dalam memproduksi ilmu pengetahuan yang mencerahkan masyarakat maupun berkhitmad dalam advokasi-advokasi kebijakan untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil yang menjadi nadi perjuangan para intelektual FISIPOL UGM.

Semoga dengan membaca kumpulan karangan ini, para pembaca akan dapat mengikuti pergulatan pemikiran tiga Guru Besar Departemen Sosiologi yang terentang panjang di dalam karier beliau-beliau sebagai guru, peneliti, dan aktivis sosial. Tidak hanya berhenti di situ, kita juga dituntut untuk meneruskan diskursus-diskursus yang telah disemai puluhan tahun lalu dan yang masih relevan untuk dicari jawabannya hingga hari ini.

Bulaksumur, awal Oktober 2019

Terima Kasih, Prof...

(Sebuah Pengantar)

Dr. Arie Sujito

(Ketua Departemen Sosiologi FISIPOL UGM)



Ada anggapan, menjadi guru tidak sekadar sebagai profesi. Namun, lebih pada panggilan moral. Tugas mendidik dan mencerahkan masyarakat, adalah sekian di antara tugas mulia seorang guru, dibandingkan profesi lain.

Karena itulah, guru dianggap sebagai produsen keteladanan dan menjadi figur yang menebar pengetahuan, dengan landasan nilai-nilai, yang kelak hasilnya menjadikan seseorang disebut “terdidik”. Semua itu dapat dianggap fakta, namun dapat juga sebagai mitos, bergantung bagaimana seseorang mampu melacak pada berbagai sisi jejak historis sampai perkembangannya hingga hari ini.

Guru Besar, atau Maha Guru, adalah dosen yang dengan gelar profesor. Penganugerahan predikat Guru Besar merupakan penghormatan kepada dosen karena dedikasi, integritas, pengabdian serta reputasi yang dimilikinya. Dari situ-lah disadari betul bahwa Guru Besar adalah sosok yang dalam derajat tertentu menjadi figur sumber pengetahuan. Dalam konteks demikian sudah selayaknya mahasiswa, kolega, mantan muridnya dan insan-insan akademik memberikan penghormatan dengan berbagai cara. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk konteks itu, yakni sebagai bagian kecil dari upaya kami untuk mempersembahkan narasi bagian penghormatan, kesan-kesan dari kami yang pernah bersama beliau-beliau.

Untuk itulah, berkenankan pada kesempatan ini, kami mewakili Departemen Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Sunyoto Usman, Prof. Dr. Partini, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi yang pada tahun 2019 ini memasuki masa purna tugas.

Kami menyadari, jasa beliau begitu banyak dalam mengembangkan Sosiologi UGM. Pengabdianya tidak semata urusan rutin mengajar dan membimbing mahasiswa ketika menulis skripsi (S1), tesis (S2) dan disertasi (S3), namun juga keterlibatan aktif dalam penelitian guna memperkaya pemikiran atau perspektif dalam khasanah ilmu-ilmu sosial sehingga begitu banyak karya telah diwujudkan. Bahkan, pengabdian diri secara praksis kepada masyarakat menjadi bagian penting dari wujud dedikasinya pula. Karenanya, kami bangga pernah jadi muridnya, dan menjadi koleganya.

Beliau bertiga, menurut saya, adalah figur yang sangat unik dan dinamis.

Prof. Dr. Sunyoto Usman, adalah sosiolog yang meminati kajian sosiologi politik. Saya mengenal beliau sejak mahasiswa pertengahan tahun 1991 karena beliau mengajar mata kuliah Pengantar Sosiologi, dan kemudian dalam perkuliahan lainnya. Dan kemudian saya semakin mengenal melalui interaksi yang panjang hingga menjadi kolega beliau. Dalam perjalanan sebagai ilmuwan, Prof. Dr. Sunyoto Usman memiliki pemikiran yang cenderung kritis terhadap berbagai isu yang ditekuni. Meskipun, sebagai sosiolog kadang sikap beliau ketika menganalisis sangat “politis”.

Secara pribadi, saya menilai beliau ini berpenampilan “galak”. Tetapi banyak orang tidak menduga, ternyata beliau juga humoris. Dalam berbagai pembincangan informal misalnya, kami sering membahas isu politik kontemporer yang berkadar berat namun oleh beliau diperbincangkan dengan gaya ringan dengan dibumbui sindiran kecut. Bahkan pada tiap diskusi diwarnai ilustrasi-ilustrasi khas dan bernada humor. Beliau pernah meledek saya, “Arie, pertarungan antara kelompok kiri dan Islam, yang menang ‘kan nasionalis”. Saya tersenyum, sambil menimpali, “Ya, itu ‘kan maunya kaum nasionalis”. Saya tahu beliau itu alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), organisasi mahasiswa yang di zamannya juga disegani di kampus.

Sependek pengamatan saya, seiring perjalanan waktu, kajian politik Islam juga diminati beliau, yang dalam skala lebih luas sekarang ini merupakan diskursus politik identitas.

Semoga tidak berlebihan jika saya menyebut beliau ini ilmuwan golongan nasionalis religius.

Banyak tulisan telah dihasilkan beliau dalam bentuk buku, jurnal dan makalah seminar, yang merupakan kajian sosiologi dengan tema-tema demokrasi, politik Islam. Bahkan dalam sepuluh tahun belakangan ini beliau menekuni isu-isu pemberdayaan dan infrastruktur. Menjelang purna tugas pun, beliau masih sempat menulis jurnal dan artikel di media massa, bahkan, mengisi *tausiah* di berbagai mimbar. Hormat pada Prof. Nyoto... Tiada henti beliau berkarya.

Prof. Dr. Partini, adalah seorang sosiolog, perempuan dosen yang pertama kali meraih profesor di FISIPOL UGM. Itu penting dicatat. Dalam sebuah kesempatan informal, beliau pernah cerita –Bu Partini ini memang suka curhat pada kolega, terutama saat suasana santai usai mengajar sambil menikmati segelas teh hangat dan makanan ringan– bahwa jalan panjang untuk dapat menjadi Guru Besar memang melelahkan, meski akhirnya berhasil diraihinya juga. Cukup inspiratif. Energinya luar biasa, karena sejak saya mengenal beliau pada zaman mahasiswa, beliau aktif mengajar dengan penuh semangat di hadapan mahasiswanya. Di kalangan dosen dan mahasiswanya, beliau dikenal menekuni dunia metodologi penelitian, khususnya kuantitatif. Seorang kolega senior, namanya Mas Heru Nugroho, pernah berkomentar dengan nada *guyon*: “Ahli kuantitatif ini *biasane itung-itungane njlimet*”.

Hal yang juga menarik dicatat, Prof. Dr. Partini memiliki “jamaah” dosen dari berbagai perguruan tinggi. Mengapa begitu? Karena beliau adalah asesor terkemuka yang selama ini memiliki reputasi dalam memberikan penilaian terhadap prodi (program studi) sosiologi tingkat nasional. Wajar saja jika Prof. Dr. Partini populer di kalangan dosen perguruan tinggi, dan yang khususnya memiliki prodi sosiologi harus mengenal beliau. Salut pada Prof. Partini. Tetaplah semangat berkarya.....

Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi adalah ilmuwan sosial yang meminati tema-tema pengembangan SDM (sumber daya manusia), ketenagakerjaan, serta problem dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Di kalangan mahasiswa,

pak TNE (sebutan populer Prof. Tadjuddin Noer Effendi) dikenal sebagai dosen yang disiplin dalam mengajar. Mahasiswa tidak boleh terlambat masuk kelas, dengan konsekuensi Pak TNE selalu hadir lebih awal dibandingkan mahasiswanya. Sebagai guru, beliau membangun karakter disiplin pada mahasiswa, yakni pemaduan antara proses belajar yang baik dan hasil memuaskan. Tidak heran jika beliau pernah terpilih menjadi dosen favorit di FISIPOL. Meskipun dikenal sebagai dosen “galak”, pengalaman saya pribadi dalam berinteraksi dengan beliau, ternyata pak TNE suka guyon terkait perilaku politik, suka meledek dan *ndagel* bergaya “Batak-Jawa”.

Pak TNE memang memiliki jaringan dan akses luas. Hal itu ditunjukkan dengan pelibatan dirinya dalam agenda-agenda yang mempengaruhi kebijakan strategis lokal dan nasional. Dalam 2 tahun terakhir ini, menjelang pensiun pun, beliau masih aktif tergabung di dalam Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) dalam naungan Kemenaker RI (Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia). Terus semangat pak TNE, untuk berkontribusi bagi bangsa.

Itulah sedikit narasi kecil tentang para Guru Besar kami yang pada tahun 2019 ini harus mengakhiri masa tugasnya. Tentu para kolega dosen maupun mantan muridnya, juga memiliki “rekaman” dan interpretasi atas berbagai pengalaman ketika berinteraksi dengan beliau-beliau.

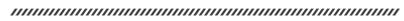
Kami telah memperoleh banyak hal dari beliau-beliau. Bangunan dan jejak reputasi Departemen Sosiologi juga tidak lepas dari peran sang Guru. Inspirasi, pemikiran, dan pengabdianya tentu tidak kami lupakan. Karenanya, tantangan penting yang perlu dipikirkan adalah bagaimana regenerasi berlangsung, serta transformasi intelektual dalam menjawab arus perubahan sosial kini dan ke depan. Terlebih, bagaimana Departemen Sosiologi FISIPOL UGM hendaknya terus memperkuat pemikiran kritis dan membangun kelembagaan yang kokoh, agar punya makna dan kontribusi secara akademik dan sosial untuk masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya. Kami menyadari, tiap sejarah melahirkan generasi, dan pada tiap generasi berkreasi dalam membangun sejarahnya. Terima kasih Prof, salam hormat selalu.....

Yogyakarta, 9 Oktober 2019

Bagian 1



Persembahan untuk



Prof. Dr. Sunyoto Usman



Biografi

Prof. Dr. Sunyoto Usman



Prof. Dr. Sunyoto Usman lahir di Jember, Jawa Timur pada 19 Oktober 1949. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, beliau merantau ke Yogyakarta pada 1969 hingga menyelesaikan S1 Sosiologi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1974. Kemudian pada 1976 beliau memulai karier sebagai dosen di jurusan Sosiologi UGM, lalu pada 1984–1986 melanjutkan studi jenjang S2 di University of Guelph, Kanada, dan kemudian studi S3 di Flinders University, South Australia pada 1986–1991.

Sebagaimana tercermin di dalam catatan riset dan daftar publikasinya, Prof. Dr. Sunyoto Usman memiliki minat riset pada isu-isu agama dan organisasi keagamaan, infrastruktur, energi dan ICT (*Information and Communication Technology*), serta sosiologi politik. Selain mengajar dan membimbing mahasiswa, beliau terbilang sangat produktif menghasilkan karya ilmiah. Hingga kini, sudah ada 10 buku yang beliau tulis dan dibaca oleh para mahasiswa serta khalayak luas. Contohnya, buku berjudul *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada 1998, dan telah dikutip sebanyak 569 kali.

Sebagai wujud pengabdian kepada institusi dan masyarakat, beliau aktif di dalam berbagai organisasi, asosiasi dan forum-forum ilmiah. Di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Prof. Dr. Sunyoto Usman pernah menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Akademik pada periode 1995–1997, lalu menjadi dekan pada 1997–2004. Di luar kampus, beliau menjadi anggota Ikatan Sosiolog Indonesia (ISI) sejak 1990 hingga kini, dan menjadi

Pengurus Pusat ISI pada 2004–2006. Asosiasi-asosiasi lain yang digeluti beliau adalah Dewan Pendidikan Nasional pada awal 2000-an, Asosiasi Ilmu Sosial Indonesia (1992–sekarang), dan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan wilayah Yogyakarta sejak 2017 hingga sekarang.



Media Sosial dan Ruang Publik Virtual

Sunyoto Usman

Departemen Sosiologi, FISIPOL UGM



Abstrak

Ruang publik (*public sphere*) lazim dikonsepsikan sebagai kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang di antara institusi pemerintah (*state*) dan masyarakat sipil. Keberadaan ruang publik dipahami sebagai bagian penting dalam proses demokratisasi karena diyakini menciptakan komunikasi politik antara pemerintah dengan berbagai asosiasi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka saling berbagi bermacam-macam informasi, aspirasi, dan kepentingan politik yang selanjutnya didorong menjadi kebijakan publik. Sejak awal 2000-an, sebagai efek kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berkembanglah media sosial yang *internet-mediated* seperti *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *youtube*, *istagram*, *blog*, *google* dan sebagainya. Media sosial telah mendorong kelahiran ruang publik virtual (maya) yang memiliki karakteristik berbeda dengan ruang publik kehidupan nyata (*real*). Ruang publik virtual berkembang semakin kompleks karena media sosial tersebut bukan hanya mampu memberikan fasilitas jaringan komunikasi politik dengan cepat dan luas (*dispersion*), tetapi juga mampu memberikan fasilitas dialog langsung secara intensif (*deliberation*). Tendensi demikian ikut melemahkan kapasitas media

(lama) dalam memberikan fasilitas komunikasi politik antara pemerintah dan asosiasi ataupun organisasi masyarakat sipil di ruang publik nyata (*real*).

Kendati demikian, masih dapat dipertanyakan, seberapa efektif komunikasi politik di dalam ruang publik virtual tersebut sehingga mampu mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah melahirkan *ambivalency* (kegamangan) keberadaan ruang publik virtual. Sebagian kalangan optimistis, dan sebagian lagi pesimistis terhadap kapasitas media sosial tersebut. Ada pula sebagian kalangan lain lagi yang justru skeptis, dalam arti bahwa membahas kapasitas media sosial dalam memberikan fasilitas komunikasi politik di ruang publik virtual adalah tidak ada relevansinya. Masing-masing pihak memiliki argumentasi sendiri yang berbeda. Perbedaan argumentasi tersebut dapat diurai melalui (a) struktur jejaring sosial (*social network*) aktor-aktor (*netizen*) yang terlibat dalam komunikasi politik; (b) habitus (tindakan individual dan kolektif) yang mereka kembangkan; (c) interdependensi antaraktor (*netizen*); dan (d) kondisi lingkungan sosial politik yang membingkai (*framing*) jejaring, habitus dan interdependensi. Makalah ini bermaksud mengurai keterkaitan aspek-aspek tersebut untuk menunjukkan mengapa terjadi *ambivalency* ruang publik virtual.

Keywords: jejaring sosial, habitus, interdependensi, kondisi sosial-politik, dan ruang publik virtual

Pendahuluan

Konsep ruang publik (*public sphere*) lazim dihubungkan dengan pemikiran seorang ahli sosiologi bernama Jurgen Habermas (1989) pada abad XIX lalu. Ruang publik ketika itu dikonsepsikan sebagai kehidupan sosial (*social life*) yang tumbuh dan berkembang di antara kehidupan masyarakat sipil dan pemerintah (*state*). Ruang publik berupa ruang bersama (*common space*) ditandai dengan jalinan komunikasi politik untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan politik. Karena itu keberadaan ruang publik lazim dipahami sebagai mimbar

yang memberikan fasilitas relasi-relasi saling memberi atau berbagi informasi pelbagai aspirasi dan kepentingan politik. Keberadaan ruang publik juga dipahami sebagai arena masyarakat sipil mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi serta mencari alternatif solusinya yang kemudian diharapkan menjadi agenda kebijakan publik. Habermas menyebut ruang publik tersebut dengan istilah *the bourgeois public sphere* karena ketika itu ruang publik menjadi mimbar para kapitalis yang gelisah menghadapi masalah ekonomi dan politik yang semakin pelik sebagai akibat dari derasnya penetrasi modernisasi. Ketika itu juga terjadi transisi dari kapitalisme liberal menjadi kapitalisme monopoli. Menurut Habermas (1992:421–479), komunikasi politik di dalam ruang publik tersebut antara lain ditandai dengan (1) persamaan ide, bahasa dan jargon dalam membangun kesepakatan kolektif; (2) persamaan kesempatan menyampaikan pendapat tentang prinsip-prinsip yang diperjuangkan; serta (3) adanya norma-norma yang digunakan sebagai referensi untuk menghindari tekanan, intervensi, dan diskriminasi. Itulah sebabnya dalam keyakinan Habermas, pluralitas yang melembaga di dalam kehidupan masyarakat sipil tidak harus diartikan sebagai sumber konflik atau perpecahan, tetapi pluralitas itu justru dapat berfungsi sebagai kekuatan yang saling mengisi dalam proses pembentukan opini publik. Pluralitas tersebut menjadi kekuatan mengontrol proses formulasi dan eksekusi keputusan terkait dengan hajat publik.

Lazim dikatakan pula bahwa keberadaan ruang publik memperlihatkan tingkat kompleksitas proses formulasi dan eksekusi kebijakan publik, karena aktor-aktor yang berperan membahas dan merumuskan isu-isu publik bukan hanya para elite politik yang secara resmi berada di pemerintahan (*the governing elites*) tetapi juga beragam asosiasi dan organisasi di dalam kehidupan masyarakat sipil. Ruang publik menjadi arena “critical public debate” (Habermas, 1991:52). Perkembangan komunikasi politik di dalam ruang publik sebenarnya telah dibahas di dalam berbagai publikasi. Menurut Benhabib (1996:73–74) ruang publik adalah kehidupan sosial yang terbuka dan di dalamnya terdapat berbagai asosiasi masyarakat sipil yang plural (majemuk). Benhabib mengatakan, “*It is through the interlocking net of these multiple forms of associations, networks and organizations that an anonymous public conversation results.*” Kendatipun demikian, menurut Charney (1998:97), asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi di dalam kehidupan masyarakat sipil sebenarnya terlibat dalam komunikasi politik tentang isu-isu ter-

tentu atau hanya pada ruang tertentu (*restricted sphere*) yang memiliki kekuatan mempengaruhi kebijakan publik. Itu berarti liberalisasi komunikasi politik di dalam ruang publik masih dibatasi oleh aspirasi dan kepentingan politik tertentu (bukan tanpa batas).

Menurut Salvatore (2007:224), kendatipun komunikasi politik yang lembaga di dalam ruang publik mengedepankan hubungan antarinstansi yaitu pemerintah (*state*) dengan jaringan berbagai asosiasi atau organisasi di dalam kehidupan masyarakat sipil, namun aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi politik memiliki peran penting yaitu sebagai agen yang mendorong motivasi dan tindakan individual, serta dalam menjalin relasi-relasi dalam proses memberikan makna dan memahami kerja sama yang kelak diekspresikan menjadi tindakan kolektif. Pernyataan Salvatore tersebut selaras dengan *structuration theory* yang ditawarkan Giddens dalam membahas keterkaitan (*link*) antara aktor individual (*agent*) dengan lingkungannya (*structure*). Blumler and Gurevitch (2001) memberikan catatan tentang guncangan (*destabilized*) komunikasi politik di dalam kehidupan masyarakat kapitalis. Guncangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. *Pertama*, adanya peningkatan keragaman (*heterogeneity*) sosio-kultural yang implikasinya berupa munculnya aspirasi dan kepentingan politik baru yang acapkali bertentangan dengan habitus yang sudah mapan. Selain itu, bermunculan pula asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi representasi ideologi politik yang relatif baru. *Kedua*, semakin berkembangnya media massa yang dengan leluasa memberikan informasi politik yang acapkali mampu menembus jaringan kekuatan-kekuatan politik. Bersamaan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, media massa memiliki kemampuan memberikan informasi dalam waktu cepat dengan *covered area* yang luas. Apa yang sebelumnya disimpan sebagai strategi politik yang dirahasiakan, dapat dibedah dan dikomunikasikan menjadi konsumsi publik. *Ketiga*, semakin berkembangnya lembaga-lembaga konsultan dan penasihat politik. Mereka mengembangkan teori dan metodologi tertentu yang mampu membuat analisis politik berbasis data hasil kajian, dan menyajikannya kepada publik secara sistematis dengan prinsip-prinsip ilmiah. *Keempat*, perubahan komunikasi politik yang menembus batas-batas wilayah geografi dan administratif. Informasi politik dapat diperoleh bukan hanya terbatas dari lingkungan sosial sendiri tetapi juga dari lingkungan

sosial lain (luar). Dua macam lingkungan sosial tersebut saling mempertajam isu-isu yang relevan dituangkan di dalam ruang publik. *Kelima*, semakin menguatnya sikap dan tindakan “masa bodoh” (*cynicism*) terhadap pergeseran pemaknaan ideologi politik yang telah menjadi kesepakatan kolektif. Makna partisipasi politik menjadi mobilisasi politik, dan dalam berpolitik lebih mengedapankan meraih kekuasaan daripada memperkuat kedaulatan.

Efek Media Sosial

Sejak awal 2000-an, bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *youtube*, *instagram*, *blog* dan *google* berkembang pesat pula. Komunikasi politik di dalam media sosial yang difasilitasi internet (*internet-mediated*) membentuk komunitas maya (*virtual community*) yang ditandai dengan identitas diri berupa *account for social media*. Media sosial dengan fasilitas internet bukan hanya mampu menciptakan jaringan komunikasi politik dengan cepat dan luas (*dispersion*), tetapi juga meningkatkan dialog langsung secara intensif (*deliberation*). Media sosial tersebut kemudian menjadi instrumen berkembangnya ruang publik virtual (maya) yang memiliki karakteristik berbeda dengan ruang publik real (nyata). Ide ruang publik yang pernah dilontarkan Habermas (yang kemudian dibahas oleh pakar-pakar lain) boleh jadi masih ada, namun di dalam konteks media sosial, bentuknya menjadi ruang publik digital yang bertautan dengan komunitas virtual (maya). Permasalahannya kini sebenarnya bukan lagi seperti apa keberadaan ruang publik virtual tersebut, tetapi sejauh mana komunikasi politik yang terjalin di dalam ruang publik virtual memiliki kapasitas mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik.

Pertanyaan tersebut telah melahirkan *ambivalency* (kegamangan) terhadap peran ruang publik virtual sebagai arena komunikasi politik dalam mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi keputusan publik. Sebagian kalangan tergolong optimistis, sebagian yang lain justru pesimistis, bahkan tidak sedikit yang *scepticism*. Kalangan yang tergolong optimistis memiliki keyakinan bahwa ruang publik virtual memiliki kapasitas yang signifikan dalam mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik terutama karena memiliki watak

dispersion (cepat dan luas) serta *deliberation* (dialog langsung tanpa harus bertatap dan intensif). Sementara yang termasuk pesimisme beranggapan sebaliknya, bahwa komunikasi politik di dalam ruang publik virtual lebih mengutamakan kepentingan perseorangan, bukan kepentingan bersama, bahkan tanpa diendapi *leadership*. Komunikasi politik yang terjalin di dalam ruang publik virtual seperti itu seringkali diberi *framing* konflik sosial dan *low trust*. Sedangkan mereka yang *sceptic* beranggapan bahwa komunikasi politik di dalam ruang publik virtual adalah produk *narcisim similarity*, yang tidak ada hubungannya dengan proses politik. Oleh karena itu hampir tidak ada manfaatnya mencari hubungan antara ruang publik virtual dengan komunikasi politik dalam mendorong aspirasi dan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik.

Mengapa terjadi *ambivalency*? Berikut ditawarkan kerangka konseptual untuk menjawab pertanyaan tersebut (lihat Diagram 1).

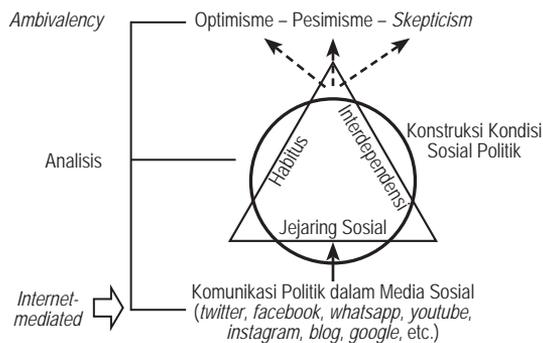


Diagram 1

Sedikitnya terdapat 5 aspek yang perlu diidentifikasi. *Pertama*, pola interaksi sosial melalui media sosial (*internet-mediated*) terutama terkait dengan aspirasi dan kepentingan politik yang diharapkan menjadi kebijakan publik. *Kedua*, struktur jejaring sosial (*social network*) yang terjalin pada antaraktor yang terlibat dalam komunikasi politik terkait dengan isu-isu strategis yang potensial didorong menjadi kebijakan publik. *Ketiga*, habitus (tindakan individual dan kolektif) dalam menjalin komunikasi politik melalui jejaring sosial tersebut. Dalam konteks ini habitus tersebut diasumsikan diproduksi secara internal melalui interaksi antaraktor dalam upaya mengembangkan kesadaran, pemahaman dan penilaian terhadap isu-isu strategis. *Keempat*, tingkat interdependensi atau kemandirian

aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi politik. *Kelima*, kondisi sosial politik yang dikonstruksi atau dikondisikan untuk membingkai (*framing*) jejaring sosial, habitus dan interdependensi tersebut. Konstruksi kondisi sosial politik tersebut tidak di dalam ruang vakum. Artinya, kuat dipengaruhi oleh kepentingan kekuatan-kekuatan politik.

Selanjutnya, hubungan antara struktur jejaring sosial antaraktor (*netizen*), habitus (tindakan individual dan kolektif), interdependensi dan lingkungan sosial politik (konteks) di dalam ruang publik virtual tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Diagram 1.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa analisis tentang efek media sosial terhadap perkembangan ruang publik virtual diawali dari mengidentifikasi aplikasi media sosial (seperti *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *youtube*, *instagram*, *blog*, *google*). Berbagai aplikasi di dalam media sosial telah membuka kemungkinan orang melakukan interaksi sosial dengan cepat, efisien dan tepat waktu. Interaksi sosial di dalam media sosial tersebut dimediasi oleh perangkat internet (*internet-mediated*), melibatkan banyak kalangan dan mampu menembus batas wilayah, ideologi, agama dan etnis. Interaksi sosial yang terjalin di dalam media sosial jauh lebih luas dibandingkan dengan interaksi sosial *offline* (komunitas nyata). Itu karena interaksi sosial tersebut tak berujung (*borderless*) dan dapat dilakukan secara spontan, sehingga acapkali terjadi situasi yang lazim disebut dengan *information overwhelm* atau masuknya bermacam-macam informasi yang sebetulnya tidak dibutuhkan.

Langkah selanjutnya adalah membuat analisis tentang struktur jejaring sosial (*social network*) yang terjalin antar-*stakeholders* dalam melakukan komunikasi politik terkait dengan isu-isu politik yang potensial untuk didorong menjadi kebijakan publik. Struktur jejaring komunikasi politik melalui media sosial (media baru) diyakini lebih kompleks daripada struktur jejaring komunikasi politik melalui media lama seperti media cetak, media elektronik, dan organisasi-organisasi sosial yang ada dalam kehidupan komunitas nyata (*real*).

Berikutnya, membuat analisis tentang habitus (tindakan individual dan kolektif) dalam menjalin komunikasi politik melalui jejaring tersebut. Dalam konteks ini habitus adalah tindakan individual ataupun kolektif yang didahului

dengan menciptakan figurasi-figurasi sebagai sarana menanamkan pengetahuan, kesadaran dan penilaian tentang aspirasi dan kepentingan politik yang didorong menjadi kebijakan publik. Media sosial efektif memproduksi figurasi-figurasi semacam itu dalam waktu yang cepat, efisien, spontan dan melibatkan banyak kalangan (*many to many*). Media sosial mampu menyebarkan informasi secara luas sehingga *poting* pengetahuan, kesadaran dan penilaian tentang aspirasi dan kepentingan politik cepat sekali tersebar ke berbagai kalangan. Selanjutnya membuat analisis tentang kondisi sosial politik yang dikonstruksi (*constructed*) untuk membingkai (*framing*) struktur jejaring sosial, habitus serta interdependensi aktor-aktor dalam menjalin komunikasi politik. Proses konstruksi sosial politik tersebut sarat dengan kepentingan politik. Kepentingan politik yang berbeda melahirkan konstruksi sosial politik yang berbeda pula, dan konsekuensinya kemudian adalah menghasilkan analisis struktur jejaring sosial, habitus dan interdependensi aktor-aktor yang berbeda pula. Saling keterkaitan antara konstruksi kondisi sosial politik, struktur jejaring sosial, habitus dan interdependensi tersebut diasumsikan memproduksi *ambivalency* peran ruang publik virtual dalam mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan politik. Di satu sisi, ruang publik virtual diyakini mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan politik. Tetapi di sisi lain, ruang publik virtual justru potensial melahirkan manipulasi isu-isu politik dan kebencian (destruktif).

Benkler (2006:213) menyatakan bahwa media sosial telah menciptakan komunikasi politik secara efektif karena membuka kesadaran atau reorientasi pengguna secara individual dari yang semula hanya sebagai “konsumen” isu-isu politik (*reader and listener*) menjadi “produsen” karena memiliki peluang melontarkan kritik atau berpartisipasi memberikan respons isu-isu strategis terkait dengan hajat publik. Benkler percaya bahwa pengguna media sosial lebih leluasa mengunduh (*download*) sekaligus mengunggah (*upload*) informasi politik mutakhir. Pandangan serupa dinyatakan pula oleh Papacharissi (2009:244). Menurutnya, kehadiran media sosial telah memberikan stimulan kepada anggota masyarakat untuk secara individual berpartisipasi menanggapi agenda publik (*dissent with a public agenda*). Dalam konteks ini individual pengguna dapat melontarkan pandangan politiknya atau melakukan diskusi politik dengan para

pengguna lain secara cepat dan spontan. Media sosial telah membentuk apa yang lazim disebut “*cultural public sphere*” karena mampu menciptakan kultur politik yang melibatkan kalangan dari beragam keyakinan, ideologi dan identitas.

Kendatipun pernyataan para pakar tersebut sama-sama memberikan penegasan bahwa media sosial memiliki efek yang signifikan terhadap peran ruang publik virtual dalam mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik, namun efek tersebut perlu dikonfirmasi dengan *conceptual framework* yang ditawarkan di dalam uraian di depan yaitu memperhatikan aspek-aspek struktur jejaring sosial, habitus, interdependensi dan kondisi sosial politik yang dikonstruksi untuk membingkai (*framing*) keterkaitan aspek-aspek tersebut. Dari segi interdependensi, aktor-aktor yang menjalin komunikasi politik melalui ruang publik virtual berasal dari beragam kalangan, baik dari segi identitas, ideologi maupun kepentingan politik. Mereka (*netizen*) adalah komunitas majemuk (plural) yang acapkali afiliasi organisasi politiknya tidak jelas. Persepsi, respons dan kritik terhadap isu-isu politik yang mereka sampaikan melalui media sosial lebih bersifat individual atau bukan representasi kelompok maupun golongan. Oleh karena itu, ketika persepsi, respons dan kritik tersebut mengandung risiko politik yang mengancam atau merugikan dirinya maka akan serta merta dicabutnya.

Dari segi struktur jejaring sosial, karakteristik ruang publik virtual berbeda dengan ruang publik nyata (*real*). Jejaring sosial ruang publik nyata (*real*) lazimnya memperlihatkan hubungan antaraktor yang membentuk kluster, dan sejumlah kluster terhimpun menjadi *closure*. Berbagai *closure* tersebut dapat merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan, dapat pula birokrasi pemerintah atau elite yang sedang berkuasa (*the governing elites*), serta dapat pula elite oposisi atau mereka yang di luar pemerintahan (*the non-governing elites*), pelaku bisnis, asosiasi, organisasi buruh, masyarakat adat, intelektual kampus, gerakan keagamaan, gerakan perempuan, komunitas hak asasi manusia dan sebagainya. Dalam konteks ini relasi-relasi sosial tersebut terkait membahas isu-isu politik yang potensial didorong menjadi kebijakan publik. Aktor-aktor tersebut memiliki posisi-posisi dengan berbagai macam peran. Di antaranya ada aktor yang berperan sebagai *bridge* dan *liaison*. Mereka adalah aktor-aktor yang menjembatani hubungan antar-*closure*. Ada pula aktor yang berada pada posisi

sentral (dikerumuni beberapa *closure*). Kendatipun kehidupan sosial majemuk (plural) namun aktor-aktor tersebut adalah bagian dari entitas yang terhimpun untuk membahas isu-isu politik yang diyakini dapat didorong menjadi kebijakan publik. Mereka terikat dengan norma, nilai dan etika politik yang dibangun untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan kata lain, di dalamnya terdapat *leadership* yang menjadi referensi untuk menggerakkan partisipasi politik.

Gambaran tersebut berbeda dengan jejaring sosial di dalam ruang publik virtual. Jejaring sosial di dalam ruang publik virtual tidak membentuk kluster dan *closure*. Aktor-aktor (*netizen*) yang terlibat dalam komunikasi politik lebih mengedepankan representasi dirinya sendiri (bersifat individual), bukan representasi dari komunitas tertentu seperti birokrasi pemerintah atau elite yang sedang berkuasa (*the governing elites*), elite oposisi atau mereka yang di luar pemerintahan (*the non-governing elites*), pelaku bisnis, asosiasi, organisasi buruh, masyarakat adat, intelektual kampus, gerakan keagamaan, gerakan perempuan, komunitas hak asasi manusia dan sebagainya. Itulah sebabnya jejaring sosial di dalam ruang publik virtual tidak ditemukan *bridge* atau *liaison* dan figur sentral. Kecuali itu, komunikasi politik di dalam media sosial juga tidak terdapat *leadership* karena stimulan dan respons terhadap isu-isu politik adalah menjadi tanggung jawab aktor secara individual. Ketika apa yang disampaikan potensial menimbulkan sanksi karena dianggap bertentangan dengan norma hukum, *mores* atau *folkways* yang berlaku maka dengan mudah mereka keluar (*off*) dari group diskusi.

Menurut Fuchs (2014) sedikitnya terdapat dua macam habitus yang lazim melembaga di dalam ruang publik virtual. *Pertama*, media sosial memberikan fasilitas bagi berkembangnya *integrated sociality*, yakni menjadikan semua pihak yang terlibat dalam komunikasi politik bukan hanya menciptakan kesadaran bahwa ide-ide politik yang dibahas memang relevan untuk dikembangkan menjadi kebijakan publik, tetapi juga bersedia mengalokasikan sumber daya (*resources*) yang dimiliki serta menjalin kerja sama untuk merealisasikannya menjadi kebijakan publik. Proses implementasi *integrated sociality* melalui media sosial dapat dilakukan dengan cepat, luas dan spontan karena, seperti telah disampaikan pada uraian di atas, bahwa komunikasi politik *liaison* di dalam media sosial ditandai dengan pola “*many to many*” (banyak orang kepada banyak

orang). *Kedua*, media sosial memberikan fasilitas berkembangnya *integrated social roles* (Fuchs, 2013) yaitu mendeskripsikan profil pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi politik ke dalam beberapa peran (*multi-roles*) sekaligus. Profil mereka dapat dideskripsikan berperan sebagai warga negara (*citizens*), politisi atau aktivis politik, penganut agama atau pelaku bisnis. Lontaran pandangan, pemikiran dan kritik politik yang dilontarkan dapat berupa integrasi peran-peran tersebut. Karena itu ruang publik virtual efektif berperan sebagai ruang (*space*) yang berfungsi sebagai arena mendeskripsikan aspirasi dan kepentingan politik yang dapat didorong menjadi kebijakan publik.

Dari segi habitua (tindakan individual dan kolektif), ruang publik virtual juga efektif untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kebijakan publik. Kontrol tersebut disampaikan dengan menempatkan masyarakat sipil pada posisi yang kurang lebih sejajar dengan pemerintah atau kekuatan-kekuatan politik yang berada pada lingkaran kekuasaan. Proses tersebut lazim dikategorikan sebagai *horizontal civic communication* (Malina:2003). Hal tersebut selaras pernyataan Mouffe (1999:745–758) bahwa ruang publik virtual menjadi sarana terbentuknya berbagai macam forum masyarakat sipil yang melibatkan banyak kalangan (*diverse civic forums*). Di dalam forum semacam itu masyarakat sipil dapat dengan leluasa membahas isu-isu politik yang strategis dan potensial untuk didorong menjadi kebijakan publik. Pembahasan isu-isu politik di dalam ruang publik virtual lazimnya dikemas dalam bentuk diskusi yang amat bebas dan bersifat deliberatif. Semua pihak ditempatkan pada posisi politik yang kurang-lebih sama (*political equality*). Habitus yang tumbuh dan berkembang di dalam ruang publik virtual lazim mengedepankan prosedur yang ditetapkan secara kaku (*unrestricted*), “menyembunyikan identitas” (*anonym*), dan berusaha netral. Prosedur yang ditetapkan secara kaku acapkali justru kurang tajam melihat isu-isu politik yang potensial menjadi kebijakan publik. Tindakan menyembunyikan identitas dengan maksud agar semua pihak yang terlibat dalam pembahasan komunikasi politik harus terhindar dari perlakuan yang diskriminatif. Kondisi masyarakat kini semakin heterogen, memiliki berbagai afiliasi organisasi sosial dan politik, memiliki beragam ideologi dan kepentingan politik. Kecuali itu juga netral supaya komunikasi politik menjadi bebas dan cair agar tidak dicurigai bahwa telah berpihak pada kekuatan atau kepentingan politik golongan tertentu.

Semua pihak yang terlibat dalam komunikasi politik terkait dengan isu-isu politik yang relevan untuk didorong menjadi kebijakan politik diperlakukan sama atau tidak ada diskriminasi. Ruang publik virtual memiliki kekuatan menciptakan kondisi semacam itu.

Ambivalency

Di dalam uraian di atas telah disampaikan bahwa saling keterkaitan antara kondisi sosial-politik, struktur jejaring sosial, habitus dan interdependensi diperkirakan memproduksi *ambivalency* peran ruang publik virtual dalam mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan politik. Maksudnya, ruang publik virtual dapat melahirkan optimisme, dalam arti dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam proses mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan politik. Tetapi sebaliknya, ruang publik virtual juga dapat melahirkan pesimisme, atau menciptakan kondisi yang tidak kondusif dalam proses mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik. Masing-masing memiliki argumentasi sendiri. Bagi mereka yang dalam kategori optimisme, memiliki argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sipil diyakini sebagai satu entitas yang saling memperkuat satu sama lain (fungsional). *Kedua*, aktor-aktor yang menjadi bagian dari asosiasi atau organisasi tersebut mengembangkan *trust* sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan (*reciprocal relationships*). Hubungan-hubungan tersebut kemudian menjadi *code* dalam menjalin komunikasi politik dalam upaya mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik. Oleh karena itu kendatipun di dalam ruang publik virtual, asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi tersebut bersifat plural (majemuk) dan identitas aktor-aktor yang terlibat di dalamnya berupa *account of social media* (tidak transparan sebagaimana tampak di dalam ruang publik *real*), namun tidak menghalangi kemungkinan terciptanya kerja sama antarmereka dalam mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan politik.

Argumentasi tersebut bertolak belakang dengan argumentasi mereka yang dalam kategori pesimisme (lihat Diagram 2).

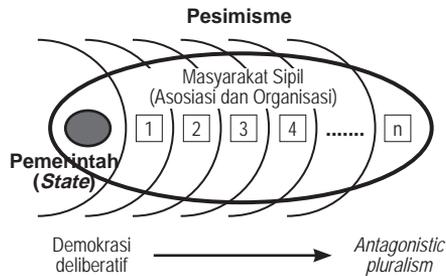


Diagram 2

Pertama, bagi kategori ini asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sipil adalah plural (majemuk) dan dapat menjalin komunikasi politik tentang isu-isu krusial yang dihadapi pemerintah atau masyarakat. Tetapi jalinan komunikasi politik tersebut lebih bersifat *like interest* (kepentingan yang sama). Jalinan komunikasi politik semacam itu dilakukan terutama untuk kepentingan asosiasi atau organisasinya sendiri, bukan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Itulah sebabnya sangat sulit mengharapkan peran asosiasi atau organisasi tersebut menjadi katalisator atau menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan politik untuk didorong menjadi kebijakan publik. *Kedua*, oleh komunikasi politik yang terjalin antar-asosiasi atau organisasi tersebut dalam *framing* (bingkai) *like interest*, maka tidak mudah bagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan *trust* dan *reciprocal relationships*. Relasi-relasi sosial antarmereka bukan meneguhkan kerja sama tetapi justru mengedepankan kepentingan asosiasi atau organisasinya sendiri. *Ketiga*, ruang publik virtual seringkali digunakan sebagai mengembangkan wacana bahwa kondisi sosial politik penuh ketidakpastian politik, diskriminasi dan manipulasi. Pemerintah (*state*) seringkali diwacanakan gagal mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, bahkan menggunakan kekuasaannya untuk mendiskreditkan asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dianggap tidak sejalan. Wacana semacam itu sangat mudah tersebar melalui media sosial (informasi terartikulasi *many to many*), sehingga kemudian terjadi *low trust*, saling curiga dan intoleransi. *Keempat*, perbedaan pandangan di antara asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi di dalam kehidupan masyarakat sipil tidak mudah dicapai kata sepakat karena media sosial telah membuka lebar masuknya ideologi baru yang acapkali berskala luas dan menyentuh berbagai

relung kehidupan sosial. Ideologi baru semacam itu acapkali justru juga bertentangan (*clash*) dengan ideologi yang sudah ada (mapan). Asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil sering memanfaatkan *clash* tersebut untuk melakukan perlawanan.

Di dalam uraian di atas juga telah disampaikan bahwa *ambivalency* ruang publik virtual tidak hanya dalam kategori optimisme dan pesimisme tetapi juga *skepticism* atau keraguan apakah ruang publik virtual dapat menjadi arena komunikasi politik untuk mendorong aspirasi dan kepentingan publik menjadi kebijakan publik. Bagi pandangan *skepticism*, argumentasi yang dikembangkan oleh pandangan berkategori optimisme maupun pesimisme dianggap terlalu berlebihan, terutama ketika menempatkan komunikasi politik di dalam ruang publik virtual seakan-akan sebagai entitas sosial yang terkait erat dengan kondisi sosial politik, struktur jejaring sosial, habitus (tindakan individual dan kolektif) serta interdependensi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Kategori *skepticism* lebih percaya bahwa pemanfaatan ruang publik virtual dalam komunikasi politik semacam itu justru merupakan produk rekayasa atau manipulasi para elite dan sub-elite asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi di dalam kehidupan masyarakat sipil. Rekayasa atau manipulasi tersebut antara lain dilakukan melalui isi pesan yaitu berupa jargon-jargon politik yang seakan-akan melakukan pembelaan aspirasi dan kepentingan masyarakat sipil. Rekayasa atau manipulasi semacam itu juga dapat dilakukan melalui perluasan jejaring sosial di dalam lingkarannya sendiri. Kategori *skepticism* sepakat bahwa media sosial mampu menciptakan komunikasi, interaksi, dan transaksi politik tanpa hambatan sekat-sekat ideologi, etnis dan agama. Tetapi karena pemakaian media sosial membutuhkan akses internet dengan biaya yang tidak murah, maka ditengarai mereka yang mengakses internet tumbuh menjadi kelompok eksklusif. Mereka sebagian besar komunitas urban dan berasal dari lapisan menengah dan atas yang acapkali melembagakan relasi-relasi yang ditandai '*lifestyle enclaves*' dan '*narcissism of similarity*'. Bagi pandangan *skepticism*, tabiat semacam itu justru menjadi patologi demokrasi politik karena dipenuhi dengan nalar yang dipaksakan, inkonsistensi dan asumsi-asumsi yang keliru.

Sebagai catatan penutup, perlu disampaikan bahwa apa yang disampaikan di dalam tulisan ini adalah kerangka konseptual yang dibangun dari penelitian

kepuustakaan. Kerangka konseptual ini mengandung prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang terkait dengan efek media sosial terhadap proses komunikasi politik di dalam ruang publik virtual. Kerangka konseptual tersebut tentu saja bukan hanya salah satu di antara pelbagai kemungkinan kerangka konseptual yang bisa ditawarkan. Fokus, *setting* dan eksplorasi variabel yang berbeda melahirkan kerangka konseptual yang berbeda pula. Oleh karena itu kerangka konseptual yang ditawarkan di dalam uraian ini terbuka untuk diperdebatkan. ***

Referensi

- Benhabib, Seyla. 1992. "Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jurgen Habermas" in *Habermas and the Public Sphere*. ed. Craig Calhoun. 73–98. Cambridge, MA: MIT Press.
- Benkler, Yochai. 2006. *The Wealth of Networks*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Bennett, W.L. and Entman, R. (eds.). 2001. *Mediated Politics in the Future of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blumler, J.G. and Gurevitch M. 2001. "The New Media and Our Political Communication Discontent: Democratizing Cyberspace". *Information, Communication & Society*. 4. 1–14.
- Charney, Evan. 1998. "Political Liberalism, Deliberative Democracy, and the Public Sphere". *American Political Science Review*. Vol. 42, No. 1. March.
- Fuchs, Christian. 2014. *Social Media, A Critical Introduction*. London: Sage.
- Habermas, Jurgen. 1989. "The Public Sphere, An Encyclopedia Article" in *Critical Theory and Society, A Reader*. ed. Stephen E. Bronner and Douglas Kellner. 136–142. New York: Routledge.
- _____. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere, An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- _____. 1992. "Further Reflections on the Public Sphere and Concluding Remark". in *Habermas and the Public Sphere*. ed. Craig Calhoun. 421–479. Cambridge, MA: MIT Press.
- Malina, A. 2003. "E-Transforming Democracy in the UK: Considerations of Development and Suggestions for Empirical Research". *Communication: The European Journal of Communication Research*. 28. 135–155.

- Mouffe, C. 1999. "Deliberative Democracy or Agonistic Plurlaism?". *Social Research*. 66. 745–758.
- Papacharissi, Zizi. 2009. "The Virtual Sphere 2.0, The Public Sphere, and Beyond" in *Routledge Handbook of Internet Politics*. eds. Andre Chadwick and Philip N. Howard. 230–245. New York: Routledge.
- Salvatore, Armando. 2007. *The Public Sphere, Liberal Modernity Catholicism, Islam*. New York: Palgrave MacMillan.

Ucapan Terima Kasih

Kami sampaikan terima kasih kepada segenap sahabat yang telah berkenan menjadi panelis dalam diskusi tentang "Media Sosial dan Ruang Publik Digital". Komentar-komentar cerdas dan catatan-catatan kritis yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan tulisan ini, dan selanjutnya disertakan sebagai lampiran.



Dunia Sosial Baru di Era Digital

Dr. Hakimul Ikhwan, M. A.



Tulisan Prof. Dr. Sunyoto Usman berjudul “Media Sosial dan Ruang Publik Virtual” menarik dan penting didiskusikan karena sangat *timely* dan relevan secara empiris dan akademik. Secara empiris, tulisan tersebut penting untuk memahami berbagai peristiwa mutakhir termasuk gelombang demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa dan pelajar belakangan ini. Para mahasiswa dan pelajar tersebut adalah generasi Z dan Alpha (McCrindle, 2011; Seemiller and Grace, 2018; Ferri-Reed and D, 2014) yang selama ini cenderung dianggap sebagai generasi yang tidak tertarik dengan diskusi politik kenegaraan, bahkan dipersepsikan mengalami autisme sosial akibat kemelekatan (*embeddedness*) yang kuat kepada dunia maya dan virtual (Parsons, 2019). Gelombang demonstrasi di berbagai penjuru tanah air seakan mematahkan asumsi skeptikal terhadap Gen Z dan Alpha. Mereka bisa mengorganisasikan diri untuk turun ke jalan melalui metode aksi konvensional seperti demonstrasi di jalanan dan orasi di tengah kerumunan massa. Tentu, dalam berbagai aksi tersebut karakter milenial tetap mewarnai melalui berbagai ekspresi yang kreatif dan orientasi eksistensial di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Path.

Dalam berbagai aksi menjelang dan pasca pemilu 2019, generasi Z dan Alpha masih dipandang sebelah mata. Pada waktu itu media sosial dan kontestasi politik didominasi oleh para *digital immigrant* (Cut, 2017), yaitu mereka yang lahir sebelum era 1980-an, yang tidak secara *genuine* tumbuh di dalam budaya digital. Perkembangan akhir-akhir ini membuka mata publik bahwa generasi Z

dan Alpha tidak hanya eksis di dunia digital. Mereka juga merupakan kekuatan dalam gerakan non-virtual. Fenomena ini menunjukkan pentingnya untuk memahami media sosial dan pengaruhnya terhadap pembentukan ruang publik virtual, bahkan dunia sosial baru berbasis digital. Dalam konteks inilah, tulisan Prof. Dr. Sunyoto Usman penting dan menarik untuk dibaca dan didiskusikan guna menangkap karakter dasar dunia sosial baru yang tengah berproses menuju pematangan (*maturity*).

Menyambut pemikiran Prof. Dr. Sunyoto Usman tentang media sosial dan ruang publik virtual, tulisan ini meng-*highlight* tiga hal penting. *Pertama*, perkembangan internet dan teknologi digital tidak hanya menggeser ruang publik dari konvensional ke virtual. Lebih dari itu, internet dan digital telah membawa perubahan secara ontologis tentang hakikat ruang publik bahkan dunia sosial secara umum. *Kedua*, sebagai implikasi lanjut dari perubahan ontologis tersebut, struktur sosial yang membentuk dunia sosial digital juga mengalami perubahan sangat substansial. *Ketiga*, konsekuensi dari dua perubahan tersebut adalah kebutuhan bagi para ilmuwan sosial untuk keluar dari *bureaucratization of reason and argument* sehingga menjadi satu tarikan nafas dengan budaya inovasi dan *speed*. Ketiga hal itu akan dibahas secara terpisah pada subbagian berikut, dan ditutup dengan rekognisi atas legasi dan kontribusi Prof. Dr. Sunyoto Usman bagi perkembangan ilmu sosial di era digital.

Transformasi Dunia Sosial (*The Social*)

Ada tiga hal yang menandai perubahan mendasar pada dunia sosial (*the social*) di era digital. *Pertama*, kehadiran *internet of thing* telah mengubah hakikat dasar dunia sosial yang selama ini dipahami sebagai bentuk keterikatan antarmanusia menjadi manusia dengan perangkat digital dan internet. Pada era pra-digital, seorang individu memiliki keterikatan (*engagement*) yang kuat dengan individu lain melalui *peer group* (kelompok sebaya), komunitas sosial, profesi, dan sebagainya. Pada era digital, *engagement* manusia dengan manusia semakin tergantikan dengan *engagement* manusia dengan teknologi. Keterikatan seorang individu tidak lagi dengan *fellow human* di dalam lingkup teman sebaya atau komunitas agama dan etnis melainkan bergeser menjadi keterikatan individu

dengan *gadget* (Norris, 2001). Fenomena ‘*twitter, please do your magic*’, misalnya, yang dapat menggerakkan ribuan pengguna internet untuk membeli dagangan seorang kakek renta membuktikan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh orientasi eksistensi secara *online* (daring = dalam jaringan, *Red.*). Kalau dulu Descartes mengatakan ‘*cogito ergo sum*’ (saya berpikir maka saya ada) (Watson, 2002), slogan para milenial di era internet menjadi ‘saya *online* maka saya ada.’ Perkembangan ini ditandai penetrasi internet yang meningkat tajam dari 54,86 persen pada tahun 2017 menjadi 64,8 persen pada tahun 2019 (Pratomo, 2019).

Orientasi utama dalam tindakan manusia digital adalah keterpenuhan tuntutan eksistensial di dunia maya (digital) (James *et al.*, 2017; Mehdizadeh, 2010). Di dalam konteks ini maka konsepsi manusia sebagai makhluk sosial yang mengandaikan manusia terikat dengan manusia lainnya membutuhkan pendefinisian ulang secara substansial. Di dalam era digital, manusia sebagai makhluk sosial tidak lagi dipahami sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Bagi anak-anak generasi Alpha yang lahir setelah 2011 (Duneier, 2019; McCrindle, 2011) berinteraksi dengan teman sebaya tidak lagi menarik. Bahkan, kehadiran manusia lain (*the other*) secara empiris dipandang sebagai ‘gangguan’ (*interference*) bahkan ‘ancaman’ bagi tertib sosial para generasi peradaban digital tersebut. *Self-being* tidak lagi diukur dari asosiasi dengan komunitas melainkan *engagement* yang dibentuk oleh digital. Bekerjanya praktik ‘*twitter, please do your magic*’, misalnya, adalah cerminan dari *engagement* secara digital tersebut.

Kedua, dunia sosial digital ditandai dengan perubahan mendasar struktur sosial pada level makro (nilai dan norma), meso (institusi dan regulasi), dan mikro (perilaku) masyarakat digital yang membutuhkan *body of knowledge* baru ilmu sosial (lihat, misalnya, Starbuck, 2006). Struktur sosial dalam imajinasi masyarakat industri awal (dan kapitalisme lanjut) tidak lagi memadai untuk memahami struktur sosial masyarakat era digital abad ke-21. Struktur sosial era digital semakin menjauh dari karakter fondasional yang menjadi basis *grand theory* ilmu sosial abad ke-19 hingga 20.

Dunia sosial era digital berbeda secara mendasar dengan dunia sosial era industri berbasis mesin (*machinery*) yang dihasilkan oleh revolusi industri di

Eropa Barat abad ke-19. Ilmu sosial produk modernisasi Eropa dibangun dalam spirit saintifikasi ilmu sosial dengan mengembangkan rumusan teori dan konsepsi ‘*ideal type*’ sebagai *framework* berpikir para *homo academicus* era modern (termasuk modernitas lanjut/*late modernity*). Di dalam *frame* ini, konsepsi tentang ‘negara,’ misalnya, hanya dapat dipahami di dalam batasan konsepsi yang sekaligus membedakannya dengan masyarakat sipil, swasta/bisnis, dan kelompok *intermediaries*.

Dalam praktik politik demokrasi di Indonesia, misalnya, negara tidak selalu diimajinasikan sebagai entitas yang berbeda dengan masyarakat sipil dan sektor swasta. Negara diisi oleh elemen pengusaha (pelaku bisnis) dan elemen masyarakat sipil, termasuk aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan para profesor perguruan tinggi yang menjabat sebagai presiden, wakil presiden, menteri, dan kepala daerah. Akibatnya, ketika para pelaku bisnis menjadi pemegang kekuasaan negara, maka nalar utama yang menggerakkan keputusan politik mereka adalah kepentingan kelompok. Begitu juga ketika profesor menjabat sebagai pejabat negara, maka praktik berpengetahuan di kampus dibentuk di dalam *frame* berpikir kekuasaan negara, bukan nalar kritis akademik.

Di era internet dan digital, negara semakin kehilangan substansi ontologisnya. Konsepsi modern tentang negara sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan yang melindungi warga negara dari ancaman keamanan semakin kehilangan relevansi di era digital. Untuk konteks Indonesia, hal tersebut diperkuat dengan semakin melemahnya peran negara ketika berhadapan dengan penetrasi modal asing dan para aktor global yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia.

Kekuasaan negara untuk membatasi akses warga terhadap situs tertentu, misalnya, atau bahkan memblokir akses terhadap dunia maya tidak berarti apa-apa bagi manusia milenial karena mereka bisa dengan mudah menembus pemblokiran dan mengakses segala situs yang diinginkan melalui VPN (*Virtual Private Network*). Dalam hal perlindungan dari situasi *vulnerable*, misalnya, negara tidak lagi menjadi aktor yang paling memiliki sumber daya (*resources*) untuk memberikan bantuan. Skema *social assistance* (bantuan sosial) yang digunakan dalam kajian kebijakan sosial tidak lagi dibatasi oleh batasan wilayah teritori

negara. Para donatur di dalam situs kitabisa.com, misalnya, berasal dari warga dari berbagai penjuru dunia, melintas batas negara.

Ketiga, perubahan kedua hal di atas berimplikasi pada kebutuhan untuk menghindari praktik birokratisasi nalar dan argumen sehingga ilmu sosial dapat mengimbangi percepatan (*speed*) dan inovasi yang berlangsung di dalam dunia sosial digital. Sejak penghujung abad ke-19, tradisi keilmuan baik ilmu alam maupun ilmu sosial terperangkap di dalam *bureaucratization of reason and argument* (lihat Mills, 2000). Birokratisasi yang dimaksud bukan hanya ditandai dengan kuasa administrasi pengetahuan tetapi, lebih mendasar dari itu, adalah penerapan prosedur ‘*assembly line*’ yang secara ketat dan *rigid*. Dunia sosial seakan hanya dapat dipahami melalui konsepsi dan teori yang telah ada (*existing*). Untuk menjadi ilmu, maka seorang pemikir sosial harus mengapropriasi teori dan konsepsi yang telah ada. Implikasinya bukan hanya menjadikan ilmu sosial berjarak dengan realitas, tetapi lebih serius dari itu, yakni bahwa ilmu sosial ikut melanggengkan kolonialisme pengetahuan. Ilmuwan sosial di kampus di Asia, termasuk Indonesia, fasih membunyikan konsepsi dan teori yang dilahirkan oleh peradab Eropa dan digunakan untuk menjelaskan dunia sosial di Asia. Tetapi, gagap untuk membunyikan realitas sosial yang *genuine* di luar ‘mantra’ teori dan konsepsi yang ada.

Di dalam masyarakat digital, perilaku konsumsi, misalnya, ditentukan oleh para *influencer* yang membangun legitimasi berdasarkan jumlah *follower* di media sosial. Peran *influencer* telah menggantikan peran artis sebagai *brand ambassador* produk dalam industri *marketing* konvensional (Choi, Lee, and Kim, 2005). Pada era pra-digital, citra diri seorang artis merupakan bagian yang menyatu (*embedded*) dengan citra produk sebagaimana diinginkan oleh produsen (Schroeder, 2005, 2010). Oleh karenanya, seorang artis harus tampil sempurna, tanpa ‘cacat’ sebagaimana suatu produk yang juga ingin ditampilkan secara sempurna. Jika seorang artis sebagai *brand ambassador* produk tertentu tersandung isu moral atau kriminal, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk bagi citra produk, dan oleh karenanya seketika itu juga kontrak artis dan produk dapat diputus.

Berbeda dengan artis, para *influencer* cenderung lebih longgar dalam ikatan nilai dan norma. Mereka mengambil alih peran para artis pada era sebelumnya

dalam memperkenalkan produk kepada para konsumen (Conick, 2018). *Influencer marketing* di era digital hampir tidak memperhatikan isu moralitas tradisional pada diri seorang *influencer* sebagaimana yang terjadi pada *brand-ambassador* dalam *marketing* konvensional. Bagi pelaku industri, yang terpenting adalah seberapa besar jumlah *followers* yang dimiliki oleh seorang *influencer*. Semakin besar jumlah *follower* maka akan semakin luas *product awareness* yang diberikan oleh pasar (konsumen). Untuk memenuhi hasrat *marketing* tersebut maka viralitas lebih dipentingkan melebihi apa pun. Para pelaku dunia *digital marketing* akan melakukan berbagai cara untuk menjadi viral, tanpa mempertimbangkan nilai dan norma sosial dan agama konvensional. Dengan menjadi viral, maka suatu produk akan dilihat oleh lebih banyak orang, dan itu artinya tingkat *product awareness* meningkat. Dalam penalaran tersebut, maka struktur nilai dan norma bergeser dari karakternya yang *rigid* dan konvensional menjadi lebih terbuka. Dengan lain kalimat, struktur sosial budaya lama mengalami gugatan hebat dari praktik dan perilaku masyarakat digital. Bahkan, dunia kerja berbasis digital sudah tidak lagi mampu (dan mau) membatasi jumlah jam kerja. Itu karena para pekerja digital mengalami keterikatan yang tinggi dengan dunia digital. Bekerja berbasis digital menjadi bagian dari ekspresi diri secara eksistensial. Manusia melakukan tindakan *online* bahkan ketika tidur. Populernya *smartwatch*, misalnya, membuat seorang pengguna terus terkoneksi dengan internet sepanjang tidur malamnya. Ketika bangun dari tidur, maka orang tersebut dapat melihat rekam aktivitas online selama tidur seperti kualitas tidur, detak jantung, lama tidur dan sebagainya.

Legasi Prof. Dr. Sunyoto Usman untuk Ilmu Sosial Era Digital

Prof. Dr. Sunyoto Usman memasuki masa pensiun ketika ilmu sosial, khususnya sosiologi, sedang memasuki pintu gerbang dunia sosial baru yang dideterminasi oleh internet dan digital. Penulis meyakini bahwa bagi Prof. Dr. Sunyoto Usman, pensiun hanyalah soal administrasi kepegawaian. Secara gagasan dan legasi keilmuan, beliau tidak pernah pensiun, bahkan semakin relevan.

Prof. Dr. Sunyoto Usman selalu menekankan pentingnya sosiologi untuk bertemu dengan disiplin ilmu lain, tidak hanya dalam rumpun ilmu sosial tetapi

juga rumpun ilmu alam (*natural science*). Suatu ketika, Prof. Dr. Sunyoto Usman pernah berujar “apa yang kita pelajari di Sosiologi akan lebih bermanfaat dan relevan jika bertemu dengan disiplin ilmu lain.” Keyakinan tersebut mendorong beliau aktif menginisiasi berbagai kerjasama penelitian lintas disiplin. Prof. Dr. Sunyoto Usman aktif dalam pengkajian isu-isu tentang lingkungan dan energi. Beliau juga terlibat dalam inisiasi program pascasarjana untuk kajian infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, bersama dengan beberapa praktisi dan akademisi, Prof. Dr. Sunyoto Usman mengembangkan kajian tentang desa *broadband* dan berbagai kajian berbasis teknologi digital.

Lima belas tahun lalu, Prof. Dr. Sunyoto Usman memperkenalkan penulis kepada kajian-kajian lintas disiplin tentang berbagai topik di luar *mainstream* kajian sosiologi waktu itu. Beliau bersama kolega dari disiplin arsitektur dan tata ruang mengkaji tentang pemukiman dan tata ruang. Problem pertambangan minyak dikaji beliau bersama dengan kolega dari disiplin geologi dan nuklir. Bersama dengan kolega dari disiplin teknik elektro, Prof. Dr. Sunyoto Usman mengkaji tentang listrik, termasuk berbagai hal terkait dengan listrik tegangan tinggi (SUTET - Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Tidak terhitung riset lintas disiplin yang telah dilakukan oleh Prof. Dr. Sunyoto Usman. Bahkan, sejauh yang penulis ketahui, riset-riset beliau jauh dari sifat riset yang monodisiplin Sosiologi.

Lima belas tahun telah berlalu. Gagasan Prof. Dr. Sunyoto Usman tentang pentingnya kajian lintas bahkan *trans-discipline* semakin relevan. Perubahan pada dunia sosial digital membawa pengaruh pada batasan disiplin antar-ilmu sosial yang semakin menipis, bahkan sekat disiplin semakin tidak relevan lagi. Memang secara administratif pengetahuan masih dikenal istilah disiplin antropologi, yang berbeda dengan sosiologi, psikologi, dan politik. Tetapi secara substantif, sekat disiplin ilmu tersebut telah semakin memudar. Sehingga semakin jarang pula diskusi yang membahas tentang perbedaan disiplin-disiplin di dalam rumpun ilmu sosial. Perkembangan tersebut ditandai dengan berkembangnya kajian lintas disiplin (*inter-discipline*), dan *multi-discipline*, bahkan *trans-discipline*.

Perkembangan dunia sosial juga mewarnai evolusi pembelajaran di Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Misalnya, mata kuliah teori

dan metode hampir tidak lagi menggunakan kata 'Sosiologi', namun semakin digantikan dengan kata 'sosial.' Mata kuliah teori yang semula bernama Teori Sosiologi berganti nama menjadi Teori Sosial. Begitu juga dengan mata kuliah metode yang beralih dari Metode Penelitian Sosiologi menjadi Metode Penelitian Sosial. Kesadaran ini jugalah yang akhirnya melahirkan nama pusat kajian sosiologi menjadi *Social Research Centre* (Sorec), bukan *Sociological Research Center*. Itu menandakan adanya kesadaran bahwa disiplin ilmu dalam rumpun ilmu sosial semakin beririsan kuat menjadi *trans-discipline*.

Menipisnya batas *discipline* juga terjadi antara ilmu sosial dan ilmu alam (*natural science*). Berkembangnya teknologi digital semakin membawa dunia sosial dan alam (*nature*) semakin erat bersinggungan. Perkembangan teknologi telah membawa dimensi teknologi dan *non-human* merasuk ke dalam dimensi sosial dan *human*. Harari (2016) menyebut proses evolusi manusia dari simpanse belum berakhir karena dalam dua abad ke depan *artificial intelligence* akan melanjutkan evolusi pada tubuh manusia. Bahkan, pada 2050, Harari menyebut *smartphone* menjadi bagian tidak terpisahkan dari tubuh manusia yang melakukan sensor biometrik untuk memonitor detak jantung, tekanan darah, dan aktivitas otak selama 24 jam sehari. Bahkan, elemen hasrat (*desire*) serta emosi seperti perasaan suka dan benci dapat diketahui dari rekam sensorik tersebut (Falk, 2017). Ini menandakan bahwa suatu saat nanti teknologi akan melekat (*embedded*) sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan bukan hanya dari dunia sosial tetapi juga dari tubuh manusia.

Dalam perkembangan dunia sosial yang demikian maka tidak ada cara lain bagi Sosiologi, dan seluruh disiplin ilmu (*natural and social sciences*), kecuali menyeberangi batas-batas disiplinnya. Tidak ada lagi tempat bagi mono-disiplin. Juga, tidak ada tempat bagi perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan mono-disiplin, termasuk melakukan fakultasasi ilmu. Pada 2050, ketika *smartphone* menjadi bagian dari tubuh manusia sebagaimana diprediksi oleh Harari, maka universitas yang berbasis mono-disiplin dan fakultatif sudah musnah ditelan zaman.

Referensi

- Choi, Sejung Marina, Wei-Na Lee, and Hee-Jung Kim. 2005. "Lessons from the Rich and Famous: A Cross-Cultural Comparison of Celebrity Endorsement in Advertising". *Journal of Advertising* 34 (2): 85–98.
- Conick, Hal. 2018. "How to Win Friends and Influence Millions: The Rules of Influencer Marketing". *American Marketing Association* (blog). <https://www.ama.org/marketing-news/how-to-win-friends-and-influence-millions-the-rules-of-influencer-marketing/>.
- Cut, Martina. 2017. "Digital Natives and Digital Immigrants — How Are They Different". *Medium*. November 16, 2017. <https://medium.com/digital-reflections/digital-natives-and-digital-immigrants-how-are-they-different-e849b0a8a1d3>.
- Duneier, Stephen. 2019. *AlphaBrain: How a Group of Iconoclasts Are Using Cognitive Science to Advance the Business of Alpha Generation*. NJ: John Wiley & Sons.
- Falk, Dan. 2017. "Godlike 'Homo Deus' Could Replace Humans as Tech Evolves". *NBC News*. May 31, 2017. <https://www.nbcnews.com/mach/technology/godlike-homo-deus-could-replace-humans-tech-evolves-n757971>.
- Ferri-Reed, Jan, and Jan Ferri-Reed Ph. D. 2014. *Millennials 2.0: Empowering Generation Y*. KEYGroup.
- Harari, Yuval Noah. 2016. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. NY: Random House.
- James, Carrie, Katie Davis, Linda Charmaraman, Sara Konrath, Petr Slovak, Emily Weinstein, and Lana Yarosh. 2017. "Digital Life and Youth Well-Being, Social Connectedness, Empathy, and Narcissism". *Pediatrics* 140 (Supplement 2): S71–S75. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758F>.
- McCrinkle, Mark. 2011. *The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations*. NSW: UNSW Press.
- Mehdizadeh, Soraya. 2010. "Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook". *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*. 13 (4): 357–64. <https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0257>.
- Mills, C. Wright. 2000. *The Sociological Imagination*. Oxford: Oxford University Press.
- Norris, Pippa. 2001. *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Parsons, Jeff. 2019. "Forget Millennials and Gen Z: 'Generation Alpha' Is on the Horizon | Metro News". June 20, 2019. <https://metro.co.uk/2019/06/20/forget-millennials-gen-z-rise-generation-alpha-horizon-10016963/>.
- Pratomo, Yudha. 2019. "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa". May 16, 2019. <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>.
- Schroeder, Jonathan E. 2005. "The Artist and the Brand". *European Journal of Marketing*. November. <https://doi.org/10.1108/03090560510623262>.
- _____. 2010. "The Artist in Brand Culture". *Marketing the Arts*. April 27, 2010. <https://www.taylorfrancis.com/>.
- Seemiller, Corey, and Meghan Grace. 2018. *Generation Z: A Century in the Making*. UK: Routledge.
- Starbuck, William H. 2006. *The Production of Knowledge: The Challenge of Social Science Research*. Oxford: OUP Oxford.
- Watson, Richard A. 2002. *Cogito, Ergo Sum: The Life of René Descartes*. Massachusetts: David R. Godine.



Media Sosial dan Ruang Publik Virtual:

Tantangan Bagi Masyarakat Informasi
Mencapai Rasionalitas Tertinggi di Ruang Komunikasi Publik

Hermin Indah Wahyuni



Tulisan Prof. Dr. Sunyoto Usman berjudul “Media Sosial dan Ruang Publik Virtual” dapat ditempatkan sebagai upaya ahli ilmu sosial, khususnya dari perspektif sosiologi, untuk menjelaskan fenomena media sosial dan kualitas ruang publik virtual. Sebagai pengkaji ilmu komunikasi, saya sangat senang atas hadirnya tulisan tersebut. Fenomena media baru memang menjadi tantangan tersendiri karena karakternya telah mengubah seluruh teori klasik tentang sifat media sebagai platform komunikasi. Media baru dengan seluruh karakternya yang kompleks melahirkan kompleksitas lain yang juga tak sederhana implikasinya terhadap konstruksi realitas di benak publik. Sifat media baru yang *circular* menggabungkan karakter “*one to one*”, “*one to many*”, “*many to many*”, dan “*many to one*” pada saat yang sama sehingga sering dikatakan bersifat *disruptive*, yang artinya bahwa inovasi baru membawa banyak pergeseran pada pola-pola interaksi di dalam masyarakat yang awalnya di dunia nyata kemudian ke dunia maya. Realitas masyarakat kontemporer yang disebut sebagai masyarakat informasi menghadirkan pertanyaan yang mendasar: *bagaimana kualitas informasi di era ini?* Lebih jauh, terkait pertanyaan di dalam tulisan utama Prof. Dr. Sunyoto Usman berjudul “Seberapa efektif komunikasi politik dalam ruang publik virtual mampu

mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik?”, Prof. Dr. Sunyoto Usman menggunakan berbagai *grand theory*, khususnya teori Habermas yang mengidealkan terwujudnya kualitas *public sphere* yang optimal sebagai wilayah yang bebas dari intervensi negara dan kepentingan bisnis (Habermas, 1991a). Habermas meyakini sebuah kondisi yang ia sebut sebagai “*communicative action*” yang mampu membawa masyarakat sampai pada rasionalitas yang paling optimal (Habermas, 1991b). Saya sendiri sangat meyakini kekuatan komunikasi sebagai platform perubahan karena hanya komunikasi yang dapat berkomunikasi (*only communication can communicate*) sehingga kualitas komunikasi masa lalu akan mempengaruhi komunikasi masa kini dan nantinya akan mempengaruhi komunikasi masa depan (Luhmann, 1991). Namun, bagaimanakah kualitas komunikasi berbasis media sosial? Mampukah ia mendorong meningkatnya kualitas publik virtual? Saya akan menjawab pertanyaan itu pada rentang yang sangat bervariasi. Artinya, dalam pandangan saya, optimisme, pesimisme dan skeptisisme sangat tergantung pada kasusnya dan perlu dilihat secara spesifik karena setiap kasus memiliki lingkungan dan karakter yang spesifik pula. Sebagai contoh, semakin populernya internet dan media sosial ditandai dengan spirit yang sangat positif pada beberapa kasus gerakan berbasis internet atau media sosial di Indonesia, seperti sebut saja kasus Prita Mulyasari dan kasus Cicak versus Buaya. Keduanya menunjukkan spirit media baru sebagai media alternatif yang mampu menggerakkan opini publik yang mendorong perubahan sosial dan kebijakan. Spirit optimistis dapat dirasakan ketika dukungan publik mampu menjadi sebuah kekuatan baru. Pada level global, peristiwa “*Arab Spring*” (Khondker, 2011; Breuer, Landman & Farquhar, 2015; Rane & Salem, 2012; Comunello & Anzera, 2012) mampu menebar spirit positif. Dalam konteks terkini atau pertengahan tahun 2019 konstruksi citra individu ataupun lembaga sangat memperhatikan refleksi netizen (*net-citizen*) yang terkenal “kejam” dalam memberikan komentarnya, terlepas dari kualitasnya. Akan tetapi di dalam kasus lainnya, *mood* pesimistis mulai menguat ketika kejujuran dunia maya mulai terkorupsi dengan beberapa penyakit yang oleh Habermas juga ditengarai sebagai hal-hal yang menyebabkan penjajahan kembali (*re-feudalization of public sphere*), yaitu profesionalitas *public relations* dan para *communication strategist*, iklan, serta kesadaran para pembentuk opini untuk mewarnai wacana atau diskursus yang muncul (Habermas, 1991a). Media baru yang awalnya muncul sebagai

platform alternatif kembali coba dikuasai oleh kelompok-kelompok profesional – walaupun pertarungan lebih terbuka sehingga varian kontingensi komunikasi semakin kompleks. Adapun kelompok yang skeptis meragukan seluruh performa media baru ini mampu menjadi harapan baru bagi pembentukan opini publik yang mampu mengubah kebijakan publik. Kasus komunikasi politik yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2019 dan seluruh rangkaiannya menjadi cerminan kualitas rasionalitas publik yang makin memburuk karena tidak dikendalikan oleh profesionalitas dan etika. Di Indonesia, pada rentang momen tersebut dipicu oleh beberapa faktor-faktor yang secara tidak langsung dapat dibaca sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas wacana media baru. Di Indonesia, biaya *online* yang relatif dapat dijangkau justru melahirkan ancaman baru – sebuah fakta yang berbeda dengan analisis Habermas yang mengkhawatirkan lahirnya eksklusivitas kelas menengah. Di Indonesia, karena tingkat akses yang tinggi –walaupun tidak merata antara Jawa dan luar Jawa– menjadikan pertarungan ide semakin terbuka dan bervariasi antara kelas menengah dan arus bawah. Beberapa klaim menyebut adanya gejala matinya kepakaran (Nichols, 2017) semakin kuat dan dominan dalam kondisi itu. Potret pertarungan wacana menyebabkan para pemegang kewenangan melakukan tindakan-tindakan aktif dan reaktif dengan menjadikan media sosial sebagai platform baru yang penting dan menjadi barometer suhu sosial dan politik masyarakat.

Pada akhirnya dalam pandangan saya, agar media sosial dapat meningkatkan kualitas publik virtual yang lebih baik maka dibutuhkan upaya untuk memperbaiki beberapa faktor yang menjadi syarat bagi tumbuhnya kualitas publik virtual yang optimal. Pada level makro, para pengelola kebijakan ataupun regulator perlu mengembangkan resonansi yang tepat dengan pengembangan sistem kebijakan yang menjadikan media baru ini dapat mendorong masyarakat mengoptimalkan berbagai potensinya. Namun pada saat yang sama, memperkuat pengembangan literasi digital dengan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia adalah keperluan mendesak. Di level yang lebih meso, seluruh lembaga ataupun institusi yang ada juga dapat mengembangkan respons yang memperkuat budaya publik virtual yang lebih bertanggung jawab. Sementara itu pada level mikro, penguatan kapasitas masyarakat sebagai komunitas aktif akan berevolusi dengan sendirinya dalam *setting* masyarakat demokratis bagi pengembangan kualitas publik virtual di Indonesia.

Di antara 3 posisi yang ditawarkan penulis utama (Prof. Dr. Sunyoto Usman), saya ingin menawarkan variasi posisi (*techno*) *realist* yang menempatkan dan memandang kekuatan media baru khususnya media sosial secara realistis (pada saat tertentu ia bisa saja menumbuhkan optimisme namun di saat yang lain berpotensi menumbuhkan sikap pesimistis dan bahkan skeptis). Munculnya ambivalensi memang bukanlah sebuah hal yang mengagetkan karena pada kenyataannya berbagai contoh kasus yang ada menunjukkan hal tersebut. Beberapa faktor yang dapat menjadi syarat untuk menguatkan tercapainya kondisi optimal publik virtual dapat diupayakan sekuat tenaga untuk direalisasikan. Beberapa syarat ditunjukkan melalui indikator-indikator yang ada untuk tata kelola media baru yang optimal (salah satu contohnya adalah indikator pada indeks *Freedom on the Net* yang dirilis oleh Freedom House). Secara umum, apa yang tersaji di dalam indeks *Freedom on the Net 2018* telah menghadirkan upaya untuk menolak fakta menguatnya *digital* atau *online authoritarianism* dan mendorong tata kelola yang baik dalam internet (*good digital/online governance*). Dalam refleksi ini, China, Iran, Ethiopia, Syria, dan Kuba menjadi contoh negara yang pesimistis dan bahkan skeptis pada media baru, sedangkan negara-negara yang optimistis pada media baru dapat dilihat dari tata kelola yang optimal menempatkan media baru dilihat dari potensi positifnya (Islandia, Estonia, Kanada, Jerman, dan Australia). Sementara itu, di antara dua kutub tersebut terdapat negara-negara yang naik-turun dalam semangat pengelolaan terhadap internet (USA, UK, Japan dan banyak negara lain).

Secara umum, media baru telah menjadi tantangan baru bagi masyarakat informasi dunia dalam mencapai rasionalitasnya yang tertinggi. Bagi Indonesia, fenomena ini juga sedang terjadi dan melahirkan spirit optimistis, ambivalensi, ataupun pesimistis pada saat yang bersamaan dan tak terhindarkan juga sikap skeptis terhadap pertumbuhan media baru ini. Tak ada resep terbaik yang dapat dilakukan, selain hanya berevolusi dan mengembangkan sistem-sistem diferensiasi dalam merespons lingkungan media baru yang terus berkembang. Namun, tentu saja dengan catatan yang dikontekskan dengan kondisi Indonesia yang sangat spesifik.

Referensi

- Breuer, A., Landman, T., & Farquhar, D. 2015. "Social Media and Protest Mobilization: Evidence from the Tunisian Revolution". *Democratization*. 22:4, 764–792.
- Comunello, F., & Anzera, G. 2012. "Will the Revolution Be Tweeted? A Conceptual Framework for Understanding The Social Media and The Arab Spring". *Islam and Christian - Muslim Relations*. 23:4, 453–470.
- Habermas, Juergen. 1991a. *The Structural Transformation of The Public Sphere, An Inquiry to A Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press.
- _____. 1991b. *Communicative Action, The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society*. Volume 1. UK: Polity Press.
- Freedom House. 2018. *Freedom on The Net 2018: The Rise of Digital Authoritarianism*. Diakses dari <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018>.
- Khondker, H.H. 2011. "Role of The New Media in The Arab Spring". *Globalizations*. 8:5, 675–679.
- Luhmann, Niklas. 1991. *Introduction to System Theory*. UK: Polity Press.
- Nichols, T. 2017. *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters*. USA: Oxford University Press.
- Rane, H., & Salem, S. 2012. "Social Media, Social Movements and The Diffusion of Ideas in The Arab Uprisings". *Journal of International Communication*. 18: 97–111.



Commentaries:

Penetrasi Media Sosial

Drs. Ashadi Siregar



Di dalam ruang publik real terdapat publik sebagai *citizen* dalam konteks institusi negara, konsumen dalam konteks institusi pasar, dan warga dalam konteks masyarakat sipil. Keberadaan mereka di dalam berbagai institusi diikat oleh norma, etik dan hukum di dalam struktur sosial. Artinya, habitus setiap anggota masyarakat sebagai pengikut dibentuk oleh, atau sebagai elite membentuk norma pada institusi di mana ia berada. Dalam interaksi sosialnya, publik dimediasi oleh media massa (koran dan media penyiaran). Artinya, keberadaan media massa adalah untuk mengisi interaksi sosial di dalam ruang publik. Media massa berfungsi mediasi institusi negara, pasar dan masyarakat sipil. Informasi dari kehidupan publik dikelola secara institusional berdasarkan standar profesional (habitus berdasarkan standar teknis, norma etik, dan hukum). Ada paralelisme antara standar norma dari ruang publik dan institusi media massa. Dalam fungsinya, informasi publik dari media massa diasumsikan sebagai dasar pembentukan *public opinion* untuk selanjutnya menjadi dasar bagi pemilihan pejabat publik dan pembentukan kebijakan publik oleh negara.

Sementara itu di ruang publik virtual, publik sebagai *netizen* terbentuk dari kesertaan dengan memiliki akun di dalam internet. Artinya, media lebih dulu

ada, baru kemudian ada publik. Di sini tidak ada struktur dengan institusi dan norma yang menjadi acuan bersama. Dengan semakin mudahnya memiliki perangkat keras telepon pintar (*smart phone*) dan teknologi selular 3G, jumlah *netizen* semakin besar dan meluas. Internet tidak lagi sebagai gejala urban dan elitis. Media sosial melalui internet bukan sebagai sumber informasi, tetapi sebagai media aktualisasi diri. Dalam aktualisasi diri ini, faktor subjektif dan psikis sangat dominan. Ini sangat berbeda dengan fungsi media massa di ruang publik real yang terikat dengan norma publik. Media massa di ruang publik real semakin tergerus keberadaannya. Hal itu ditunjukkan dengan berhenti terbitnya sejumlah koran, dan media penyiaran berusaha menarik minat publik dengan informasi sensasional. Upaya negara dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ditunjukkan dengan kasus-kasus menutup akun atau “menyeret” *netizen* ke ruang publik real untuk diadili. Tetapi itu tidak dapat mengubah kondisi di ruang publik virtual. Konten aktualisasi diri yang ada melalui media sosial virtual berhadapan dengan informasi publik dari media massa di ruang publik real. Sementara *citizen* di ruang publik real terpapar dengan konten-konten media sosial virtual, dan penetrasi informasi publik yang berasal dari media massa ke dalam kehidupan publik menjadi semakin lemah. Jika *public opinion* terbentuk dari konten-konten media sosial yang berasal dari aktualisasi diri dan psikis, tentu proses pemilihan pejabat publik dan pembentukan kebijakan publik akan menimbulkan tanda tanya secara ideal dalam kehidupan di ruang publik.



Demokrasi dan Pluralisme

Dr. J. Kristiadi



Tulisan yang disampaikan Prof. Dr. Sunyoto Usman dapat dikatakan sebagai *audit forensic* relasi antara *civil society* dan para pemutus politik. Tulisan tersebut secara detail memaparkan tingkat revolusi digital dengan proses pengambilan kebijakan publik. Kalimat penutupnya sangat menyengat: “Bagi pandangan *skripticism*, tabiat semacam itu justru menjadi patologi demokrasi politik karena dipenuhi oleh nalar yang dipaksakan, inkonsistensi dan asumsi-asumsi yang keliru”. Bertitik tolak dari ungkapan tersebut, catatan berikut mungkin dapat menjadi pelengkap.

Sebagai catatan awal, mungkin perlu untuk melirik pendapat Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century* bahwa 2018 menjadi acaman teknologi terhadap demokrasi. Gejala itu disebut dengan *digital dictatorship*. Ia mendalilkan teknologi digital akan sangat berguna untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, di tangan seorang yang sangat ambius justru akan menyebabkan bencana yang mematikan. Penguasa politik tiranikal dapat melakukan ekspansi ke negara lain dengan menciptakan robot-robot melalui program algoritme. Rezim tersebut juga dapat mengontrol ketat terhadap warga negara yang secara emosional tidak senang pada pemimpinnya. Bermodalkan gelang bioritmik (*biorytmic bracelet*) penguasa dapat mengontrol dan menghukum warga yang muak melihat fotonya. Prajurit robot menihilkan emosi, empati serta nilai-nilai kemanusiaan. Loyalitas mereka absolut pada perintah masternya. Dalam peperangan meskipun

membunuh musuh adalah absah, tetapi *rule of engagement* mengatur agar perilaku prajurit tidak sewenang-wenang.

Kebebasan dan kesetaraan serta merebaknya masyarakat sipil ternyata tidak selalu berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Masyarakat madani yang ber-tebaran di seantero negeri tampaknya bergerak tidak fokus pada visi, bahkan sebagian mempunyai ideologi anti demokrasi. Oleh sebab itu dikuatirkan bahwa pesta demokrasi diancam anarki oleh masyarakat anti madani. Nilai-nilai mulia religi dipelintir menjadi ujaran saling membenci sesama anak bangsa yang hakikatnya adalah saudara sendiri.

Namun kegalauan matinya demokrasi tidak hanya merebak di negeri ini. Nun jauh di seberang negeri, negara yang konon dianggap biang dan “embahnya” demokrasi (Amerika Serikat) pun beberapa tahun terakhir ini gelisah menghadapi penggerogotan demokrasi di negara sendiri. Mereka menjerit, apakah demokrasi sudah mati? Presidennya yang sejak kampanye mengobarkan intoleransi juga membangun Partai Republik sebagai institusi milik pribadi (*The Economist*, 17–21 April 2018). Fenomena regresi demokrasi juga terjadi di banyak negeri, misalnya di Amerika Latin telah terjadi pemusatan kekuasaan eksekutif, politisasi lembaga peradilan, menyerang habis-habisan independensi media, pejabat *public* memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi (“Is Democracy Dying”, *Foreign Affairs*, May/June 2018).

Sementara itu prinsip kesetaraan bila dipraktikkan tanpa pandang bulu justru dapat merusak demokrasi karena kesetaraan dianggap berarti semua orang sama derajat, niat dan kompetensinya. Kecuali itu, tidak ada kepedulian pada mereka yang ingin memuliakan kehidupan bersama atau mereka yang ingin menghancurkan tatanan kehidupan demi mengejar kekuasaan. Referensi pengelolaan kekuasaan dalam konteks manajemen pemerintahan untuk kepentingan umum telah ribuan tahun lalu didiskusikan mendalam antara Socrates dan Glaucon (sahabat Socrates). Wacana yang dapat dijadikan pelajaran tersebut dikumpulkan Plato di dalam bukunya *Republic* (Editor Chris Emyliyn-Jones, dan William Freddy: Harvard University Press, London, England, 2013). Di dalam bab VIII (hlm. 107–305) memuat perdebatan tentang kekuasaan. Pelajaran pentingnya, antara lain, adalah tentang manipulasi para elite politik yang me-

ngobarkan propaganda untuk memenuhi hasrat kuasa, hanya menempatkan rakyat sebagai budak. Namun para budak tersebut semakin lama tidak dapat dikendalikan sehingga menghasilkan pemerintahan oleh gerombolan yang tidak mempunyai kompetensi memerintah alias mobokrasi. Kemaruk kuasa selalu dapat memporakporandakan negara.

Mewujudkan cita-cita tatanan demokrasi di dalam masyarakat yang plural karena identitas primordial adalah sangat rumit. Jebakan demokrasi yang paling mudah menjerat kedaulatan rakyat adalah dalil mulia dari demokrasi itu sendiri: kebebasan dan kesetaraan. Prinsip tersebut baru bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan umum bila disertai dengan kualitas manusia yang mampu membatasi kebebasannya untuk merawat nilai dan aturan guna mewujudkan cita-cita bersama. Praktik di negara-negara yang demokrasinya telah mapan, biasanya sebelum terjadi ledakan partisipasi rakyat, lembaga-lembaga politik telah dibangun sehingga dapat menampung partisipasi publik. Tanpa adanya manusia yang mempunyai kompetensi serta tingkat pemahaman yang tinggi tentang hidup bersama, maka kebebasan menjadi ekspresi kemerdekaan yang liar, tidak bertanggung jawab, dan anarkis. Kebebasan individual harus dipagari kepentingan umum melalui hukum, dan lembaga-lembaga politik mampu mengelola partisipasi publik. Tanpa batas-batas yang jelas, para pemburu kekuasaan dengan sigap akan mengobarkan propaganda mengelabui rakyat agar mau membangun dukungan untuk kepentingan mereka sendiri.

Mengingat akar permasalahan terletak pada tataran pengelolaan jiwa, maka tidak ada resep instan untuk mengobati penyakit tersebut. Solusi harus dilakukan dalam jangka panjang dengan melakukan pendidikan hasrat manusia dalam mengelola gelora dan gerak jiwanya. Pendidikan hasrat akan menghasilkan manusia yang nuraninya terasah. Dengan demikian, pengelolaan negara secara gradual akan menjadi paralel dengan pengelolaan jiwa yang memuliakan kekuasaan. Hadirnya negara yang bermartabat akan mewujudkan keadilan, dan itu merupakan senjata yang sangat ampuh untuk melawan ideologi apa pun, termasuk ideologi kapitalisme, komunisme serta politik identitas.



Demokrasi Digital di Dalam Media Sosial

Dr. Nurul Hasfi



Tulisan Prof. Dr. Sunyoto Usman tentang media sosial dan ruang publik virtual layak disimak, karena bukan hanya mengingatkan kita tentang betapa pentingnya isu media sosial (media baru) di dalam percaturan akademik dewasa ini, tetapi juga menawarkan *conceptual framework* untuk memahami fungsi media sosial sebagai arena komunikasi politik di dalam ruang publik *virtual* (maya). Uraian berikut ini adalah nukilan ringkas disertasi doktor yang penulis ajukan di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada 2017. Beberapa temuan di dalam disertasi tersebut *in line* dengan pandangan Prof. Dr. Sunyoto Usman.

Sejak kemunculan internet, praktik demokrasi diwarnai dengan berkembangnya fenomena baru yang disebut demokrasi digital. Kehadiran media sosial (*internet-mediated*) tersebut ditengarai telah membuka nuansa baru tentang hubungan pemerintah (*state*) dan masyarakat sipil. Fungsi atau peran media sosial dalam menjembatani komunikasi politik sebenarnya telah banyak dibahas di dalam literatur sosiologi, ilmu komunikasi maupun ilmu politik. Ilmuwan seperti Dumitrica (2014), Tolbert (2003) dan Ifukor (2010) percaya bahwa media sosial meningkatkan partisipasi politik dan diskusi publik di kalangan warga *net* (*netizen*). Kemudian Shcherbak (2014) menyebut bahwa media sosial tidak hanya mendorong partisipasi politik *online*, namun juga dapat memicu gerakan

politik di tingkat *offline*. Postmes (2002) berkesimpulan, media sosial dapat berfungsi sebagai saluran perubahan tindakan kolektif dari tindakan persuasif menjadi konfrontatif baik pada level individu maupun kelompok. Gleason (2013) menemukan bahwa media sosial (khususnya *twitter*) dapat berfungsi mendukung terbukanya ruang partisipasi politik. Dalam konteks gerakan *Occupy Wall Street*, Enjolras (2012) menunjukkan bahwa struktur informasi di media sosial menghasilkan karakter mobilisasi dukungan yang kuat dan independen.

Namun ternyata tidak sedikit ilmuwan yang bersebarangan dengan pandangan tersebut. Hosch-Dayican (2014), misalnya, menyimpulkan bahwa warga *net* (*netizen*) melalui media sosial cenderung lebih banyak memproduksi kampanye negatif dibandingkan kalangan politisi sendiri. Ceron (2015) melihat kampanye negatif di media sosial merugikan kekuatan politik yang sedang berkontestasi. Sementara itu Groshek dan Ahmed (2013) menyatakan bahwa media sosial acapkali digunakan sebagai upaya mendiskreditkan kekuatan politik yang berkontestasi.

Lalu bagaimana yang terjadi di Indonesia? Media sosial juga telah digunakan sebagai instrumen untuk menjalin komunikasi politik dalam upaya kontestasi politik. Kecenderungan demikian mudah dimengerti karena di dunia pengguna internet (*nitizen*), negeri ini menempati peringkat keempat pengguna Facebook dan peringkat ke lima pengguna Twitter. Hasil penelitian penulis antara lain memperlihatkan bahwa berdasarkan pengalaman pemilihan Presiden RI 2012 yang lalu, media sosial cenderung menjadi ruang perdebatan terbuka yang melibatkan proses komunikasi politik yang justru melukai bahkan merusak idealisme demokrasi, seperti kampanye negatif, kampanye hitam (*black campaign*), provokasi, propaganda bahkan kebohongan publik. Pada waktu itu berkembang demokrasi semu (*pseudo-democracy*) yang maksudnya bahwa seakan-akan terdapat atau tumbuh kebebasan berekspresi, namun sebenarnya dikontrol oleh kekuatan dan kekuasaan elite-elite politik. Perdebatan politik yang berlangsung ketika itu seperti berbentuk komunikasi egaliter, namun sebenarnya komunikasi politik yang terjalin penuh dominasi dan penetrasi. Komunikasi politik melalui media sosial ketika itu didominasi oleh elite politik melalui dua mekanisme kontrol. *Pertama*, kontrol melalui pesan (*message*) berupa pengembangan teks dengan konten politik imagologi, politik identitas, pengembangan citra kesa-

lehan personal, politisasi agama dan politisasi aliran. Kontrol melalui pesan semacam memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial tidak lebih sebagai alat memobilisasi dukungan politik, dan jauh dari pendidikan politik. *Kedua*, melakukan kontrol melalui jaringan (*network*), dilakukan dengan cara: (a) membangun jaringan internal, terutama dengan akun-akun milik *public figure* (artis, akademisi, budayawan, ustadz) dan (b) membangun jaringan eksternal dengan berbagai media sosial. Kontrol melalui jaringan tersebut terutama bertujuan agar pesan-pesan kampanye dapat efektif memobilisasi dukungan pemilih secara cepat dan luas.

Hasil penelitian penulis memperlihatkan bahwa komunikasi politik yang terjalin melalui media sosial ternyata tidak mampu menghadirkan apa yang disebut Habermas sebagai ‘perbincangan rasional’ yang ilmiah. Di samping itu, diskusi politik melalui media sosial tidak sesuai dengan prosedur demokrasi deliberatif yakni komunikasi politik tanpa dominasi, rasional dan dialog netral. Konsekuensinya, ide yang ditawarkan Habermas sebagai alternatif perspektif kritis gagal mengemansipasi warga *net* (*netizen*). Bahkan komunikasi politik yang diharapkan menghasikan dialog yang mencerahkan pada konteks kontestasi politik justru cenderung menghasilkan komunikasi politik yang kurang mendidik publik. Karena itu tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa jalan konsensus yang ditawarkan Habermas dalam perspektif kritis terkait dengan komunikasi politik gagal direalisasikan. Praktik kekuasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam media sosial justru menjadi ladang konflik yang secara sadar dibangun secara kolektif.

Hasil penelitian penulis juga memperlihatkan bahwa demokrasi digital cenderung berbuah negatif, dalam arti telah mendegradasi proses demokratisasi. Jadi, mirip dengan yang disampaikan Habermas meskipun dengan argumentasi yang berbeda. Habermas melihat akar permasalahannya bersumber dari ruang publik yang terpecah (*fragmented*), sedangkan hasil penelitian penulis sumber perpecahan tersebut berasal dari praktik kekuasaan kelompok dominan yang menutup ruang kelompok marginal. Kelompok dominan dengan cerdas membangun berbagai wacana yang mendiskreditkan kelompok marginal. Temuan penulis menunjukkan bahwa praktik demokrasi semu di media sosial ini juga menutup harapan Darlberg dan Siapera (2007) tentang kemungkinan berkem-

bangnya demokrasi radikal (*radical democraton*). Demokrasi radikal lazim dihubungkan dengan demokrasi deliberatif yang menurut mereka dapat difasilitasi melalui media sosial (*internet-mediated*). Media sosial sukar berfungsi memfasilitasi terwujudnya ide demokrasi radikal yakni kebebasan (*liberty*), kesetaraan (*equality*), dan solidaritas. Media sosial juga sukar memberikan fasilitas bagi tumbuhnya resistensi terhadap kelompok dominan yang acapkali membangun *status quo* secara sistematis dengan cara mengontrol pesan dan jaringan.



Media Sosial dan Agenda Kebijakan

Dr. Erwan Agus Purwanto



Pemilihan umum serentak yang diselenggarakan 17 April 2019 lalu, terutama pemilihan umum presiden dan wakil presiden, banyak memperoleh perhatian dari berbagai kalangan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu serentak tersebut mampu mengundang partisipasi masyarakat. Berkat kehadiran internet dan media sosial, masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau konsumen informasi, namun mereka juga tampil sebagai produsen informasi. Masyarakat kita memiliki beragam latar belakang etnis, agama, pendidikan, literasi digital dan afiliasi politik. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kualitas informasi yang terartikulasi terkait dengan pemilihan umum serentak tersebut juga beragam. Bahkan informasi yang tidak berkualitas atau kabar bohong (*hoax*) pun sengaja dibuat untuk menyesatkan pemahaman publik tentang suatu peristiwa. Sudah barang tentu, tujuannya adalah untuk memobilisasi dukungan politik.

Kehadiran internet dan media sosial sebenarnya juga membawa kisah-kisah menggembirakan. Keberhasilan masyarakat dalam memobilisasi dukungan untuk membantu individu yang membutuhkan bantuan seperti kasus “koin untuk Prita” yang terjadi beberapa tahun lalu, rasanya akan sulit terjadi tanpa adanya internet dan media sosial. Kisah-kisah lain tentang manfaat internet dalam menggalang solidaritas publik, baik untuk membantu individu maupun mendesak pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan terus berulang terjadi. Itulah sebabnya fenomena kemunculan internet dan media sosial yang telah

mempengaruhi hampir seluruh kehidupan kita tentu menarik untuk dipahami dan dijelaskan. Tulisan Prof. Dr. Sunyoto Usman tentang media sosial dan ruang publik virtual hadir tepat pada saat dibutuhkan (*timely*). Tulisan yang menarik itu sangat membantu kita dalam memahami realitas baru, yaitu munculnya masyarakat digital atau yang dalam tulisan tersebut disebut sebagai *internet-mediated community*.

Kehadiran internet dan media sosial memang telah melahirkan dilema. Di satu sisi, internet dan media sosial dapat berdampak positif, yaitu menjadi ruang alternatif dalam membantu orang berinteraksi dan membangun koalisi untuk mendukung sebuah agenda kebijakan. Di sisi yang lain, internet dan media sosial dianggap tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, atau justru merusaknya lewat fenomena *hoax*. Untuk menjelaskan dilema di atas, Prof. Dr. Sunyoto Usman menawarkan sebuah *framework* yang dapat dipakai untuk memahami dilema kehadiran internet dan media sosial yang menghadirkan apa yang disebut sebagai ruang publik virtual. Dalam *framework* yang diusulkannya tersebut, Prof. Dr. Sunyoto Usman menyebut bahwa dilema kehadiran tersebut dapat dilihat pada bagaimana masyarakat melihat internet dan media sosial dari dua perspektif yaitu perspektif optimistis dan pesimistis (skeptis). Perspektif optimistis menganggap kehadiran internet dan media sosial dapat memfasilitasi munculnya ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sehingga akan mendorong demokratisasi dalam proses perumusan kebijakan. Sedangkan yang pesimistis melihat bahwa kehadiran ruang publik virtual tidak akan dapat membantu masyarakat dalam merumuskan kebijakan secara demokratis karena berbagai hal, dan terutama karena kelompok elite masih tetap dominan mengontrol ruang publik virtual.

Namun demikian diperlukan telaah lebih dalam melihat pembacaan efektivitas media sosial dalam agenda kebijakan. Itu karena proses perkembangan isu di dalam ruang publik virtual tidak hanya ditentukan oleh dimensi aktivisme di dalam media sosial itu sendiri, namun juga menyangkut aspek kepublikan dari konten isu yang didorong. Terkait dengan hal tersebut, dapat mengaca pada kasus “penurunan tiket pesawat” dan “legalitas transportasi online” yang terus dan sempat hangat, bahwa urgensi, dampak, kualitas dan implikasi isu yang ditimbulkan dapat membangun antusias *netizen* untuk mengawal isu tersebut

sampai pada level kebijakan. Selain itu, validitas isu publik yang dikembangkan juga menjadi aspek penting. Hal itu berkaca pada kasus “*justice for Audry*”, bahwa kebenaran realitas maupun pengetahuan yang ada pada suatu isu harus dapat dipercaya dan dapat menjadi representasi nilai dari publik itu sendiri. Meskipun kasus tersebut sempat viral dan mempengaruhi atensi publik, namun karena adanya aspek informasi negatif yang dirahasiakan, maka kemudian menjadikan kasus tersebut gagal menjadi representasi publik baik virtual maupun real dalam melakukan advokasi kebijakan.

Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah karakter respons dari pengambil keputusan dalam melihat realitas virtual sebagai rujukan dalam mendorong *agenda setting* pembuatan kebijakan. Hal itu menjadi pertimbangan karena tidak semua pemimpin mengoptimalkan akun media sosial sebagai “pintu” untuk menyerap aspirasi publik. Masih ada gap pandangan dalam melihat dua realitas tersebut, sehingga bagi pengambil keputusan yang sudah berani mempublikkan akun media sosial akan lebih terbuka dalam merepons isu publik dalam pembuatan kebijakan. Harapan ke depan adalah menciptakan realitas publik virtual yang kaya dengan konten positif yang dapat memberikan perbaikan kehidupan masyarakat. Perkembangan media sosial tidak bisa dipungkiri lekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sangat penting untuk menanamkan kesadaran bahwa konten yang baik (positif) di dalam ruang publik virtual merupakan bagian penting dalam proses mendorong aspirasi dan kepentingan politik menjadi kebijakan publik.



Bagian 2



Persembahan untuk
////////////////////////////////////

Prof. Dr. Partini



Biografi Prof. Dr. Partini



Prof. Dr. Partini lahir di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juni 1949. Beliau memulai karier sebagai asisten dosen dengan membantu mengajar mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif sambil menyelesaikan studi S1. Pada bulan Desember 1973, beliau menyelesaikan S1 Sosiologi dan kemudian diangkat menjadi dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada bulan Maret 1975. Pada bulan Agustus 1985, beliau menamatkan pendidikan jenjang S2, dan kemudian pada tahun 1999 memperoleh gelar Doktor di bidang Sosiologi dengan disertasi berjudul “Peluang Pegawai Wanita untuk Menduduki Jabatan Struktural”.

Tercermin dari mata kuliah yang diampu dan dari berbagai riset yang dikerjakan, Prof. Dr. Partini memiliki minat yang sangat kuat pada topik-topik gender dan pembangunan, teori pembangunan, dan metode penelitian sosial. Semua topik tersebut beliau ajarkan di semua jenjang Prodi (Program Studi) Sosiologi, mulai S1 hingga S3. Aktivitas riset beliau pun berfokus pada tema-tema serupa. Dari sekian banyak karya, buku beliau berjudul *Bias Gender dalam Birokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013) termasuk yang banyak dikutip. Selama 1987–2009, Prof. Dr. Partini menjadi staf peneliti di PSKK (Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan) UGM, dengan aktivitas riset seputar isu gender, *public service*, dan *good governance*.

Prof. Dr. Partini telah berkontribusi besar dalam pengembangan Jurusan Sosiologi UGM yang kini diistilahkan dengan Departemen Sosiologi. Beliau

pernah menjadi Ketua Jurusan selama dua periode, yakni 1989–1992 dan 2007–2011, juga sebagai anggota Senat FISIPOL UGM. Berkat portofolio dalam pengembangan kelembagaan dan kurikulum, maka selama 2009–2015, Prof. Dr. Partini dipercaya menjadi *reviewer* dan evaluator pada Ditjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kini Kemenristekdikti [Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia]) untuk Usulan Pendirian Universitas, Fakultas, dan Program Studi baru di bidang Ilmu Sosial. Terkait dengan kapasitas tersebut, beliau mendapat tugas sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Prodi S1, S2, dan S3 selama tahun 2000–2019. Di internal UGM, beliau dipercaya menjadi anggota Komisi Pertimbangan Kenaikan Pangkat Dosen UGM bidang Ilmu Sosial (2005–2019), dan Manajer Audit Mutu Internal FISIPOL UGM (2005–2018). Selain itu pada tahun 1980–1985 beliau menjadi Tim Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM, dan pada tahun 2006–2008 beliau menjadi anggota Senat UGM sebagai wakil dari FISIPOL UGM unsur Non-Guru Besar.

Di luar kampus, Prof. Dr. Partini dikenal luas sebagai sering menjadi narasumber pada berbagai seminar dengan paparan mengenai isu-isu perempuan/gender dalam pembangunan, politik, sosiologi keluarga, dan pelayanan publik. Atas berbagai prestasi dan dedikasinya, beliau memperoleh bintang jasa Karya Satya Lencana Kesetiaan 20 tahun dari Ditjen Dikti pada tahun 1999, Karya Satya Lencana Kesetiaan 25 tahun dari Ditjen Dikti pada tahun 2007 dan Karya Satya Lencana Kesetiaan 30 tahun dari Ditjen Dikti pada tahun 2018.



Soft Masculinity: Dekonstruksi Maskulinitas dalam Industri Musik Korea (K-Pop)

Dr. Harmona Daulay, M. Si.



Pengantar

Pada abad ke-21 ini dapat dikatakan telah terjadi suatu fenomena dalam perkembangan musik Korea, baik di Indonesia maupun di dunia. Fenomena *boyband* dan *girlband* Korea mendapat *fans* yang begitu masif. Anak muda, terutama perempuan, dapat dibilang “tidak gaul” bila tidak mengetahui *Korean Wave*. Proses penyebaran budaya Korea (*Korean Wave*) yang begitu cepat membuat produk-produk dari budaya Korea mudah ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. *Korean Wave* menawarkan berbagai bentuk hiburan berupa film, drama, *variety show*, dan musik (*Korean Pop*). Tidak hanya itu, perlahan *Korean Wave* juga membawa pengaruh berupa *fashion*, makanan, *games*, dan sebagainya. Dari berbagai bentuk hiburan yang ditawarkan oleh *Korean Wave* tersebut, musik (*Korean Pop* atau K-Pop) merupakan bentuk hiburan yang paling banyak digandrungi oleh remaja akhir-akhir ini.

Korean Pop atau disingkat K-Pop merupakan jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Memasuki tahun 2011, K-Pop mulai merambah ke sejumlah negara Asia, tidak terkecuali Indonesia, bahkan Eropa. Banyak remaja

Indonesia, khususnya perempuan, yang menjadikan K-Pop sebagai *trendsetter*. Kombinasi lagu yang dinamis, *dance* yang sinkron, *fashion* yang unik, serta wajah yang rupawan, menjadikan K-Pop memiliki ciri khas tersendiri dan digemari oleh kaum muda hingga kini. Salah satu jenis musik K-Pop yang paling banyak digemari oleh remaja masa kini adalah sekumpulan penyanyi dan penari yang biasa disebut *boyband* atau *girlband*. Mereka bernyanyi sekaligus menari.

Meluasnya K-Pop tidak dapat dilepaskan dari peran media. K-Pop menggunakan jejaring sosial *online* sebagai medium untuk menyebarkan K-Pop ke seluruh dunia (Setiawan, 2012). Jejaring Sosial seperti *Youtube*, *Twitter*, *Instagram*, berbagai *website* berita, dan portal musik menjadi jembatan bagi K-Pop untuk menjadi terkenal ke seluruh dunia seperti sekarang ini. *Fans* K-Pop di seluruh dunia semakin hari semakin bertambah. Tidak mengherankan jika jumlah *fans* K-Pop mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Seperti yang dilansir oleh *Jawa Pos*, sebuah yayasan yang berafiliasi dengan pemerintah Korea, *The Korea Foundation* menunjukkan bahwa Asia dan Oceania memiliki *fans* yang paling banyak, yaitu sekitar 70,59 juta anggota dari 457 klub. Amerika menempati posisi kedua, yaitu 11,8 juta anggota dari 712 *fans* klub (*Jawa Pos*, 13 Januari 2019).

Kepopuleran K-pop terbukti dari seringnya musik-musik K-pop diputar di kafe-kafe, TV swasta, atau di tempat-tempat berkumpulnya para anak muda di Indonesia. Bukan hanya itu, dunia *fashion* anak muda pun kini telah berubah mengikuti tren ala Korea, mulai dari pakaian, aksesoris, *make up*, sampai model rambut pun mengikuti gaya artis-artis Korea. Dunia kuliner kini juga turut mempopulerkan budaya Korea. Makanan Korea banyak dijual secara bebas di supermarket atau swalayan, seperti *ramen*, *kimchi*, dan lain-lain. Restoran-restoran Korea kini juga mulai menjamur di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan juga terdapat banyak *online shop* yang khusus menjual makanan-makanan khas Korea.

Di dalam industri musik K-Pop, visual menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Tidak heran jika banyak orang di Korea yang berprofesi sebagai artis melakukan operasi plastik agar visualnya terlihat sempurna. Setelah melakukan operasi plastik pun, mereka tetap harus meriasnya agar tetap terlihat sempurna. Dengan kondisi seperti itu, maka wajah *boyband* hampir rata-rata memiliki komposisi dan proporsi yang sama, bahkan nyaris mirip antar satu dengan yang lainnya.

Tidak heran mereka yang tidak tertarik dengan K-Pop selalu berkomentar bahwa tidak ada yang bisa dibedakan dari wajah artis ini dengan artis itu. Kemiripan tersebut menjadi tolak ukur atau penanda adanya kesepakatan bersama bahwa visual yang ideal adalah seperti yang ditampilkan para *boyband*.

Tidak sampai di situ saja, hadirnya K-Pop juga membawa perubahan pandangan remaja *fans* K-Pop, khususnya remaja perempuan, terhadap beberapa hal. Di antaranya adalah perihal maskulinitas. Pada era di bawah tahun 2000-an, konstruksi maskulinitas yang jamak terlihat adalah maskulinitas *macho*. Pada era tersebut muncul idola pria seperti tokoh-tokoh film dengan konstruksi maskulinitas *macho* seperti misalnya aktor Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Kemudian pada era di atas tahun 2000-an muncul konstruksi maskulinitas metroseksual dengan tokoh pemain bola David Beckham. Itu merupakan evolusi perkembangan maskulinitas yang ada di media massa maupun dalam kondisi empiris.

Bila merujuk pada sejarah maskulinitas, kata “maskulin” atau “maskulinitas” berasal dari bahasa Prancis, “*masculine*” yang merupakan sebuah kata sifat yang berarti kepriaan atau menunjukkan sifat laki-laki. Maskulinitas merupakan seperangkat praktik sosial dan representasi budaya yang terkait dengan “menjadi laki-laki” (Pilcher dan Whelehan, 2017:92). Pemaknaan terhadap maskulinitas memang beragam, karena dipengaruhi oleh latar belakang dan kondisi budaya masing-masing masyarakat. Maskulinitas cenderung diidentikan dengan seorang laki-laki yang menampilkan kejantanannya dengan memiliki sifat-sifat yang meliputi dominan, berani, dewasa, sosok seorang pemimpin, kuat, rasional, tubuh kekar, perkasa, dan sebagainya.

Satu dekade belakangan ini muncul fenomena *soft masculinity*. Hal itu terlihat dari penampilan penyanyi pria Korea yang menampilkan gaya maskulinitas yang disebut *soft masculinity* dengan menampilkan sisi feminitas yang terlihat pada penampilan di panggung maupun penampilan sehari-hari. Perubahan pandangan mengenai pemaknaan maskulinitas yang cukup unik itu ditampilkan oleh banyak *boyband* K-Pop. Maskulinitas bagi para penikmat musik K-Pop, khususnya perempuan, bukan lagi maskulinitas yang menjunjung tinggi kekuatan atau bentuk tubuh yang berotot. Laki-laki yang menarik dan tampan bukan lagi laki-laki yang berbadan besar, berkulit sawo matang atau laki-laki *macho* yang

penuh keringat. Laki-laki yang dianggap tampan dan menarik dikonstruksi sebagai lelaki dengan tubuh semampai, rambut *stylish*, kulit putih cerah, berotot di bagian perut, dan wajah yang cenderung ‘cantik’.

Sementara daya tarik *boyband* K-Pop berupa dandanan sebagaimana tersebut di atas, di Indonesia pada era maskulin tahun 1960-an dimaknai sebagai sosok laki-laki yang berambut klimis dengan kumis hitam seperti penyanyi melayu P. Ramlee, dan tahun 1980-an sebagai sosok yang ditampilkan oleh Trio Libels. Sedangkan di era terkini, yang memiliki daya tarik adalah figur laki-laki dengan wajah imut yang dapat juga disebut cantik, bertubuh langsing tapi berotot di bagian perut, berkulit wajah mulus tanpa jerawat, berseliweran di media elektronik maupun media sosial, dan menjadi pesona tersendiri bagi kaum remaja perempuan masa kini.

Fenomena *boyband* di Indonesia di tahun 2010, dapat dilihat pada kelompok musik anak muda seperti Smash. Grup tersebut menjadi fenomenal dalam waktu hampir satu dekade ini, karena memberikan warna berbeda dalam hal maskulinitas yang muncul pada konstruksi penyanyi pria di Indonesia. Walaupun Smash sempat agak vakum selama sekitar 4 tahun, namun muncul kembali pada tahun 2018 dengan tetap menampilkan fenomena *boyband* K-Pop. Fenomena *boyband* Korea terlihat juga pada konser Super Junior di Tangerang 15 Juni 2019. Penampilan tersebut masih saja mempesona setelah 14 tahun berkarier, terbukti dengan banyaknya penonton yang hadir.

K-Pop hadir dan mendekonstruksi makna maskulinitas yang selama ini sudah tertanam di masyarakat. Melihat anggota *boyband* menggunakan *lip tint*, *lip balm*, *eyeliner* dan alat *make up* lainnya, *fans* K-Pop merasakan sebagai pemandangan yang biasa. Di Korea, anggota *boyband* tidak ada yang berkumis, apalagi memelihara janggut, karena laki-laki seperti itu dianggap tidak tampan. Kemapanan hegemoni maskulinitas yang secara tradisional mengeliminasi laki-laki dengan karakteristik tubuh yang tidak memenuhi standar maskulin, kini harus rela berbagi tempat dengan konsep baru yang ternyata diterima oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa makna maskulinitas tidak melulu soal kumis, otot dan kekar.

Maskulinitas yang seperti digambarkan oleh *boyband* K-Pop disebut sebagai *Soft Masculinity* (Maskulinitas Lembut). Disebut seperti itu karena konstruksi

baru maskulinitas yang diciptakan oleh *boyband* adalah laki-laki yang berwajah “cantik” tetapi tetap tidak meninggalkan kesan laki-lakinya. Melihat penampilan mereka seperti itu merupakan suatu hal yang lebih permisif bagi umumnya perempuan Indonesia yang menjadi *fans*. Pergeseran pakem maskulinitas *macho* menjadi tergerus pada konteks kesukaan mereka pada penyanyi K-Pop.

Dinamika Konstruksi Maskulinitas pada *Boyband* di Indonesia

Secara historis, Indonesia juga memiliki fenomena *boyband* sebagaimana yang terjadi pada industri musik Indonesia pada era tahun 1980-an. Munculnya *boyband* Trio Libels yang mengeluarkan lagu fenomenal berjudul “Gadisku” adalah salah satu contohnya. Mereka menjadi idola di masa itu. Fenomena maskulinitas yang muncul pada Trio Libels tidak memberikan citra konstruksi maskulinitas yang lembut. Pada era tahun 1990-an juga diwarnai dengan munculnya *boyband* ME yang mendapat tanggapan luas dari para remaja. Mereka mengeluarkan album berjudul “Inikah Cinta”. ME mengadopsi maskulinitas gaya *boyband* Amerika di tahun 1990-an. Konstruksi maskulinitas yang ditiru adalah maskulinitas Barat, dengan tampilan Jaket mengkilap warna-warni, celana gombrong yang senada dengan warna jaket, rambut kepong, rambut kriwil, serta bandana, kacamata dan topi hitam. (Zahida, 2012:36). Ada juga yang cukup fenomenal, yakni *boyband* Cool Colors dengan lagu hitnya berjudul “Tataplah”. Cool Colors menampilkan eksotisme maskulinitas ala Indonesia, yakni berkemeja sutra lembut dengan rambut panjang sebahu dipotong rapi. Ada usaha untuk menampilkan sisi lembut pria di dalam tampilan video mereka.

Pada satu dekade terakhir ini pengaruh maskulinitas Barat bergeser pada maskulinitas Asia, yakni Korea. Apakah itu terkait dengan kedekatan budaya Timur ataukah arus globalisasi? Krisna Sein dan David T. Hill (2000) menulis bahwa media massa di Indonesia, termasuk media elektronik seperti televisi, selalu terkait dan mendapat pengaruh dari dunia global tanpa batas. Penyebab utamanya adalah perkembangan teknologi digital.

Fakta yang menarik memang menunjukkan adanya perubahan maskulinitas yang signifikan dalam tampilan panggung depan para artis *boyband* Korea. Itu

kemudian menjadi imitasi bagi *boyband* yang ada di Indonesia, walaupun tidak secara keseluruhan. Untuk kasus di Indonesia hal itu menunjukkan bahwa maskulinitas tidaklah kaku sebagai konstruksi sosial yang tidak dapat diubah. Fenomena masuknya budaya dari luar maupun munculnya perubahan sosial di Indonesia memberikan dinamika yang cukup menarik dalam perkembangan kajian maskulinitas. Walaupun secara umum maskulinitas yang masih diterima sebagai *mainstream* adalah maskulinitas *macho*, perubahan maskulinitas pada pria metroseksual dan maskulinitas lembut pada *boyband* Korea ikut mewarnai dinamika maskulinitas dalam satu dekade ini.

Secara konseptual, perubahan makna maskulinitas tidak terjadi begitu saja. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut.

◆ Faktor Internal

- **Sikap**

Sikap berarti keadaan jiwa yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku.

- **Pengalaman dan Pengamatan**

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakan di masa lalu, dan dapat dipelajari. Melalui belajar, orang akan memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan membentuk pandangan terhadap suatu objek. Begitulah yang terjadi pada *fans* K-Pop. Pengalaman dan pengamatan yang terkait dengan K-Pop membuat mereka memiliki makna tersendiri tentang maskulinitas.

◆ Faktor Eksternal

- **Kelompok Referensi**

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok di mana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya dan saling berinteraksi. Sedangkan kelompok yang memberikan pengaruh tidak langsung adalah kelompok di

mana individu yang bersangkutan tidak menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapi individu pada perubahan makna atau pandangan terhadap sesuatu.

Dari faktor internal ini tampak bahwa sikap yang ditunjukkan oleh *fans* perempuan dalam menanggapi penyanyi pria Korea adalah antusias yang dalam. Penerimaan terhadap cita rasa baru dari penyanyi Korea baik secara teknik suara, tata panggung, tarian dan konstruksi maskulinitas yang juga baru memberikan warna dan eksistensi tersendiri bagi keberadaan penyanyi Korea. Walaupun popularisme terjadi juga pada penyanyi perempuan pada (*girlband*) Korea, akan tetapi dinamika *girlband* menunjukkan fenomena feminitas yang masih dalam lingkup perempuan, yakni mendambakan konstruksi boneka Barbie. Hal itu mempertegas konstruksi feminitas yang sudah ada sebelumnya.

Penerimaan *Fans* K-Pop terhadap *Soft Masculinity* *Boygroupp* K-Pop

Laki-laki berkaitan erat dengan maskulinitas. Definisi maskulinitas secara konseptual tumpang tindih dengan kedewasaan, identitas laki-laki, kejantanan, dan peran laki-laki (Tan, Shaw, Cheng, & Kim, 2013). Maskulinitas memiliki banyak tipe. Salah satunya adalah *Soft Masculinity*, yakni maskulinitas yang menunjukkan sisi lembut dari laki-laki yang dibangun secara sosial. *Boyband* K-Pop menunjukkan bagaimana sisi lembut laki-laki melalui simbol dan perilaku yang mereka lakukan. Sisi lembut tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian perempuan.

Soft Masculinity sering dikaitkan dengan penampilan yang feminin. Di Korea sendiri, *Soft Masculinity* sering disebut *kkonminam* yang merupakan gabungan dari kata bunga dan lelaki cantik. Secara luas, *kkonminam* merujuk pada *flower boys* yaitu lelaki yang memiliki tampilan cantik dan mempunyai kulit putih, rambut lembut, dan sikap feminin (Jung, 2011). Kata *Flower* dan *Boy* menunjukkan dua hal yang berbeda. *Flower* adalah identik dengan bunga yang menjadi identitas romantisme bagi perempuan. Sementara *Boy* adalah konstruksi identitas maskulin yang lambang kejantannya jauh dari identitas bunga. *Kkonminam* me-

nunjukkan penggabungan unsur maskulin dan feminin secara bersamaan. Maskulinitas yang demikian itu akan ditemukan pada konstruksi maskulinitas di Indonesia pada dekade di bawah tahun 2000-an.

Soft Masculinity bukan sekadar sisi lain dari laki-laki tetapi juga merupakan tipe maskulinitas baru yang berhasil mendekonstruksi makna maskulinitas menjadi lebih lembut. Pemikiran perempuan *fans* K-Pop semakin terbuka bahwa *soft masculinity* bukan berarti feminin, tetapi merupakan bentuk maskulinitas yang lebih lembut dari *macho* atau *hard masculinity*. Ada indikasi bahwa *soft masculinity* sebagai maskulinitas alternatif buatan artis pria Korea, yang dapat diterima dalam konsteks panggung. Apakah itu dapat menjadi realitas maskulinitas empirik yang terjadi di dalam masyarakat sehari-hari, kiranya masih menjadi fenomena yang harus diikuti lebih lanjut.

Meski *fans* perempuan kerap menerima *soft masculinity* yang ditampilkan oleh *boyband* K-Pop, tetapi ada indikasi bahwa mereka menolak bila ada laki-laki yang mengimitasi penampilan *boyband*, khususnya di Indonesia. Hasil pengamatan dan riset yang dilakukan oleh Sutiwi (2018) adalah bahwa *fans* perempuan tidak memperlakukan penampilan idolanya meski sangat menunjukkan *soft masculinity*. Menurut *fans* perempuan, bila laki-laki Indonesia mengimitasi penampilan *boyband* Korea, laki-laki tersebut justru terkesan “alay”. Hal tersebut berbanding terbalik ketika *boyband* K-Pop mewarnai rambutnya atau menggunakan *lip balm*, *fans* perempuan justru merasa biasa saja, dan tidak merasa aneh, karena menurut mereka itu semua memang cocok dengan kulit mereka yang mayoritas berkulit putih. Seperti pernyataan informan R, seorang remaja perempuan usia 18 tahun berikut ini.

Aku memang suka K-pop karena visualnya, tapi aku gak suka orang-orang yang coba niru-niru gitu, jatuhnya alay. Aku pun heran ha ha ha. Contohnya ini kayak ngecat rambut. Orang Korea kalau ngecat rambut merah, biru, coklat menurutku keren. Tapi kalau misalkan orang Indonesia la kek gitu, rang Korea kayak gitu menurutku gak alay, ya Allah alay menurutku. Ngak Cocok menurutku (wawancara Maret, Sutiwi, 2018:131)

Dalam hal ini terjadi ambiguitas minat *fans boyband* K-Pop. Ambiguitas yang dimaksud di sini terkait dengan kesukaan mereka dengan idol K-pop itu

sendiri. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya salah satu daya tarik K-Pop adalah visual yang tampan. Tetapi ketika seseorang yang bukan orang Korea mencoba mengimitasi visual dan *fashion* K-Pop, maka para *fans* menolaknya. Hal itu menunjukkan seolah identitas *Soft Masculinity* menjadi wilayah bagi pria Korea saja. Itu merupakan suatu keunikan tersendiri yang mana tidak terjadi ketika penampilan pria Barat seperti David Beckham ditiru pria Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *fans boyband* K-Pop memberikan ruang yang cukup bagi artis K-Pop untuk berselancar di dalam *Soft Masculinity* (Maskulinitas Lembut). *Soft Masculinity* lalu menjadi pertanyaan ketika diterapkan pada *boyband* di Indonesia seperti SMASH yang merupakan singkatan dari *Seven Mens as Super Hero*. Selama ini *hero* identik dengan maskulinitas laki-laki dalam konstruksi tangguh, kuat, dan berlawanan dengan kata-kata bermakna lembut. Kata lembut menjadi hal yang penting di sini karena terkait dan bertentangan dengan konstruksi maskulinitas yang penuh dengan citra keras, kasar, tangguh, berpetualang. Kata lembut menjadi konstruksi feminitas, dan identik dengan konstruksi perempuan. Secara konseptual, kata *soft* dan *hero* merupakan dua kata yang berposisi biner. *Boyband* Smash tidak tampil dengan konstruksi maskulinitas *macho*. Hal itu menjadi realitas yang ada dalam perkembangan dinamika maskulinitas pada konteks penyanyi *boyband* K-Pop.

Hegemoni Maskulinitas dalam Kajian *Boyband* K-Pop

Merujuk pada Ronald F. Levant, nilai maskulinitas lokal didefinisikan sebagai “*avoidance of femininity; restricted emotions; sex disconnected from intimacy; pursuit of achievement and status; self-reliance; strength and aggression; and homophobia*”. Itu memang masih menjadi patron bagi kebanyakan pria di Indonesia. Connell berpendapat bahwa kekuatan global yang menentang identitas dan kekuasaan laki-laki sering menyebabkan orang untuk “menegaskan kembali ortodoksi gender setempat dan hirarki” (Derne, 2002:144).

Di dalam wacana media internasional, studi tentang maskulinitas masih banyak terpusat pada konsep maskulinitas Barat. Maskulinitas non-Barat, ter-

masuk maskulinitas Indonesia, masih belum banyak dibahas. Oleh karena itu, pemahaman tentang maskulinitas di Indonesia pun masih banyak berpijak pada pemahaman Barat. Seorang akademisi yang banyak meneliti isu-isu maskulinitas, Michael Kimmel, menegaskan bahwa praktik gender di dalam masyarakat Barat menunjukkan norma-norma femininitas dan maskulinitas yang berbeda dengan masyarakat non-Barat (Kimmel, 2000).

Konsep hegemoni maskulinitas, selain telah mempengaruhi studi gender di berbagai bidang akademis juga telah mengundang kritik yang serius. Para penulis menelusuri asal-usul konsep dalam suatu konvergensi ide pada awal tahun 1980-an dan memetakan cara diterapkannya konsep tersebut ketika penelitian mengenai laki-laki dan maskulinitas diperluas. Mengevaluasi kritik utama, penulis mempertahankan konsep yang mendasari maskulinitas, yang pada sebagian besar penggunaan penelitian bukan reifikasi maupun esensialis.

Penampilan group *boyband* K-Pop yang menyajikan konstruksi *soft masculinity* menunjukkan suatu perbedaan besar dengan hegemoni maskulinitas *macho* yang mendominasi perkembangan maskulinitas di dunia. Perkembangan maskulinitas pada pria metroseksual yang berkembang pada tahun 2000-an di Eropa memberikan konstruksi yang berbeda dengan *soft masculinity* yang ditampilkan oleh *boyband* K-Pop. Kelihatannya penyanyi pria Korea berani menampilkan *soft masculinity* ataupun maskulinitas alternatif yang mendobrak pakem maskulinitas hegemoni dalam konstruksi pria *macho* dan pria metroseksual.

Secara fakta, fenomena band K-Pop menunjukkan dinamika maskulinitas yang terjadi pada konstruksi dari hegemoni maskulinitas yang selama ini ada. Hal itu menjadi wacana konstruksi baru ataupun alternatif dari konstruksi maskulinitas yang ada. Apakah itu hanya sampai di panggung ataukah menjadi keseharian dalam interaksi sehari-hari? Hal yang dapat dilihat adalah bahwa hegemoni maskulinitas Barat mengalami pergeseran dengan *soft masculinity*. Di era posmodern dengan spirit *anything goes*, maka semuanya memberikan warna bersama dengan masuknya maskulinitas yang seolah melanggar pakem yang ada. Tentu itu memerlukan telaah lebih lanjut. Apakah *soft masculinity* semakin menampakkan eksistensinya, ataupun sekadar perubahan sosial sesaat sesuai tren globalisasi yang ada.

Referensi

- Connel, R.W. dan James W. Messersmidt. “Hegemoni Maskulinitas; Memikirkan Kembali Sebuah Konsep”. Dikutip dari http://www.lakilakibaru.or.id/wp-content/uploads/2014/09/HEGEMONIC-MASCULINITY_RW-Connel.pdf. Diakses 11 Oktober 2014.
- Jung, Sun. 2011. *Korean Masculinities and Transcultural Consumption*. Hongkong: Hong Kong University Press.
- Kartika, Sekar Hayu dan Yudha Wirawanda. 2019. “Maskulinitas dan Perempuan: Resepsi Perempuan terhadap Soft Masculinity dalam Variety Show”. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 1 Nomor 1, Februari 2019:23–41. Diakses 3 Juni 2019. <https://journal.uc.ac.id/index.php/calathu/article/download/774/670>.
- Pilcher, Jane dan Whelehan, Imelda. 2017. *Key Concept in Gender Studies 2nd Edition*. London: SAGE Publications
- Purnamasari, Deti Mega. 2019. “Makin Populer, Tahun 2018 Ada 89 Juta Penggemar Korea di Seluruh Dunia”. *Jawa Pos*. Diakses 5 Juni 2019. <https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/13/01/2019/makin-populer-tahun-2018-ada-89-juta-penggemar-korea-di-seluruh-dunia/>.
- Setiawan, Teguh. 2012. “Amerikanisasi, Japanisasi dan Gelombang Korea”. *Republika*. 3 Juni 2019.
- Sutiwi, Agus. 2018. “Gaya hidup Komunitas Korean Pop ARMY di Kota Medan (Studi Deskriptif pada Komunitas Army Medan)”. *Skripsi* tidak diterbitkan.
- Tan, Y., Shaw, P., Cheng, H., & Kim, K. K. 2013. *The Construction of Masculinity: A Cross Cultural Analysis of Men’s Lifestyle Magazine Advertisements*. *Sex Roles* 69:237–249. Springer Science+Business Media New York.
- Zahida, Ana. 2012. *Representasi Maskulinitas New Man BoyBand Indonesia dalam Video Musik*. Yogyakarta: Program Studi Kajian Budaya dan Media, UGM, tidak diterbitkan.



Memahami Generasi Z Melalui Etnografi Virtual

*Diah Ajeng Purwani
& Rama Kertamukti*



Pengantar

Dalam sebuah percakapan melalui Instagram pada kolom komentar di salah satu akun seorang dosen, seorang mahasiswa yang mengikuti akun dosen tersebut memberikan komentar pada foto *selfie* yang diunggah dengan kalimat yang sangat santai. “*Yungalah ayunee...*”, ada juga mahasiswa yang lain berkomentar, “*eseme manis mbak...*”, “*soale dosene ayu...*”, “*Syukaaaa* 👍👍👍”. Dosen yang diberikan komentar tersebut memberikan balasan dengan santai, “*suwun yaa...*”, “*Yungalah suwun mbak...*”. Percakapan di Instagram antara dosen dan mahasiswa itu tidak menjadi masalah bila sang dosen tidak membahasnya setelah membalas komentar, akan tetapi ia membahasnya ketika meminta pendapat pada sesama dosen lainnya. Ia beranggapan bahwa mahasiswa sekarang “*bebas banget*” ketika berkomunikasi dengan dosennya di ruang virtual. Percakapan itu sebenarnya mewakili sang dosen yang berbeda generasi dengan mahasiswanya. Mahasiswanya yang kelahiran 2000-an dan sang dosen kelahiran 1981. Interaksi kedua generasi tersebut dapat disebut sebagai pertemuan generasi Z dan Y. Pada 2012, Bruce Horowitz mengenalkan Generasi Z, dengan rentang umur yang

dipakai mendeskripsikan generasi Z adalah anak-anak yang lahir 1995 hingga 2014 (Horovitz, 2012). Sedangkan generasi yang dosen dalam karakter generasi Y, kelompok manusia yang lahir di atas tahun 1980-an hingga 1997. Generasi Y ini menyukai hidup seimbang. Mereka pekerja keras tapi tetap mementingkan “*me time*”. Generasi Y dikenal dapat diandalkan dalam hal kedisiplinan dan soal pemanfaatan teknologi (*tech-savy*). Dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut, generasi Y punya kepercayaan diri yang baik dan tetap menjunjung tinggi kritik dan saran dari orang lain. Sedangkan, generasi Z berkarakter sudah menikmati keajaiban teknologi usai kelahiran internet dalam segala aktivitas kehidupannya (Huntley, 2006:9). Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang di generasi ini, membuat mereka sangat bergantung pada teknologi, gawai, dan aktivitas di media sosial. Bahkan mereka lebih memprioritaskan popularitas, jumlah *followers* dan *like* (Seemiller & Grace, 2019:2). Ranah Sosiologi terus mengembangkan metode untuk menangkap teknologi komunikasi yang selalu memungkinkan adanya transformasi budaya dari konvensional ke ranah digital, dan ranah ini menciptakan budayanya sendiri. Identitas seseorang yang dahulu merupakan cerminan diri atas keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Di dalam dunia teknologi komunikasi yang dimunculkan dalam media sosial, identitas dapat dibuat oleh seseorang dengan sekenanya yang disebut identitas virtual. Seperti halnya ruang perbedaan karakteristik yang paling signifikan antara generasi X, Y dan Z dalam mengakses teknologi media bertumpu pada ranah digital. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir kala mana akses terhadap internet sudah menjadi budaya global, sehingga berpengaruh terhadap nilai dan pandangan tujuan hidup mereka. Di kala itu generasi Z biasanya menyukai sesuatu yang *out of the box*, cenderung *overconfidence*, berani mengungkapkan pendapat, baik langsung ataupun lewat media sosial. Para pengajar Sosiologi menangkap itu sebagai realitas yang perlu diperhatikan dan menjadi kenyataan aktual. Bahkan, ruang sosial yang ada di dalam dunia nyata kini dapat ditemui di dalam dunia digital dan mempengaruhi kehidupan sosial di kenyataan dalam ruang individu, kelompok, dan masyarakat. Dunia digital menciptakan perubahan yang substantif dalam sistem interaksi antarindividu yang dimediasi teknologi seperti *smartphone* yang cukup menghilangkan batas-batas identitas dalam konsep lama itu sendiri. Kelas-kelas sosiologi telah

menyadari bahwa dunia digital telah melahirkan model komunitas yang baru yaitu *imaginary community* (Hepp and Krotz, 2014:170), yang perlu dipahami dengan metode memahami tersendiri. Ruang *imaginary community* melahirkan *social sharing*, *social solidarity*, *imaginary place* yang sebenarnya hanya bermukim di dalam ruang *byte-byte* komputer.

Jejak Generasi Z

Memahami generasi Z dapat dilakukan dengan kita membuka konstruksi identitas yang sering mereka bangun di media sosial yang mereka gunakan. Media sosial menjadi ruang perayaan kebebasan mereka terhadap dunia yang mereka hadapi. Riset Tirto.ID terhadap 1.201 responden dengan rentang usia 7–21 tahun di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan Denpasar di pertengahan 2017 menghasilkan data bahwa 35,2% percaya dengan informasi yang dibagikan di media sosial, dan akses internet rata-rata 5 jam perhari. Karakter mereka menurut riset Tirto.ID, adalah bahwa generasi Z lebih individual, lebih terbuka dalam pemikiran, dan lebih suka berkomunikasi dengan koneksi internet (*intuitive digital*). Komunikasi dosen dengan mahasiswa di ruang media sosial mengalami *perception gaps* komunikasi yang salah. Generasi Y sang dosen masih memperhatikan ruang nyata-*offline* dalam membentuk komunikasi, sedangkan generasi Z tidak perlu berbasa-basi dalam mengungkapkan perasaan di media sosial. Di dalam buku tentang generasi Z yang ditulis Jonah Stillman diterangkan bahwa generasi Z memiliki karakteristik sendiri dalam memahami dunianya yang dapat dimunculkan atau diungkapkan oleh mereka di media sosial yang mereka miliki.

Tujuh karakteristik generasi Z yang paling dominan menurut Jonah Stillman (Stillman and Stillman, 2018:18) adalah: **Figital**, yakni bahwa ketika lahir, generasi Z melihat dunia dengan segala kemajuan teknologinya. Mereka hidup di dunia baru di mana kemajuan teknologi yang sangat pesat, penghalang antara fisik dan digital sudah dihilangkan. Generasi Z hadir di lingkungan kerja dengan sesuatu hal yang baru yang tidak terjadi pada generasi sebelumnya. Generasi Z akan memadukan sisi fisik dan digital dengan cara mengkonsumsi, hidup, dan bekerja. Generasi Z menganggap bahwa penerapan figital sebagai

solusi dalam meningkatkan budaya organisasi. Meskipun serba digital, tapi jangan meremehkan nilai dan etika mereka, karena hampir keseluruhan mereka menyukai atasan atau rekan kerja dengan tatap muka secara langsung. **Hiper-Kustomisasi:** Generasi Z selalu berusaha untuk menyesuaikan identitas mereka dan melakukan kustomisasi agar dikenal dunia. Kemampuan mereka untuk mengustomisasi segala sesuatu menimbulkan ekspektasi bahwa perilaku dan keinginan mereka sudah sangat akrab untuk dapat dipahami. Nama jabatan, jalur karier, salah satunya. Hal ini memunculkan tekanan yang cukup sulit bagi dunia kerja yang notabene terfokus untuk bersikap adil dan memberikan perlakuan sama bagi semua orang. **Realistis:** Generasi Z sudah mengalami masa krisis berat sejak dini kala mana hal ini membentuk pola pikir pragmatis dalam merencanakan dan mempersiapkan masa depan. Di lingkungan kerja, hal itu menciptakan kesenjangan yang cukup lebar antara milenial yang idealis duduk sebagai manajer garis depan. Dengan sifat tersebut, lebih baik selalu bersikap realistis terhadap apa saja yang perlu dilakukan oleh generasi Z untuk bertahan atau bahkan terus maju. **Fomo:** mungkin tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah ini. Bangun tidur cek *smartphone* untuk *update* terkini, misalnya. Generasi Z termasuk orang yang sangat takut ketinggalan informasi. Mereka selalu menjadi yang terdepan dalam tren dan kompetisi. Namun, kabar buruknya, mereka selalu khawatir jika mereka bergerak kurang cepat dan tidak menuju arah yang benar. Dunia kerja akan tertantang oleh generasi Z yang selalu ingin memastikan mereka tidak ketinggalan. Sehingga memanfaatkan kemampuan generasi Z dalam “mengintip” dan gunakan kemampuan oleh generasi Z dalam mengambil risiko di lingkungan kerja. **Weconomist:** Gojek hingga Airbnb sebagai salah satu contoh bahwa generasi Z hanya mengenal dunia dengan ekonomi berbagi. Generasi Z menekan kantor untuk memilah bagian-bagian internal dan eksternal guna mendayagunakan perusahaan dengan cara-cara baru yang praktis dan hemat biaya. **Do it yourself.** Mungkin sebagian dari kita juga percaya dengan *do-it-yourself* atau lakukan sendiri dapat mempermudah segala urusan menjadi lebih cepat dan baik. Sama halnya dengan generasi Z yang tumbuh dengan dunia internet khususnya *youtube* yang dapat mengajari mereka melakukan apa saja. Generasi Z sangat mandiri dan akan berbenturan dengan budaya kolektif yang sebelumnya diperjuangkan oleh generasi milenial. Generasi Z percaya dengan pernyataan, “*Jika ingin melakukannya dengan benar, lakukanlah*

sendiri”. Dan karakteristik terakhir adalah **Terpacu**. Generasi Z meyakini adanya pemenang dan pecundang. Resesi yang membuat pendahulu mereka goyah serta laju perubahan yang sulit dikejar, tidak mengherankan jika Generasi Z menjadi generasi yang terpacu. Generasi Z siap dan giat dalam berkompetisi, dan ini tidak dimiliki generasi Y ataupun yang terdahulu yaitu hidup yang ‘sangat digital’. Bagi generasi sebelumnya seperti generasi Y sumber informasinya dari televisi, kedua dari *search engine*, baru yang terakhir media sosial. Kalau generasi Z sebaliknya, dari media sosial, televisi, baru *search engine*. Generasi Z kadang tidak menyukai membaca koran, majalah, kurang *menonton* televisi, dan mudah mengadopsi tren yang ada di dunia. Fenomena itu disebabkan oleh akses internet yang sangat mudah. Aktivitas di media sosial menyebabkan generasi Z menjadi sosok yang *creator* mudah dalam membuat konten tertentu di blog, situs *web*, ataupun akun YouTube dan juga *conversationalist* generasi yang lebih senang menggunakan media sosial untuk bercakap-cakap.

Etnografi Virtual sebagai Metode Memahami *Way of Life* Generasi Z

Etnografi sebagai metode penelitian dalam melihat *way of life* individu ataupun masyarakat dapat menjadi *tools bagi* generasi Y untuk lebih memahami apa yang dialami dan diinginkan generasi Z. Etnografi modern tidak hanya *informan oriented*, metode ini dapat lebih menelisik dan menguraikan tindakan yang dialami *life* individu ataupun masyarakat. Etnografi ingin lebih menggali pandangan hidup sesuai dengan sudut pandangan *life* individu ataupun masyarakat, mengangkat fenomena praktik-praktik tindakan yang dilakukan *life* individu ataupun masyarakat yang kemudian akan ditemukan makna dari tindakan individu ataupun masyarakat yang diekspresikan melalui apa saja. Penelitian etnografi yang dapat dilakukan untuk memahami generasi Z yang selalu bersentuhan dengan internet, dan sangat bergantung pada teknologi, gawai, dan aktivitas di media sosial adalah etnografi virtual. Etnografi virtual menurut Christine Hine, berupaya mengeksplorasi lebih dalam tentang interaksi objek yang terjadi di dunia virtual. Dalam istilah sederhana, etnografi virtual adalah proses melakukan dan membangun etnografi menggunakan lingkungan

virtual online sebagai lokasi penelitian. Etnografi virtual biasanya dilakukan di situs, *chatroom*, forum *online* dan media sosial, di mana peneliti tidak secara fisik hadir. Virtual tersebut diartikan sebagai yang tidak berwujud dan membawa konotasi pada tidak sepenuhnya hal yang nyata (Hine, 2000:11). Hal itu dapat diartikan sebagai pengamatan aktivitas individu yang berada di dunia *online* yang tidak di dunia nyata. Etnografi virtual mengadopsi model observasi partisipan yang digunakan etnografi. Perbedaannya adalah observasi partisipan dilakukan di lingkungan virtual. Selain etnografi virtual dikenal juga konsep kajian etnografi *online* seperti netnografi dan dunia virtual dari Boellstorff (Boellstorff *et al.*, 2012), karena etnografi virtual tidak menjelaskan secara detail tahap penerapan metode sehingga menyulitkan peneliti untuk mengkaji dalam melakukan penelitian. Sedangkan netnografi dari Kozinets (2010) menjelaskan tahapan prosedur metodologis studi netnografi secara rinci, yang juga digunakan dalam penelitian ini. Tujuan menggunakan etnografi virtual adalah untuk menggambarkan kehidupan dan pengalaman-pengalaman subjek penelitian, sehingga dapat mengetahui esensi dari makna *privacy* bagi pengguna, dan memungkinkan tergalinya data dan fakta yang lebih mendalam serta fenomena komunikasi yang terjadi di dalam ruang virtual. Etnografi virtual diartikan sebagai proses mengkonstruksi sebuah penelitian etnografi menggunakan produk virtual, dengan lingkungan maya sebagai lingkup penelitiannya. Hanya saja etnografi virtual menggunakan cara dan peralatan yang berbeda dengan etnografi tradisional perihal mengumpulkan data.

Etnografi virtual dapat memahami bagaimana media sosial membawa perubahan pada kepercayaan (*belief*), nilai (*values*), dan sikap (*attitudes*). Seperti yang diungkap Samovar L.A. & Porter R.E. (Samovar, Porter, McDaniel & Roy, 2007:194) bahwa media sosial mengubah cara pandang tradisional yang berubah menjadi cara pandang yang menyesuaikan zaman yang seringkali hal inilah yang sering mengakibatkan *culture shock*. Media sosial dapat menciptakan organisasi sosial yang dibentuk di media sosial yang tidak lagi bersifat resmi dan terikat seperti di dunia nyata. Seorang anggota organisasi sosial dapat sangat aktif maupun pasif, tidak ada keterikatan dan rasa tanggung jawab seperti pada dunia nyata. Tetapi justru hal inilah yang membuat sebagian besar masyarakat merasa tertarik untuk bergabung dengan organisasi pada media sosial. Hal-hal

ini menarik untuk dapat dipahami oleh generasi sebelumnya untuk memahami generasi Z yang begitu lekatnya dengan media sosial. *Human nature* seringkali diungkapkan melalui “status” yang sering menunjukkan tabiat narsis, egosentris, ingin merasa lebih dari yang lain dan ingin menonjolkan kelebihan diri sendiri. Banyak juga yang terlihat berusaha membuka kekurangan dan memojokkan orang lain. Generasi Z juga menggunakan media sosial untuk membuka orientasi kegiatan mereka dengan tujuan pamer, atau membangun citra diri. Membangun persepsi tentang diri sendiri dan orang lain (*perception on self and others*), pengguna media sosial berusaha membangun konsep diri mereka sendiri dengan menuliskan status pada laman media sosial mereka. Mengekspos diri sendiri untuk mendapat perhatian orang lain, misalnya dengan mengunggah (*upload*) foto untuk berlomba mendapatkan “like” dari orang lain. Semua itu merupakan kegiatan yang dilakukan generasi Z, yang dapat dibaca melalui metode etnografi virtual.

Penelitian di ruang media sosial memerlukan metode kualitatif yang khusus karena banyaknya kekhasan dalam media sosial yang membedakannya dengan praktik di ruang *offline*. Teknologi ruang siber mempunyai konsekuensi tersendiri. Di dalam ruang siber seseorang dimungkinkan untuk mempraktikkan budaya lama dengan cara-cara baru. Ruang media sosial sebagai sebuah bagian dari konteks budaya juga memungkinkan untuk dikaji dengan menggunakan etnografi. Dengan etnografi maka peneliti dapat melihat suatu wacana dari sudut pandang subjek yang diteliti (Saukko, 2003:57). Etnografi juga akan berusaha melihat secara lebih luas mengenai realitas subjek yang dikaji. Etnografi dapat memberikan cara pandang baru mengenai pelabelan praktik budaya sesuatu, misalnya mengenai konsep resistensi (Saukko, 2003:56). Di lingkungan yang dimediasi secara teknologis maka diri, *other*, dan struktur sosial sesungguhnya terbentuk melalui interaksi, yang dinegosiasikan secara bersama-sama dengan orang lain. Sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi dapat memediasi identitas diri dengan relasi-relasi sosial, seyogianya mengalihkan kita pada perhatian epistemologis. Entah melakukan penelitian terhadap kebudayaan fisik atau *online* ataukah tidak, teknologi komunikasi yang baru ternyata menekankan ciri-ciri dialogis realitas sosial, dengan mengkaji ulang berbagai asumsi tradisional dan kategori penelitian sosial yang sebelumnya diterima bulat-bulat. Markham

bahkan menyebutkan: “*The researcher has to conduct a multi-layered investigation of self and others while also collecting statistical and other kinds of data as are relevant to the particular context being examined*” (Markham & Baym, 2009:67). Konstruksi diri, *other*, dan struktur sosial yang dimediasi komputer menjadi sebuah fenomena unik. Di dalam dunia *online*, konstruksi identitas merupakan sebuah proses yang harus dirintis secara lebih sengaja atau sadar. Ketika *offline*, tubuh dapat berjalan-jalan dan direspons oleh orang lain, yang memberikan kacamata bagi kita untuk mengetahui diri atau *self*. Tetapi ketika *online*, langkah pertama menuju eksistensi atau agar dikenali adalah penciptaan diskursus, entah dalam bentuk kata-kata, gambar grafis, ataukah suara (Markham & Baym, 2011:165). Di dalam sebagian besar lingkungan yang dimediasi komputer, proses tersebut membutuhkan pertukaran informasi yang lebih sadar karena manusia tidak hadir bersama di dalam ruang fisik yang sama, sedangkan sebagian besar aspek-aspek nonverbal proses tersebut hilang. Prosesnya rumit dan kabur karena kita lazimnya mendapatkan pengetahuan tentang diri secara otomatis tanpa banyak mempertimbangkan proses sosial dan interaksi yang menjadi alat untuk merundingkan diri dengan *other* di dalam konteks. Teks dipandang sebagai sarana yang ampuh untuk mengontrol, melalui penyuntingan dan penghapusan mundur, cara mempresentasikan diri kepada *other*. Teks sangat penting bagi pemahaman peneliti tentang *persona online* (Denzim & Lincoln, 2011:166).

Dalam konteks dunia siber, yang diteliti adalah ruang-ruang di dalamnya. Peneliti akan memakai metode etnografi virtual. Pendekatan etnografi virtual akan dilakukan karena objek penelitian ini di dalam ruang siber, sehingga cukup dapat memahami cara subjek berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena yang teramati dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keseharian maupun dalam penggunaan instagram. Penelitian etnografi di internet yang menjadi persoalan adalah interaksi peneliti dengan subjek (Hine, 2000:43–57). Dalam etnografi keberadaan peneliti, subjek penelitian, dan lokasi penelitian itu hadir dalam bentuknya yang nyata. Ada tempat yang bisa dikunjungi secara nyata sesuai dengan laporan hasil penelitian. Juga, berdasarkan hasil penelitian tersebut, orang-orang yang menjadi subjek atau informan yang memberikan pernyataan atau yang diamati dapat ditemui. Melakukan penelitian etnografi di lapangan berarti etnografer berada pada posisi simetris dengan subjek yang

diteliti. Pengertian simetris di sini adalah antara peneliti dan subjek berada dalam pola komunikasi yang sama, memiliki pemahaman yang sama, keduanya saling bertatap muka dan mengenal-memperkenalkan diri, dan data yang dihasilkan juga berdasarkan konteks yang dipahami antara keduanya.

Tahapan Memahami Generasi Z Lewat Etnografi Virtual

Memahami generasi Z dapat dilakukan lewat unggahan-unggahan mereka di media sosial, dengan cara menganalisa unggahan-unggahan di ruang media sosial karena konstruksi diri, *liyan*, dan struktur sosial yang dimediasi komputer menjadi sebuah fenomena yang unik bagi penelitian (Markham, 2011:165). Tahapan analisis dilakukan dengan:

“In ethnography... you learn something (collect some data), then you try to make sense out of it (analysis), then you go back and see if the interpretation make sense in light of new experience (collect more data), then you refine your interpretation (more analysis), and so on. The process is dialectic, not linear. Such a simple statement, so important in capturing a key aspect of doing ethnography.”

Dunia siber memberikan aktivitas lain pada diri manusia, model kehidupan yang dimediasi teknologi mengalihkan kehidupan nyata ke dalam berbagai bentuk *artificial* di media sosial. Pemahaman beridentitas berubah di dalam ruang siber, bagaimana menjalani dan memaknai hidup. Segala tindakan sosial di dalam dunia siber tidak ada yang mengatur, mengontrol, seakan-akan apa pun boleh (*anything goes*) (Piliang, 2012). Pelukisan kembali realitas, yang tidak dapat dihadirkan di dalam ruang padat menjadi pilihan untuk tetap mempertahankan keberadaan subjek di media sosial. Di dalam ruang padat kita terkontrol oleh aturan pimpinan, konvensi sosial (adat, tabu, hukum, aturan main dan peranan lembaga hukum sebagai regulator), tetapi di dalam dunia siber kata “kontrol” menjadi sesuatu yang bermakna lebih sempit karena kontrol biasanya berlaku hanya pada satu aplikasi, atau menginginkan aturan seperti apa yang diinginkan pengembang aplikasi seperti di Instagram, bila ada unggahan yang tidak disukai pengembang Instagram maka unggahan tersebut akan di-*banned* atau diblokir. Pengembang membuat kontrol atau aturan main yang berlaku secara sepihak, seperti berapa jumlah minimal *byte* suatu foto yang dapat diunggah, berapa kata

yang bisa dituliskan, berapa banyak pertemanan yang bisa kita *approved* dan lain-lain. Bahkan pengembang aplikasi dapat mematikan aplikasi yang dibuatnya walau yang menggunakan banyak sekali mencapai jutaan pengguna. Media sosial melakukan mediatisasi kehadiran diri di dalam dunia siber. Cara kerja yang dilakukan dengan subjek dapat mengunggah kata-kata, visual, gambar, maupun bunyi dengan berdasarkan prinsip kesamaan, keserupaan, dan ikonitas, “*a set of rules or codes which determine a user’s behavior in, and interaction with, virtual spaces. She brings together a range of cross-disciplinary debates, and begins to identify current and future implications for interactivity, autonomy, and the construction of Second Lives*” (Astrid & Eben, 2011:5). Media sosial menghadirkan ruang baru dalam budaya manusia, cara kita bergaul dengan sesama dan memandang diri kita sebagai identitas yang akan senantiasa digerakkan oleh dunia maya di sekeliling generasi Z.

Secara aplikatif, metode etnografi virtual tidak begitu berbeda jauh dengan penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan atau metode etnografi pada umumnya. Mulai dari teknik pengumpulan data hingga analisis yang digunakan, semuanya bergantung pada kebutuhan dan persoalan penelitian yang akan diteliti (Hine, 2000:12). Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan konsep dari Boellstorff (Boellstorff *et al.*, 2012:68), yaitu:

Data Collection

- a. Observasi Partisipan (*online*), dilakukan secara *online*, peneliti ikut bergabung di dalam Instagram, dan ikut aktif dalam dinamika Instagram. Menyangkut hal ini, peneliti ikut andil dalam *mem-posting* momen-momen, peneliti juga ikut memperhatikan *posting-an* pengguna yang berbentuk teks/tulisan, visual ataupun audiovisual dan peneliti juga ikut aktif dalam menyampaikan *feedback* dari *posting-an* subjek penelitian, misalnya memberikan *emoticon* atau komentar. Ada dua maksud yang dapat disampaikan dalam observasi partisipan secara *online* ini, yaitu: *pertama*, mengamati secara langsung perkembangan subjek penelitian secara *online*, termasuk juga dinamika atau isu, tema yang dibicarakan. *Kedua*, mengamati dan mencermati bahasa verbal dan non verbal yang

digunakan dalam mem-*posting* momen di internet. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan peneliti dalam melakukan observasi secara *online*. Peneliti mempersiapkan diri, memiliki koneksi internet yang bagus dan perangkat/*device* yang mendukung, peneliti harus memperhatikan performanya dalam menampilkan diri di Instagram dan kehadiran peneliti juga menjadi hal yang penting karena berpengaruh saat melakukan tahap wawancara.

- b. *Interviu (online)*, dilakukan secara *online*. Pada tahap ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan pengguna Instagram. *Interviu* ini bertujuan untuk mengidentifikasi pada saat observasi partisipan. *Observasi partisipan* sangat membantu untuk meringkaskan proses *interview*. Adanya hubungan kedekatan dengan informan yang terjalin melalui *observasi partisipan* akan membentuk adanya kejujuran dan keterbukaan dari jawaban hasil *interview* dengan informan dan *interview* juga akan memberikan kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih dalam.

Other Data Collection

- a. *Observasi partisipan (offline)*. Pengamatan secara *offline* digunakan peneliti untuk lebih memahami karakter individu ketika berada di dunia nyata, apakah sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dunia *online* ataukah sebaliknya. *Observasi partisipan offline* ini sudah dilakukan peneliti ketika ikut bergabung dengan beberapa informan.
- b. *Face to face interviews (offline)*. Peneliti dan informan akan bertemu tatap muka langsung sambil melakukan *interview*. *Face to face interview* ini dilakukan untuk memperdalam *online interview*. *Face to face interview* juga dilakukan untuk memahami hubungan antara apa yang informan katakan dan lakukan. Pola *online interview* dan *face to face interview* merupakan pola yang harus dilakukan peneliti etnografi virtual, untuk mencegah bias informasi dan ketidakpastian validasi data.
- c. *Diary routine*. Tujuan menggunakan *diary routine* ini adalah agar memudahkan peneliti untuk melihat momen-momen yang di-*upload* oleh informan. Selain itu, *dairy routine* membantu menjelaskan rutinitas informan

penelitian dan interaksi yang terjalin dalam postingan. Lebih jauh, *dairy routine* membantu peneliti untuk mempelajari jenis-jenis informasi yang ditampilkan dan melihat emosi-emosi apa saja yang ditampilkan informan penelitian saat mem-*posting* sebuah momen. Data yang dihasilkan pada tahap ini berupa teks seperti tulisan status dan visual seperti foto.

- d. *Screenshot*, dapat menjadi aspek penting dari pengumpulan data. *Screenshot* ini berupa *posting*-an momen-momen yang diunggah oleh informan. *Screenshot* diperlukan sebagai bentuk representasi dari aspek budaya dan mengandung simbol-simbol yang memiliki arti. Data ini dapat membantu menggambarkan sebuah pengamatan atau menunjukkan penampilan dari budaya yang dipelajari. Sebuah *screenshot* dapat memberikan ringkasan instan dari aktivitas informan ketika berada di Instagram, membantu untuk mengingatkan pola gerakan dan detail visual. Data ini juga dapat digunakan untuk memberikan analisis visual dari penjelasan fenomena yang terjadi.
- e. Studi Pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini akan diperoleh dari buku, jurnal-jurnal dan artikel internet.

Dengan menggunakan etnografi virtual dalam memahami tindakan-tindakan yang dilakukan generasi Z, kita dapat melihat adanya proses *interplay* antara diri, *other*, dan struktur sosial yang sesungguhnya terbentuk melalui interaksi melalui aktivitas di media sosial yang mereka gunakan di mana individu membangun pemaknaan atas dirinya berdasarkan apa yang orang lain tafsirkan (*looking glass self*). Etnografi virtual dapat mengungkapkan bagaimana generasi Z melakukan konstruksi atas diri mereka dengan cara menampilkan diri (*self performance*), yang pada dasarnya dibentuk atau untuk memenuhi keinginan *other* lingkungan sosial juga, bukan berasal dari diri dan bukan pula diciptakan oleh individu itu sendiri.

Referensi

- Boellstorff, T. *et al.* 2012. *Ethnography and virtual worlds: A handbook of method, Journal of Broadcasting and Electronic Media*. New Jersey: Princenton University Press. doi: 10.1080/08838159609364336.

- Denzim, N.K. and Lincoln, Y.S. 2011. *The Sage Handbook Qualitative Research 2*. California: SAGE Publications.
- Ensslin, A. and E. Muse .2011. *Creating Second Lives: Community, Identity and Spatiality as Constructions of the Virtual*. New York: Routledge.
- Hepp, A. and F. Krotz. 2014. *Mediatized Worlds*. London: Palgrave Macmillan.
- Hine, C. 2000. *Virtual Ethnography*. doi: 10.4135/9780857020277.
- Horovitz, B. .2012. “After Gen X, Millennials, What Should Next Generation Be?” *USA Today*. Available at: <http://usatoday30.usatoday.com/money/advertising/story/2012-05-03/naming-the-next-generation/54737518/1>.
- Huntley, R. 2006. *The World According to Y: Inside New Adult Generation*. New South Wales: Allen and Unwin.
- Kozinets, R.V. 2010. *Netnography: Doing ethnographic research online*, *International Journal of Advertising*. doi: 10.2501/S026504871020118X.
- Markham, A.N. 2011. “Metode, Politik, dan Etika Representasi dalam Etnografi Online”, in *The Sage Handbook of Qualitative Research 2*. 1st edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, pp. 165–193.
- Markham, A.N. and Baym, N.K. 2009. *Internet Inquiry*. Singapore.
- Piliang, Y.A. 2012. ‘Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial’, *Jurnal Sosioteknologi*, 27(11), pp. 143–156.
- Samovar, L.A. et al. 2007. *Communication Between Cultures*. 8th edn. Boston: Monica Eckman.
- Saukko, P. 2003. *Doing Research in Cultural Studies*. London: SAGE Publications.
- Seemiller, C. and Grace, M. .2019. *Generation Z*. London: Routledge.
- Stillman, D. and Stillman, J. (2018) *Generasi Z: Memahami Karakter Generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



Perempuan di Pusaran Teknologi Digital

Sri Peni Wastutiningsih



Latar Belakang

Kehidupan manusia akan terus berjalan sesuai dengan zamannya. Perubahan zaman yang sedemikian cepat kadang tidak terasa dan tidak bisa dihindari. Seseorang akan mengikuti atau tidak sebetulnya adalah pilihan. Demikian juga insan perempuan. Kaum perempuan akan mengikuti perkembangan zaman atau tidak sebetulnya adalah pilihan, namun kadang tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti. Misalnya teknologi digital saat ini, tidak dapat dielakkan lagi. Perempuan sebagai bagian dari zaman ini mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, akan ikut di dalamnya. Partini (2017) sudah menyampaikan dalam pidato pengukuhan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab perubahan peranan dan perilaku perempuan.

Pratikno (2019) mengatakan bahwa berkaitan dengan teknologi digital, masyarakat atau individu dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni *native digital* dan *migrant digital*. Menurut hemat penulis, perlu ditambahkan satu lagi yakni *migraine digital*. Generasi *native digital* akan sangat familiar dengan gawai, *smartphone*, *coding*, *artificial intelligent*, *internet of things*, *big data*, dan se-

bagainya. Lewat gawai atau *smartphone* generasi ini dapat mengoptimalkan penggunaannya. Sementara pada kelompok *migrant digital* mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman dengan berpindah, menyesuaikan diri, belajar, dan sebagainya supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi digital ini. Kelompok ketiga yang oleh penulis dikelompokkan sebagai *migraine digital* ter-gagap dengan perkembangan teknologi digital ini. Akan ikut berubah dengan cepat masih kesulitan dari sisi kemauan dan/atau kemampuan. Pada setiap kelompok tersebut pasti ada kaum perempuan yang menjadi anggotanya.

Jumlah penduduk perempuan di dunia semakin banyak dibandingkan laki-laki dan dituntut dapat menjalankan perannya. Selama ini peran perempuan paling tidak ada dua, yakni sebagai (1) anak dan sebagai (2) anggota masyarakat. Peran ini akan bertambah ketika menikah, yakni sebagai (3) istri, (4) menantu, dan (5) manajer keuangan keluarga. Jika memiliki anak akan bertambah satu lagi sebagai (6) ibu. Untuk membantu pekerjaan rumah tangga, beberapa keluarga memiliki asisten rumah tangga, jadi ibu akan menjadi (7) atasan dari asisten rumah tangganya. Belum lagi kalau perempuan bekerja, dia akan menjadi (8) karyawan dan jika perempuan tersebut menjadi pimpinan di kantornya maka akan bertambah satu lagi yakni (9) pejabat/pemimpin di kantornya. Peran itu akan bertambah lagi jika perempuan tersebut juga menjadi pimpinan lembaga masyarakat, Ketua PKK misalnya (10). Dengan demikian semakin banyak kedudukan atau status yang dimiliki perempuan akan semakin banyak peran yang disandangnya.

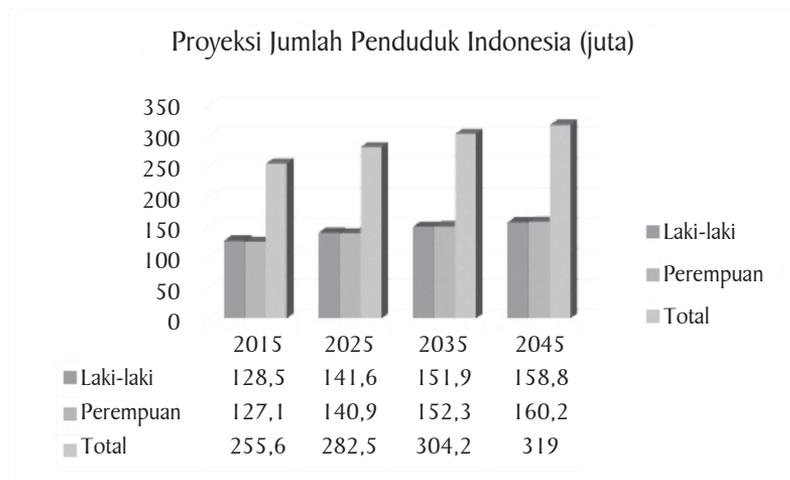
Dari semua atau sebagian peran yang disandang perempuan, pada zaman ini tidak dapat lepas dari teknologi digital. Sebagai ibu harus mengikuti atau paling tidak tahu apa yang dilakukan anak dengan gawainya, khususnya untuk anak yang masih usia sekolah. Demikian juga peran yang lainnya, baik di rumah, di kantor, maupun di masyarakat yang serba digital. Kondisi ini ditambah lagi dengan himbuan *cash less*, sehingga transaksi yang biasanya dilakukan ibu-ibu dengan tunai berubah lewat kartu atau gawai, sehingga hanya satu gawai untuk banyak kegiatan dan transaksi. Pertanyaannya, akankah kita lari dari kenyataan ini? Tidak bisa lagi tentu saja, sehingga tantangan ada di depan mata. Bagaimana perempuan bersikap? Topik inilah yang menarik penulis untuk mengungkapkannya. Pilihan kata “pusaran” karena teknologi digital seperti

arus yang kuat yang ada di sekeliling perempuan, yang memerlukan daya tahan perempuan untuk tidak serta merta terseret di pusaran teknologi digital itu.

Populasi Penduduk Perempuan di Indonesia

Dari data yang dikeluarkan BPS pada tahun 2018, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sampai tahun 2019 masih seperti yang selama ini terjadi yakni lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Namun angka ini ternyata setiap tahunnya berubah dengan kenaikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Diproyeksikan BPS mulai tahun 2032 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan sama pada angka 149,2 juta jiwa. Fenomena ini sangat menarik karena setelah itu jumlah penduduk perempuan diproyeksikan selalu lebih tinggi dari pada laki-laki. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Indonesia Tahun 2015-2045 (BPS)



Dari Grafik 1 terlihat bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan akan selalu naik, dan kenaikan penduduk perempuan pada tahun 2045 lumayan banyak dibanding laki-laki. Hal lain yang menarik adalah kenaikan penduduk perempuan setiap 10 tahunnya lebih tinggi daripada laki-laki, meskipun angkanya semakin kecil dari tahun (Tabel 1).

Tabel 1
Kenaikan Proyeksi Jumlah Penduduk
berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2015-2045

Uraian	Laki-laki (juta jiwa)	Perempuan (juta jiwa)
Kenaikan tahun 2015-2025	13,1	13,8
Kenaikan tahun 2025-2035	10,3	11,4
Kenaikan tahun 2035-2045	06,9	07,9

Sumber: BPS 2018 diolah

Dengan keragaan data seperti itu keberadaan perempuan sangatlah strategis. Pengoptimalan kualitas dan kuantitas perempuan untuk berpartisipasi mengisi peradaban sangatlah diharapkan. Penggunaan teknologi digital yang beradab tidak bisa ditawar lagi. Di sinilah perempuan dapat memulai perannya. Banyak penelitian mengatakan bahwa saat ini anak-anak sudah mulai dikenalkan gawai sejak kecil, bahkan sangat kecil dan karena biasanya kontak anak pertama dengan ibu, maka pengetahuan ibu tentang gawai dan teknologi digital sangat diperlukan.

Dunia Teknologi Digital dan Perempuan

“Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.” (R.A. Kartini, 1902)

Kalimat di atas sepertinya dapat menggambarkan situasi dan kondisi perempuan kini. Sudah banyak lulusan pendidikan tinggi bagi perempuan, sehingga pengembangan potensi yang dimiliki perempuan adalah suatu kebutuhan. Saat ini banyak bidang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan. Namun demikian ternyata masih banyak perempuan yang menggeluti pekerjaan tanpa bayaran yang setimpal. Bahkan ada pekerjaan yang sama sekali tak dibayar, seperti pekerjaan domestik (menyiapkan makanan, mencuci baju, dan membersihkan rumah). Di sisi yang lain belum banyak perempuan bergerak di bidang teknologi digital.

Dunia teknologi digital adalah dunia yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Hal ini karena pilihan profesi biasanya ditentukan oleh pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Biasanya laki-laki lebih banyak memilih bidang komputer dan keilmuan yang berkaitan dengan teknologi digital dibandingkan perempuan. Hal ini terjadi juga terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurut data di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, pada tahun 2017–2019 rerata jumlah mahasiswa perempuan di program studi Ilmu Komputer hanya 21,20% dan di program studi Teknologi Informasi hanya 39,82% dari total mahasiswa di program studi masing-masing. Meskipun kemampuan perempuan tidak diragukan lagi. Hasil penelitian Munandar dalam Yayasan Jurnal Perempuan (2016) mengatakan bahwa perempuan cenderung lebih kreatif dibanding laki-laki dengan perbandingan 58% : 42%. Pengakuan yang lain, perempuan dikenal lebih tekun dan lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Ketekunan perempuan ini dapat dimanfaatkan sebagai perancang, perencana, peneliti, dan pengusaha di bidang teknologi informasi, bahkan dapat sebagai penemu. Penemu mesin jahit dan mesin tenun adalah perempuan. Dengan demikian sebenarnya peluang perempuan untuk bekerja di bidang teknologi digital sangat terbuka.

Peran ganda yang disandang perempuan membuat perempuan harus “berhitung” karena keterbatasan yang dimiliki seperti keterbatasan waktu, tenaga, akses, maupun lingkungannya. Salah satunya misalnya, pekerjaan di luar rumah menuntut konsekuensi meninggalkan anak dan rumahnya. Oleh karena itu dengan hadirnya era digital sebenarnya membuka lebar kesempatan untuk dapat melakukan tugas domestik dan bekerja mencari nafkah akan terwujud. Akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi digital perempuan dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Dengan demikian dapat melakukan peran publiknya, tanpa meninggalkan pekerjaan. Dalam hal ini dukungan dari keluarga sangat berperan besar dalam pengembangan diri perempuan. Tak ketinggalan bagi siswa perempuan, dukungan dari guru-gurunya di sekolah sangat diperlukan.

Pada era 4.0 ini hampir semua pekerjaan berbasis atau paling tidak menggunakan teknologi informasi. Pada posisi seperti ini ada perempuan yang dengan *passion*-nya memasuki dunia digital, tetapi di sisi lain ada perempuan yang enggan untuk menapakinya. Fenomena *digital native*, *migrant digital*, dan *migraine digital* sepertinya tidak dapat dielakkan. Namun demikian ketika perempuan

berjarak dengan teknologi, maka ke depannya kemungkinan perempuan tidak dapat terlibat dan digantikan dengan robot atau laki-laki.

Partisipasi perempuan di dalam teknologi informasi akan terbantu jika tidak hanya kemauan diri sendiri, tetapi juga kebijakan pemerintah yang ramah teknologi untuk perempuan. Visi Digital Ekonomi yang dibuat sampai dengan tahun 2020 sepertinya sudah dibuat untuk memfasilitasi warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Visi tersebut telah diadopsi oleh Presiden Joko Widodo, dengan menetapkan pola kebijakan yang erat posisinya dengan **“Indonesia: Energi Digital Asia”** yakni (Setiawan, 2017):

1. Rencana strategis untuk fokus kepada UKM dan sebanyak-banyaknya melibatkan UKM dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. Peta jalan e-dagang yang memadukan 31 inisiatif dari 8 kementerian dan lembaga pemerintah untuk memastikan pertumbuhan sektor teknopreneur dengan target mencapai transaksi e-dagang sebesar 130 miliar USD pada tahun 2020.
3. Kebijakan yang ramah terhadap penanaman modal asing untuk menarik minat investasi dan penanaman modal ventura.
4. Memfasilitasi akses pendanaan untuk digitalisasi UKM dan perusahaan-perusahaan rintisan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga membuat regulasi yang lebih menarik minat modal ventura.
5. Menyediakan *“exit strategy”* yang mudah dan atraktif dengan cara memperdalam likuiditas pasar modal untuk *listing* perusahaan teknologi.
6. Adopsi kebijakan-kebijakan yang pro-inovasi seperti: program nasional untuk menciptakan 1000 teknopreneur digital nasional dan peraturan *“safe harbor”* untuk memproteksi para pelaku perdagangan elektronik.

Namun kebijakan yang sudah kondusif belum tentu langsung dapat diimplementasikan. Untuk itu Setiawan (2017) menyebutkan ada beberapa permasalahan bersifat *cross-cutting* (lintas *stakeholder*) yang harus diantisipasi, yaitu: pendanaan (*funding*), perpajakan (*tax*), perlindungan konsumen (*consumer protection*), infrastruktur telekomunikasi (*communication infrastructure*), logistik, pendidikan dan sumber daya manusia. Dua masalah terakhir ini yang kental dengan

dunia perempuan. Peningkatan pendidikan dan kualitas SDM menjadi isu yang harus digarap.

Di sisi yang lain keterlibatan perempuan di dalam pengambilan dan penentuan kebijakan belum begitu tinggi. Misalnya keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan, keanggotaan di parlemen, dan pimpinan lembaga pendidikan masih didominasi laki-laki, sehingga kadang-kadang keputusan yang dihasilkan belum mempertimbangkan perempuan baik dari kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas.

Beberapa hal permasalahan dan realita perempuan di bidang teknologi digital di atas sebetulnya dapat mulai diurai dari rumah tangga. Konsep “*nature*” dan “*nurture*” perlu digalakkan. Pembagian tugas laki-laki bekerja sebagai “mesin uang” dan bertanggung jawab terhadap perekonomian rumah tangga terkadang menjebak laki-laki untuk tidak mengurus anak dan seolah-olah urusan anak adalah urusan istri yang notabene perempuan. Padahal sebetulnya pengetahuan dari kedua orang tuanya baik laki-laki maupun perempuan sangat dibutuhkan oleh anak. Bahwa secara “*nature*” kontak dan interaksi anak dengan ibunya biasanya lebih banyak dibandingkan dengan ayahnya. Namun demikian dalam konteks masa kini misalnya, konteks masyarakat digital, problem hari ini adalah pengasuhan. Mestinya pengasuhan atau *nurturing* bukan hanya ada dan menjadi tanggung jawab ibu/perempuan tetapi mestinya menjadi model pengasuhan *parenting*, antara ayah dan ibu. Akhirnya perempuan juga dapat berkarier, juga dapat melakukan fungsi-fungsi reproduksi tanpa teropresi dengan beban ganda. Hal senada juga disampaikan Mona dalam Yayasan Jurnal Perempuan (2016) yang mengatakan bahwa kita kekurangan figur ayah untuk mendidik anak dan mengasuhnya, sehingga menjadi negara yang sedikit sekali *fatherhood*-nya.

Tantangan dan Dorongan Keterlibatan Perempuan dalam Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital terhadap segala aspek kehidupan manusia bertujuan untuk mempermudah dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang semakin luas dan semakin mudah, mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja dan waktu. Pe-

nguasaan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang yang lebih luas untuk maju dan meningkatkan kualitas hidup.

Perempuan sebagai salah satu subjek dalam pembangunan dewasa ini seyogyanya meningkatkan kemampuannya di segala aspek termasuk dalam penguasaan teknologi digital. Akses dan penggunaan teknologi digital bagi perempuan sangat diperlukan karena peran perempuan yang sangat banyak dan berdampak luas. Kesetaraan akses dan penguasaan teknologi digital bagi kaum perempuan dan laki-laki sudah menjadi perhatian tingkat global, isu gender dan teknologi digital menjadi bagian penting dalam pembangunan melalui pemberdayaan perempuan. Di dalam program *Sustainable Development Goals (SDGs)* tentang kesetaraan gender ditekankan juga di dalam peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberdayaan perempuan (Hakiki & Supriyanto, 2018).

Pengakuan terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sudah menjadi isu global, namun kesenjangan akses dan penguasaan teknologi digital antara perempuan dan laki-laki masih cukup besar. Menurut Hafkinn dan Taggart (2001), faktor-faktor penghambat perempuan di negara berkembang dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi adalah pendidikan, keaksaraan, bahasa, waktu, biaya, norma sosial dan budaya. Hal ini merupakan tantangan bagi perempuan dan pendamping kegiatan perempuan dalam pelaksanaan dan pengembangan teknologi digital.

Pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan pada ranah domestik akan menjebak perempuan untuk tidak mengambil bagian pada pekerjaan di luar rumah meskipun sebetulnya setiap individu memiliki kemerdekaan dan kebebasan yang setara untuk berkembang. Kebebasan mengembangkan diri tentunya memerlukan ekosistem yang mendukung. Selama lingkungannya baik internal maupun eksternal tidak bisa mendukung perempuan untuk berkembang di dunia digital, selama itu pula perempuan tidak akan optimal di dunia digital. Dalam hal ini tentu saja tantangan tidak hanya ada pada diri perempuan sendiri, tetapi juga pemerintah dan masyarakat di sekelilingnya.

Dilihat dari sudut pandang kemampuan secara intelektual laki-laki dan perempuan dalam kapasitas dan potensinya tidak berbeda, bahkan sebagian pe-

rempuan memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kecerdasan yang dimiliki perempuan ini mestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dan kompetensi di teknologi digital. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kecerdasan ini sebenarnya relatif lebih mudah untuk diatasi, karena menurut hemat penulis banyak di sisi perempuannya, Sebenarnya dia mampu tetapi kalau tidak mempunyai *passion* di dunia digital tentunya akan tidak optimal.

Dari sisi waktu yang dimiliki perempuan, tantangan yang cukup menantang adalah dalam manajemen waktu. Manajemen waktu yang dimiliki untuk urusan domestik dan publik menjadi tantangan. Dalam hal ini sebenarnya teknologi digital dapat membuat efisien di dalam penggunaan waktunya. Bagi perempuan yang menghendaki bekerja tetapi tidak mau ke luar rumah, dapat melakukan pekerjaannya di rumah, sehingga peran domestik tetap dapat dilakukan di satu sisi, peran berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga dapat mereka lakukan.

Kemampuan penguasaan teknologi digital menjadi tantangan berikutnya, karena perempuan yang mempunyai kompetensi teknologi digital dapat bekerja di mana pun tanpa terhambat kendala ruang dan waktu. Kompetensi penguasaan teknologi digital akan dapat digunakan dengan baik melalui pendidikan formal dan non formal. Dalam hal ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk mendorong perempuan menggeluti teknologi digital.

Segmentasi keilmuan IPA/Saintek dan IPS/Soshum menurut penulis mendegradasi kebutuhan teknologi digital. Seolah-olah teknologi digital hanya untuk bidang saintek, sementara untuk bidang soshum tidak memerlukan teknologi digital, padahal dewasa ini apa pun pekerjaannya tidak dapat dilepaskan dari teknologi digital. Oleh karena itu menjadi bahan refleksi buat kita semua bahwa teknologi bukan hanya sebatas pendidikan, tapi juga harus ada kontribusinya kepada masyarakat.

Dari berbagai tantangan yang disebutkan di atas sebetulnya dorongan terbesar untuk menjadikan perempuan melek teknologi digital adalah karena tugas dan tanggung jawabnya dalam menyiapkan dan mendidik generasi ke depan, meskipun tugas dan tanggung jawab ini juga ada pada laki-laki. Mulai dari rahimnya perempuan sudah harus berpikir memberikan nutrisi yang baik, dari

segi biologis, fisik, dan psikologis. Janin yang sehat diharapkan akan menjadi anak yang sehat pula. Demikian juga dengan perkembangan anak pada tahap berikutnya. Dalam proses menjadi dewasa tentunya orang tua harus bijak. Banyak hasil penelitian yang mengatakan bahwa pengenalan anak terhadap gawai semakin hari semakin muda. Anak-anak yang masih 2–3 tahun sudah diberi asupan gawai supaya tidak rewel misalnya. Pada masa sekolah SD, SMP, maupun SMA untuk beberapa sekolah sudah menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajarannya. Di satu sisi kemajuan metode pembelajaran ini tidak dapat dipungkiri tetapi di sisi lain menuntut orang tua juga tidak ketinggalan pengetahuan tentang gawai dan teknologi digital. Di sinilah kadangkala timbul persoalan, karena saat ini perempuan yang meniti karier juga semakin banyak. Artinya ada bagian waktu yang dimiliki perempuan dipakai untuk perjalanan kariernya, di sisi yang lain anak-anak pada usia sekolah masih butuh pendampingan. Hal ini akan berlanjut sampai anak memasuki dunia kuliah, meskipun intensitas pendampingan tidak seintensif ketika masa sekolah di TK, SD, SMP, maupun SMA. Dalam hal ini perempuan didorong untuk menggunakan waktunya dengan baik, baik untuk peran domestik maupun peran publik.

Dorongan perempuan *melek* teknologi digital, di samping kontribusi penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu menyongsong masa depan, juga pada kontribusi dalam pembangunan yang semakin baik. Hal ini karena perempuan sebagai salah satu subjek pembangunan yang sekarang pada era industri 4.0 juga harus disiapkan supaya sebagai anggota masyarakat siap untuk menghadapi era itu bahkan siap juga untuk masyarakat 5.0. Di dalam masyarakat 5.0 akan lahir nilai baru yang juga harus disiapkan. Enam pilar pada peradaban revolusi industri 4.0 yakni *Internet of Things*, *Artificial Inteligent*, *Cloud*, *Super Apps*, *Broadband Network*, dan *Big Data* telah mengubah banyak hal mulai dari perilaku konsumsi, cara melakukan mobilisasi, sampai orkestrasi sumber daya (Kasali, 2019) tentunya akan ada nilai baru dalam masyarakat kita. Dalam hal ini peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan itu sendiri harus didorong untuk lebih baik dan lebih siap, sehingga perempuan dapat membantu dalam mengoptimalkan potensi individu dan masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di negara kita.

Perempuan juga dapat didorong menjadi *influencer* di mana pun berada, seperti kata Patterson *et al.* (2008), bahwa seorang *influencer* memotivasi orang lain untuk berubah, seorang *influencer* mengganti perilaku yang buruk dengan keterampilan baru yang sangat kuat, seorang *influencer* membuat sesuatu bisa terjadi. Dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, tentunya peran *influencer* ini sangat dinantikan. Perempuan dapat memulai dari rumah tangga, masyarakat dan tempat kerjanya. Namun demikian sepertinya sebelum perempuan menjadi *influencer*, akan lebih baik jika dirinya juga melakukan *self disruption*. Mueller (2017) menuliskan langkah-langkah untuk *self disruption*: (1) mengidentifikasi apakah kamu mengevaluasi ide yang sudah lazim, ide kreatif, atau keduanya; (2) persiapan diri untuk *self-disrupt*; (3) *self-disrupt – accept unknowable*; (4) *self-disrupt – mengubah dari menemukan masalah ke memecahkan masalah*; (5) bermitra dengan lawan. Hal yang senada juga disampaikan Pratikno (2018): “*if you don’t disrupt, others will do. Be a disruptor, otherwise you’ll be disrupted. Develop internal disruptor, before others disrupt you.*” Dengan demikian perempuan juga harus siap-siap menjadi *disruptor* untuk kebaikan generasi ke depan dan lingkungannya. Dengan keberhasilan menjadi *self disruptor*, tentunya peran sebagai *influencer* akan lebih mudah dijalankan.

Penutup

Kemajuan teknologi yang sangat cepat tidak dapat dihindari. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat industri digital mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela harus mengikutinya. Bonus jumlah penduduk perempuan yang mempunyai tren naik dan *soft skill* yang tidak kalah dengan laki-laki menjadi pendorong perempuan untuk berkiprah di dunia ini.

Dengan dua sampai mungkin sepuluh peran yang disandang perempuan, dengan berbagai tingkatan pengetahuan dan penggunaan teknologi digital, baik *native digital*, *migrant digital*, maupun *migraine digital* merupakan aset yang perlu untuk dioptimalkan, supaya di mana pun perempuan berada mempunyai kontribusi untuk kehidupan masyarakatnya.

Pusaran teknologi digital yang melingkupi perempuan akan selalu ada, oleh karena itu dorongan dan tantangan menghadapi pesatnya teknologi digital

bagi perempuan harus disiapkan dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi ini dapat berdampak pada individu perempuan, keluarga, masyarakat, maupun negaranya. *Last but not least*, perempuan *influencer* perlu ditumbuhkembangkan untuk menyiapkan generasi masa depan, berkontribusi dalam pembangunan yang sedang terjadi dan dapat “menggawangi” pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian perempuan akan bertahan dan tidak terseret pusaran teknologi digital yang tanpa arah dan tidak beradab. Sebagai *influencer* akan lengkap jika sudah menjadi *self disruptor*.

Referensi

- Hafkin, N. & Taggart, N. 2001. “Gender, Information Technology, and Developing Countries: An Analytic Study”. Dapat diakses pada http://www.mujeresenred.net/zonaTIC/IMG/pdf/Gender_Book_NoPhotos.pdf. Diakses tanggal 8 September 2019.
- Hakiki, G. & S. Supriyanto. 2018. “Profil Perempuan Indonesia 2018”. Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dapat diakses pada <https://www.kemempda.go.id/lib/uploads/list/d9495-buku-ppi-2018.pdf>. Diakses tanggal 8 September 2019.
- Kasali, R. 2019. *Sebuah Dunia Baru yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham*. Jakarta Selatan: Mizan.
- Mueller, J. 2017. *Creative Change*. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 3 Park Avenue.
- Partini. 2017. “Perubahan Peranan Perempuan: Peluang dan Tantangan”. Pidato Pengukuhan
- Patterson, K., Grenny, J., Maxfield, D., McMillan, R. & Switzler, A. 2008. *Influencer: The Power To Change Anything*. New York: McGraw-Hill, Two Penn Plaza.
- Pratikno. 2018. “Revolusi Industri 4.0. Pertanian Paling Terdisrupsi?” Yogyakarta, Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Tahun 2018.
- Pratikno. 2019. *Bonus Demografi dan Pendidikan Tinggi* (tidak dipublikasikan).
- Setiawan. 2017. “Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mendorong Pembentukan Model Bisnis Masa Depan”. Jurnal *Pekommas*, 2 (2), 193 – 204.
- Yayasan Jurnal Perempuan. 2016. *Status Perempuan dalam STEM*. Buku Seri

Pendidikan. Dapat diakses pada https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/buku_seri_pp_jp91-amp-ad-amp.pdf. Diakses pada 15 Oktober 2018



Femininitas Gajah Mada *Plus* Maskulinitas Prof. Dr. Partini

Mochamad Sodik



*“..... perempuan tidak harus hanya bersifat feminin,
tetapi sekaligus dapat bersifat maskulin
yang oleh para ahli sering disebut sebagai sifat androgini.
Sifat androgini akan mampu mengendalikan diri
kapan diri sendiri seharusnya menggunakan sifat-sifat feminin
dan kapan seharusnya menggunakan sifat-sifat maskulin.
Sifat androgini inilah yang diharapkan
dapat menjawab tantangan perempuan untuk sukses dalam karier
dan dalam keluarga yang lebih berorientasi
pada pembentukan norma kesetaraan”
(Partini, 2013:321)*

Kutipan di atas merupakan salah satu rekomendasi genius Prof. Dr. Partini di dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dengan judul *Bias Gender dalam Birokrasi*. Pemaknaan kritis dari rekomendasi ini dapat berupa peringatan praktis kepada kaum laki-laki: “Jika Anda ingin berhasil dalam karier dan keluarga, senyawakan sifat maskulinmu dengan sifat feminin”. Secara simbolik dapat ditegaskan, Gajah Mada (laki-laki) dan Prof. Dr. Partini (perempuan) dapat berhasil dalam mengarungi dunia domestik dan publik sekaligus karena kemampuannya dalam mengintegrasikan sifat feminin (yang positif) dan maskulin (yang positif) dalam dirinya dengan takaran yang seimbang.

Kesetaraan gender merupakan norma baru bagi umumnya laki-laki, sehingga narasi “gender” jauh lebih sulit diterima oleh kaum laki-laki karena langsung mengancam terhadap kepentingan “dirinya” (dominasi laki-laki). Hal ini berbeda jauh dengan narasi keadilan sosial, kelas sosial, dan sejenisnya yang digandrungi oleh kaum laki-laki karena bersentuhan dengan kepentingan “umum” (dominasi kelompok tertentu) yang harus mereka perjuangkan. Fenomena ini meneguhkan argumen sosiologi pengetahuan, bahwa seseorang cenderung akan memperjuangkan kepentingan dirinya dan menolak sesuatu yang akan mengancam eksistensinya.

Secara reflektif perlu direnungkan lebih mendalam, karena eksistensi seseorang tidak semuanya berasal dari takdir, tetapi karena dibentuk oleh lingkungan tempat mereka tumbuh. Beriringan dengan itu, sistem pengetahuan seringkali hadir untuk mengukuhkan relasi kuasa dan memperkuat eksistensi kelompok tertentu. Dalam ruang semacam itu, perspektif kesetaraan gender hadir untuk memberi pemaknaan baru atas ketimpangan gender yang terlanjur dianggap lumrah dan biasa. Di sinilah narasi dan praksis hidup Prof. Dr. Partini menemui tantangannya.



Untuk melengkapi apa yang sudah dinarasikan dan diperjuangkan oleh Prof. Dr. Partini, kita dapat mengingat apa yang ditawarkan oleh Prof. Sachiko Murata (1992:44) dalam menjelaskan relasi gender dengan perspektif kosmologi Islam dan *al-asmaul al-husna* (nama-nama yang baik [indah dan agung]). Tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah *al-insan al-kamil* (manusia yang sempurna) yaitu kemampuan untuk menyatukan aspek *jamal* (feminin positif) dan *jalal* (maskulin positif) menjadi *kamal*. Menurut Murata (1992:69), keterpaduan antara sikap kasih sayang (yang indah/*beauty*) dan ketegasan (yang

agung/*majesty*) akan melahirkan buah keberhasilan (yang sempurna/*perfection*). Secara sederhana dapat dirumuskan: *jamal* (yang indah) + *jalal* (yang agung) = *kamal* (sempurna).

Mujtahidah Kesetaraan: Berilmu dan Berjuang Tiada Henti

Siapa yang tidak mengenal Prof. Dr. Partini, terutama bagi sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Perempuan yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM pada tahun 2017 ini telah mengambil peran penting dalam perkembangan sosiologi gender dan perempuan. Selain itu, ia dikenal keberpihakannya terhadap kaum perempuan, utamanya di era digital.

Perempuan kelahiran Klaten (21 Juni 1949) ini telah menamatkan pendidikannya mulai dari jenjang sarjana sampai doktor di “kampus biru” tempatnya mengabdikan. Selain sebagai dosen dan Ketua Jurusan Sosiologi selama dua periode (1989–1992 dan 2007–2011), Prof. Dr. Partini juga aktif sebagai peneliti di PSKK UGM (1987–2009). Ia pernah sebagai Anggota Senat Universitas dan FISIPOL UGM, serta aktif sebagai Konsultan, *Reviewer*, dan Assesor BAN-PT.

Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi diberi judul *Perubahan Peranan Perempuan di Era Millenium: Peluang dan Tantangan*. Prof. Dr. Partini (2017:9) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan pergeseran peranan perempuan di dunia kerja dan rumah tangga. Hadirnya revolusi digital dan luasnya akses perempuan terhadap pendidikan, memungkinkan perempuan mengisi berbagai jenis pekerjaan. Kecenderungan seperti ini dapat digunakan untuk menghilangkan stereotipe yang menegaskan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan pencari nafkah tambahan saja.

Prof. Dr. Partini (2017:16) berpesan agar laki-laki dan perempuan mempunyai visi baru dalam membentuk keluarga yang dibangun untuk *sharing of power* tanpa dominasi dan subordinasi atau setidaknya lebih lentur sebagai keluarga harmonis. Hadirnya teknologi *advanced* dapat membawa beban baru bagi keluarga dalam pendidikan anak. Kesenjangan pemahaman orang tua dan anak

terhadap sistem pengetahuan baru dan sistem nilai yang ada bukan persoalan sederhana. Hal ini perlu disikapi dengan kritis tetapi tetap bijaksana.

Diperlukan banyak kajian baru pada generasi milenial karena mereka sangat akrab dengan teknologi *advanced* yang akan berpengaruh terhadap makna keluarga, *somah*, dan sistem nilai budaya. Pemerintah diharapkan mampu untuk merumuskan kebijakan yang holistik, integratif dan sinergis antareleman yang ada. Pusat kajian di Jurusan Sosiologi dan FISIPOL UGM diharapkan memberikan kontribusinya melalui penelitian untuk menemukan konsep baru sebagai salah satu cara kritis dalam menghadapi hegemoni Barat (Partini, 2017:17).

Selain pidato pengukuhan dan karya disertasi, Prof. Dr. Partini telah menghasilkan banyak karya, di antaranya: *Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Sosiologi (Studi Awal tentang Pembantu Rumah Tangga di Yogyakarta)* (1990); *Partisipasi Politik Perempuan Abad 21* (2008); *Dinamika Isu Pernikahan Anak di Indonesia pada Media Baru* (Partini dkk., 2008); *Penggunaan Statistik dalam Penelitian Sosiologi* (2008); *Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks* (2012); *National Character Building in the Third Millenium Era: A Challenge* (2012); dan *Glass Ceilling & Guilty Feeling sebagai Penghambat Karir Perempuan di Birokrasi* (2014).

Di usia yang tidak muda lagi, nenek dari Arcelion Eynar Diandro ini masih energik dalam kegiatan akademik sebagai pengajar, peneliti, penguji serta pembimbing para mahasiswa. Ia sangat layak dijadikan panutan bagi generasi muda milenial, terutama pemihakannya pada kaum perempuan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sosiologi akan semakin mengalami perubahan yang signifikan, karena masyarakat bergerak sangat dinamis. Diperlukan dialog intensif antargenerasi agar proses regenerasi keilmuan dan aktivisme dapat berkembang dengan baik.

Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ibu dari Ciptoning Suryo Condro, S.E. dan Condrodewi Puspitasari, S.I.P., MA., yang telah menjadi panutan atas sikap konsistennya dalam menyuarakan aspirasi perempuan dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang sosiologi. Prestasi yang telah didapatkan dan karya tulis yang dilahirkan merupakan bukti perjalanan hidupnya untuk mengabdikan melalui dunia pendidikan.

Paparan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Prof. Dr. Partini telah lama berkiprah di dunia akademik dan sudah menghasilkan sejumlah karya seperti buku, artikel, dan produk penelitian lainnya. Studi perempuan dan keadilan gender merupakan menu utama dalam setiap kajiannya. Selain itu, Prof. Dr. Partini dikenal konsisten dan gigih dalam memperjuangkan nasib kaum sesamanya. Selayaknya, Prof. Dr. Partini kita beri gelar “*Mujtahidah* Kesetaraan”.

Selanjutnya untuk melengkapi apa yang telah ditulis dan diperjuangkan oleh istri dari Bapak Drs. Mujayadi, M.Si. (*almarhum almghfurlahu*), uraian berikut akan mengulas gender, perempuan, keluarga, dan Islam sebagai proses harmonis sekaligus relasi kuasa yang penuh ketegangan.

Kosmologi: Islam dan Perempuan

Tidak banyak pengamat luar yang memberikan apresiasi positif kepada posisi perempuan dalam Islam. Salah satu nama ilmuwan terpenting dalam isu tersebut adalah Prof. Sachiko Murata. Perempuan asal Jepang ini dipilih, karena Murata berperan penting dalam membangun “nalar konstruktif” terhadap relasi perempuan dan laki-laki, sejalan dengan nalar yang diusung oleh Prof. Dr. Partini sebagaimana dikutip di awal tulisan ini.

Sebagai ilmuwan dengan latar belakang budaya Asia Timur, Murata (1992:6–7) beranggapan ada kesamaan antara konsep Taoisme dengan Islam yaitu keindahan dan keagungan Tuhan. Misalnya di dalam al-Qur’an, nama keindahan (*jamal*) tidak jauh berbeda dengan konsep *yin*, sedangkan *yang* identik dengan nama keagungan (*jalal*). Selain itu, Murata selalu merujuk pada teks klasik Islam, terutama pengaruh pemikiran Ibnu ‘Arabi, yang dipelajarinya dari Prof. Izutsu.

Dalam pembacaan tentang feminin dan maskulin, Murata (1992:44) mencari titik persamaan untuk saling melengkapi, karena keduanya memiliki elemen positif dan negatif sekaligus. Keseimbangan dan kesatuan *yin* dan *yang*, *jamal* dan *jalal*, femininitas dan maskulinitas, sebagai tujuan penciptaan selalu ditekankan di dalam studinya. Ditemukan kesamaan tujuan antara perempuan dan laki-laki untuk menjadi *al-insan al-kamil* (manusia yang sempurna) yaitu manusia yang

mampu menyatukan sisi ketuhanan *jamal* (yang indah) dan *jalal* (yang agung) menjadi *kamal* (sempurna).

Sifat feminin yang positif mengacu pada sifat keindahan seperti kasih sayang dan kelembutan, sedangkan feminin yang negatif mengacu pada sifat mudah menyerah dan cengeng. Sifat maskulin yang positif merupakan sifat keagungan seperti melindungi dan mengayomi, sedangkan maskulin yang negatif merupakan sifat mendominasi, menguasai dan angkuh, yang disebut Murata (1992:323) sebagai *iblis's masculine*.

Perbedaan Sifat Positif dan Negatif dari Maskulin dan Feminin		
Sifat	Positif	Negatif
Maskulin	Keagungan (Melindungi, Mengayomi, dll.)	Selalu Mendominasi, Angkuh, dll.
Feminin	Keindahan (Kasih Sayang, Kelembutan, dll.)	Mudah Menyerah, Cengeng, dll.

Menurut Murata (1992:12), dengan menafsirkan al-Qur'an secara lebih mendalam, segala sesuatunya terkait dengan penciptaan kosmos yang berasal dari Tuhan dan makna batin di dalamnya. Makna batin ini menjadi nilai universal jika dikaitkan dengan yang universal, bukan dengan yang relatif. Oleh karena itu, Murata tidak menafsirkan al-Qur'an dan hadis menurut pemikirannya sendiri, melainkan disandarkan pada pengarang yang menjadi acuannya. Misalnya, ia mengikuti jalan pikiran Ibn 'Arabi ketika menggambarkan semua realitas dalam kosmos sebagai manifestasi nama-nama Tuhan yang beragam (*all realities in the cosmos as manifestations of different divine names*).

Islam pada dasarnya menempatkan perempuan dengan sangat terhormat, tetapi masih banyak dijumpai persepsi yang sebaliknya. Dalam rangka mengubah persepsi demikian itu dibutuhkan pendekatan baru yang terlepas dari dominasi nalar Barat. Kebutuhan akan pendekatan tersebut memerlukan penjelasan tentang Islam dari konteks non-Barat. Jalan yang ditempuh Murata (1992:1) adalah mengawali kajiannya dengan memanfaatkan konsep *I Ching*. Menurutnya, ha-

nya jika seseorang dapat melepaskan prasangka untuk sementara waktu dan memusatkan perhatian pada hubungan gender di tingkat supra-duniawi, barulah mereka mampu menangkap prinsip yang menjiwai sebuah pandangan, seperti Islam dan Cina.

Masalah yang sulit (*the ultimate problem*), menurut Murata (1992:1), adalah ketika berbicara perbedaan budaya dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang hidup di dunia yang berbeda. Pandangan Barat tentang yang terbaik untuk perempuan belum tentu sama dengan pandangan yang terbaik untuk perempuan muslim. Diperlukan kejelian dalam melihat persoalan, baik dari perbedaan sudut pandang budaya, analisis diri maupun kondisi sosial. Seringkali persoalan yang sama tetapi dengan kultur dan latar sosial yang berbeda memerlukan solusi yang berbeda.

Dalam konteks paradigmatis, diperlukan penguatan “tradisi intelektual Islam” (*the intellectual tradition in Islam*) yaitu menelaah kembali dimensi esoterik di dalam al-Qur’an dan hadis (Murata 1992:2). Apa yang membedakan tradisi esoterik ini dengan pendekatan legalistik eksoterik fikih atau yang dikenal dengan syariah/hukum Islam)? Kajian esoterik mempertanyakan “sebab” dari segala sesuatu, bukan sekadar “bagaimana”. Ahli fikih cenderung untuk memberitahu “apa” yang harus dilakukan, bukan bertanya “mengapa” sesuatu itu harus dilakukan. Politik gender tidak cukup dikaji dengan pendekatan fikih eksoterik, tetapi justru lebih perlu didekati dengan perspektif sufistik esoterik.

Dalam studinya, Murata (1992:3) mempelajari karya tokoh intelektual esoterik yang telah mempertanyakan masalah fundamental yang berkaitan dengan hakikat Tuhan, manusia, alam, dan relasi gender. Kebanyakan dari mereka adalah para sufi dan filosof, seperti Ibnu ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, Suhrawardi, Mulla Shadra, dan lainnya. Dengan kata lain, Murata mencari jawaban yang sumbernya dimiliki oleh para tokoh esoterik tradisi kearifan (*sapiential tradition*).

Dalam konteks esoterik kosmologi Islam dan Cina, Murata (1992:6) menjelaskan bahwa kosmologi Cina melukiskan alam semesta dalam batasan kerangka *yang* dan *yin* sebagai prinsip eksistensi yang bersifat aktif dan reseptif antara laki-laki dan perempuan. *Yang* dan *yin* merangkul satu sama lain dalam keselarasan, dan perpaduan keduanya menghasilkan harmoni. *Yang* dan *yin*

adalah prinsip perubahan dan simbol bagi seluruh gerakan di alam semesta yang menekankan konsep harmoni antara keduanya.

Sementara itu, kosmologi Islam selaras dengan kosmologi Cina karena bertumpu pada konsep komplementaritas atau polaritas prinsip aktif dan reseptif. Pada mulanya, Allah ada dan tidak ada sesuatupun selain Dia (*God was and there was nothing with Him*). Eksistensi alam semesta bergantung pada satu realitas tunggal. Sebelum alam semesta ada, tak ada satu pun yang ada kecuali Sang Pencipta, yaitu Allah. Sedangkan dalam tradisi Cina, sebelum *yin* dan *yang* ada, sudah ada *Tai Chi (Tao)* atau *Great Ultimate*, “Puncak Agung” (Murata, 1992:7).

Ratna Megawangi (1999:230) memuji pendekatan Murata yang menegaskan bahwa Tuhan adalah keseimbangan antara nama-namanya yang *jalal* dan *jamal*. Keterpisahan manusia (*separateness*) terjadi karena hilangnya keseimbangan, yaitu ketika internalisasi nilai-nilai *jalal* lebih kuat daripada nilai-nilai *jamal* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat yang cenderung keras, dan terlalu menekankan pendekatan kekuasaan dan hukum.

Prof. Nasaruddin Umar (2001:177) memberikan pandangan positif terhadap karya Murata yang mengeksplorasi perspektif esoterik Islam. Misalnya, konsep berpasang-pasangan (*azwaj*) digali lebih mendalam dibandingkan dengan penjelasan fikih eksoterik. Perkawinan makrokosmos mencakup perkawinan tertentu antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti hujan mengawini tanah. Dengan mengutip Jalaluddin Rumi, Murata (1992:143) mengumpamakan langit sebagai laki-laki dan bumi sebagai perempuan. Hubungan keduanya dapat diterangkan melalui hubungana *yang* dan *yin*, *male* dan *female*, suami dan istri.

Ibnu ‘Arabi juga memberikan penggambaran yang sama. Langit diumpamakan suami dan bumi diumpamakan istri dalam kehidupan rumah tangga. Jika langit menurunkan airnya kepada bumi maka lahirlah beragam jenis makhluk, seperti flora dan fauna. Pemberian air (sperma) suami kepada istri akan menumbuhkan janin di dalam rahim yang kemudian lahir menjadi bayi (Umar, 2001:178). Disebabkan keindahan dan kebaikannya (*her beauty and virtue*), bumi sangat dicintai. Langit mengawininya bukan karena kewajiban tetapi karena memperoleh kenikmatan dan kesenangan, *pleasure and joy* (Murata 1992:143).

Prof. Annemarie Schimmel (1992), memberi pengantar indah pada buku Murata, *The Tao of Islam*. Ia memberikan catatan penting tentang peran perempuan dalam berbagai tradisi agama. Selama ini peran perempuan lebih banyak dilihat dari sudut pandang Barat. Sementara itu, interpretasi peran spiritual feminin Timur masih sangat kurang. Bahkan Moriz Winternitz sebagaimana dikutip Schimmel (1992:vii) mengatakan: “*Women have always been the best friends of religion, but religion has generally not been a friend of women*” (“Perempuan selalu menjadi sahabat agama, tetapi agama umumnya bukan sahabat bagi perempuan”).

Menurut Schimmel (1992:vii), jika Islam hanya dikaji sebatas permukaan semata, maka yang timbul dalam pandangan publik hanya yang negatif. Islam perlu dikaji secara komprehensif dari sudut pandang kosmologis-fenomenologis agar strukturnya dapat dipadukan dengan struktur agama lain. Diperlukan cara pandang baru seperti yang dilakukan oleh Murata dalam mengkaji dimensi esoterik Islam.

Posisi perempuan dalam Islam dapat dilihat bagaimana al-Qur’an memperlakukan mereka, seperti terminologi *muslimun wal-muslimat, mu’minun wal-mu’minat* yang diletakkan sejajar. Selain itu, banyak contoh perempuan yang memiliki peranan penting dalam spiritualitas Islam, baik yang dijelaskan di dalam hadis (seperti peran penting istri dan anak perempuan nabi Muhammad), maupun penjelasan kaum sufi yang dikisahkan dengan bagus oleh Ibn ‘Arabi dalam *Fushus al-Hikam* (Schimmel 1992:viii–ix).

Ayat di dalam al-Qur’an yang mengatakan “*isteri-isterimu adalah pakaianmu, dan engkau adalah pakaian mereka* (QS. al-Baqarah [2]:187) sering disalahartikan. Menurut Schimmel (1992:ix), ayat tersebut justru sangat tepat sebagai pola hubungan gender yang ideal. Pakaian dianggap sebagai pelindung serta mampu menutupi pandangan bagian tubuh yang bersifat pribadi, juga dianggap pelindung kehormatan bagi pasangannya. Dengan interpretasi demikian, maka sama baiknya dengan konsep *yin* dan *yang* dalam hubungan perkawinan. Suami dan istri adalah setara dalam kebersamaan mereka.

Setelah menganalisis pemikiran Murata di dalam bukunya, Schimmel (1992:x) menegaskan bahwa meskipun banyak pengamat yang menolak pendekatan mistiknya mengenai relasi gender, tetapi teks-teks yang dijelaskan telah

menunjukkan bahwa pendekatannya sangat komprehensif. Sejumlah teks itu sendiri menyatakan aspek paling penting dari studinya. Teks-teks itu dengan sendirinya membentuk sebuah antologi kearifan mistik (*an anthology of mystical wisdom*) yang seharusnya dikaji secara seksama oleh mereka yang berminat pada studi Islam dan perempuan.

Berbeda dengan cita ideal Islam dan perempuan dalam al-Qur'an serta kosmologi kearifan esoteris Islam sebagaimana dijelaskan di atas, seringkali dijumpai nalar fikih eksoterik yang tidak selamanya sejalan dengan visi kitab suci. Misalnya, konservatisme eksoterik dapat menjadi penghalang bagi kemajuan Islam. *Al-Islam mahjubun bilmuslimin*, kemajuan Islam dapat terhalang oleh kesalahan nalar dan sikap kaum muslim sendiri.

Membedah Konservatisme

Dalam masyarakat muslim seperti Indonesia, Islam menjadi kerangka normatif bangsa karena pemeluknya yang mayoritas. Oleh karena itu, konstruksi gender dan seksualitas banyak dipengaruhi oleh pemikiran keagamaan yang berkembang di masyarakat (Ruhaini, 2002:vii). Pemahaman keagamaan yang melibatkan dimensi kreatif manusia, menjadikannya tidak "tabu" untuk ditelaah ulang. Sangat mungkin, jika apa yang selama ini dianggap sebagai kebenaran doktrin agama ternyata adalah sesuatu yang *socially constructed* (Peter L. Berger dan Luckmann, 1966).

Semakin luasnya akses perempuan dalam pendidikan serta partisipasi publik telah mendorong kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan anak. Kecenderungan ini menuntut pembacaan progresif terhadap konstruksi dan nalar konservatif yang dipertahankan dalam fikih eksoterik keluarga Indonesia. Nalar konservatif berakar dari kuatnya benteng normativitas fikih yang dibangun oleh kelompok eksotetik.

Pembacaan progresif menawarkan upaya *ijtihadi* (pemikiran serius) yang relevan dengan dinamika zaman dan tetap berpegang pada otoritas kitab suci. Implikasi teoretiknya adalah terbangunnya paradigma baru yang mengadaptasi ilmu kemanusiaan kontemporer dalam pembacaan fikih. Implikasi praktisnya adalah tersedianya panduan etis-normatif dalam mengamalkan ajaran fikih

yang menghargai harkat dan martabat semua jenis makhluk Tuhan. Oleh karena itu, perlu dilacak akar persoalan yang menimpa kajian dan praktik fikih di masyarakat.

Merujuk pada argumen Masdar F. Mas'udi (1991:1), konservatisme fikih bermula dari abad ke-3 Hijriyah (ke-9 Masehi) yang ditandai dengan masa kemunduran umat. Persoalannya bukan karena tidak adanya norma yang dipegang, namun justru karena telah dibakukannya norma-norma itu. Dikokohnya pilar-pilar mazhab dalam Islam, telah menjadikan umat Islam "malas berpikir". Lambat laun mereka mengalami kemandekan dalam dunia pemikiran.

Menurutnya, setidaknya ada dua modus untuk menghindar dari kemungkinan pembaruan. *Pertama*, dengan menciptakan mitos seolah-olah keinginan pembaruan ajaran hanya dapat dipenuhi oleh kualitas keulamaan terdahulu. Elit agama berusaha mempersempit kemungkinan pembaruan, dan menakut-nakuti setiap orang yang ingin memasuki wilayah ijtihad. *Kedua*, setiap pemikiran ulang dan pembaruan, seringkali dinilai sebagai "jalan sesat" yang akan mengganggu stabilitas keagamaan umat yang sudah mapan. Pola pemikiran ini disebut oleh Arkoun (1990:116) sebagai "sakralitas pemikiran keagamaan" (*taqdis al-afkar ad-diniyyah*).

Arus konservatisme merupakan akibat dari masa traumatik berupa instabilitas masa kekhilafahan. Kegoncangan tidak saja terjadi di bidang politik, tetapi juga di dunia pemikiran keagamaan. Instabilitas politik mewarnai panggung pertengkar para umara, sedangkan instabilitas teologis terjadi di pentas perdebatan para ulama. Dalam pengamatan Mas'udi (1991:2), tugas keulamaan yang semestinya berorientasi mencipta (kreasi) kemudian teredusir pada tugas yang ditujukan untuk memelihara (konservasi). Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan, tugas keulamaan adalah mengelaborasi konsep standar yang dibangun oleh para pendahulunya. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat, tugas mereka adalah memberikan keteladanan dalam mengamalkan ajaran Islam yang sudah dibakukan.

Konsep keagamaan yang telah dibakukan itu dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Apa yang sudah dibakukan oleh para ulama terdahulu, harus diikuti dengan ketaatan yang nyaris tanpa batas. Kenyataan kehidupan

umat Islam hampir tidak mampu menggerakkan nalar pembaruan. Penyesuaian bukanlah sesuatu yang dapat terjadi pada rumusan ajaran, tetapi sebaliknya kebutuhan dalam kehidupan umat yang harus menyesuaikan diri dengan bunyi ajaran. Konsep keagamaan seakan menjadi kebenaran abadi yang selalu dipelihara oleh para ulama dari dulu sampai hari ini (Mas'udi, 1991:2).

Dalam rentang sejarahnya yang sangat panjang, lebih dari 10 abad, menurut Abdurrahman Wahid (1991:ix), umat Islam telah mengabaikan amanat sosialnya, yang sangat jelas ditegaskan dalam ajaran Islam. Bukannya tidak ada dimensi sosial yang telah ditegaskan oleh umat dalam kehidupan politik maupun sosial, tetapi semua itu tampak sebagai sesuatu yang tidak memiliki kaitan organik dan fungsional dengan jantung keyakinan agama. Dengan komitmen sosialnya yang sangat eksplisit, Islam telah direduksi menjadi agama ritual yang hanya berurusan dengan kehidupan personal.

Di sisi personal umat, Islam memang masih membersitkan pengaruh, tetapi dalam dimensi kehidupan sosial, pengaruh itu hampir tidak terasa. Wahid (1991:x) menyimpulkan bahwa ketika umat Islam masuk dalam tatanan masyarakat feodalistik, mereka juga ikut berperilaku feodal. Ketika umat Islam berada dalam tatanan masyarakat borjuis-kapitalistik, mereka juga bersikap sama. Sisa-sisa imperialisme kultural ini dikritik secara tajam oleh "Kiri Islam" Hassan Hanafi (Shimogaki, 1993:39).

Begitu seterusnya, ketika umat Islam berada dalam tatanan masyarakat patriarkhis, konservatif, dan bias gender, mereka juga ikut mengukuhkannya. Dengan tidak adanya ketegasan sikap semacam itu, maka tidak mengherankan jika keberadaan fikih eksoterik tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh konservatisme. Diperlukan upaya serius agar dominasi fikih eksoterik dapat digeser dengan jalan memperkuat perspektif sufistik-esoterik.

Wasana Kata

Dengan derasnya arus informasi dan berkembangnya media sosial yang digandrungi generasi muda milenial, sangat mungkin mereka akan terlepas dari belenggu konservatisme. Jika ini yang terjadi, dinamika keagamaan generasi muda akan berlangsung dengan sehat. Sebaliknya, jika mereka terpapar oleh

ideologi radikalisme, justru akan sangat membahayakan masa depan Islam dan juga masa depan Indonesia. Nalar radikalisme jauh lebih merugikan peradaban bangsa Indonesia dibandingkan dengan nalar konservatisme yang juga problematis itu.

Kita, para murid intelektual Bu Partini memiliki kewajiban moral untuk mengembangkan riset dan pemberdayaan perempuan dan gender di era milenial. Kesabaran, ketekunan, dan kasih sayang Bu Partini, telah mengisi “tangki cinta” keluarga dan lingkungannya. Bu Partini telah berhasil mengarungi samudera dunia realitas laki-laki sekaligus memikul cita-cita ideal yang harus diwujudkan oleh politik kesetaraan gender sebagai seni kemungkinan (*the art of the possible*).

Selamat (Sem)Purna Tugas Prof. Partini. Sukses selalu dan penuh berkah.

Referensi

- Arkoun, Muhammad. 1990. *Al-Islam: al-Akhlaq wa as-Siyasah*. Beirut: Markaz al-Inma' al-Qaumi.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality, a Treatise in The Sociology of Knowledge*. New York: Double Day & Company.
- Berger, Peter L. 1969. *The Secred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchors Books.
- Mas'udi, Masdar F. 1991. *Agama Keadilan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- _____. 2010. *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda?*. Bandung: Mizan.
- Murata, Sachiko. 1992. *The Tao of Islam, A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*. New York: State University of New York Press.
- Partini. 1990. “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Sosiologi: Studi Awal Tentang Pembantu Rumah Tangga di Yogyakarta”, *POPULASI Jurnal Kependudukan dan Kebijakan UGM*.
- _____. 2008a. *Partisipasi Politik Perempuan Abad 21*. Yogyakarta: LSIP (Lembaga Studi Islam dan Politik).
- _____. 2008b. “Penggunaan Statistik dalam Penelitian Sosiologi”, *DIMENSI Jurnal Kajian Sosiologi*.

- _____. 2012a. "Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1 No. 2, 2012.
- _____. 2012b. "National Character Building in the Third Millenium Era: A Challenge". *Southeast Asian Journal of Social and Political Issues*. Volume 1, Number 2, 2012.
- _____. 2013. *Bias Gender dalam Birokrasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 2017. *Perubahan Peranan Perempuan di Era Millenium: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Naskah Pidato Pengukuham Guru Besar Sosiologi FISIPOL UGM.
- _____. 2018. "Dinamika Isu Pernikahan Anak di Indonesia pada Media Baru", *IPTEK-KOM*, 20 (2).
- Ruhaini Dz., Siti. 2002. "Pengantar," dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN dan *The Ford Foundation*.
- Schimmel, Annemarie. 1992. "Foreword" in Sachiko Murata, *The Tao of Islam, A Sourcebook on Gender Relationship in Islamoc Thought*. New York: State University of New York Press.
- Shimogaki, Kazuo. 1993. *Kiri Islam: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*. terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula. Yogyakarta: LKiS.
- Sodik, Mochamad. 2013. "Hukum Keluarga Indonesia (Kritisisme terhadap KHI dan RUU HTPA)", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk.. *Menuju Hukum Keluarga Indonesia Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*, Yogyakarta: Suka Press - PSW UIN Sunan Kalijaga - *The Asia Foundation*.
- _____. 2014. *Fikih Indonesia, Dialektika Sosial Politik Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Suka Press.
- _____. 2015. *Melawan Stigma Sesat*. Yogyakarta: Disertasi Program Studi Sosiologi FISIPOL UGM.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wahid, Abdurrahman. 1991. "Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas", Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas'udi. *Agama Keadilan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.



Sosok “Kartini” itu Bernama ... PARTINI

Muhamad Sulhan



Jika anda tanya pada saya tentang siapa sosok ibu yang paling mengagumkan untuk diceritakan dari sisi kompleksitas seorang manusia, maka saya tak pernah ragu untuk menjawab Ibu Partini 'lah namanya. Begitu banyak alasan untuk jawaban itu. Akan tetapi saya akan bercerita sedikit saja mengapa jawaban itu muncul tanpa keraguan.

Pertama kali saya kenal wajah beliau adalah ketika menjadi panitia keakraban (semacam *gathering*) FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta pada tahun 2000. Waktu itu status saya adalah asisten peneliti, dan sehubungan dengan acara *gathering* tersebut mendapat tugas sebagai panitia *event organizer*. Lokasi tujuannya adalah Batu, Malang, Jawa Timur, dengan jumlah peserta sangat banyak. Di antara begitu banyaknya persiapan yang harus dilakukan, panitia utama memberikan catatan khusus berisi urutan nama-nama dosen. Panitia sudah tentu harus memperhatikan kebutuhan dan keperluan yang tentu juga berlainan sesuai karakter masing-masing dosen. Catatan khusus tersebut dibuat mengingat nama-nama yang dicatat untuk ‘diperhatikan’ adalah dosen-dosen berkepribadian unik. Terutama permintaan mereka kepada panitia mulai dari keperluan mereka yang super ribet seperti menemani anak mereka belanja, membelikan obat tekanan darah tinggi di tengah malam, permintaan letak kamar yang spesial, dan sebagainya. Pokoknya merepotkan. Namun bagaimanapun juga, keperluan itu

semua harus diutamakan. Salah satu nama yang tertera adalah ibu Partini, dosen jurusan Sosiologi. Kata panitia utama, beliau galak. *Wuiih.....* menakutkan.

Acara keakraban berjalan lancar. Sejak dari Yogya hingga Batu, Malang, dan Surabaya semua urutan kegiatan berjalan seperti *gathering* pada umumnya. Dari sepanjang acara, saya baru mengetahui bahwa nama ibu Partini merupakan sosok senior dengan fokus minat pada permasalahan gender. Bidang yang sangat menarik. Sepanjang acara berlangsung, saya tidak pernah kontak langsung dengan beliau, melainkan melalui sosok anaknya: Ita. Ita adalah mahasiswi semester awal Ilmu Komunikasi. Ita, kakaknya, dan saya berbincang sejenak di meja makan. Saya mengambil peran sebagai panitia yang memberi pelayanan. Ita menyapa saya dengan akrab seperti layaknya seorang mahasiswa pada dosennya, tanpa pretensi apa-apa. Salah seorang panitia mengingatkan saya, "Itu anak bu Partini lho!" dengan *tone* seperti ketika menelpon saluran 911. Saya cuma tertawa, *lha wong* Ita adalah mahasiswi Komunikasi, dan saya berprasangka positif tanpa tendensi.

Waktu terus berjalan hingga acara *gathering* berakhir dan sesudahnya, tidak pernah ada momen yang menjadikan saya dapat berhubungan langsung dengan ibu Partini. Oleh karena itu, saya mendapatkan semua perihal beliau hanya dari cerita dan desas-desus yang hampir semuanya bernada sangat unik. Ibu Partini adalah dosen *killer*. Ibu Partini sangat teliti dan tak mau kompromi sama sekali dengan kemalasan mahasiswa. Kemudian sampailah pada kesempatan yang mengharuskan saya menjalani posisi unik yang tak pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Nama beliau muncul menjadi salah satu penguji proposal disertasi saya. Tiba-tiba dunia terasa gelap. Terbayanglah segala kerumitan.

Hari itu, pukul empat sore. Proposal disertasi yang harus saya presentasikan barulah berisi $\frac{1}{4}$ keyakinan. Saya sadar bahwa selama 5 tahun jadi mahasiswa, saya sama sekali tidak pernah memikirkan disertasi. Antara terlalu santai, menikmati proyek, dan kemalasan menjadikan saya selalu menghindari setiap pembicaraan tentang disertasi. Akan tetapi pada sore itu saya harus menerima kenyataan. Duduk bagai pesakitan. Ditatap enam pasang mata penguji. Sepasang di antaranya adalah tatapan lembut Dr. Partini. Entah mengapa segala cerita yang pernah saya dengar tentang kegalakan, kerumitan, dan segala kesulitan

dari beliau hilang sirna entah ke mana. Beliau menguji dengan sangat lembut. Memantik ide baru sebagai tantangan yang harus disambut. Seluruh masukan dan saran atas struktur penulisan bersifat sangat konstruktif. Saya betul-betul menikmati proses ujian proposal disertai sore itu. Saya ingat bahwa saya justru lebih banyak bertanya daripada berpresentasi hingga waktu lewat pukul enam sore. Hasilnya: saya harus ujian proposal lagi. Ini bahasa lain untuk mengatakan bahwa saya tidak lulus..... #bangga

Sebagai mahasiswa doktoral, tentu saja saya *shock* bukan kepalang. Segala bentuk umpatan, cacian, dan kemarahan mengalir di dalam otak saya kepada sosok Sulhan yang telah menjalani ujian: *Begitu bodohnya dirimu! Begitu lalainya dirimu! Begitu corobohnya dirimu membuat proposal cuma seminggu!* Masih banyak lagi ragam kesal dan marah berpadu menjadi satu. Akan tetapi semua itu pelan-pelan menguap hilang. Penyebabnya cuma satu. Dr. Partini memperlakukan saya bukan semata sebagai mahasiswa. Beliau memperlakukan saya sebagai manusia pembelajar.

Perlakuan sebagai manusia pembelajar itulah yang saya dapatkan sepanjang menghabiskan waktu 1 tahun kemudian untuk menggarap disertasi dengan segala kesungguhan. Saya menikmati tatapan penuh kelembutan seorang ibu dari sosok arif ibu Partini. Saya paling intens melakukan bimbingan dengan penguji yang satu ini. Setiap kali saya mendatangi kantornya, saya tunggu beliau jika belum datang. Saya nikmati diskusi tentang substansi dan logika disertasi. Bahkan saya tidak hanya menikmati pengolahan isi disertasi sebagai sebuah karya akademik, melainkan juga senyum keramahan dan kepedulian sejati seorang ibu. Di situlah saya merasakan bahwa beliau betul-betul sosok yang harus ditiru.

Rasa kagum pada ibu Partini itulah yang begitu membekas dan membuat saya bertekad untuk mengadopsi gaya membimbing beliau untuk di kemudian hari, hingga hari ini. Sejak interaksi lebih intens berlangsung antara mahasiswa doktoral dengan dosen penguji, saya merasa bahwa beliau bukan saja cocok menjadi sosok dosen yang pantas diteladani. Lebih dari itu, ibu Partini adalah seorang panutan dengan penuh kearifan.

Tampaknya rasa tersebut tidak hanya berlaku bagi saya pribadi. Dalam berbagai kesempatan menguji proposal tesis bersama di program pascasarjana,

gaya menguji dan membimbing penuh kelembutan sosok ibu Partini juga diamini oleh begitu banyak mahasiswa pasca sarjana. Hampir semua mahasiswa yang pernah dibimbing dan diuji oleh ibu Partini sepakat bahwa pendekatan beliau dalam menemani mahasiswa memberikan banyak pencerahan. Layaknya seorang Kartini, beliau memberikan penerangan di tengah gelapnya rimba belantara menggarap karya akademis, entah itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Di mata beliau tak pernah ada kebodohan dan kemalasan mahasiswa. Yang ada hanya mahasiswa belum menemukan 'keasyikan' dalam belajar bersama. Pada titik itulah satu kekuatan luar biasa beliau menemukan relevansinya. Namanya kesabaran.

Kesabaran beliau tampaknya tidak muncul seketika. Kesabaran itu muncul setelah melalui berbagai peristiwa yang menurut cerita banyak pihak membentuk karakter beliau yang khas. Sejak muda ketika menjadi mahasiswa, semangat ibu Partini untuk menekuni profesi sebagai pembelajar tumbuh dan bertahan secara mengagumkan. Kesabaran itu pula yang mengiringi langkah beliau untuk tak pernah menyerah dalam membimbing, mengajar, dan memberikan pembinaan baik kepada mahasiswa maupun kepada institusi (oh ya, bu Partini juga seorang asesor yang penuh dedikasi). Hal itu ditambah pula dengan satu penghargaan luar biasa: beliau menjadi profesor perempuan satu-satunya di FISIPOL UGM hingga saat tulisan ini dibuat.

Kesabaran pula yang membuat energi beliau untuk bekerja seolah tak pernah ada habisnya. Mengajar di jurusan Sosiologi, berpindah ke sekolah Pascasarjana, menguji mahasiswa, dan dapat langsung pulang untuk menjaga cucu tercinta. Semua itu beliau jalani dan nikmati. Dan satu lagi, beliau selalu menyetir mobil sendiri, tanpa sopir. Setiap kali berjumpa, saat beliau sudah akan mengemudikan mobilnya, saya selalu mengetuk kaca mobilnya. Dengan bercanda saya berkata, "mari saya sopiri saja!" Jawabannya cerdas luar biasa, "saya tak kuat membayar Doktor untuk jadi sopir!" Lalu kami akan tertawa gembira bersama-sama.

Itulah Prof. Dr. Partini. Sosok sederhana luar biasa. Sosok penuh energi tak pernah sirna. Di mata saya pribadi, beliau bukan lagi seorang dosen. Beliau sudah saya anggap ibunda, panutan, dan selalu memberikan pencerahan. Sosok panutan yang biasanya melekat pada satu nama besar R.A. Kartini. Bagi saya

pribadi, seluruh nilai teladan seorang 'Kartini' telah melekat dan hidup di dalam keseharian sosok ini. Dalam hati saya berbisik, jika Indonesia memiliki nilai luhur seorang Kartini untuk dijadikan teladan, maka bagi saya pribadi, cukup hanya dengan meneladani dan menjiwai kesabaran dan keikhlasan dari sosok seorang Partini.

Jika Indonesia memiliki Kartini untuk diteladani, maka bagi saya pribadi, cukuplah dengan meneladani nilai-nilai kesabaran dan keteladanan dari sosok Partini.

Terima kasih dan selamat memasuki masa-masa kebebasan Prof.....

Nilai dan keteladananmu telah melekat luar biasa, abadi sepanjang masa.....

Rote'ndao, September 2019



Metodologi Feminis:

Refleksi Penelitian terhadap Kelompok Perempuan Marginal

*Fina Driyati¹ dan
Desintha Dwi Asriani²*



Tulisan ini akan membahas mengenai pengalaman penulis dalam melakukan penelitian dan menuliskan pengalaman dua kelompok perempuan marginal atau rentan dalam produk akademik. Penulis akan menceritakan refleksi dalam menjalani proses tersebut dan memaknainya sebagai hal yang memberdayakan bagi peneliti dan subjek penelitian. Refleksi berdasarkan dua kasus yang berbeda yaitu mengenai kehidupan perempuan dengan disabilitas dan remaja yang hamil di luar nikah melibatkan banyak aspek pergulatan mengingat posisi mereka sebagai kelompok yang rentan terhadap stigma, marginalisasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Oleh karena itu, meneliti dan menuliskan kisah subjektif mereka melibatkan emosi yang dalam sehingga menuntut kemampuan peneliti untuk lebih sensitif dan terus-menerus mempertimbangkan bagaimana dampak penelitian tersebut bagi kedua belah pihak. Proses mengolah, memaknai dan menuliskan data juga merupakan peristiwa yang sensitif karena bersentuhan dengan norma dan moral *mainstream* yang ada di masyarakat.

-
- 1 Dosen Sosiologi FISIPOL UGM yang ketika buku ini disusun, sedang menyelesaikan studi S3 di Australian National University (ANU), Australia.
 - 2 Dosen Sosiologi FISIPOL UGM yang ketika buku ini disusun, sedang menyelesaikan studi S3 di Ewha Women's University, Korea.

Selain pelibatan emosi dalam relasi antara peneliti dan subjek penelitian, ada hal lainnya yang menjadi pertimbangan peneliti dalam mengelaborasi kehidupan kelompok rentan dan marginal. Wolf (2018) mengatakan bahwa peneliti harus menyadari adanya isu kekuasaan, hierarki dan level kontrol yang tidak setara dalam hubungan peneliti dan subjek penelitian. Dia menekankan bahwa dimensi kekuasaan tersebut terjadi dalam hal ketidaksetaraan posisionalitas antara peneliti dan subjek penelitian, misalnya dalam hal kelas sosial, level pendidikan, akses, usia, pengalaman dan latar belakang lainnya yang menimbulkan perbedaan dan jarak yang semakin lebar. Dimensi lain dalam relasi kuasa antara peneliti dan subjek penelitian adalah proses penelitian yang rentan eksploitasi dan pelanggaran etis misalnya dalam hal pengungkapan hal-hal yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, malu, takut dan hal-hal lain yang bersifat rahasia yang sesungguhnya tidak ingin diungkapkan oleh subjek penelitian. Kemudian yang terakhir yang sangat penting diperhatikan dalam rangkaian penelitian adalah proses menuliskan kembali pengalaman subjek penelitian dalam bentuk sebuah karya akademik. Aspek representasi dan penempatan cerita informan di tengah-tengah tulisan sangat krusial untuk menghindari pelanggaran marginalisasi dan eksklusi posisi sosial mereka di masyarakat.

Dalam menuliskan karya akademik, penulis dituntut untuk dapat menempatkan aspirasi subjek penelitian secara proporsional sekaligus memberdayakan. Dalam mengelaborasi informasi, penulis dituntut untuk sensitif dan adil dalam menempatkan artikulasi subjek yang mengalami marginalisasi, eksklusi atau penindasan. Peneliti harus dapat memaknai ulang hal-hal *mainstream* yang selama ini menjadi indikator ketidakberdayaan perempuan, misalnya mengenai makna *silence* (diam). Aspek yang akan dibahas artikel pendek ini adalah bagaimana menempatkan dan membaca *silence* (diam) dan *secrecy* (kerahasiaan) sebagai suatu strategi yang *empowering* bagi subjek penelitian. Selama ini, bersuara, berpendapat dan berbicara sering dianggap sebagai bukti keberdayaan dan agensi seorang perempuan (Parpart, 2013). Serta, wacana besar mengenai pemberdayaan melalui melihat *voice* sebagai indikator utama kekuatan perempuan dalam proses perlawanan mereka terhadap otoritas patriarki (Kabeer, 1999).

Sementara itu, *silence* dianggap sebagai simbol kepasifan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Mereka yang tidak berbicara dianggap sebagai tidak ber-

daya, tidak mampu bertindak dan berkontribusi pada perubahan (Gal dalam Parpart, 2013). Sementara itu, pengaruh dari Barat mengatakan bahwa *voicing* (bersuara) dianggap sebagai kekuatan agensi dari seorang individu, sinyal kuasa, kemerdekaan, kebudayaan dan peradaban (Kawabata dan Gastaldo, 2015; Malhotra dan Rowe, 2013). Padahal sejatinya, perempuan dengan berbagai macam latar belakang sosial dan budaya mempunyai latar belakang, sejarah hidup, pengalaman dan konteks yang berbeda satu sama lain sehingga mempengaruhi cara mereka berpikir dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, relasi biner dari makna *voice* dan *silence* semestinya ditempatkan sesuai konteks dan situasi karena jika penulis memaknai *silence* hanya sebagai simbol ketidakberdayaan, maka variasi dan kedalaman makna tersebut sebagai bentuk strategi perempuan bisa terabaikan.

Dalam konteks penyandang disabilitas perempuan, *silence* juga dapat berarti sebagai representasi internalisasi dari ketidakadilan yang dialami dalam jangka panjang dan juga karena ketiadaan akses fisik dan sosial. Sehingga dalam konteks penyandang disabilitas, *silence* merupakan cara bagi perempuan untuk tetap dapat memperoleh akses bantuan mobilitas dari orang sekitar. Dalam konteks kehamilan remaja, kontekstualisasi *silence* dapat ditemukan pada sebuah kondisi saat remaja perempuan yang belum menikah merahasiakan kehamilannya (*secrecy*). Upaya para remaja perempuan untuk menyembunyikan kehamilannya merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri mereka dari stigma. Dengan tidak mengungkap fakta kehamilannya, para perempuan remaja adalah sedang mensiasati perasaan malu, takut, dan gelisah yang pada saat bersamaan terdapat kesadaran bahwa kehamilan tersebut akan menjadikan mereka mendapat stigma dan pengucilan sosial.

Sementara itu, di sisi lain, pengakuan sosial adalah modal utama yang dibutuhkan perempuan remaja untuk membangun identitas dan eksistensinya terutama sebagai pelajar dan generasi muda. Citra diri sebagai perempuan remaja sangat erat kaitannya dengan tren remaja zaman sekarang (*teenager nowadays*) yang lebih mengutamakan pendidikan dan karier masa depan sebagai narasi utama konstruksi identitas remaja. Dengan kata lain, tindakan merahasiakan kehamilan merupakan strategi dalam merespons wacana utama definisi masyarakat tentang perempuan remaja ideal saat ini.

Oleh karena itu *silence* juga perlu dibaca sebagai upaya dan strategi dalam proses mereka mengusahakan agensi dalam tahap-tahap kehidupannya. Merujuk pada *frame* di atas mengenai relasi kuasa dalam proses penelitian dan penulisan, dua kasus berbeda di bawah ini merefleksikan dan memaknai *silence* (diam) dan *secrecy* (kerahasiaan). Penelitian tentang penyandang disabilitas perempuan dilakukan dalam konteks pascabencana gempa bumi 2006 di Bantul, Yogyakarta. Dalam pemulihan jangka panjang kehidupannya, perempuan penyandang disabilitas penyintas gempa bumi 2006 mengalami banyak tantangan dan pergulatan yang selama ini tidak terekam dalam proses rekonstruksi identitas mereka. Mereka mempunyai pengalaman subjektif yang berbeda dengan perempuan penyandang disabilitas lainnya sehingga untuk melihat strategi mereka dalam berinteraksi secara sosial dengan keluarga dan masyarakat serta relasinya dengan struktur negara, peneliti harus jeli dalam melihat pengalaman kompleksitas kehidupannya baik sebelum dan sesudah bencana. Sementara itu, studi mengenai kehamilan perempuan remaja yang belum menikah juga dilakukan di Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan etnografi dan metodologi feminis, penelitian ini mewawancarai subjek perempuan remaja usia 16–19 tahun yang memiliki pengalaman kehamilan ketika mereka masih bersekolah dan belum menikah.

Cerita Perempuan Penyandang Disabilitas Pascabencana

Refleksi sebagai peneliti penyandang disabilitas perempuan menyisakan hal-hal tantangan, dilema, kontradiksi yang berhubungan dengan relasi peneliti dan subjek penelitian. Posisi di dalam hierarki sosial yang tidak setara antara peneliti dan informan berlangsung sebelum, selama dan sesudah proses penelitian. Hierarki dan kesenjangan tersebut harus disadari dan menjadi pertimbangan terus-menerus karena menimbulkan dampak etis serta berpengaruh terhadap hasil penelitian dan kebijakan di masa yang akan datang (Bourke, 2104). Refleksi tersebut penting dalam riset etnografi karena peneliti harus memikirkan mengenai latar belakang subjek penelitian, bagaimana dan dalam kondisi seperti apa, termasuk menyadari potensi bias karena peneliti juga membawa subjektivitas mereka sendiri. Pada intinya, reflektivitas berarti menempatkan diri dalam penelitian etnografi di mana produksi pengetahuan menjadi tujuannya (Atkinson, 2005).

Dalam proses penelitian terhadap penyandang disabilitas fisik, peneliti menyadari ada ketidaksamaan kuasa antara peneliti dan subjek penelitian karena hierarki sosial ekonomi dan hegemoni *abled-bodiedness* sebagai simbol standar manusia ideal. Perempuan penyandang disabilitas bahkan harus mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi karena stigma kelas sosial, seksualitas, serta kondisi tubuh yang menimbulkan prasangka ketidakmampuan (*incapability*), belas kasihan (*pity*) dan kekikukan (*awkwardness*). McRuer (2010) mengemukakan konsep *compulsory able-bodiedness* yang dalam *setting* kultural yang dominan, *disability* dipersepsikan sebagai kurangnya kesempurnaan (*lack of perfection*), sehingga seseorang dengan disabilitas dianggap sebagai kategori individual di luar norma yang harus disembuhkan atau diperbaiki supaya mendekati tubuh yang standar (*as able-bodied as possible*). Oleh karena itu, sangat dipahami jika dalam konteks tertentu informan memilih *silent* (diam) karena konstruksi hegemonik mengenai tubuh yang sempurna, sehat, kuat dan independen terinternalisasi di dalam pikiran dan praktik kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, supaya dapat membedakan dan memaknai berbagai macam bentuk *silence*, peneliti harus dapat membangun komunikasi yang dapat membangun kedekatan tanpa membuat subjek penelitian merasa canggung atau tidak nyaman (Booth dan Booth, 1996).

Dari pengalaman berinteraksi dengan perempuan penyandang disabilitas, peneliti menganalisis bahwa diam yang mereka lakukan bukan diam karena mereka lemah, pasif dan tidak berdaya seperti yang digambarkan oleh stereotipe umum mengenai perempuan dengan disabilitas. Ranah peran gender, seksualitas, citra diri dan aksesibilitas merupakan tantangan yang menjadi bagian dari kehidupan personal mereka. Sehingga strategi, negosiasi dan resistensi sudah menjadi praktik keseharian mereka. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, karena kuatnya hambatan ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan individu perempuan dengan disabilitas, diam merupakan salah satu strategi perempuan tersebut dalam menegosiasikan tantangan kehidupan mereka. Dalam diamnya, ibu-ibu penyandang disabilitas tetap melakukan tugas domestiknya di rumah karena tidak ingin menjadi beban tambahan bagi pasangan dan anak-anaknya. Ketika tersedia aksesibilitas di dalam rumah, mereka tetap berusaha untuk menjadi ibu yang ideal bagi anak-anaknya. Dengan tetap melakukan perannya di rumah sebagai ibu dan istri yang memperhatikan

anak-anak dan pasangannya, mereka bisa menegosiasikan kepentingannya untuk melakukan mobilitas atau berinteraksi secara sosial di luar rumah. Dengan diam, menjalankan tugas keibuan dan menjaga kewibawaannya sebagai tiang rumah tangga, dukungan dan bantuan aksesibilitas dari anggota keluarga akan mudah didapatkan.

Aspek lain yang menuntut strategi adalah bagaimana berhadapan dengan hegemoni mainstream mengenai citra diri dan seksualitas. Perempuan dengan disabilitas harus menghadapi stereotipe mengenai *image* mereka sebagai makhluk aseksual. Ketika berhadapan dengan non-penyandang disabilitas, mereka menyadari bahwa mereka harus berkonfrontasi dengan asumsi bahwa mereka tidak menarik, tidak wajar dan aseksual. *Gaze* (pandangan mata), kehadirannya tidak dikenali, serta hal-hal lainnya membuat stereotipe tersebut terinternalisasi di dalam pikiran penyandang disabilitas. Duduk di kursi roda juga berimplikasi pada ketidaksamaan posisi bicara antara penyandang disabilitas kursi roda dan lawan bicara membuat situasi tidak nyaman bisa terjadi pada kapan saja dan tidak dapat selalu diantisipasi. Hal-hal tidak biasa dalam interaksi dengan non-penyandang disabilitas membuat perempuan penyandang disabilitas tersebut memilih diam dalam situasi-situasi *awkward* dan berada di luar kontrol mereka. Hal tersebut disebabkan karena prasangka dan kekikukan merupakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan secara lugas dengan orang lain atau lawan bicara. Untuk merespons hal tersebut, penyandang disabilitas terkadang melakukan resistensi dengan berkonfrontasi melalui tatapan mata. Meskipun resistensi tidak terjadi setiap saat, tetapi ada waktu-waktu tertentu mereka melakukan hal tersebut untuk melindungi diri sendiri, *survive* dan mendapatkan kembali *sense of self-worth* (harga diri) mereka.

Selain itu, masalah tubuh dan kesehatan reproduksi juga tidak dapat dibicarakan dengan orang lain secara terbuka karena menimbulkan efek tidak nyaman karena ketimpangan pengetahuan dan pengalaman antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Pengalaman tubuh yang berbeda dengan perempuan lain membuat perempuan dengan kursi roda tidak dapat bercerita banyak dengan perempuan lain. Hal tersebut disebabkan karena ada rasa malu untuk menceritakan kondisi tubuhnya secara detil karena keengganan untuk membuat lawan bicara berada pada kondisi tidak nyaman. Strategi yang mereka lakukan

adalah dengan melakukan kontrol diri dan memperkuat *inner strength* (kekuatan batin) sehingga mereka dapat berhadapan dengan situasi apa pun. Dalam banyak hal tidak dipungkiri perempuan penyandang disabilitas harus meminta bantuan dari orang lain supaya bisa melakukan tugas individu, peran gender serta peran sosialnya. Sehingga kemampuan untuk memilah dan bersikap kapan harus mengontrol diri dan meminta bantuan orang lain merupakan agensi spesifik dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perbedaan ekspresi dalam berbicara, bersuara dan mengemukakan pikiran tidak bisa disamakan dengan perempuan lain. Terdapat banyak alternatif moda ekspresi perempuan dengan disabilitas yang berbeda termasuk ekspresi diam mereka. Diam juga berarti menunggu saat yang tepat bagaimana menggunakan variasi strategi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Masalah mengenai penggunaan ekspresi diam juga pernah dikemukakan oleh Gal (1991) yang mengamati bahwa diam tidak selalu identik dengan kepasifan dan ketidakberdayaan perempuan dan kelompok yang tersubordinasi lainnya. Diam dapat mengandung kekuatan transformasi dan merupakan elemen penting dari agensi subjek perempuan. Peneliti menghubungkan dengan agensi perempuan di Mesir di mana perempuan muslim di sana memperkuat keimanan dan kesalehan dalam rangka merespons situasi yang diskriminatif. Mahmood (2001) menjelaskan bahwa kesabaran merupakan salah satu elemen dari agensi karena bagi perempuan ada hal-hal yang tidak bisa mereka rubah yaitu nasib dan takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Analogi tersebut tepat untuk menggambarkan perempuan dengan disabilitas yang mana keadaan mereka menjadi *survivor* gempa bumi 2006 membuat mereka harus menjalani keadaan sebagai pengguna kursi roda sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa kesabaran (*patience*) dan kontrol diri melalui kekuatan batin menjadi sumber energi mereka untuk bertahan. Kontrol diri yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka harus mengambil sikap *silent* atau *voicing*. Hal tersebut membutuhkan sensitivitas yang tinggi karena berkaitan dengan keputusan bagaimana memposisikan dirinya dalam konteks sosial.

Prasangka dan stigma dari masyarakat karena anggapan mereka *incapable*, *lack of body control* dan interseksi lainnya yang berkaitan dengan posisi rentan mereka di masyarakat sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Karena

kondisi masyarakat kita yang komunal, perempuan dengan disabilitas harus terus menegosiasikan kepentingannya dalam kehidupan sehari-hari karena *sense of belongingness* dan perasaan diterima sebagai anggota masyarakat merupakan sesuatu yang tidak murah. Perasaan diabaikan, dikasihani dan disepelekan selalu menyertai dalam fase kehidupan mereka setelah bencana. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi atas diri mereka sudah berada di luar kontrol dan sesuatu yang ideal sudah di luar jangkauan mereka. Jadi, diam dapat berarti resistensi, menahan diri dan bernegosiasi dalam usahanya *survive* dalam kehidupan individu, keluarga dan sosial. Oleh karena penulis memaknai *silence* bukan hanya sebagai karakter ketidakberdayaan dari penyandang disabilitas tetapi ada interpretasi lain sesuai dengan kondisi dan konteks ketika praktik diam itu berlangsung. Diam merupakan spiritualitas, keseimbangan diri (Konscianska, 2009) yang mana hal-hal eksternal tidak menjadi tekanan tetapi menjadi energi untuk bersiasat.

Kehamilan yang Dirahasiakan: Ketika Perempuan Remaja yang Terstigma Bersuara

Cerita yang kedua adalah mengenai kehamilan remaja di usia sekolah. Dilihat dari sudut pandang feminisme, penelitian terhadap pengalaman kehamilan pada remaja yang belum menikah setidaknya menghasilkan dua pembelajaran. *Pertama*, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memberikan ruang bagi subjek yang distigma dan “dihilangkan” dari struktur sosial tertentu agar mereka dapat mengartikulasikan gagasannya. Narasi tersebut dapat digunakan sebagai input produktif dalam upaya memahami struktur sosial yang ada di dalam masyarakat tertentu. Lebih lanjut, peneliti melihat bahwa studi berbasis pengalaman keseharian dapat digunakan untuk mengungkap bentuk kontrol sosial terkait pembudayaan tatanan bias gender yang khas pada kelompok remaja. *Kedua*, problematisasi *secrecy* pada kasus kehamilan remaja memungkinkan peneliti untuk membongkar bagaimana kontestasi kebenaran (*truth*) di dalam masyarakat sedang berlangsung. *Truth* di sini terkait dengan bagaimana esensi perempuan remaja ideal dan kategorisasi feminitas perempuan remaja direproduksi sebagai sebuah wacana (*discourse*) dalam konteks kekinian. Bagian

ini akan menjelaskan dua proses pembelajaran tersebut dalam kaitannya dengan refleksi peneliti terhadap penggunaan metodologi feminisme pada pembacaan fenomena sosial di kalangan perempuan remaja.

Narasi keseharian yang dikedepankan dalam penelitian kehamilan remaja ini digunakan untuk melihat makna sosial di balik proses konstruksi stigma yang diberlakukan dalam masyarakat. Secara umum, kehamilan sering dijadikan sebagai tanda apakah identitas perempuan remaja tersebut (masih) layak mendapat pengakuan secara sosial. Ketika perempuan remaja mendapat stigma berarti subjek perempuan remaja itu sedang atau telah “dihilangkan” dari kelompok atau organisasi yang sebelumnya memberikan legitimasi atas identitasnya, seperti dari keluarga, komunitas, dan sekolah. Utomo dan McDonald (2009) menjelaskan bahwa kehamilan secara umum menyebabkan perempuan remaja yang belum menikah mengalami berbagai kesulitan. Mereka harus menerima konsekuensi dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan di masyarakat, dan terpaksa tinggal berjauhan dari keluarga karena harus tinggal di “rumah nyaman”. Narang (2016) menyebutkan bahwa kasus kehamilan pada perempuan remaja yang belum menikah biasanya tidak benar-benar disadari kecuali para guru, orang tua, atau tetangga menyadari bahwa tubuh gadis tersebut terlihat berubah. Sementara itu, oleh karena perempuan remaja tidak memiliki kemampuan mengelola risiko perilaku seksual sebelum menikah, mereka cenderung merahasiakan kehamilannya. Mereka sadar bahwa stigma dan pengucilan sosial dapat menjadikan dirinya merasa tidak lagi memiliki manfaat secara sosial. Goffman (1963) menjelaskan bahwa stigma sangat erat kaitannya dengan konsekuensi moral atas suatu penyimpangan norma sosial yang menyebabkan terjadinya kerusakan identitas (*spoiled identity*) pada diri individu.

Akan tetapi fenomena kehamilan remaja tidak dapat direduksi sebagai persoalan moral. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa isu kehamilan remaja yang belum menikah saling tumpang tindih dengan isu sosial lainnya seperti gender, hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, relasi kuasa, hierarki usia, dan modernitas. Namun jika dilihat melalui cara pandang positivisme, realitas sosial yang saling berkelindan tersebut sangat sulit dipahami, diurai, dan dijelaskan. Penerepan paradigma strukturalisme justru sangat rentan pada reproduksi cara pandang yang bias terhadap perempuan remaja itu sendiri. Pe-

nelitian ini beranggapan bahwa kehamilan remaja tidak dapat hanya dilihat sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma yang sedang dilakukan oleh perempuan. Tulisan ini tentu saja tidak untuk mengkonstruksi dalih pembenar terhadap kehamilan maupun perilaku seksual perempuan remaja tersebut. Namun studi ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana kasus kehamilan remaja merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak dapat dipahami dengan kesimpulan bahwa perempuan remaja memang layak untuk distigma.

Oleh karena itu, problematisasi tentang *secrecy* pada kasus kehamilan remaja memungkinkan perempuan remaja untuk mengungkap makna hubungan antara dirinya dengan dunia sosialnya. Secara metodologis, etnografi dapat dijadikan sebagai alat penelitian yang sesuai. Hal ini didasarkan pada gagasan yang menekankan bahwa etnografi memungkinkan peneliti untuk mendayagunakan kepekaan dalam mengamati, mendengar, dan mempertanyakan apa yang sedang seseorang atau kumpulan orang lakukan (Hammersley dan Atkinson, 1983). Di saat bersamaan, proses dan hasil pengamatan kehidupan sehari-hari tersebut dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan pola budaya pada masyarakat tertentu (Spradley, 1980; Geertz, 1973). Namun, pendekatan etnografi secara normatif tidak memiliki perangkat yang cukup untuk mengeksplorasi keseharian subjek yang telah “dihilangkan” dalam struktur masyarakat tertentu. Sementara itu, metodologi feminis berangkat dari kesadaran untuk melakukan advokasi terhadap kelompok perempuan yang dianggap berbeda untuk mendefinisikan esensi subjektivitas mereka sendiri (Harding, 1986). Selain itu, metodologi feminis juga terkait dengan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bersama (*consciousness raising*) (McKinnon, 1982) dalam menyuarakan pengalaman sebagai objek yang teropersi sekaligus mengupayakan perubahan (Mies, 1978). Naples bahkan (2003) berpendapat bahwa pendekatan feminisme memiliki kontribusi terhadap pengembangan kajian antropologi, dalam kaitannya dengan pendeskripsian keseharian kelompok marginal. Penelitian berbasis pengalaman keseharian yang dikontekstualisasikan pada gagasan feminisme ini pada gilirannya dapat membantu menguraikan fakta sosial yang sangat kompleks di dalam masyarakat, termasuk struktur relasi kuasa yang ada di dalamnya.

Alih-alih berfokus pada justifikasi atas stigma terhadap perempuan remaja, penggunaan metodologi feminis pada kasus kehamilan remaja yang belum

menikah justru mengungkap idealisasi dan konstruksi femininitas perempuan remaja saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma terhadap kehamilan perempuan remaja adalah bentuk oposisi dari idealisasi perempuan remaja yang saat ini dikembangkan oleh masyarakat. Secara umum, perempuan remaja saat ini diidentikkan dengan mereka yang bersekolah dan memiliki orientasi kemandirian terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Realitas ini juga terkait dengan transformasi gaya hidup modern pada kelompok anak muda saat ini. Namun pengalaman berbasis gender menjadikan proses transformasi yang dialami remaja laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk mewujudkan ambisi pada nilai modernitas, perempuan harus senantiasa waspada bahwa tubuhnya memiliki jejak femininitas yang bertentangan dengan nilai modernitas itu sendiri. Pada kasus kehamilan remaja, kehamilan dilihat sebagai masalah yang membentangkan kontradiksi antara status sebagai pelajar dan ibu, dan antara keseharian di sekolah dan rumah tangga. Maka untuk menjadi subjek modern, perempuan remaja “diharuskan” menjadi pelajar yang mana standarisasi pelajar ada pada tubuh dan subjektivitas pelajar laki-laki. Dengan kata lain, perempuan pelajar harus senantiasa perawan, tidak menikah, tidak hamil, dan berjarak dengan simbolisasi femininitas yang “kuno”. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan dikucilkan oleh masyarakat.

Dengan memberikan ruang untuk bersuara pada perempuan remaja yang “terpaksa” merahasiakan kehamilannya, studi ini pada akhirnya membongkar kontestasi kebenaran tentang makna menjadi perempuan remaja saat ini. Faktanya, upaya untuk merahasiakan kehamilan juga didasarkan pada kehendak para perempuan remaja tersebut untuk mempertahankan status “tidak menikah”-nya. Meskipun kehamilannya dapat menyebabkan stigma, mereka menolak untuk menikah. Para perempuan ini khawatir kalau pernikahan akan membatasi ruang gerak mereka untuk memenuhi hasrat menjadi perempuan yang independen di masa depan. Jika aborsi tidak berhasil dilakukan, mereka memilih untuk melahirkan di “rumah nyaman” lalu melanjutkan sekolah di pesantren, mengikuti ujian penyeteraan kejar paket atau bekerja. Garber (1991) menyebutkan bahwa kultur perempuan remaja (*girlhood*) saat ini merupakan salah satu fenomena post-feminisme, dalam mana para perempuan muda berupaya melakukan klaim tentang kebaikan dari nilai-nilai femininitas dan hakikat

menjadi perempuan yang independen. Dengan demikian, pembacaan terhadap kasus kehamilan berikut sikap perempuan remaja tentang pernikahan tidak harus didasarkan pada ideologi normatif yang bias gender dalam kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan tindakan menyimpang. Memang, berdasar kaidah masyarakat heteronormatif, keputusan tidak menikah bisa jadi disebut sebagai anomali sebab kehamilan telah dinormalisasi sebagai “syarat” untuk “menyempurnakan” fungsi reproduksi seorang istri. Namun berdasarkan narasi perempuan remaja, keengganan untuk menikah adalah sebuah mekanisme konstruktif yang merefleksikan bahwa konsepsi subjek tidak dilahirkan dari proses generalisasi, melainkan melalui rekognisi terhadap pengalaman sosial dan kesadaran personal yang berbeda. Lebih lanjut studi tentang kehamilan remaja berikut kumpulan narasi dari subjek riset dapat ditangkap sebagai upaya dalam melihat sejauh mana transformasi sosial di kalangan perempuan remaja saat ini direspons dengan kebijakan, perlindungan sosial, dan pendidikan kesehatan reproduksi yang advokatif terhadap fakta bahwa perbedaan gender (*gender differences*) menghasilkan pengalaman yang berbeda pada kelompok perempuan remaja. Sehingga perempuan remaja memiliki keleluasaan dalam mengekspresikan aspirasinya pada konteks kekinian dan terhindar dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

Dari dua kisah kelompok perempuan yang berbeda, penulis menyimpulkan bahwa struktur budaya *heteronormativity* dan hegemoni *abled-bodiedness* tidak memberi ruang bagi perempuan yang tidak memenuhi standar ideal budaya, agama dan ketubuhan. Padahal jumlah mereka makin banyak dan tidak bisa dianggap hanya sebagai masalah sosial yang muncul dalam angka statistik di laporan-laporan penelitian. Ada banyak suara subjektif yang harus didengarkan dan dipertimbangkan karena mereka merupakan kelompok yang mengalami variasi pengalaman individual yang berbeda konteks sosial dan budaya dengan perempuan lain. Selama ini, pengucilan, pengabaian dan hukuman sosial dianggap sebagai norma *mainstream* karena ketidaksesuaian posisi mereka dengan standar ideal di masyarakat. Lebih buruk lagi, perempuan-perempuan marginal tersebut banyak yang mengalami *double* atau *triple* marginalisasi karena interseksi

penindasan yang mereka alami. Misalnya penyandang disabilitas perempuan tidak hanya berhadapan dengan disabilitas fisiknya tetapi juga harus menghadapi kemiskinan dan kesulitan akses mobilitas. Sementara itu, remaja hamil harus menghadapi stigma karena terputusnya pendidikan, anggapan sebagai *pollutan* dari masyarakat dan risiko pernikahan dini. Dalam mengeksplorasi pengalaman hidup mereka, peneliti merasa harus berhati-hati dalam menganalisa dan menginterpretasikan suara dan diam mereka karena level penindasan struktural yang mereka alami sangat kuat dan akses untuk mendapatkan pertolongan tanpa kehilangan *dignity* (harga diri) mereka sebagai perempuan sangat minim. Oleh karena itu, penulis harus cermat mengamati agensi sehari-hari mereka termasuk mengelaborasi aspek emosi tanpa mengabaikan etika sehingga peneliti tidak menjadi orang yang melakukan penindasan berikutnya melalui representasi dalam tulisan. Penulis harus melakukan refleksi terus menerus dan bisa menyadari posisi hierarki yang tidak setara sehingga bisa empatik dalam mendengarkan dan tidak melabel mereka sebagai *passive victims* yang tidak berdaya dalam mengatasi tantangan dan konsekuensi serta risiko dalam kehidupannya.

Referensi

- Atkinson, P. 2005. September. "Qualitative research - Unity and Diversity". in *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* (Vol. 6, No. 3).
- Booth, T. and Booth, W. 1996. "Sounds of Silence: Narrative Research with Inarticulate Subjects". *Disability & Society*, 11 (1), pp. 55–70.
- Bourke, B. 2014. "Positionality: Reflecting on the Research Process". *The Qualitative Report*, 19 (33), pp. 1–9.
- Garber, J. 1991. "Girls and Subcultures". In *Feminism and Youth Culture*. (pp. 1–15). Palgrave, London.
- Gal, S. 1991. "Between Speech and Silence". *Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era*. pp. 175–203.
- Geertz, C. 1973. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture", in C. Geertz, *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Goffman, E. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Hammersley, M. and Atkinson, P. 2007. *Ethnography: Principles in Practice*. Routledge.
- Harding, S.G. 1986. *The science question in feminism*. Cornell University Press.
- Kabeer, N. 1999. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment". *Development and change*, 30(3), pp. 435–464.
- Kawabata, M. and Gastaldo, D. 2015. "The Less Said, the Better: Interpreting Silence in Qualitative Research". *International Journal of Qualitative Methods*, 14(4), p.1609406915618123.
- Kościańska, A. 2009. "The "Power of Silence": Spirituality and Women's Agency beyond the Catholic Church in Poland". *Focaal*, 2009(53), pp.56–71.
- MacKinnon, C.A. 2006. *Are Women Human?: and other International Dialogues*. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Mahmood, S. 2001. "Feminist theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival". *Cultural Anthropology*, 16(2), pp.202–236.
- Malhotra, S. and Rowe, A.C. (eds.). 2013. *Silence, Feminism, Power: Reflections at the Edges of Sound*. Palgrave Macmillan.
- McRuer, R. 2010. "Compulsory Able-bodiedness and Queer/Disabled Existence". *The Disability Studies Reader*, 3, pp.383–392.
- Mies, M. 1983. "Towards a Methodology for Feminist Research". *Theories of Women's Studies*, 117, p.139.
- Naples, N.A. 2013. *Feminism and method: Ethnography, discourse analysis, and activist research*. Routledge.
- Narang, S. 2016, *When Schoolgirls Become Mothers in Rural Indonesia*, AOL Inc, New York.
- Rowe, A.C. and Malhotra, S. 2013. "Still the Silence: Feminist Reflections at the Edges of Sound". In *Silence, Feminism, Power* (pp. 1–22). Palgrave Macmillan, London.
- Parpart, J.L. 2013. "Choosing Silence: Rethinking Voice, Agency and Women's empowerment". In *Secrecy and Silence in the Research Process* (pp. 34–48). Routledge.
- Spradley, J.P. 1979, *The Ethnographic Interview*, Holt, Rinehart And Winston, New York.

Utomo, I.D. and McDonald, P. 2009. "Adolescent Reproductive Health in Indonesia: Contested Values and Policy Inaction. *Studies in family planning*, 40(2), pp.133-146.

Wolf, D.L. 2018. "Situating Feminist Dilemmas in fieldwork". In *Feminist Dilemmas in Fieldwork* (pp. 1–55). Routledge.



Bagian 3



Persembahan untuk



Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi



Biografi

Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi



Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada 23 Desember 1949. Beliau menamatkan S1 dari Fakultas Geografi UGM dalam bidang Demography and Human Resource pada tahun 1976, S2 dari Flinders University, Adelaide, Australia tahun 1986 pada bidang Development, Population Mobility and Rural Poverty, dan S3 dari universitas dan pada bidang yang sama. Mulai 1977 hingga 2001, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi merupakan dosen di Departemen Human Geography, Fakultas Geografi UGM. Sejak 2001 menjadi dosen dan kemudian guru besar di Departemen Sosiologi, FISIPOL UGM hingga purna tugas. Selain mengajar dan membimbing mahasiswa, pada periode 1983–1999 beliau aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Kependudukan (kini PSKK: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) UGM.

Di luar kampus, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi banyak terlibat sebagai konsultan pada riset dan program yang terkait dengan isu ketenagakerjaan, seperti Skill Development Project (kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Bank Dunia, 1996), dan CIMU (Central Independent Monitoring Unit) yakni sebuah unit pengelola beasiswa dan *block grant* di bawah British Council yang didanai oleh ADB (Asian Development Bank), Bank Dunia, dan AusAID (Australian Aid).

Sebagaimana tercermin di dalam berbagai publikasi beliau, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi memiliki minat dan keahlian seputar topik-topik migrasi dan ketenagakerjaan. Telah tercatat ada 8 buku dan *book chapter* karya beliau yang

telah diterbitkan oleh penerbit internasional seperti Edward Elgar Publishing dan ISEAS Singapore. Buku beliau berjudul *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota* yang ditulis bersama kolega beliau, Profesor Chris Manning dari Australia pada 1985 telah dikutip oleh 225 penulis lain.

Berkat keahlian dalam isu-isu tersebut, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi telah banyak diminta untuk terlibat dan memimpin proyek-proyek di bidang ketenagakerjaan, seperti misalnya konsultan pada Skill Development Project kerja sama Ministry of Man Power dengan World Bank pada April 1996; konsultan untuk CIMU (Central Independent Monitoring Unit) yakni sebuah unit pengelola beasiswa dan *block grant* di bawah British Council yang didanai oleh ADB, Bank Dunia, dan AusAID pada 1999–2005. Kecuali itu, beliau juga menjadi peneliti pada riset Rural-Urban Migration in Indonesia in Four Indonesian Cities (Medan, Tangerang, Samarinda and Makassar), yang merupakan kolaborasi Australian National University dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada 2008–2011; dan riset “Modal Sosial dan Ikhtiar Bantul Bangkit” sebagai kerja sama Universitas Gadjah Mada dengan Australian National University dan dibiayai oleh ARC (Australian Research Council) tahun 2013. Pada 2017–2019, beliau menjadi Pengarah Komite Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan.



Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Kawasan Industri Pertambangan

Di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Suharka¹, D. C. Mulyono², Triyono³



Pengantar

Kawasan industri pertambangan terus berkembang di berbagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak, batubara, nikel, emas, dan lain-lain. Salah satu kawasan industri pertambangan yang berkembang pesat dalam 5–10 tahun terakhir terletak di kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah provinsi ini dan juga Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan memiliki kekayaan tambang berupa nikel. Hal ini telah mendorong sejumlah perusahaan pertambangan baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan bijih nikel, dan diikuti dengan operasi industri berbasis nikel.

Sejak akhir tahun 1960-an, sejumlah perusahaan pertambangan terutama dari luar negeri mendapat wilayah konsesi dan ijin penambangan, dan kemudian melakukan eksplorasi dan operasi penambangan serta pengolahan tambang di wilayah Bahodopi. Setidaknya terdapat 5 perusahaan pertambangan yang

1 Departemen Sosiologi dan PSPK UGM

2 Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM)

3 Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

beroperasi di wilayah ini. PT Vale yang berdiri tahun 1968, mengeksplorasi, menambang, mengolah dan memproduksi nikel di areal kontrak karya seluas 190.509 ha yang tersebar sebagian besar di Sulawesi Selatan, dan sebagian lainnya di Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Tenggara. PT Bintang Delapan Mineral mengantongi izin usaha pertambangan tahun 2010 dengan wilayah konsesi seluas 21.695 ha yang terletak di sembilan desa di kecamatan Morowali. PT Hengjaya Mineralindo dengan 80% sahamnya dari asing, memiliki area konsesi lahan seluas 6.249 ha di kecamatan Bahodopi. PT Ang and Fang Brother memiliki konsesi dan izin pertambangan di kecamatan Bahodopi namun belum aktif melakukan proses eksplorasi karena belum memiliki *smelter*. Sesuai dengan UU Mineral dan Batubara, sejak tahun 2014, perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki pabrik pengolahan bahan mentah atau *smelter*, dan dilarang mengekspor bahan mentah berupa ore (tanah yang mengandung biji nikel).

Perusahaan yang terbesar dan beroperasi secara intensif adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). PT IMIP yang berdiri pada tahun 2013 dan beroperasi sejak awal tahun 2015, merupakan perusahaan patungan antara investor dalam negeri dan luar negeri, yaitu Shanghai Decent Investment, PT Sulawesi Mining Investmen, dan PT Bintang Delapan Investama. PT IMIP menyediakan dan mengelola kawasan industri yang terintegrasi seluas 2000 ha, yang terdiri dari penambangan bijih nikel dan pengolahan bahan nikel (*smelter* nikel), industri peleburan nikel seperti baja nirkarat dan baja karbon, dan produk turunan berupa baterai lithium (PT IMIP, 2017). Sampai akhir tahun 2018, terdapat 29 pabrik yang beroperasi di kawasan industri tersebut, dan dalam waktu dekat akan bertambah 3 pabrik baru, yakni baja karbon, industri mangaan, dan baterai (Suarapalu, 2019).

Kawasan industri tersebut melibatkan 12 perusahaan *tenant* yang berbasis nikel, yang umumnya merupakan perusahaan patungan dari dalam dan luar negeri. Untuk menunjang operasi *smelter* dan operasi pertambangan, telah dibangun PLTU sebagai pemasok energi listrik bagi operasional kawasan industri tersebut, dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, telah dibangun sejumlah infrastruktur penunjang operasional kawasan industri, yakni perumahan (rusunawa), pelabuhan, bandara, poliklinik, dan pendidikan politeknik.

Kecamatan Bahodopi mencakup wilayah seluas 1.080,98 kilometer persegi. Sebagian wilayahnya berupa areal pantai yang menghadap ke laut Banda, dan sebagian yang lain berupa perbukitan atau pegunungan yang kaya dengan tambang nikel. Jumlah penduduknya pada tahun 2010 sebanyak 6.594 orang dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 7.517 orang, atau 6,41 % dari total penduduk kabupaten Morowali (117.330 orang). Jumlah penduduk tersebut tersebar di 12 desa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016–2017 tergolong rendah, yakni 1,75%, dengan kepadatan penduduk 6,46 per kilometer. Persentase penduduk miskin mencapai 14,55 % pada tahun 2017 (BPS Kabupaten Morowali, 2018). Angka tersebut lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional.

Data kependudukan tersebut tampaknya tidak menggambarkan penambahan penduduk yang terjadi karena perpindahan atau migrasi para pekerja yang datang dari luar daerah, baik yang bekerja di perusahaan industri pertambangan maupun yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa di wilayah tersebut. Kehadiran penduduk pendatang telah menambah keragaman sosio-kultural masyarakat. Mayoritas penduduk yang semula berasal dari etnis Bungku dan sebagian kecil dari etnis Jawa (transmigran), kemudian berkembang menjadi semakin heterogen karena hadirnya para pekerja dari berbagai etnis, seperti Makassar, Bugis, Toraja, dan etnis lainnya.

Kondisi wilayah desa-desa di sekitar kawasan industri itu pun berubah secara cepat, dari ciri fisik, ekonomi dan sosial yang bercorak pedesaan ke perkotaan. Secara fisik, pembangunan prasarana hunian dan bangunan untuk perdagangan meningkat pesat. Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Palu-Kendari, pada ruas jalan di wilayah kecamatan Bahodopi, semakin ramai dan padat. Prasarana jalan di kampung-kampung juga bertambah panjang dengan kualitas yang makin baik. Mobilitas warga menjadi lebih intens dan lancar. Warga masyarakat yang sebelumnya mendapatkan nafkah dari mengambil hasil hutan, usaha pertanian, dan usaha nelayan mulai berubah ke sektor perdagangan dan jasa. Banyak warga setempat, terutama yang berusia muda, menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan pertambangan, dan juga di usaha-usaha perdagangan dan jasa yang tumbuh di sekitar kawasan industri. Singkatnya, investasi dan operasi perusahaan pertambangan nikel telah menciptakan aktivitas perekonomian bagi masyarakat setempat dan menciptakan konektivitas wilayah (Nuraini, 2018:12).

Jika kawasan industri berbasis nikel didesain secara sengaja untuk tujuan tertentu, wilayah di sekitarnya tampak tidak didesain secara khusus, bahkan terkesan dibiarkan berkembang tanpa perencanaan yang terukur. Hal itu terlihat dari pertumbuhan wilayah yang bergerak secara acak tanpa pola yang jelas. Area permukiman dan area bisnis dan usaha berkembang secara tidak teratur. Jumlah pemilikan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, terus bertambah, tanpa diimbangi dengan transportasi publik. Arus lalu lintas di jalan raya pun padat dan sering macet. Jaringan limbah dan sanitasi tidak dibangun sehingga mengalir mengikuti sungai dan bentuk aliran air lain. Sampah bertumpukan di pinggir jalan, dan berbagai sudut area permukiman dan perdagangan, yang mengindikasikan ketiadaan pengelolaan yang memadai. Singkatnya, wilayah di sekitar kawasan industri pertambangan ini terkesan seperti “mendadak kota”, suatu area yang tampak mengalami ledakan jumlah penduduk dengan prasarana dan fasilitas fisik-publik yang sangat minim.

Sebagian besar pekerja di kawasan industri pertambangan ini tinggal di wilayah sekitarnya. Mayoritas pekerja tinggal di desa-desa yang berdekatan dengan kawasan industri, terutama di empat desa, yakni Bahodopi, Bahomakmur, Kurea, dan Fatufia. Jumlah pekerja yang terus berdatangan dari berbagai daerah asal, kondisi fisik kawasan hunian yang hampir tidak tertata, dan kondisi kerja di perusahaan industri pertambangan yang berjalan 24 jam, dapat menimbulkan berbagai kerentanan dan risiko yang harus dihadapi oleh para pekerja. Pada titik inilah isu perlindungan sosial (*social protection*) bagi pekerja menemukan pijakan argumennya.

Sejumlah hasil studi menunjukkan urgensi perlindungan sosial bagi pekerja di sejumlah perusahaan pertambangan. Rukmana (2016) menunjukkan bahwa hadirnya perusahaan tambang di desa Fatufia, kecamatan Bahadopi, kabupaten Morowali menyerap ratusan pekerja lokal dari berbagai kecamatan di wilayah tersebut. Mereka bekerja di dalam perusahaan sebagai mandor, pekerjaan eksplorasi, buruh harian, sekuriti, supir, tenaga kerja konstruksi pabrik, dan lainnya. Perusahaan pertambangan telah menciptakan lapangan kerja yang seharusnya diikuti dengan memberikan perlindungan tenaga kerja secara memadai.

Urgensi perlindungan tenaga kerja di sebuah perusahaan pertambangan ditunjukkan oleh hasil penelitian Muntaha (2017) di kabupaten Konawe Utara,

provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak semua pekerja di perusahaan tersebut mendapat kepastian kerja melalui perjanjian kerja secara tertulis. Pekerja wanita yang bekerja di perusahaan tambang tersebut tanpa disertai dengan perjanjian kerja secara tertulis, dan hanya dilakukan melalui kesepakatan bersama secara tidak tertulis. Perjanjian lisan sangat merugikan pekerja, dan telah melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, karena di dalam hubungan kerja harus ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani secara tertulis.

Satrina *et al.* (2013) dalam penelitiannya di perusahaan nikel PT Bintang Delapan, di desa Fatufia kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali menunjukkan bahwa konflik yang berujung pada perusakan fasilitas perusahaan tersebut adalah karena gaji yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Belajar dari peristiwa tersebut perusahaan kemudian memperhatikan hak-hak normatif pekerja, sebagai salah satu skema untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Praktik yang baik telah ditunjukkan oleh perusahaan tambang batu bara, PT Sims di Kalimantan Timur (Chusairi, 2013). Perusahaan tersebut telah mendaftarkan pekerja di dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh PT Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan) dan juga memiliki skema penanganan kecelakaan kerja. Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu cara untuk menciptakan kepercayaan pekerja pada perusahaan, yang dalam jangka panjang kondisi ini akan berdampak terhadap loyalitas pekerja pada perusahaan.

Tulisan ini berupaya menunjukkan adanya gejala kerentanan dan risiko yang dihadapi oleh para pekerja, seiring dengan perkembangan fisik, sosial dan ekonomi di wilayah sekitar kawasan industri pertambangan yang tidak teratur, dan kegiatan penambangan dan pengolahan bijih nikel, dan operasi industri berbasis nikel. Bertitik tolak dari identifikasi gejala kerentanan dan risiko tersebut, tulisan ini mengajukan argumen tentang urgensi perlindungan sosial baik formal maupun informal bagi pekerja.

Tulisan disusun berdasarkan data lapangan hasil penelitian PSPK UGM (2019) tentang penilaian dampak sosial ekonomi dari kawasan industri pertambangan yang dikelola oleh PT IMIP di kecamatan Bahodopi. Kegiatan *fieldwork* berlangsung bulan Februari dan Maret 2019. Data dikumpulkan dari para pekerja yang tinggal di sekitar kawasan industri pertambangan melalui *focus group*

discussion (FGD), observasi dan wawancara, serta data sekunder dari pihak perusahaan dan instansi pemerintah. Setelah melalui proses *cleaning & coding* dan pengelompokan data, sejumlah temuan pokok dideskripsikan. Untuk melengkapi data kualitatif, penyajian data didukung dengan data sekunder dari BPS Kabupaten Morowali dan media *online* yang terpercaya. Berdasarkan sajian data tersebut, penulis melakukan interpretasi atas data untuk mengambil kesimpulan.

Setelah penyajian pengantar di atas, berikut ini disajikan secara singkat konsep perlindungan sosial, termasuk perlindungan tenaga kerja bagi para pekerja. Paparan berlanjut dengan gambaran singkat tentang pekerja di kawasan industri pertambangan nikel Bahodopi yang mengalami perkembangan yang pesat dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, dipaparkan sumber-sumber dan bentuk kerentanan dan risiko yang dihadapi oleh pekerja, dan argumen tentang urgensi perlindungan sosial bagi pekerja. Tulisan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah bagian dari pembangunan sosial untuk menciptakan kondisi kesejahteraan. Merujuk ke UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah “semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. Sementara Suharto (2013:42) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai “segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespons beragam risiko, kerentanan, dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan”.

Dalam praktiknya, perlindungan sosial menjadi instrumen kebijakan untuk meningkatkan kapasitas warga terutama kelompok rentan sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Perlindungan sosial biasanya diwujudkan dalam skema yang melembaga untuk melindungi orang dari berbagai risiko yang mengancam kehidupannya, seperti sakit, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian.

Perlindungan sosial mencakup tiga bentuk, yakni bantuan sosial (*social assistance*), asuransi sosial (*social insurance*), dan jaminan sosial berbasis komunitas

(*community based social welfare security*). Bantuan sosial dan asuransi sosial biasanya disediakan oleh negara. Sedangkan jaminan sosial berbasis komunitas diinisiasi oleh komunitas sesuai dengan konteks masalah dan sumber daya yang dimiliki komunitas, dan disebut sebagai bentuk perlindungan informal (Suharto, 2013).

Perlindungan mempunyai arti lebih luas dari jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Perlindungan sosial mencakup mekanisme kontribusi dan non kontribusi yang berbentuk skema bantuan sosial dan asuransi sosial bagi program kesejahteraan berbasis pajak atau sukarela, kebijakan pasar kerja, serta skema mikro berbasis masyarakat. Bantuan sosial dan asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial formal dan makro (Suharto, 2013).

Dalam konteks pekerja/buruh, perlindungan sosial disediakan baik berkaitan dengan posisinya sebagai bagian dari warga (yang berhak atas pelayanan perlindungan sosial dari negara) maupun berkaitan dengan posisinya sebagai warga yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain (UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dalam relasinya dengan pemberi kerja, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tersebut, pekerja harus mendapatkan perlindungan tenaga kerja.

Dalam suatu proses produksi baik barang maupun jasa, pekerja merupakan salah satu faktor yang memegang peran penting. Untuk mencapai proses produksi yang optimal diperlukan pekerja yang memiliki produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi hanya bisa tercapai jika pekerja memiliki standar kesejahteraan yang memadai. Hal itu bisa diwujudkan jika pekerja memperoleh skema perlindungan tenaga kerja oleh perusahaan.

Pemberi kerja memasukkan tenaga kerja di dalam kepesertaan sistem jaminan sosial sebagaimana mandat dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Adanya jaminan sosial memungkinkan pekerja memiliki kepastian terhadap risiko yang akan diterima dan akan mengurangi beban bagi pekerja untuk menyisihkan uang untuk membelanjakan ketika terjadi

kecelakaan kerja (Zamani, 2011). Adanya perlindungan dalam jangka panjang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika kondisi ideal tersebut dapat dilakukan maka akan menimalisir terjadinya konflik antara perusahaan dengan pekerja, sehingga menjadi kondisi yang mendukung pencapaian produktivitas kerja yang optimal.

Secara singkat, perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan terhadap hak normatif yang diterima oleh pekerja berupa upah yang layak, kepastian hubungan kerja, sistem kerja, fasilitas kerja, kepesertaan jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjamin keberlangsungan kerja. Melalui perlindungan tersebut, hubungan yang harmonis antara tenaga kerja dengan perusahaan akan tercipta, sehingga aktivitas perusahaan akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Triyono, 2016:243).

Pekerja Kawasan Industri Pertambangan

Seiring dengan konstruksi dan operasi kawasan industri pertambangan berbasis nikel, perusahaan-perusahaan memberikan kesempatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. PT IMIP menyediakan kesempatan kerja yang paling besar dibanding perusahaan yang lain. Jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan di dalam kawasan industri IMIP terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada saat awal pabrik *smelter* beroperasi pada awal tahun 2015, jumlah pekerja kurang lebih 2000 orang. Pada Januari 2018, jumlah pekerja mencapai 17.831 orang. Jumlah tersebut bertambah hampir dua kali lipat pada awal Mei 2019, yakni mencapai lebih dari 32.000 orang. Jumlah pekerja tersebut akan terus bertambah, dan diperkirakan mencapai 80.000 orang pada tahun 2023 (Achmanto, 2019). Sebagian besar dari pekerja berasal dari daerah sekitar kawasan industri dan daerah-daerah lain di pulau Sulawesi, atau biasa disebut pekerja lokal. Sedangkan pekerja asing yang umumnya merupakan pekerja profesional dan manajerial, dan berasal dari Tiongkok kurang-lebih 7% dari total jumlah pekerja (Suarapalu.com, 2019).

Para pekerja lokal di kawasan industri IMIP berasal dari berbagai daerah, dengan komposisi sebagai berikut. Pekerja berasal dari warga masyarakat di sekitar kawasan industri (desa-desa di kecamatan Bahodopi) sebesar 19,6%.

Yang berasal dari kabupaten Morowali di luar Bahodopi sebanyak 19,3%. Hal ini berarti bahwa pekerja yang berasal dari kabupaten Morowali mengisi 38,9% dari total pekerja di kawasan industri IMIP. Selebihnya berasal dari luar daerah Morowali yakni: provinsi Sulawesi Tengah di luar Morowali (7,7%), Pulau Sulawesi di luar Sulawesi Tengah (44,8%), luar pulau Sulawesi (8,5%) (PT IMIP, 2017:73).

Para pekerja di kawasan industri IMIP terdiri dari empat kategori, yakni pekerjaan *low-skill*, *skill*, pakar, dan manajerial. Pekerjaan yang menuntut tingkat keterampilan yang relatif sedikit dilakukan oleh operator atau kru pelaksana kerja (*crew*). Pekerjaan yang menuntut ketrampilan khusus memiliki sejumlah sebutan, seperti analis laboratorium, penginstal jaringan listrik, mekanik pabrik, operator alat berat, dan sejenisnya. Kategori pekerjaan ini membutuhkan pelatihan khusus dan pengalaman yang memadai. Pekerjaan kepakaran tertentu berkaitan dengan industri pengolahan dan peleburan nikel menjadi produk-produk spesifik, seperti baja nirkarat, baterai litium, dan sejenisnya. Sedangkan pekerjaan manajerial berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan rantai produksi di kawasan industri ini (Achmanto, 2019). Porsi terbesar jumlah pekerja di PT IMIP, dan perusahaan pertambangan lainnya, adalah kategori yang pertama yakni kru/buruh (Mulyadi, 2017:154).

Sumber-sumber Kerentanan dan Risiko Pekerja

Kondisi kerentanan dan risiko seringkali tidak bisa dihindari karena faktor-faktor yang bekerja di luar kendali para pekerja. Dalam konteks pekerja yang bekerja di kawasan industri dan bermukim di wilayah sekitar kawasan tersebut, kondisi rentan dan risiko bisa muncul dari beragam sumber penyebab. Yang pertama berasal dari kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi di wilayah sekitar kawasan industri yang tampak belum tertata dengan baik. Yang kedua berasal dari praktik perlindungan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Berikut dipaparkan sejumlah kondisi penyebab yang bisa menimbulkan kerentanan dan risiko bagi para pekerja.

Kondisi lingkungan fisik dan sosial

• *Perumahan*

Kebutuhan tempat tinggal bagi pekerja di kawasan industri pertambangan yang berasal dari luar daerah telah mendorong munculnya usaha pemondokan atau kos-kos di wilayah desa-desa sekitar kawasan tersebut. Pihak perusahaan biasanya tidak menyediakan fasilitas perumahan bagi seluruh pekerja. PT IMIP menyediakan mess dan rusunawa untuk para karyawan atau pekerja. Mess berlokasi di dekat areal pabrik dan biasanya disediakan untuk pekerja asing dan pekerja level manajerial dan pakar. Sedangkan rusunawa berlokasi di desa Labota yang berjarak sekitar 3 km dari kawasan industri. Melalui kerjasama PT IMIP dan Kementerian PUPR dibangun 3 *tower* rusunawa berlantai 5 dengan kapasitas 104 kamar per *tower*. Sedangkan melalui kerjasama PT IMIP dengan perusahaan *tenant* di kawasan industri dibangun 8 *tower* apartemen 3 lantai dengan kapasitas 62 kamar per *tower*. Ketersediaan 11 *tower* rusunawa tersebut dapat menampung pekerja sekitar 3000 orang (PT IMIP, 2017:44–45).

Fasilitas perumahan yang tersedia tersebut tidak mencukupi untuk semua pekerja. Karena itu, para pekerja menyewa rumah, kamar kos atau pemondokan yang diusahakan oleh warga sekitar kawasan industri. PT IMIP memberikan tunjangan tempat tinggal dan tunjangan transportasi sebesar Rp 500.000,- untuk pekerja yang tidak tinggal di mess dan rusunawa. Sejumlah informan pekerja menyatakan bahwa mereka merasa lebih senang tinggal di kamar kos atau pemondokan milik warga dibandingkan tinggal di rusunawa. Mereka juga tidak ingin tinggal di rusunawa karena lokasinya yang relatif jauh dari tempat kerja.

Kondisi kamar kos yang disediakan oleh warga bagi para pekerja bervariasi, ada yang berupa bangunan permanen (tembok), semi permanen (kayu) dan sederhana (lantai tanah, dinding triplek, dan atap seng). Harga sewa kamar kos yang disediakan oleh warga juga bervariasi tergantung kondisi kamar. Harga sewa kamar kos berkisar antara Rp 300.000,- hingga Rp 1.700.000,-. Sebagai contoh, harga sewa kamar kos berdinding kayu dan berlantai plester mencapai Rp 800.000,-, sedangkan kamar kos berdinding tembok dan berlantai keramik mencapai Rp 1.200.000,-.

Sejumlah informan pekerja menyatakan bahwa harga sewa kamar kos tersebut tergolong mahal. Tunjangan tempat tinggal dari perusahaan sebesar Rp 250.000,- tidak mencukupi untuk menyewa kamar kos. Karena alasan tersebut, para pemilik kos membolehkan para pekerja untuk menempati kamar kos secara bersama-sama, sehingga 1 kamar bisa dihuni 4–5 orang pekerja. Penyewaan 1 kamar untuk bersama (*sharing*) juga dilatari oleh pola kerja *shift* yang diterapkan oleh perusahaan yang beroperasi 24 jam. Dengan pola kerja shift, 4–5 orang yang menyewa 1 kamar (mungkin) tidak akan tinggal di kamar dalam waktu yang bersamaan.

Usaha pemondokan atau kos-kosan umumnya terkonsentrasi di desa-desa yang berdekatan dengan kawasan industri IMIP, yakni Bahodopi, Bahomakmur, Keuria, Fatufia, Labota dan Lalampu. Warga setempat dan warga pendatang yang umumnya dari Toraja dan Sulawesi Selatan, membuka lahan-lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dan lahan pertanian untuk bangunan pemondokan. Selain itu, pengusaha pemondokan mendirikan bangunan pemondokan di sejumlah lokasi pinggiran pantai Bahodopi yang tentunya bisa terkena arus pasang laut. Meskipun posisi bangunan ini memiliki risiko yang cukup tinggi, tampak tidak ada upaya melarang dan membiarkannya untuk dihuni.

Dari hasil observasi, ditemukan sejumlah titik-titik area kumuh. Kondisi kumuh ini disebabkan oleh ketiadaan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Tumpukan sampah padat rumah tangga mudah ditemukan di sekitar pemondokan. Titik genangan air limbah rumah tangga juga muncul di mana-mana, dan hanya dibiarkan tergenang di belakang bangunan. Bangunan kos-kosan umumnya tidak dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dan kondisi sanitasi lingkungan masih buruk dan memiliki potensi kerentanan dan risiko bagi para penghuni pemondokan.

Adanya titik-titik area kumuh dapat menjadi sumber penyakit bagi para pekerja yang tinggal di kamar kos-kosan dan juga bagi warga masyarakat. Jenis penyakit yang sering diderita oleh warga di desa-desa yang berada di sekitar kawasan industri pertambangan sebagai akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat (kumuh) adalah diare. Seorang informan mengatakan bahwa hampir setiap tahun

di desanya terjadi wabah diare yaitu pada saat musim penghujan tiba. Informasi tersebut selaras dengan data dari puskesmas Bahodopi yang menyatakan bahwa diare merupakan jenis penyakit yang banyak diderita oleh warga, dan jenis penyakit tersebut menempati posisi ketiga dari sejumlah penyakit yang sering dialami oleh warga. Jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh warga di desa-desa sekitar kawasan industri pertambangan yang ada di wilayah kecamatan Bahodopi adalah ISPA, gastritis, dan kemudian disusul oleh penyakit diare.

• *Transportasi*

Untuk mobilitas pekerja dari tempat tinggal ke lokasi kerja di kawasan industri IMIP, perusahaan menyediakan fasilitas angkutan karyawan. Namun fasilitas angkutan tersebut masih sangat terbatas. Sampai bulan Maret 2019 (pada saat kegiatan *fieldwork* dilakukan), hanya ada satu jalur bus karyawan yaitu dari pos yang ada di desa Labota, sedangkan di desa-desa lain belum ada layanan bus karyawan. Tidak terlalu sulit untuk menemukan alasan bahwa kemudian para pekerja menggunakan sepeda motor untuk mobilitas dari dan ke tempat kerja.

Banyaknya pekerja yang membawa sepeda motor sendiri ke tempat kerja telah menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sehingga menambah waktu tempuh. Sebagai gambaran, pekerja yang tinggal di desa Bahomakmur yang berjarak kurang dari 5 km, membutuhkan waktu 2 jam untuk bisa sampai ke tempat kerja di kawasan industri IMIP. Kemacetan arus lalu lintas yang sangat tinggi biasanya terjadi di dekat gerbang masuk kawasan industri. Para pekerja menuturkan bahwa untuk bisa masuk ke area parkir di kawasan industri para pekerja harus antri dalam waktu lama sehingga kaki mereka menjadi sangat pegal karena harus menyangga motor dalam waktu relatif lama.

Jumlah pekerja yang terus bertambah dan diikuti dengan penggunaan sepeda motor ke tempat kerja menyebabkan prasarana tempat parkir yang disediakan oleh perusahaan tidak mencukupi. Banyak pekerja yang memarkir motor mereka di pinggir jalan, bahkan tidak jarang di sembarang tempat seperti di lahan kosong dekat pabrik dan di bahu jalan. Kondisi tersebut menyebabkan keamanan kendaraan milik pekerja tidak terjamin, karena rawan terhadap tindak pencurian. Sejumlah informan pekerja menyatakan bahwa banyak motor pekerja yang hilang saat di parkir di pinggir jalan. Data BPS mengkonfirmasi gejala ini,

yakni terjadinya peningkatan jumlah tindak kriminalitas yang dilaporkan ke Kepolisian Sektor dari 42 kejadian pada tahun 2015 menjadi 124 kejadian pada tahun 2017 (BPS Kabupaten Morowali, 2018:90).

Seorang informan FGD mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini kasus pencurian kendaraan bermotor marak terjadi di desa Bahomakmur. Selama bulan Februari 2019, sudah ditemukan lima warga yang mengaku kehilangan motor. Perlu diketahui bahwa jenis sepeda motor yang digunakan oleh para pekerja termasuk berkategori motor kelas menengah seperti jenis motor sport yang harganya cukup mahal. Bagi pekerja, kehilangan sepeda motor berarti kehilangan aset yang berharga.

Penggunaan sepeda motor yang terus bertambah menyebabkan arus lalu lintas di jalan Trans Sulawesi ruas Bahodopi, satu-satunya jalan yang menghubungkan Morowali ke Kendari, menjadi sangat padat dan semrawut. PT IMIP menyatakan “sisi negatif penggunaan motor adalah kemungkinan untuk mendapatkan insiden di jalan raya semakin besar” (PT IMIP, 2017:46). Kekhawatiran ini dikonfirmasi oleh sejumlah informan dari pekerja dan aparat kepolisian yang mengatakan bahwa hampir setiap hari di jalan Trans Sulawesi ruas Bahodopi selalu terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami dari luka ringan hingga meninggal.

Praktik Perlindungan Tenaga Kerja oleh Perusahaan

Perlindungan merupakan salah satu upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman dari berbagai risiko. Setiap perusahaan selalu dituntut untuk memiliki komitmen dan praktik perlindungan tenaga kerja secara memadai sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Bagian berikut memaparkan bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT IMIP dan pandangan atau persepsi pekerja terhadap praktik tersebut.

• *Rekrutmen Pekerja Lokal*

Banyaknya pekerja lokal di kawasan industri yang berasal dari kabupaten Morowali merupakan implikasi langsung dari besarnya kesempatan kerja yang

diberikan oleh perusahaan kepada warga sekitar. Dalam rekrutmen tenaga kerja, PT IMIP selaku pengelola kawasan industri memberikan prioritas utama kepada pekerja lokal terutama untuk kategori kru atau operator pelaksana. Prioritas berikutnya diberikan pada warga di luar kabupaten Morowali.

Dari hasil FGD, ditemukan bahwa hingga akhir tahun 2018 warga di desa-desa sekitar kawasan industri mengkonfirmasi kebijakan prioritas dalam proses perekrutan tenaga kerja. Namun sejak awal tahun 2019, kebijakan prioritas tersebut tampak tidak berlaku lagi. Banyak pencari kerja dari warga lokal yang tidak diterima atau gagal dalam mengikuti proses rekrutmen pekerja untuk perusahaan-perusahaan *tenant* di kawasan industri IMIP. Para informan mengatakan bahwa bekal ijazah SMA dan sarjana tidak mencukupi untuk dapat diterima kerja di kawasan industri pertambangan. Persaingan di antara para pelamar kerja yang berasal dari berbagai daerah di pulau Sulawesi semakin meningkat. Mereka mengaku kalah bersaing dengan pencari kerja dari Sulawesi Selatan. Karena itu, tidak berlebihan jika penduduk pendatang terus bertambah di desa-desa sekitar kawasan industri.

Semakin ketatnya persaingan di pasar kerja tersebut, memunculkan rumor tentang praktik percaloan dalam proses rekrutmen pekerja. Rumor tersebut adalah bahwa untuk bisa diterima bekerja di perusahaan *tenant* di kawasan industri, pelamar harus memberikan uang kepada calo. Seorang informan yang telah bekerja di perusahaan menyatakan bahwa praktik percaloan tersebut benar-benar terjadi. Seorang informan FGD menyatakan bahwa ia bisa diterima kerja karena ia membayar sejumlah uang kepada seorang perantara. Menurut pengakuannya ia dikontrak selama 3 tahun untuk bekerja sebagai tenaga las, namun ia mengaku bahwa kontrak tersebut hanya secara lisan. Ia tidak menandatangani perjanjian kerja yang bisa menjadi jaminan bahwa ia benar-benar bekerja secara resmi di perusahaan tersebut.

Praktik sistem kontrak kerja secara lisan yang diterima oleh salah seorang pekerja di lingkungan kawasan industri tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan setiap kontrak kerja yang mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja harus dalam bentuk tertulis. Praktik seperti ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan

ketenagakerjaan. Informan FGD mengindikasikan bahwa selama ini pengawas ketenagakerjaan tidak memiliki akses ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri pertambangan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.

Pengakuan yang sama disampaikan oleh seorang Informan lain yang mengaku telah bekerja selama 2 bulan di perusahaan yang ada di kawasan industri dan berasal dari Kendari. Ia diterima bekerja di perusahaan karena membayar sejumlah uang kepada seseorang yang mengaku bisa membantunya menjadi pekerja di perusahaan yang ada di kawasan industri pertambangan. Ia bersedia membayar uang dalam jumlah cukup besar karena dijanjikan bisa ditempatkan sebagai operator yang memerlukan ketrampilan khusus. Namun ternyata ia hanya diterima sebagai kru, dan tetap diminta untuk membayar uang dalam jumlah tersebut. Perantara yang membantunya bekerja di perusahaan yang ada di kawasan industri adalah seseorang yang berasal dari Poso yang memiliki jaringan dengan pejabat di perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri pertambangan.

Dugaan praktik percaloan ini semakin kuat ketika muncul keluhan tentang lamanya waktu proses rekrutmen tenaga kerja. Seorang pencari kerja dari Luwu, Sulawesi Selatan mengaku telah mengirim surat lamaran kerja ke perusahaan di kawasan industri sejak 4 bulan yang lalu dan belum mendapat respons dari perusahaan. Seorang pencari kerja yang lain dari Palopo Sulawesi Selatan mengaku telah memasukkan lamaran kerja sebagai kru di perusahaan yang ada di kawasan industri sejak 7 bulan yang lalu dan belum memperoleh respons dari perusahaan. Mereka menduga bahwa karena mereka tidak mau menggunakan jasa calo, maka proses lamarannya menjadi tidak jelas dan harus menunggu respons yang lama dari perusahaan. Sistem percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja tentu tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang menuntut proses rekrutmen berlangsung secara terbuka dan transparan.

- *Upah*

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan pekerja adalah upah yang diterima dari perusahaan. Undang-undang Ketenagakerjaan

mengamanatkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan PP No. 78 Tahun 2015 mendefinisikan penghasilan yang layak sebagai jumlah penerimaan atau pendapatan buruh atau pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Dari hasil FGD dan wawancara dengan pekerja kategori kru, upah pokok yang diberikan oleh perusahaan industri pertambangan untuk pekerja dengan masa kerja 0–12 bulan rata-rata mencapai Rp 2.900.000,-. Bagi pekerja yang tidak mendapat kesempatan untuk tinggal di mess atau di rusunawa, perusahaan memberikan tunjangan tempat tinggal dan tunjangan transportasi sebesar Rp 500 ribu sehingga total penghasilan selama 1 bulan sekitar Rp 3,4 juta. Penghasilan tersebut akan meningkat apabila pekerja melakukan kerja lembur, baik kerja lembur wajib maupun kerja lembur sukarela. Dengan tambahan upah dari kerja lembur, pekerja di perusahaan kawasan industri pertambangan bisa mendapatkan Rp 5 juta per bulan. Sementara itu, seorang informan yang mengaku sebagai tukang las dan tidak memiliki kontrak kerja tertulis mengatakan bahwa ia mendapatkan upah sebesar Rp 4,5 juta apabila ia dapat bekerja penuh dalam 1 bulan dan akan mendapat tambahan uang lembur sekitar 1,5 juta bila ia melakukan kerja lembur. Total upah yang diterima dalam 1 bulan sekitar 6 juta. Narasi tersebut menunjukkan bahwa para pekerja memiliki struktur penerimaan upah yang variatif tergantung pada status kerjanya dan juga praktik pengupahan oleh perusahaan.

Jumlah upah tersebut, menurut penilaian para informan FGD dan wawancara, tergolong jumlah yang pas-pasan untuk menopang kehidupan di wilayah sekitar kawasan industri. Hal itu disebabkan oleh biaya hidup yang relatif mahal dan terus meningkat di wilayah Bahodopi. Biaya sewa kamar kos dalam kondisi standar sudah mencapai Rp 850.000 rupiah, sementara harga-harga kebutuhan pokok relatif mahal. Untuk bisa makan satu porsi makanan dengan menu standar di warung makan, seorang pekerja harus mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000,-. Setiap bulannya para pekerja umumnya harus membayar cicilan sepeda motor yang dibeli secara kredit. Mereka juga harus mengeluarkan biaya BBM di wilayah kecamatan Bahodopi mencapai Rp 10.000,- per liter, dan biaya untuk perawatan kendaraan.

• *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*

PT IMIP telah mengikutsertakan para pekerja yang memiliki kontrak tertulis ke dalam skema jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Informan pun memberikan konfirmasi perihal kepesertaan dalam skema jaminan sosial tersebut. Perusahaan juga memiliki Poliklinik yang menyediakan pelayanan tindakan kuratif atau pengobatan jika terjadi cedera atau sakit, sehingga pekerja dapat berobat jika mengalami masalah dengan kesehatan fisiknya. Seluruh pekerja IMIP sebagai pengelola kawasan industri dan pekerja di perusahaan-perusahaan *tenant* mengikuti skema asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan. Poliklinik tersebut juga memberikan pelayanan pengobatan dan kesehatan kepada warga sekitar kawasan industri. Dari data kunjungan ke poliklinik, warga sekitar memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut (PT IMIP, 2017:81).

Seorang pekerja di perusahaan sub kontraktor dari perusahaan *tenant* di kawasan industri mengaku tidak diikutsertakan dalam skema jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, meskipun ia mendapat fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis dari poliklinik. Pekerja yang tidak memiliki kontrak kerja tertulis mengaku bahwa ia tidak diikutsertakan dalam skema jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Singkatnya, hanya para pekerja yang memiliki kontrak kerja tertulis yang mendapatkan perlindungan sosial dari skema jaminan sosial formal yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

• *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*

Perusahaan wajib menjamin K3 bagi pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat dari cedera ringan hingga kematian. Upaya K3 akan menjamin kinerja dan produktivitas kerja yang optimal. Upaya K3 dilaksanakan dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di lingkungan kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Terkait dengan penyelenggaraan upaya K3 ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu memasang petunjuk keselamatan kerja, menyediakan alat-alat perlindungan diri yang dibutuhkan oleh para pekerja, misalnya helm, rompi, sepatu, masker, dan secara rutin melaksanakan

pemeriksaan kesehatan bagi pekerja.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen untuk menyelenggarakan upaya K3. Beberapa bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja antara lain, penyediaan alat pelindung tubuh, pelatihan K3 secara rutin bagi semua pekerja di kawasan industri pertambangan Bahodopi, pemasangan rambu-rambu terkait dengan K3, penyediaan fasilitas klinik untuk pemeriksaan kesehatan bagi pekerja.

Namun demikian, temuan dari FGD dan wawancara memperlihatkan kesaksian yang berbeda dari pekerja dan mantan pekerja. Seorang informan warga desa Siumbatu yang pernah bekerja di sebuah perusahaan yang ada di kawasan industri, memilih untuk berhenti bekerja karena merasa perusahaan kurang dapat menjamin keselamatannya. Ia menuturkan bahwa pada saat kondisi lingkungan kerja licin setelah diguyur air hujan, ia tetap dipaksa untuk bekerja sehingga membahayakan keselamatan dirinya. Karena merasa takut akan mengalami kecelakaan saat bekerja maka ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya.

Seorang informan yang masih bekerja di perusahaan yang ada di kawasan industri mengatakan bahwa kondisi keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan perlu ditingkatkan. Ia menilai jumlah alat pelindung tubuh seperti kaos tangan, masker, dan sejenisnya, sangat terbatas. Ia mengatakan bahwa sebelumnya pekerja mendapat jatah masker dan kaos tangan sebanyak 10 buah setiap bulan, namun saat ini dikurangi menjadi 5 buah per bulan.

Sebagai bagian dari upaya K3, perusahaan pengelola kawasan industri menyediakan jatah makan bagi para pekerja. Setiap pekerja mendapat jatah makanan seharga Rp 18.000,- sekali makan. Para pekerja di kawasan industri mendapat jatah makan satu kali sehari. Jatah makanan bagi pekerja lokal dibedakan dari pekerja asing (Tiongkok) untuk menjamin kehalalannya.

Namun menurut penilaian sejumlah informan FGD, kualitas makanan yang disediakan oleh perusahaan bagi pekerja lokal kurang baik. Rasanya kurang enak atau hambar, karena dimasak sekadarnya. Selain itu, pekerja meragukan higienitas makanan yang dihidangkan, karena kebersihan bahan makanannya kurang diperhatikan seperti tampak dari daging ayam yang tidak dibersihkan dengan baik.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah karyawan terserang sakit perut. Selain itu, menu makanan yang disajikan juga membosankan karena bahan lauk yang disajikan cenderung sama (daging ayam), dan kurang ada variasi lauk seperti daging sapi dan jenis lauk lainnya. Pihak perusahaan membantah hal tersebut. CEO PT IMIP menyatakan bahwa kondisi makanan yang disediakan oleh perusahaan bagi para pekerja higienis (Kumparan.com, 2019).

• *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja harus dituangkan di dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut berisi tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan industrial tersebut. Salah satu hal yang diatur dalam suatu perjanjian kerja adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Undang-undang mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui prosedur dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, proses PHK seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dikonfirmasi oleh para informan FGD dan wawancara. Para pekerja khususnya di level kru rentan terhadap pemecatan atau pemutusan kerja. Dalam relasi kerja, para kru bekerja di bawah supervisor. Kinerja yang dianggap tidak baik, ketidakpatuhan, dan bahkan rasa tidak senang dan kemarahan kepada kru, bisa mengantarkan supervisor untuk mengusulkan pemecatan. Dalam konteks perusahaan-perusahaan di kawasan industri yang memiliki supervisor dan manajer dari tenaga kerja asing, persoalan bisa menjadi lebih kompleks karena kemudian sering dikaitkan dengan isu ketidakadilan dalam relasi antara pekerja lokal dan pekerja asing.

Para informan mengatakan bahwa proses pemecatan pekerja umumnya dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sebagai gambaran, banyak pekerja yang berasal dari desa-desa di sekitar kawasan industri yang dikontrak untuk bekerja di perusahaan selama 1 tahun, namun baru beberapa bulan bekerja mereka kemudian diminta mengundurkan diri karena

kinerjanya dianggap kurang baik. Bagi pekerja, hal itu berarti pemecatan karena merasa tidak pernah mengundurkan diri. Karena dianggap bukan PHK maka tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan uang pesangon. Tidak berlebihan jika di antara para pekerja berkembang anggapan bahwa perusahaan telah memberikan perlakuan yang tidak adil kepada mereka.

Urgensi Perlindungan Sosial bagi Pekerja

Dari paparan dan narasi di atas, pekerja menghadapi sejumlah situasi kerentanan dan risiko. *Pertama*, lingkungan pemondokan atau kos-kosan kurang bersih dan sehat, karena sistem sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah dan limbah yang belum terkelola dengan baik. Hal ini diindikasikan oleh munculnya titik-titik area kumuh di lingkungan sekitar pemondokan. Kondisi lingkungan yang demikian menyebabkan pekerja rentan terhadap ancaman penyakit. Sebagai akibatnya, risiko sakit harus mereka hadapi.

Kedua, minimnya sarana transportasi publik telah memaksa para pekerja harus menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama. Jumlah sepeda motor dan kendaraan motor lain terus bertambah, sehingga menyebabkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Jalan utama, jalan nasional Trans Sulawesi, hampir selalu padat sepanjang hari karena lalu lalang para pekerja ke tempat kerja yang beroperasi 24 jam. Dalam kondisi ini, para pekerja rentan terhadap kecelakaan lalu lintas, dan paparan polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan dan debu. Para pekerja harus menghadapi risiko cedera hingga kematian jika mereka mengalami kecelakaan lalu lintas. Mereka juga menghadapi risiko sakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan karena kondisi jalan yang polutif.

Ketiga, jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah ternyata tidak diikuti oleh ketersediaan area parkir yang mencukupi. Para pekerja yang memarkir sepeda motor di area yang bukan semestinya rentan terhadap tindak pencurian. Risiko kehilangan aset kendaraan harus mereka hadapi. Perlu dicatat bahwa para pekerja umumnya membeli sepeda motor dengan cara kredit. Kehilangan sepeda motor berarti harus menanggung kerugian, dan bisa mengganggu tingkat kesejahteraan mereka.

Keempat, perusahaan sudah menyediakan perlindungan tenaga kerja: upah yang sesuai dengan standar UMR, jaminan sosial (jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian), dan K3 termasuk jatah makan. Namun dari sisi pekerja, praktik perlindungan tenaga kerja itu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Upah yang didapatkan seringkali habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (sewa pemondokan, biaya transportasi, makan, pulsa, dan belanja harian lain). Para pekerja mungkin tidak bisa menabung dari upah yang mereka peroleh. Mereka rentan terhadap gejolak kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Upah yang mereka terima tidak cukup melindungi mereka dari risiko menurunnya standar hidup. Lebih dari itu, sejumlah pekerja mengeluhkan peralatan K3 yang kurang memadai, kualitas jatah makan yang kurang baik, dan ketidaktahuan tentang jaminan sosial yang mereka peroleh. Semua kondisi rentan dan risiko tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu lebih meningkatkan standar perlindungan tenaga kerja yang disediakan untuk para pekerja.

Kelima, dalam hal relasi dengan perusahaan, dari sisi pekerja, mereka merasa rentan terhadap tindakan pemecatan, tanpa mendapatkan imbalan yang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Dari sisi perusahaan, pengunduran diri adalah hal yang wajar karena pekerja tidak menunjukkan kinerja yang tertuang dalam kontrak kerja. Kondisi ini tentu bisa menyebabkan pekerja rentan terhadap kehilangan pekerjaan, yang kemudian diikuti oleh risiko kehilangan pendapatan, dan itu berarti penurunan standar kesejahteraan mereka.

Sejumlah kondisi kerentanan dan risiko yang dihadapi oleh para pekerja di atas menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya mendapat perlindungan sosial yang memadai. Sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, perusahaan bisa jadi telah menjalankan semua skema perlindungan tenaga kerja, namun dalam praktiknya mungkin tidak mampu memenuhi semua kondisi dan persyaratan yang dituntut oleh aturan ketenagakerjaan, dan menjangkau semua pekerja. Para pekerja yang berasal dari berbagai daerah telah berupaya meningkatkan taraf kehidupan dan standar kesejahteraan mereka dengan jalan bermigrasi dan bekerja di kawasan industri pertambangan Bahodopi. Pendapatan dan skema jaminan sosial yang mereka peroleh bisa jadi telah memenuhi dan menopang standar kehidupan yang mereka inginkan, namun potensi kondisi yang rentan

dan risiko yang mengikutinya, dapat menurunkan standar kehidupan yang mereka telah miliki.

Kondisi kerentanan dan risiko yang dihadapi pekerja tampak lebih sering muncul dari kondisi di luar tempat kerja, yakni lingkungan fisik dan sosial di sekitar kawasan industri. Dalam kaitan ini, para pekerja harus mengandalkan pada skema perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Namun persis di titik ini, skema perlindungan sosial dari pemerintah tidak cukup memadai. Sebagai pendatang, bukan penduduk asli, para pekerja ini bisa jadi tidak menjadi bagian dari skema-skema perlindungan sosial berbasis komunitas yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.

Penutup

Kesempatan kerja yang terus bertambah telah menyebabkan laju migrasi yang tinggi ke wilayah sekitar kawasan industri di kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali. Perubahan lingkungan fisik dan sosial terus terjadi, tanpa disertai perencanaan dan pengendalian yang memadai. Kondisi ini menjadi sumber potensi kerentanan dan risiko yang dihadapi oleh pekerja di wilayah sekitar kawasan industri. Meskipun pihak perusahaan sudah menjalankan skema-skema perlindungan tenaga kerja, dalam praktiknya para pekerja masih menghadapi kondisi rentan dan risiko. Penguatan perlindungan sosial adalah suatu keniscayaan untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam bekerja dan untuk mencapai standar kehidupan yang layak.

Penguatan skema-skema perlindungan sosial tersebut harus dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. Pemerintah perlu memastikan bahwa skema perlindungan sosial (jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan, dan bantuan sosial) menjangkau para pekerja di wilayah sekitar kawasan industri. Perusahaan menjamin skema-skema perlindungan tenaga kerja yang dijalankan sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Masyarakat setempat mengikutsertakan para pekerja ke dalam skema-skema perlindungan sosial informal yang dimiliki. Hanya jika semua skema perlindungan sosial tersebut mampu menjangkau para pekerja, maka kondisi kesejahteraan pekerja bisa diwujudkan.

Referensi

- Achmanto, Mendatu. 2019. *SDM di Kawasan IMIP: Alih Keahlian dan Teknologi*. Bahan presentasi, tidak diterbitkan.
- BPS Kabupaten Morowali. 2018. *Kabupaten Morowali dalam Angka 2018*. Morowali: BPS Kabupaten Morowali.
- Chusair, Fahrul. 2013. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Di PT. Sims, Grogot, Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/111>. Diunduh pada 25 Agustus 2019.
- Kumparan.com. 2019. PT IMIP: Porsi Makanan bagi TKA asal China dan Pekerja Lokal Sama Saja. <https://kumparan.com/@kumparannews/pt-imip-porsi-makanan-bagi-tka-asal-china-dan-pekerja-lokal-sama-saja-1533582530265419945>. Diunduh pada 26 Agustus 2019.
- Mulyadi, Dedi. 2017. *Manajemen Daya Saing Industri, Studi Kasus Industri Berbasis Nikel di Kawasan IMIP*. Jakarta: Padukarya
- Muntaha. 2017. *Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Wanita Lokal Pada Perusahaan Tambang Di Kabupaten Konawe Utara*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 228-238 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. <http://103.97.100.145/index.php/psn12012010/article/view/4180>. Diunduh pada 25 Agustus 2019.
- Nuraini, Yeni. 2018. Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat. Seminar Nasional Edusainstek ISBN: 978-602-5614-35-4 FMIPA UNIMUS 2018. <HTTP://103.97.100.145/INDEX.PHP/PSN12012010/ARTICLE/VIEW/4180>. Diunduh pada 25 Agustus 2019.
- Pemerintah Indonesia. 2003. *UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2009. *UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2004. *UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara
- PT IMIP. 2017. *Laporan Tahunan IMIP 2017*. Jakarta: PT IMIP

- Rukmana, Siti. 2016. "Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Lingkungan Permukiman Masyarakat Di Kawasan Pesisir Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali". Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10047/1/Siti%20Rukmana.pdf>. Diunduh pada 25 Agustus 2019.
- PSPK UGM. 2019. *Penilaian Dampak Sosial Indonesia Morowali Industrial Park Morowali*. Laporan tidak dipublikasi.
- Satrina, Alri Lande, Hasdin. 2013. "Dampak Pertambangan Nikel PT. Bintang Delapan Mineral Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali". Universitas Tadulako. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EduCivic/article/view/7300/5886>. 25 Agustus 2019.
- Suarapalu.com. 2019. "Pekerja Asing di PT IMIP Hanya 7 Persen". <https://suarapalu.com/pekerja-asing-di-pt-imip-hanya-7-persen/>. Diunduh 25 Agustus 2019.
- Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Triyono. 2016. "Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak dan Outsourcing pada Industri Galangan Kapal Kota Batam". *Jurnal PKS* Vol 15 No 3 September 2016; 235 – 244. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial.
- Zamani, P, Oktav. 2011. *Pedoman Hubungan Industrial*. Jakarta: PPM Manajemen.



Pola Interaksi Desa Membangun Negeri

(Masyarakat, Pemerintah dan Perguruan Tinggi)

Dr. Danang Purwanto



Pendahuluan

Setidaknya terdapat dua aspek pentingnya desa membangun negeri, *Pertama*, sejak tahun 2015, ada perubahan paradigmatik peran institusi desa dalam keterlibatannya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran Pemerintahan Desa bukan hanya sekadar memiliki anggaran desa, akan tetapi yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di desa. *Kedua*, tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di kota. Dana desa ikut andil dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 9,41 % (25,14 juta orang). Angka kemiskinan di pedesaan adalah sebesar 12,85 %, atau lebih tinggi 6,16 % atau jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan, sebesar 6,69 persen. (*Kompas*, 17 Juli 2019).

Dalam realitas sosial, konsep pembangunan dan pemberdayaan saling beririsan, saling berkelindan, saling mengisi, saling bahu membahu, dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan di desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014).

Tulisan ini akan membahas perspektif institusional pengelolaan dana desa. Bagaimana peran kelembagaan desa dalam menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan prioritas masyarakat desa secara mandiri, dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan, melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat desa.

Berlakunya asas rekognisi dan subsidiaritas, menjadikan Musyawarah Pembangunan Desa (MusrenbangDes) sebagai forum tertinggi bagi masyarakat desa, untuk menyampaikan ide, aspirasi, kebutuhan masyarakat, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dapat mendorong agar kebutuhan-kebutuhan atau aspirasinya terepresentasikan dalam proses pembangunan. Problem sosial yang terjadi di desa adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi buruknya kondisi pemukiman, perumahan, sanitasi, lingkungan, tingkat nutrisi, *stunting*, rendahnya dan penghasilan, sehingga kebijakan program kerja peningkatan kualitas sumber daya Manusia. Pembangunan harus meletakkan serta mengutamakan kebutuhan dan kepentingan manusia sebagai dasar perencanaan dan tujuan akhir pembangunan (Tadjuddin, 2000).

Implikasi Kebijakan

Implementasi Undang-Undang Desa, telah memberikan pengalaman sosiologis bagi pemerintah dan masyarakat desa, khususnya proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan keuangan desa. Musyawarah Pembangunan Desa adalah cerminan bagaimana masyarakat dan lembaga desa menentukan dan mewujudkan kebutuhan, keragaman, dan keunikannya di setiap desa. Dana desa juga memberikan pengalaman admi-

nistratif bagi aparat desa mengelola anggaran yang setiap tahun semakin lama semakin meningkat.

Dalam empat tahun terakhir, alokasi dana desa sebagian besar untuk membangun infrastruktur. Jalan desa sepanjang kurang lebih 158.169 kilometer, jembatan sepanjang 1.028.225 meter, pasar desa sebanyak 7.421 unit, kegiatan BUMDes 35.145 unit, tambatan perahu 4.711 unit, embung desa sebanyak 3.026 unit, sebanyak irigasi 39.656 unit, dan saran olah raga sebanyak 11.399 unit. Selain itu, dana desa juga memberi manfaat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan membangun 179.625 unit penahan tanah, 942.927 unit air bersih, 178.034 unit MCK, 8.028 unit Polindes, 39.920.120 meter drainase, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit posyandu, dan pembangunan sumur sebanyak 37.662 unit. (Kemendes, 2019)

Sejalan dengan hasil di atas, analisis Direktorat Pengabdian Pada Masyarakat (DPKM) UGM bekerja sama dengan harian *Kompas* melalui Program KKN UGM periode Juli-Agustus 2018, kebijakan penggunaan dana desa sebagian besar masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi desa. Artinya alokasi dana masih perlunya diarahkan pada berbagai program kerja yang lebih berorientasi pada pengembangan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), pengembangan BUMDES, pengembangan wisata alam, pengembangan kesenian dan kebudayaan. (*Kompas*, 17 september 2018).

Demikian pula dalam berbagai kajian, minimalnya penggunaan dana desa berorientasi pada penanganan problem-problem sosial, seperti penanganan kemiskinan, *stunting* dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, padahal permasalahan sosial seringkali berkaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia, dengan pendidikan dan pelatihan, maka dapat membuka pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.

Dana desa bukannya semata-mata hanya dipandang dari sisi perencanaan dan pelaksanaan, untuk mencegah penyalahgunaan diperlukan pula pengawasan. Dana desa termasuk dalam lima besar sektor yang rawan dikorupsi. Terdapat 61 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara

sebesar 10,4 miliar rupiah dan tercatat ada 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum (ICW, 2017). Meskipun secara prosentase kecil jika dibandingkan jumlah desa di Indonesia, persoalan pengawasan terhadap penggunaan dana desa masih perlu langkah-langkah yang strategis. Misalnya penguatan fungsi Inspektorat kabupaten dalam mengawasi dana desa.

Terlepas dari berbagai kekurangan, namun selama empat tahun terakhir dana desa berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Desa (IPD), mengalami kenaikan sebesar 5,42 %, dimana pada tahun 2014 sebesar 39,21%, menjadi 44,63 % pada 2018 (Kemendes, 2019).

Pola Interaksi

Secara teoritis pola interaksi institusional pembangunan dan pemberdayaan desa dapat digambarkan dalam dua pola struktur interaksi, yaitu *pertama*, melalui serangkaian interaksi intraorganisasi dan antarorganisasi (Ritzer & Goodman, 2003). Dalam proses interaksi jaringan intraorganisasi, terdapat pola interaksi organisasional dari struktur pemerintah pusat sampai dengan desa. *Kedua*, Pola jaringan antarorganisasi. Posisi semua instansi menjadi bagian dari jaringan interaksi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat dapat bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi dan lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat.

• Pola Interaksi Intraorganisasi

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Kemendes PDTT mempunyai otoritas mengatur penetapan jumlah dana desa dalam setiap tahunnya, regulasi pelaksanaan tentang program, kegiatan dan evaluasi. Pemerintah Kabupaten membuat aturan teknis pelaksanaan, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, pedoman penggunaan dana desa.

Dari sisi pengorganisasian, ada dua pola kebijakan tata kelola desa pemerintah kabupaten Temanggung dalam mengkonsolidasikan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu menetapkan kawasan perdesaan dan membangun Sistem

Informasi Desa (SID). Di kabupaten Temanggung terdapat tiga kawasan perdesaan. *Pertama*, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan desa-desa Muneng, Mento, Muntung, Batusari kecamatan Candiroto kabupaten Temanggung. *Kedua*, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan desa-desa Ngropoh, Pendowo, Sanggrahan, Kramat, Purwosari kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung. *Ketiga*, Rencana Pembangunan Eduwisata di kecamatan Bansari (Bappeda, 2019).

Kawasan perdesaan tersebut merupakan bentuk kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah desa, kabupaten dan provinsi, dan pusat yang dilaksanakan secara partisipatif, holistik, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Model interaksi sinergisme pembangunan kawasan merupakan formulasi yang merepresentasikan suatu kesatuan potensi sebuah kawasan. *Pertama*, rangkaian entitas, misalnya hortikultura, kopi, makanan ringan, dan pariwisata dari sub-sistem sarana produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran pembangunan kawasan yang terstruktur dalam klaster/komoditas dan antarklaster/komoditas, saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan kawasan perdesaan. (UU Nomor 6/2014, Pasal 85).

Kedua, sinergitas antara klaster, komoditas, dan sektor merupakan hal yang substansif dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan perdesaan yang dilakukan secara bersinergi baik dari sisi perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, kabupaten, Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa, badan usaha/swasta, dan organisasi masyarakat. Akan tetapi masih diperlukan tindakan organisasional untuk penguatan pelaksanaan, respons pemerintah kabupaten Temanggung dengan peraturan bupati belum dijadikan referensi kebijakan, baik melalui keterpihakan secara politis maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun untuk dapat melakukan tindakan organisasional (Polama, 1987) melakukan percepatan pembangunan antardesa harus diperlukan komitmen dalam realisasinya.

Selain kawasan perdesaan, dikembangkan pola interaksi antara pemerintah Kabupaten dengan Desa berupa proses pembangunan Sistem Informasi Desa (SID), sebagaimana amanat dalam UU Desa Pasal 86. Di Temanggung, proses pembangunan SID, telah dilakukan sejak tahun 2012, antara Pemda dan Pe-

merintah Desa dan bekerjasama dengan COMBINE Resource Institution (CRI) Yogyakarta. Hasilnya, pada tahun 2014 telah terbangun sekitar 92 desa (Elanto, 2014). Pola interaksi antara Pemerintah Desa, kabupaten dan Provinsi Jawa tengah dapat terhubung dengan keberadaan SID. Provinsi Jawa Tengah kini mengusung visi sejahtera dan berdikari. Sebagai turunannya, gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemudian menggagas program Desa Berdikari, yakni desa yang mampu berkembang dan mandiri. Dalam konteks ini, desa akan berposisi sebagai subjek. Desa dapat membangun langkah menjadi Desa Berdikari paling tidak dengan melakukan empat hal. *Pertama*, membuat potret situasi dan kondisi desa. *Kedua*, mengidentifikasi masalah yang ada. *Ketiga*, mengenali potensi, baik di dalam maupun dari luar desa, untuk menjawab permasalahan yang ada (solusi). *Keempat*, membuat perencanaan berbasis potensi lokal. (Warsito Ellwein, 2014).

Sampai dengan 2019, pemerintah kabupaten Temanggung telah berupaya membangun SID, dengan menyiapkan pola pembagian kerja perangkat daerah tingkat kabupaten yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi menangani infrastruktur, sedangkan untuk aplikasi dilakukan oleh Dispermades. Dari terbangun, ada 184 desa yang dilayani oleh Konminfo. Uniknya, pembangunan sarana teknologi informasi ini dibiayai oleh Pemda dengan mengalokasikan anggaran sebesar 1,7 Milyar per tahun untuk pemasangan dan *bandwidth* (Kominfo, 2019). Sedangkan desa menganggarkan peralatan SID. Pembangunan Teknologi Informasi ini berbasis pada partisipasi (kebutuhan) dari masyarakat desa, karena telah direncanakan dan dianggarkan di APBDes, namun proses pemasangan, pemeliharaan dan pelatihan sumber daya manusianya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung.

Namun demikian masih diperlukan peningkatan fungsi-fungsi SID di samping secara bertahap perluasan partisipasi desa dalam menggunakan SID dan di sisi yang lain diperlukan penguatan fungsi SID sebagai fungsi pendataan, potensi desa dan perencanaan yang belum digarap secara serius. Oleh karena itu, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kecamatan Bulu, merencanakan dan menganggarkan pada tahun 2019, mulai mengkonstruksi SID sebagai basis data dan perencanaan desa. SID juga digagas yang terintegrasikan dengan perencanaan pemerintah di atasnya (Bagiyono, 2019).

• *Pola Interaksi Antarorganisasi*

Pola interaksi jaringan antarorganisasi dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan lebih kompleks, peran serta semua instansi sebagai satu jaringan. Mengembangkan struktur jaringan antarorganisasi bukan hanya menjadi tugas instansi pemerintah saja. Desa membutuhkan strategi pemberdayaan berinteraksi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, LSM.

Implementasi dana desa tentunya membutuhkan pengalaman untuk berproses bagaimana pengorganisasian dengan pendekatan pemberdayaan. Misalnya KTM Almond Mondoretno dan Pasar Papringan dapat dikategorikan *Etno development*, yang menekankan pembangunan sebagai upaya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dengan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas dan potensi masyarakat lokal (Tadjuddin, 2000).

Konsep *etno development* cukup relevan untuk dikemukakan. Kawasan Almond digagas oleh Kepala Desa. Desa Mondoretno terletak di Kecamatan Bulu kabupaten Temanggung sebagai Kawasan Terpadu Mandiri “Almond (Alam Mondoretno)”, sebagai program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi dan dikelola oleh pemerintah desa. Program ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pendekatan pertanian alami yang mengkaitkan keterpaduan antara pertanian, peternakan dan perikanan, satu sektor dengan sektor lainnya terjadi hubungan proses awal dan akhir. Artinya, akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan dan akhir dari peternakan adalah awal dari pertanian (Subagiyono, 2019).

Kawasan “Almond” dengan area seluas 10 hektar, untuk memproduksi beberapa komoditas, antara lain pembibitan ikan, pemeliharaan sapi dan domba/kambing, pengolahan pupuk organik, bio-gas, rumah bibit sayur, dan penanaman buah pisang, bahkan sebagai arena untuk tempat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan (studi banding) untuk komunitas masyarakat desa (Subagiyono, 2019).

Dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga, dari pihak baik dengan non pemerintah, menjalin interaksi tentang pembelajaran dengan relawan penggerak pertanian alami. Dengan pemerintah, melalui struktur dan fungsional

kelembagaan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). P2MKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KTM “Almond” sudah mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan pelatihan secara mandiri. POSLUHDES juga sudah eksis di KTM “Almond”. Dalam budidaya pisang, dengan fasilitasi dari BAPPEDA, tahun 2019 dijalin kerjasama dengan LIPI.

Sementara itu, konsep pemberdayaan yang dilakukan pasar Papringan yang berlokasi di dusun Ngadiprono, Ngadimulyo, Kedu, kabupaten Temanggung.¹ Konsep pemberdayaannya, merupakan upaya untuk merevitalisasi kebun bambu. Awalnya tempat itu sebagai tempat membuang sampah, kemudian diubah menjadi lokasi pasar untuk menjual produk lokal tanpa merusak ciri khas kebun bambu.

Pasar Papringan juga mengusung konsep *environmental sustainability* yang terepresentasikan dalam bentuk tata bangunan pasar. Gapura, berbagai petunjuk arah jalan, meja pedagang, rak meja ruang baca dan bermain bagi anak, bungkus makanan yang daun tumbuh-tumbuhan (bukan plastik). Tata hubung atau jalan di pasar papringan dengan desain *trasah*², melingkar membentuk angka delapan yang melambangkan keberuntungan. Tidak ketinggalan pula terdapat taman bacaan dan tempat bermain bagi anak seperti *enggrang*, panjatan, dan lain-lain. Alat transaksi pembayaran di pasar menggunakan mata uang yang disebut *Pring*. Satu *Pring* bernilai 2000 rupiah dan berlaku kelipatan. Agar dapat berbelanja di pasar ini, pengunjung harus menukar uang dengan kepingan *Pring* berbentuk persegi panjang ukuran kecil di loket penukaran uang dekat pintu masuk.

-
- 1 Pasar Papringan diinisiasi oleh Spedagi, sebuah komunitas dengan gerakan revitalisasi desa dengan tujuan mengembalikan fungsi desa sebagai komunitas lestari dan mandiri dan berkolaborasi dengan komunitas penggiat lingkungan Mata Air pecinta, dusun Ngadiprono.
 - 2 Model jalan asli Temanggung, jalan Trasah terdapat pula di Situs Liyangan, sebuah situs bekas perkampungan peninggalan abad ke-8-9 Masehi, terletak desa Liyangan Ngadirejo, Temanggung. Jalan Trasah menjadi model jalan-jalan desa sekabupaten Temanggung di masa lalu.

Bukan sekadar perbaikan fisik kawasan bambu menjadi arena jual beli, pasar Papringan mengakomodasi dan mendorong kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), kegiatan para pedagang oleh ibu-ibu dan pemuda desa yang menyajikan berbagai makanan khas tempo dulu yang sudah jarang ditransaksikan,

Pasar Papringan merupakan simbol dari kegiatan pemberdayaan dengan upaya mengembangkan kemandirian kesejahteraan, bukan hanya sekadar memanfaatkan sumber daya, akan tetapi melakukan pendampingan, transfer pengetahuan, ketrampilan bahkan pengorganisasian masyarakat desa, misalnya, beraneka makanan khas pedesaan disajikan, antara lain lesah ayam, sego jagung kuning, gono jagung, sego gono dan lain-lain, aneka minuman tradisional, dan seni *kriya*, akan tetapi juga membangun pengetahuan tentang rivitalisasi kebun bambu yang dahulunya digunakan untuk pembuangan sampah rumah tangga dijadikan pasar, bahkan dengan memberikan aksi nyata membangun kesadaran, perilaku lingkungan yang berkelanjutan, sehingga proses penataan ruang terbuka pasar Papringan bagian dari mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat, salah satu relevansinya dengan kegiatan mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN dirancang lebih kontekstual menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran masyarakat desa (Bappeda, 2016).

Sejatinya Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa bersama dosen pembimbing, sebagai arena menjalin interaksi antara perguruan tinggi, masyarakat atau perangkat desa. Program kerja KKN berperan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat melalui pengamatan, pengkajian dan pengembangan dengan pendekatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Bahkan sering kali program kerja KKN dapat memetakan berbagai permasalahan dan potensi desa. Artinya, kegiatan KKN di kabupaten Temanggung telah diupayakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang secara terpadu dan terintegrasi dengan program pemerintah (kabupaten dan desa) dan melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi antara lain Universitas Diponegoro

Semarang, UGM Yogyakarta, ISI Surakarta, Universitas PGRI Semarang, UNS Surakarta, STAINU Temanggung, IAIN Surakarta.

Kondisi tersebut dapat berjalan secara simultan dan saling mendukung dalam program pembangunan dan pemberdayaan antara program pemerintah desa dan mahasiswa KKN. Program kerja KKN dapat dibagi menjadi tiga pola. *Pertama*, pengembangan potensi seni budaya. Misalnya, mengkaji tari Jaranan (Jaran Kepang) sebagai kesenian asli Temanggung, mengajar Tari Jaranan, menciptakan tari Gerabah, melatih tari Dayakan, melatih rebana, Pentas Seni Budaya di lapangan Mungseng Temanggung (ISI Solo, 2017), penulisan kumpulan cerita rakyat desa Tlahap, Penciptaan tari Lele Truno, pelatihan membuat kerajinan, pembuatan video profil desa (UNY dan UNGRIS, 2018).

Kedua, pengembangan potensi sosial ekonomi desa, misalnya pemetaan potensi desa dan koneksitas antar desa dengan konsep masterplan, pengembangan pariwisata kecamatan Wonoboyo dan masterplan eduwisata di kecamatan Bansari desa Tlogowungu. Demikian pula selama tiga tahun diadakan KKN Tematik dengan pengolahan aneka produk jahe, pendampingan, bantuan peralatan, pemasaran kopi (Undip, 2015). Pelatihan untuk aneka produk kopi yaitu, kukis kopi, donat kopi, selai kopi, bronis kopi, stik talas kopi, keripik pisang kopi, *website* desa, sosialisasi perijinan makanan dan BPOM (KKN PPM UNGRIS, 2018). Pelaksanaan KKN Tematik yang terintegrasi antara program pemerintah desa dan kelurahan yaitu, pendampingan desa inovasi di Tegowanuh kecamatan Kaloran, pendampingan Desa Budaya desa Tlogomulyo, kecamatan Tlogomulyo, pendampingan Kampung Dolanan di kelurahan Walitelon kecamatan Temanggung, (UNY, 2019).

Ketiga, program kerja tata kelola pemerintah desa. Misalnya, pendampingan program mewujudkan Kampung KB (Keluarga Berencana) di desa Malangsari kecamatan Bulu, penyusunan buku panduan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) desa Tempelsari, pembuatan Profil Desa, buku perencanaan jalan Rabat Beton, pelatihan Sistem Informasi Desa (UNDIP, 2019), penyelenggaraan Taman Baca (UNGRIS, 2018), penguatan kelembagaan Takmir, TPQ, pengelolaan zakat infak sedekah dan pondok pesantren 6 desa Tembarak (STAINU, 2018), transformasi berbasis masjid (IAIN Surakarta, 2018), penerapan sistem pengembangan pembelajaran inovatif tingkat PAUD dan SD/MI, pengelolaan

persampahan desa, pendampingan manajemen Bumdes di desa Pengembangan Potensi Agrowisata berbasis UMKM dan BUMDes di desa Bansari kecamatan Bansari dan pengembangan potensi eduwisata dan agrowisata kopi di desa Geblok Kaloran (UGM, 2019).

Selain KKN, peran perguruan tinggi dapat berupa pendampingan penyusunan masterplan desa, salah satunya pendampingan di desa Petarangan kecamatan Kledung.³ Masterplan tata ruang desa sebagai kajian untuk menentukan kebutuhan dan prioritas desa secara komprehensif. Dengan pendekatan partisipatif dan teknokratik, masterplan desa dapat menggambarkan dokumen perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan potensi wilayah sebagai tempat tinggal komunitas, tanpa meninggalkan kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Misalnya, pengembangan potensi desa, perancangan fisik tata ruang lokasi bagi kebutuhan zonasi, distribusi, tata ruang, dan fasilitas umum, standar manajemen pengelolaan program desa.

Masterplan desa dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknokratik, tata ruang yang memperhatikan fungsi ruang desa dengan pendekatan sosial, ekonomi dan budaya, dan sangat bermanfaat apabila ada kesadaran dari segala pemangku kepentingan desa membutuhkan perencanaan desa yang komprehensif dan berkelanjutan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes.

Penutup

Pola interaksi yang bersifat timbal balik antara masyarakat, pemerintah dan perguruan tinggi suatu kebutuhan dalam merespons perubahan struktural desa. Pola interaksi yang lebih menempatkan masyarakat sebagai soko guru proses pembangunan dan pemberdayaan. Artinya memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk merumuskan dan melaksanakan program-program, bahkan diberikan pula kewenangan dalam pengawasan

3 Berawal dari diskusi di Bidang Litbang Bappeda Temanggung dengan Kades Petarangan Kecamatan Kledung tentang pembangunan dan pemberdayaan desa Petarangan, atas saran masukan dari Bappeda dibikin *pilot project* tentang pengembangan desa berbasis teknokratik dan partisipatif kabupaten Temanggung pada tahun 2019, menyusun masterplan desa bekerja sama dengan Fakultas Teknik UGM.

implementasi dana desa, akan tetapi belumlah mencukupi untuk mengakselerasi kemajuan desa, masih diperlukan pola relasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pemerintah pusat didorong untuk selalu memperbaiki regulasi dalam mendorong reformasi kebijakan di desa. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten didorong untuk memetakan skala prioritas dan harmonisasi kebutuhan masyarakat serta pengawasan pelaksanaan dana desa. Bahkan desa juga memerlukan *isoformisme*, institusi yang saling berinteraksi satu sama lain dan saling meniru satu sama lain (Turnner, 2010:282). Pengalaman keberhasilan sebuah inovasi yang telah diterapkan di desa lain, dapat dimodifikasi dan diadaptasi oleh desa lainnya.

Pola interaksi antara desa dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga sosial lainnya (seperti Spedagi, Combine Resource Institutions), proses interaksi, misalnya melalui KKN dapat berfungsi untuk melakukan transformasi penyadaran masyarakat untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan sehingga meningkatkan kualitas pengorganisasian desa. Kualitas program desa representasikan orientasi program yang tidak didominasi program tertentu saja misalnya, infrastruktur desa, namun perencanaan yang lebih teknokratik, yang bersifat komprehensif dan berjangka panjang yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan budaya.



Transisi Kerja Industrial Kaum Milenial:

Dari Otomasi 3.0 Menuju *Cyberphysical System* 4.0

Derajad S. Widhyharto



Pendahuluan

Kebangkitan industri digital telah mengubah *mode of production*, *mode of distribution*, *mode of consumption*, dan *mode of business* masyarakat dunia, khususnya kaum milenial yang lahir pada 1981–2000 saat ini sedang dalam masa transisi kerja dan pekerjaan, ditambah Indonesia mengalami bonus demografi usia produktif sampai tahun 2045. Sebagai pelaku digital kaum milenial mempunyai peran sentral dalam perubahan tersebut. Selain itu, kaum milenial menjadi produsen sekaligus konsumen kemajuan teknologi digital. Hal tersebut dinyatakan oleh Richard Florida di dalam bukunya *The Rise of Creative Class*, bahwa kini ia meyakini terdapat peran dari kelompok kreatif yang terdiri atas pekerja seni, penggiat komputer, dan pekerja informasi atau data lainnya sebagai pemacu perkembangan industri. Bagi Florida (2002), karakteristik pekerja kreatif tersebut memiliki keuntungan tersendiri dalam menggantikan tenaga kerja industri yang kaku, tidak inovatif dan terlalu *textbook*, sebab kelompok kreatif lebih fleksibel, toleran, dan kaya ide-ide baru. Masih dalam pemikiran Florida, kaum muda, sebagai kelompok usia yang seharusnya mampu mengkreasikan dan memproduksi nilai tambah secara kreatif ternyata kesulitan dalam berinovasi dan berkreasi, sehingga mereka hanya bisa membangun frasa “kreatif”, “milenial” atau “kekinian”. Sisanya, tak lebih dari sekadar kelompok manusia yang terombang-

ambing dalam arus informasi yang serba cepat. Sebaliknya, kaum muda tersebut menjadi konsumen utama produk-produk yang dilabeli “kreatif”. Perubahan yang dimaksud adalah otomasi (mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin) dalam industri 3.0 menuju *Cyberphysical System* (konektivitas dengan system siber) dalam industri 4.0 dalam berbagai bidang pekerjaan. Artinya, dalam perubahan tersebut terdapat algoritma-algoritma yang melakukan otomasi melalui mesin-mesin pengganti tenaga manusia yang telah terkoneksi dengan jaringan informasi yang membentuk hubungan interaktif yang saling melintasi batas-batas kerja dan pekerjaan. Kondisi tersebut menghasilkan teknologi digital yang mempengaruhi perubahan konfigurasi jenis pekerjaan, dan keterampilan kerja dari kaum milenial tersebut.

Hasil riset McKinsey tahun 2017, ada sekitar 60 persen dari 800 pekerjaan yang berpotensi diotomasi. Setidaknya sepertiga dari kerja dan pekerjaan tersebut, dapat digantikan oleh mesin robotik. Kegiatan fisik pada lingkungan yang stabil dan rutin mempunyai potensi terbesar diotomasi. Otomasi terjadi terutama pada pekerjaan kelas menengah seperti di sektor manufaktur, perdagangan ritel, jasa akomodasi, pengumpulan maupun pemrosesan data. Sementara itu, perubahan konfigurasi jenis pekerjaan juga ditunjukkan oleh hasil survei World Economic Forum (WEF) setahun sebelumnya yakni tahun 2016, setidaknya terdapat 18 faktor yang mempengaruhi perubahan “mode” di atas yang terbagi dalam dua indikasi. Indikasi pertama berhubungan dengan demografi dan sosial-ekonomi yang mencakup pertumbuhan kelas menengah, peningkatan urbanisasi, perubahan cara bekerja yang lebih fleksibel, meningkatnya usia muda di negara berkembang. Sedangkan indikasi kedua adalah teknologi yang meliputi teknologi robot, *big data*, *artificial intelligence*, *cloud computation*, *internet of things*, *mobile internet*, *financial technology* meningkat pesat (Tapsell, R. & Jurrien, E., 2017).

Di Indonesia perubahan tersebut sudah mulai terasa terutama di wilayah perkotaan setelah tahun 2007, pola transisi lapangan kerja di Indonesia berada di level pendapatan “menengah-menengah”. Transisi kerja sudah terjadi pada tahun 2007 atau sembilan tahun lebih dulu dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah-bawah, meskipun terlambat tujuh tahun dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah-atas. Sebelum 2007, sektor agraris mendominasi proporsi pekerja di Indonesia. Setelah itu, sektor jasa menggantikan sektor

agraris sebagai bidang pekerjaan terbesar. Sementara, tren pekerja sektor industri manufaktur meningkat tipis waktu itu (Siantoro, 2018). Bergesernya tren kerja tersebut menunjukkan potensi tenaga manusia yang digantikan oleh mesin semakin besar terjadi di Indonesia. Peningkatan kerja di sektor industri jasa di atas, perlahan tapi pasti telah mengubah orientasi kerja masyarakat dalam mencari pekerjaan. Bisa jadi sampai saat ini pun masih bisa dianggap sebagai masa transisi, terlihat dalam data BPS penduduk Indonesia yang bekerja sampai dengan bulan februari 2019, masyarakat yang bekerja sejumlah 129,36 juta orang, dari jumlah tersebut hanya 12,57 persen di antaranya yang bekerja berlatar belakang pendidikan diploma ke atas, dan hanya sekitar 0,73 persen total masyarakat yang bekerja di sektor jasa digital bidang informasi dan komunikasi. Sisanya tersebar di berbagai bidang lainnya, seperti pertanian, perdagangan dan konstruksi. Senada dengan masa transisi tersebut pemerintah membuat program peningkatan kompetensi kerja melalui Kementerian komunikasi dan informasi RI, memberikan beasiswa talenta digital sebanyak 50.000 peserta mahasiswa dari 30 universitas, 22 politeknik, 4 perusahaan teknologi global, dan 4 perusahaan rintisan lokal di Indonesia untuk menekuni bidang keamanan siber, kecerdasan buatan, dan analisis *big data* (*Kompas*, 21/06/2019, hlm.14).

Secara definitif kerja dan pekerjaan menurut Marx merupakan kegiatan yang membahagiakan manusia sebagai makhluk berpikir. Hasil kerja merupakan hakikat pemenuhan kebutuhan manusia yang luas agar dapat hidup dan menghidupi seringkali dipertukarkan dengan hasil objektivasi gagasan manusia lain. Hasil kerja ditentukan oleh seberapa besar keseriusan manusia dalam mencipta dan penghargaan dari manusia lainnya, karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Maka dunia kerja menurut pandangan Marx adalah dunia kemanusiaan, di mana setiap manusia dapat mencipta dengan leluasa sambil tetap hidup karena hasil ciptaannya dibutuhkan oleh manusia lainnya. Makna kerja dan pekerjaan merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, akan tetapi manusia mempunyai keterbatasan (Marx, 1981). Sisi keterbatasan itulah yang kemudian dijustifikasi sebagai peluang otomasi saat ini.

Sedangkan “otomasi” atau “otomatisasi” /*oto-ma-ti-sa-si*/ menurut *KBBI* adalah: 1. *penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia (dalam*

industri dan sebagainya); 2 perihal otomatis; pengotomatisan dalam hal ini pekerjaan. Dengan demikian, otomasi pekerjaan merupakan penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin adalah hal yang jamak terjadi di dunia dan juga Indonesia saat ini. Sedangkan definisi “pekerjaan” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) pekerjaan adalah “barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan: *begitulah~nya sehari-hari, memelihara tanaman dan menata taman.* Pencapaian; yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah: *ia sedang berusaha mencari.* Hal bekerjanya sesuatu: *berkat ~ mesin baru, hasilnya sangat memuaskan”* Artinya, esensi dari makna pekerjaan adalah kegiatan manusia yang menghasilkan yang terkait dengan upaya kerja dari manusia itu sendiri termasuk yang termediasi oleh mesin.

Lalu bagaimana dampak sosiologis bagi para pekerja terhadap terjadinya perubahan “mode” di atas sebagai efek berkembangnya industri 4.0 yang dampaknya dirasakan mulai tahun 2030. *Pertama*, pekerja kehilangan pekerjaan karena jenis pekerjaannya menjadi hilang atau tergantikan oleh mesin. *Kedua*, pekerja harus menyesuaikan dengan kebutuhan keterampilan yang baru. Hal ini terkait dengan kemampuan pekerja beradaptasi dengan perkembangan kerja dan pekerjaan berikut keterampilan yang dibutuhkannya. *Ketiga*, pekerja harus melakukan pekerjaan yang baru. Hal ini memaksa pekerja melakukan pekerjaan baru yang tidak dibayangkan sebelumnya.

Dinamika Otomasi Kerja menuju *Cyberphysical System*

Jacques Ellul di dalam bukunya berjudul *The Technological Society* menyatakan terjadinya *gerakan sosial luddite* merupakan satu protes yang dipicu perkembangan teknologi sejak diciptakannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776. Pada masa itu kemudian pecah revolusi industri di Inggris. Pada masa sekarang perkembangan teknologi digital juga telah mengubah kehidupan masyarakat. Meskipun tidak banyak para akademisi yang menyatakan telah terjadi revolusi industri. Indikasi yang sama terhadap munculnya revolusi industri sebenarnya telah terjadi di hampir semua negara-negara yang terdampak teknologi digital, yang membedakan adalah jika efek penemuan James Watt tersebut berimbas di

segala unsur kehidupan masyarakat Inggris dan kemudian menjalar ke negara-negara besar Eropa. Sebaliknya, teknologi digital saat ini telah menyebar tanpa batas di seluruh negara-negara di dunia, bahkan di Indonesia ikut terdampak dan terjadi gelombang protes dari masyarakat khususnya penggunaan platform media sosial seperti aplikasi transportasi *online*, aplikasi belanja, aplikasi jejaring sosial, dan sebagainya. Sebut saja pergeseran yang terjadi pada ojek pangkalan *offline* menjadi ojek *online* telah mengubah cara produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat. Sejak lima tahun terakhir perkembangan teknologi digital masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, misalnya ditandai dengan perubahan cara produksi, distribusi dan konsumsi pemilihan moda transportasi maupun jenis makanan dan cara makan. Sayangnya perubahan tersebut belum diikuti oleh kebijakan yang memadai pada saat perkembangannya, sehingga muncul keagapan pemerintah merespons efek digitalisasi tersebut, bahkan protes sempat terjadi di Indonesia dan berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan sebagian negara-negara Eropa.

Perubahan tersebut di atas mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan angkatan kerja di Indonesia dan berbagai negara tersebut belum sejalan dengan strategi inovasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Meskipun atas proses transisi tersebut pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan mengklaim “bahwa maraknya perkembangan sektor informatika maupun sektor daring juga memiliki andil yang besar dalam mengurangi angka pengangguran. Salah satunya ialah soal transportasi berbasis daring yang kini marak di berbagai wilayah di Indonesia. Baginya terlepas pro-kontra soal keberadaan transportasi daring tersebut, sektor transportasi daring telah terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja” (okezone.com, 27/02/2018). Di sisi lain, berkembangnya bisnis transportasi OJOL (ojek *online*) tersebut di atas, beberapa tahun lalu masih mendapat protes terkait dengan pola manajemen kerja, perbaikan layanan, pembagian keuntungan maupun tarif yang dinilai membebani pekerjanya. Di awal usaha, pengusaha aplikasi tersebut masih berorientasi pada kuantitas pekerja dan belum melakukan perbaikan kualitas layanan apalagi kesejahteraan pekerjanya. Setelah terjadi tuntutan peningkatan pelayanan dari pelanggan dan demonstrasi yang dilakukan pekerjanya sendiri yakni *driver* OJOL tersebut barulah pemilik usaha mulai membatasi *driver* dan beralih memikirkan layanan,

pembagian keuntungan usaha dan penyesuaian tarif. Merujuk pada penjelasan di atas, dalam perkembangannya, pemilik usaha tidak mudah mendapat pekerja yang mempunyai keterampilan melayani yang mumpuni. Sebaliknya mereka mendapat pekerja dengan keterampilan yang rendah karena sifat usaha berbasis aplikasi yang diawasi oleh *cyberphysical system*. Jika perusahaan kekurangan pekerja dengan keterampilan yang sesuai, maka produktivitas dipastikan berkurang. Dalam skala yang lebih besar, produktivitas yang rendah dipastikan berpengaruh pada *output* perekonomian nasional.

Jika OJOL dianggap mewakili pekerjaan kelas menengah ke bawah, contoh lainnya yang mewakili kelas menengah dan menunjukkan persoalan serupa dengan tantangan yang berbeda adalah pekerja di sektor perbankan, misalnya. Para bankir tengah dihadapkan pada fenomena disrupsi para penyedia layanan keuangan alternatif seperti perusahaan *financial technology* (fintech). Lewat platform digital, perusahaan *fintech* menyediakan layanan dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, bersifat *mobile* dan prosesnya lebih mudah daripada mekanisme perbankan non-digital. Dari contoh tersebut, mengindikasikan ada perubahan kebutuhan keterampilan. Jika di masa sebelumnya perbankan banyak merekrut pekerja dengan kemampuan manajemen keuangan dan operasional, di masa mendatang keterampilan *complex problem solving*, *programming*, *logical problem solving*, wajib dimiliki oleh pekerja perbankan. Dan pada akhirnya pekerja yang mempunyai kreativitaslah yang akan banyak dicari dan direkrut oleh lembaga keuangan tersebut (*Kompas*, 21/06/2019 hlm. 19). Dengan demikian, pekerja dengan latar pendidikan seperti matematika, statistik, dan ilmu komputer akan semakin dibutuhkan di sektor perbankan daripada pekerja lulusan ekonomi, dan ilmu sosial humaniora lainnya.

Lalu bagaimana upaya untuk mengantisipasi potensi perubahan keterampilan pada pekerjaan? Perusahaan dapat melakukan proses “*re-skilling*” pada pekerja. Dimulai dari sistem dan teknologi, pelatihan, rotasi pekerjaan, *job mobility* pegawai untuk mengakselerasi penguasaan keterampilan yang baru hingga perusahaan mendorong kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun pelatihan. Sayangnya, proses itu membutuhkan waktu yang lama, dan tidak semua pekerja mampu beradaptasi dengan cepat. Artinya, muncul risiko pekerja gagal dan lambat beradaptasi dengan keterampilan baru. Kegagalan

inilah yang tidak mudah diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan memilih untuk mempertimbangkan mengganti tenaga manusia dengan mesin (otomasi) yang sudah mulai dilakukan oleh sektor perbankan beberapa tahun yang lalu, kemudian diikuti oleh sektor lain seperti jasa akomodasi pariwisata, pemrosesan data di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Selanjutnya, langkah reaktif secara cepat dilakukan dengan mengantisipasi tren perubahan industri tersebut adalah perusahaan merencanakan untuk merekrut pekerja dengan membatasi keterampilan yang dibutuhkan saja. Kelemahan dari upaya ini adalah menjadikan perusahaan terus merekrut pekerja yang berujung pada peningkatan biaya tenaga kerja. Dalam praktiknya, muncul dampak dari biaya tenaga kerja tersebut, perusahaan lebih memilih berhubungan dengan pekerja dalam hubungan kontraktual. Pilihan tersebut meskipun awalnya dianggap sebagai kelemahan karena menuai protes dari serikat pekerja, akan tetapi dalam perkembangannya bagi kaum milenial justru menjadi kekuatan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan alasan ikatan kontraktual dengan sejalan dengan karakter pekerja digital. Jika dalam konteks non-milenial seorang pekerja kontrak berprestasi dan terampil dalam bekerja, seharusnya pekerja tersebut diangkat menjadi pekerja non kontraktual atas prestasi yang dicapainya. Akan tetapi sebaliknya justru pekerja tersebut diberhentikan (kontrak tidak diperpanjang) karena hanya akan membebani biaya tenaga kerja jika dialihkan menjadi pekerja non kontraktual (tetap). Perusahaan akan tetap mengambil tenaga kerja kontrak karena dinilai dapat menekan biaya tenaga kerja. Sebaliknya, karakter pekerja milenial justru tidak menginginkan keterikatan dalam bekerja, sehingga mereka memilih sebagai tenaga kerja kontrak daripada menjadi pekerja tetap meskipun dengan banyak iming-iming fasilitas kerja seperti rumah, mobil dan kepastian karier kerja. Hal ini ditegaskan oleh temuan riset Robert Walters “*Five Lessons in Tackling the Tech Talent Shortage*” Juni 2019 lalu yang menyatakan bahwa tidak mudah mendapat pekerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Rata-rata butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk mendapatkan pekerja yang diinginkan perusahaan. Kondisi tersebut sekaligus menjawab upaya pemerintah melalui Kemkominfo di bagian awal paragraf ini untuk mengisi peluang pekerja digital masuk dalam kerja industri dengan membuat program peningkatan kompetensi pekerja muda.

Meskipun upaya mengkombinasikan keduanya telah dicoba dilakukan, akan tetapi perusahaan kerap kali terlambat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri. Penyebab utamanya adalah ketidaksensitifan dan pemahaman yang kurang akan perubahan yang terjadi. Meskipun lompatan dilakukan dengan melakukan *re-skilling* yang disertai dengan pemberian insentif untuk mengakselerasi proses belajar pekerja. Sambil jalan, perusahaan mengakuisisi bakat dari luar untuk mengisi *skills gap* dan membantu memperluas penguasaan keterampilan. Akan tetapi, sampai kini tantangan pengkombinasian tersebut bukan menjadi solusi ideal bagi pekerja, mengingat dalam praktiknya belum semua pengusaha maupun perusahaan memberikan peluang kombinasi tersebut sebagai bentuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pekerja.

Kerja Industri dan Transisi Pekerjaan

Mengutip pendapat Shermine Gotfredsen, General Manager Universal Robots wilayah South East Asia & Oceania “Untuk Indonesia, Industri 4.0 membawa peluang luar biasa untuk melompati banyak tahap pembangunan, mempercepat jalan menuju terwujudnya negara yang berdaya saing tinggi (*Kompas*, 20/06/2019). Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan ini, bisnis harus memanfaatkan teknologi disruptif contohnya otomasi, sejalan dengan *roadmap* “*Making Indonesia 4.0*” yang dicetuskan oleh pemerintah. Lalu apa yang dimaksud dengan industri 4.0 yakni industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyberphysical* merupakan tren otomatisasi yang terkoneksi dengan pertukaran data. Ini termasuk sistem *cyberphysical*, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Lalu elemen esensial dari industri tersebut adalah kesiapan infrastruktur dan kapasitas adaptasi masyarakat itu sendiri. Misalnya, dalam konteks infrastruktur penyiapan perangkat keras dan sistem jaringannya, perangkat konektivitas tersebut dihubungkan dengan perangkat fisik industri, sedangkan dalam konteks masyarakat seperti terjadinya digitalisasi data, bisnis dan analisis terhadap *big data*, dan sebagainya.

Masih merespons pernyataan Gotfredsen dan implikasinya di atas, setidaknya muncul dua kata kunci yakni kaum milenial dan teknologi industri 4.0. Lalu

bagaimana hubungan keduanya: eksploitatif atau mutualistik? Kaum milenial dan teknologi industri 4.0 tidak dapat dipisahkan. Keduanya berkelindan dan saling terlilit membutuhkan. Lalu apa yang menjadi perhatian dari hubungan keduanya? Data BPS menunjukkan jumlah populasi Indonesia sebanyak 260 juta jiwa sedangkan jumlah pengguna internet sebanyak 150 juta jiwa pada tahun 2019. Pengguna internet dapat menghasilkan jumlah yang sangat besar dan potensial bisa dikembangkan lagi untuk meningkatkan literasi digital, dan pemerataan infrastruktur. Lalu bagaimana merespons jumlah besar tersebut, perlukah perubahan pekerjaan besar-besaran, apakah betul dimensi revolusioner industri tersebut berjalan seiring dengan semangat kaum pekerja milenial tersebut atau sebaliknya, menciptakan persoalan baru yang tidak berkorelasi dengan potensi yang ada.

Dikeluhkan berbagai CEO perusahaan dalam dan luar negeri bahwa di era industri 4.0. tidak mudah mencari tenaga kerja profesional. Professional yang dimaksud adalah pekerja yang mempunyai pengalaman kerja dan mendalami pekerjaannya selama tiga sampai delapan tahun. Keluhan tersebut sangat beralasan ketika pekerja milenial mempunyai kecenderungan beralih pekerjaan dengan cepat dan mempunyai proyeksi pekerjaan dekat dengan teknologi digital. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi orientasi jenis pekerjaan yang mereka tekuni. Kondisi ini juga semakin menguatkan sistem kontraktual dianggap lebih tepat diperuntukkan bagi kaum milenial yang berkarakter *high speed society* (ILO, 2017). Sayangnya karakter pekerja milenial tersebut belum terlindungi oleh kebijakan negara dalam praktik kerjanya, kebijakan dan perundangan masih dibuat untuk menyangkal *hoax* dan mencari jalan untuk menghukum pelanggar *negative content* dunia maya tersebut yang justru kontraproduktif dengan angkatan kerja digital yang terus beranjak naik di Indonesia.

Jika penjelasan di atas menunjukkan bahwa kita memasuki masa transisi, dalam konteks transisi pekerja yang masuk dalam kategori akibat perubahan teknologinya. Lalu bagaimana dengan pandangan dari sisi tenaga kerja atau pekerjaannya, transisi ataupun pengalihan pekerjaan yang diakibatkan oleh industri 4.0, secara substantif tidak mudah dilakukan. Mengingat seringkali perubahan yang dilakukan pemilik usaha lebih merujuk pada perubahan manajerial dibandingkan dengan perubahan substansi ketenagakerjaan dalam arti

perlindungan pekerja terhadap berbagai perubahan yang terjadi, termasuk perubahan yang diakibatkan industri 4.0. Kecenderungan mengubah wajah manajerial dianggap lebih penting dikarenakan pemilik usaha seringkali melihat dari sisi bisnisnya. Sedangkan dari sisi tenaga kerja dalam banyak kasus perubahan tersebut dimaknai pemilik usaha sebagai upaya mengakali tenaga kerja yang sudah bekerja lama dengan memindahkannya ke pekerjaan baru, termasuk penghitungan masa kerja kembali dari tahun pertama. Artinya, seperti telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini tentang kerja kontraktual, pemilik usaha tetap diuntungkan secara finansial dalam perubahan tersebut. Apalagi jika tidak terjadi kesepakatan atau sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, hak pekerja atas pesangon dan penghargaan masa kerja seringkali tidak dibayarkan secara penuh. Bahkan harus menempuh Pengadilan Hubungan Industrial selama beberapa tahun dan ada risiko perusahaan kabur yang kemudian berganti nama, sehingga tidak mudah lagi dilacak relasi pemilik usaha dan pekerjanya.

Dampak ikutan dari respons perubahan tersebut di atas bagi pekerja adalah kondisi kesejahteraan pekerja yang berbeda-beda bagi pekerja yang pemilik usahanya perhatian terhadap perlindungan pekerja sebagai respons atas perubahan yang terjadi dalam menghadapi industri 4.0 adalah peluang dan tantangan baru yang perlu dicapai melalui tujuan perusahaan. Artinya, jika banyak pemilik usaha yang tidak siap mengantisipasi perubahan maka akan menciptakan besarnya jurang ketimpangan karena keuntungan pengusaha akan semakin banyak mengingat jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan semakin sedikit dan murah akibat otomasi atau penggunaan mesin robot. Lalu mengapa perubahan tersebut perlu diantisipasi karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tinggi di mana 1% individu terkaya dari total penduduknya menguasai hampir separuh (49%) total kekayaan. Pada Tahun 2016, kekayaan kolektif dari empat miliarder terkaya tercatat sebesar \$25 miliar, lebih besar dari total kekayaan 40% penduduk termiskin yang sekitar 100 juta orang. Hanya dalam waktu sehari, orang Indonesia terkaya dapat meraup bunga dari kekayaannya lebih dari 1000 kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin untuk kebutuhan dasar mereka selama setahun penuh (Oxfam dan INFID, 201, hlm. 2).

Muncul risiko dari transisi kerja dan pekerjaan. Jika otomasi semakin masif maka berpengaruh pada konsolidasi pekerja melalui organisasi serikat pe-

kerja dapat saja terganggu karena pasar tenaga kerja semakin fleksibel dan berkurangnya jumlah pekerja tetap yang bekerja dalam waktu cukup lama. Kita bisa melihat bagaimana sulitnya serikat buruh mengorganisir pekerja alih daya (*outsourcing*) yang bekerja tidak tetap (kontraktual) dan seringkali tidak jelas masa kerjanya, sehingga tidak mudah pula memasukkan atau melibatkan mereka dalam organisasi serikat pekerja. Dengan demikian daya tawar pekerja makin lemah mengingat kekuatan terbesar pekerja sebenarnya ada pada organisasi serikatnya. Meskipun demikian, banyak juga yang optimis dengan Industri 4.0 akan berdampak positif terhadap pekerja, contohnya mengurangi waktu untuk bekerja, meningkatkan produktivitas, dan hidup lebih seimbang karena banyak komponen pekerjaannya dikerjakan mesin robot.

Dampak dalam skala besar di Indonesia dapat diasumsikan belum terlihat jika mengamati data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jika dibandingkan data BPS Agustus 2017 dan Agustus 2018, maka terlihat kenaikan tingkat partisipasi kerja dari 66,67% menjadi 67,26% dan terdapat penurunan kecil pengangguran terbuka dari berjumlah 7.040.323 orang menjadi 7.000.691 orang. Jika dilihat jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dalam berbagai sektor pun terjadi peningkatan (BPS Kondisi Angkatan Kerja Indonesia 2017, 2018). Meskipun dampak dalam skala besar belum dirasakan, beberapa perusahaan terutama sektor perbankan sudah menyambutnya dengan melakukan otomasi dengan memperpendek birokrasi dan menggantinya dengan aplikasi *e-banking* yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja layanannya. Artinya, gelombang perubahan Industri 4.0 telah terjadi, meskipun masih belum datang dalam skala besar ke Indonesia.

Budaya Kerja dan Arah Kebijakan Transisi

Pelajaran berharga dari perubahan kerja dan pekerjaan kaum milenial di atas adalah perubahan budaya kerja dan harapan adanya perubahan kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi dan berpihak pada pekerja. Mengapa hal tersebut penting? Setidaknya ada tiga alasan dalam konteks budaya kerja. *Pertama*, perkembangan teknologi mempengaruhi budaya kerja yang telah memaksa pekerja milenial beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang

tidak sepenuhnya diawasi dan dikuasainya, melainkan teknologi import dan hasil perubahan global dari gelombang industrialisasi (Florida, 2002). Artinya, perkembangan teknologi yang kini terjadi bukanlah keinginan dari dalam diri masyarakat pekerja Indonesia, melainkan *given* atau pemberian dari berbagai gelombang industrialisasi. *Kedua*, bakat (*talent*) tidak ditemukan secara alamiah melainkan diciptakan oleh industrialisasi, sehingga budaya kerja yang terjadi dalam bentuk pengkondisian-pengkondisian pendidikan, pelatihan kerja dan pekerjaan yang menyesuaikan kepentingan dan waktu industrial (Granovetter, 1973; Ford, 2015). *Ketiga*, hubungan kerja yang termediasi, telah menempatkan teknologi informasi dan komunikasi pekerja tidak dalam hubungan fisik interaksional, melainkan hubungan kerja yang bersifat komputasional yang termediasi oleh media teknologi (*gadget, computer, media sosial dan sebagainya*) hal inilah yang menjadikan corak budaya kerja yang dekat akan tetapi tidak lekat (Ford, 2015). Alih-alih modernisasi kerja dan hubungan kerja di atas telah menciptakan proses kerja individual dengan hubungan kerja yang saling membatasi karena hubungan yang termediasi semata mengatasnamakan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, pada dasarnya masalah ketenagakerjaan merupakan agenda sosial, politik, dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara industri besar, sebab masalah ketenagakerjaan sebenarnya tidak hanya hubungan antara para tenaga kerja dengan pengusaha, tetapi secara lebih luas juga mencakup persoalan sistem ekonomi sebuah negara dan sekaligus sistem politiknya. Oleh karena itu, ekonomi dan politik suatu negara akan sangat menentukan karakter dari sistem ketenagakerjaan yang dianut. Selama ini persoalan ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh sistem ekonomi dunia, sehingga mempengaruhi arah kebijakan ketenagakerjaan yang melahirkan tipe ketenagakerjaan seperti yang dinyatakan Tamara Lothion yang membedakan tipe ketenagakerjaan ke dalam tipe kontraktualis dan tipe korporatis (Aloysius, 2003). Tipe kontraktualis yang dimaksud berorientasi memperkecil keterlibatan negara dalam proses ketenagakerjaan, sebaliknya tipe korporatis memperkuat keterlibatan negara dalam berbagai urusan ketenagakerjaan.

Selanjutnya, jika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan jawaban atas upaya pemerintah dalam isu ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan perlindungan terhadap pekerja dalam hal: a)

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, bisa jadi tujuan tersebut belum dapat tercapai mengingat arah transisi kerja industri kaum milenial secara sosiologis justru mengarah pada kondisi sebaliknya yakni proses transisi yang lambat, kebijakan bersifat reaktif bukan responsif, dan berorientasi pada kepentingan pemilik usaha/pengusaha yang sebenarnya justru mengaburkan makna dari tujuan UU di atas. Artinya, dalam merespons Industri 4.0, sebenarnya bukan pekerja yang jadi persoalan utamanya melainkan produk kebijakan seperti ketersediaan perangkat perundang-undangan, implementasi, dan konsistensi aparatur pemerintahnya. Dalam tahap sebelumnya yakni Industri 3.0 ketiga aspek kelengkapan perundang-undangan, implementasi dan konsistensi aparatur pemerintah justru sering menjadi masalah dalam menguatkan isu ketenagakerjaan. Mulai dari lemahnya sistem pengawasan, tidak berjalannya hukum perburuhan, lemahnya perlindungan hak pekerja, sampai dengan kontroversi kebijakan yang lebih mementingkan pemilik usaha dibandingkan kepentingan pekerja.

Sampai saat ini, belum banyak diketahui tentang rencana Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) berhubungan dengan industri 4.0 selain pembuatan aplikasi dan digitalisasi, akan tetapi soal perbaikan sistem internal apa yang akan dilakukan dan apakah sudah ada integrasi dengan kementerian lainnya terkesan belum banyak perubahan. Meskipun dalam tataran gagasan Menteri Tenaga Kerja pada pembukaan Konferensi Hubungan Industrial ke-5 bertema “The Alignment of New Industrial Relations Policy Toward Industry 4.0 Era”, sempat diberikan arahan tentang tiga langkah strategis merespons industri 4.0 yakni *pertama*, pengembangan dialog sosial secara bipartit dan tripartit untuk mengatasi permasalahan dan sengketa hubungan industrial yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. *Kedua*, penyiapan regulasi bidang hubungan industrial yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital. *Ketiga*, penyiapan Aparatur Sipil Negara yang tanggap dan inovatif dalam merespons perubahan struktur ketenagakerjaan di era ekonomi digital (*detik.com*, 7/11/2018).

Sebaliknya, dalam konteks transisi otomasi menuju *cyberphysical system* pasca-pemogokan kerja pekerja taksi dan demonstrasi *driver* daring tahun 2017 dan 2018 lalu, Kementerian Perhubungan lebih responsif melakukan perubahan dengan menerbitkan Permenhub No. 12 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 348 Tahun 2019 dalam bentuk aturan batas atas dan batas bawah tarif, meskipun masih mendapat kritik tentang munculnya *predatory pricing*. Kemudian bagaimana konsep perlindungan hak pekerja? Bagaimana pula evaluasi konsep maupun kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Pengawas Tenaga Kerja (Wasnaker) atas perubahan yang telah, sedang dan akan terjadi. Kemenaker sepertinya bersikap pasif dan menunggu permintaan dunia usaha. Jika dilihat dari data media, maka program Kemenaker yang muncul untuk menghadapi Industri 4.0 hanyalah sebatas pelatihan tenaga kerja. Padahal Kementrian Perindustrian sudah membuat 10 program nasional, dalam bentuk 10 langkah prioritas nasional dalam menghadapi Industri 4.0 untuk mempercepat industri Indonesia, yaitu: 1) Perbaiki alur aliran barang dan material Indonesia bergantung pada impor bahan baku maupun komponen bernilai tinggi. 2) Mendesain ulang zona industri Indonesia telah membangun beberapa zona industri di penjuru negeri; 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*). Komunitas global telah menyuarakan kekhawatiran terkait keberlanjutan di berbagai sektor; 4) Memberdayakan UMKM. Hampir 70% tenaga kerja Indonesia bekerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); 5) Membangun infrastruktur digital nasional untuk mendukung Peta Jalan Making Indonesia 4.0. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan *digital capabilities* dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti *cloud*, *data center*, *security management* dan infrastruktur *broadband*.

Selanjutnya, lima langkah prioritas lainnya adalah: 6) Menarik minat investasi asing Indonesia perlu melibatkan lebih banyak pelaku industri manufaktur terkemuka untuk menutup kesenjangan teknologi dan mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal; 7) Peningkatan kualitas SDM. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (*Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics*) untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di

masa mendatang; 8) Pembangunan ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi adalah hal yang penting untuk memastikan keberhasilan Making Indonesia 4.0. Pemerintah Indonesia akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk di antaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara pelaku usaha swasta/BUMN dengan universitas; 9) Insentif untuk investasi teknologi. Insentif memiliki potensi untuk menggerakkan inovasi dan adopsi teknologi; 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan kordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah.

Penutup

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan transisi industrial yang berbasis konektivitas, dengan inovasi tersebut batas geografis antarpulau, budaya, dan sosial akan dapat dihilangkan karena saling terkoneksi dan membentuk ikatan jejaring mutualistik industrial. Akan tetapi momentum transisi kerja industri tersebut juga bisa menjadi beban, tinggal bagaimana upaya kita untuk tidak terjebak di dalam dikotomi peluang dan beban tersebut? Jika memang menginginkan sebagai peluang tentu saja wajib memulai dengan perencanaan yang matang, merujuk kesesuaian konsep angkatan kerja dengan dinamika inovasi teknologi dan usaha yang sedang terjadi. Kegagalan dan kecanggungan beradaptasi dengan *cyberphysical system* masih sangat terasa, baik pemilik usaha, pekerja milenial maupun pemerintah. Merespons hal tersebut memang perlu kerja keras dan cerdas untuk mengintegrasikan kepentingan dengan berbagai aktor yang terlibat. Jangan sampai transisi tersebut justru menjadi jebakan untuk mengeluarkan biaya sosial ketenagakerjaan menjadi tinggi dan berisiko mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran lebih banyak.

Esensi transisi kerja industrial bukan hanya merujuk pada perubahan revolusi teknologi industri, melainkan lebih substansial lagi, yakni merujuk pada kesejahteraan dan perlindungan pekerja milenial terhadap perubahan industri

tersebut. Oleh sebab itu, sepuluh langkah prioritas menghadapi industri 4.0 untuk mempercepat industri di Indonesia tersebut dapat menjadi kerangka kerja yang penting dilakukan semua kelembagaan pemerintah, direspons masyarakat pekerja, diikuti industri, dan pemerintah daerah. Akan tetapi dapat juga menjadi bumerang kelemahan transisi yang diakui oleh pemerintah sendiri. Skala perubahan yang terus tumbuh menjadi momentum untuk memperbaiki kerangka konsep dan pratiknya di lapangan. Mengingat efek perubahan industri 4.0 belum dapat dikelola dan direspons secara komprehensif oleh pelaksana kebijakan, dikawatirkan dominasi pengawasan dunia usaha lebih besar daripada pengawasan yang dilakukan oleh negara akan mengakibatkan isu eksploitasi serta pelemahan hak-hak pekerja akan terulang kembali di era serba digital ini.

Referensi

• *Buku*

Badan Pusat Statistik. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017*, hlm. 265–266 dan Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018*, hlm. 227–228.

ELLUL, J. (1967). *The technological society*. New York: Knopf.

FLORIDA, R. L. (2002). *The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. New York, NY: Basic Books.

FORD, M. (2015). *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*.

GRANOVETTER, MARK, "The Strength of Weak Ties" (1973). *American Journal of Sociology*, Vol. 78, Issue 6, p. 1360-13 1973. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1504479>.

Laporan Ketenagakerjaan Indonesia (2017). "Memanfaatkan Teknologi Untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja". International Labour Organization (ILO).

Marx, Karl. 1981. *Capital Vol. III*. diterjemahkan oleh David Farrenbach, Midlesex: Pinguin Books.

Rauf, Syarkawi M., "Melerai Perang di Transportasi Bebas Aplikasi" (Opini *Kompas*, 29 Juni 2019, hlm. 6).

TAPSELL, R., & JURRIËNS, E. (2017). *Digital Indonesia Connectivity and Divergence*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://muse.jhu.edu/book/57005/>.

Uwiyono Aloysius, “Implikasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terhadap Iklim Investasi”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 2003. hlm. 43.

• ***Publikasi Internet***

<https://analisis.kontan.co.id/news/mengantisipasi-perubahan-skill>

<https://medium.com/@makersinstitute/pekerjaan-yang-terancam-oleh-otomasi-mesin-a75c980a697f>

<https://oxfamblogs.org/indonesia/menju-indonesia-yang-lebih-setara/>

Lihat Katadata.co.id dengan judul «Analisis Data: Revolusi Industri 4.0: Peluang Munculnya Profesi-Profesi Baru»

<https://katadata.co.id/analisisdata/2018/04/20/revolusi-industri-40-peluang-munculnya-profesi-profesi-baru>. Penulis: Ayu Siantoro

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181219110326-4-47054/menperingkatkan-10-prioritas-ri-hadapi-revolusi-industri-40>

<https://www.robertwalters.com.my/content/dam/robert-walters/country/malaysia/files/whitepapers/robert-walters-malaysia-five-lessons-in-tackling-the-tech-talent-shortage.pdf>

<https://economy.okezone.com/read/2018/02/27/320/1865395/angka-pengangguran-indonesia-capai-level-terendah-sepanjang-sejarah>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4292210/3-langkah-strategis-guna-respons-revolusi-industri-40-ala-menaker>

https://www.academia.edu/11710009/Kebenaran_Manusia_Sebagai_Kerja_Selayang_Pandang_Kemanusiaan_Menurut_Marxisme_Klasik



Menyingkap Wajah Muram Buruh Sektor Tambang di Indonesia dalam Blokade Fundamentalisme Pasar

A. B. Widyanta



*“Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya... Yang seluas-luasnya!
Dalam rangka apa?”*

*Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya.
Jangan ada yang alergi terhadap investasi! Karena dengan cara inilah
lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang
menghambat investasi semuanya harus dipangkas! Baik itu perijinan
yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati...
Hati-hati... Ke depan... Ke depan saya pastikan akan saya kejar... Akan saya
kejar... Akan saya kontrol... Akan saya cek... Dan akan saya hajar kalau
diperlukan! Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi. Karena ini
adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.¹*

--Joko Widodo, Presiden Terpilih 2019–2024--

1 Transkrip pidato kemenangan presiden terpilih 2019-2014 yang diunggah di laman BeritaSatu 14 Jul 2019 bertajuk “Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Hambatan-hambatan Investasi” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qk4zMiei8D0> diakses pada 15 September 2019.

Pengantar

Syahdan. Di tengah kepuangan dan gelora antusiasme lautan konstituen berkemeja putih-putih, presiden terpilih 2019–2024, Jokowi —sebutan populer Joko Widodo— menyampaikan pidato pertamanya setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2019. Pidato Jokowi ini disampaikan dalam acara Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu 14 Juli 2019.² Tampil dengan raut muka yang serius, tatapan mata-jauh yang tajam, kerutan otot simpang mata yang nyaris menyambung dua pangkal alisnya, Jokowi menyampaikan visinya dalam intonasi tinggi: “Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya... Yang seluas-luasnya! Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya...” tegasnya.

Disertai gestur jari tangan kanan-menelunjuk yang diayun naik turun sebagai tanda penekanan, Jokowi berupaya meyakinkan audiens tentang keseriusannya dalam menghilangkan berbagai hambatan investasi: “Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas! Baik itu perijinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati... Hati-hati... Ke depan... Ke depan saya pastikan akan saya kejar.”³ Gemuruh tempik sorak konstituen yang menjeda pidato Jokowi hingga 30 detik seolah menjadi *spectacle* politik glorifikasi atas lolosnya “Kubu 01” dari perangkap pertarungan “politik pecah belah” berbalut hipernasionalisme (baca: nasionalisme sempit) *versus* politik identitas (baca: populisme islam)⁴ yang mereplikasi pola serupa pada Pilpres

2 Pidato lengkap dapat diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=1M2nxjzWwuM> diakses pada 15 September 2019.

3 Ardito Ramadhan, “Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Hajar Pungli dan Penghambat Investasi” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/20322301/pidato-visi-indonesia-jokowi-ancam-hajar-pungli-dan-penghambat-investasi> diakses pada 15 September 2019.

4 Baca Reza Gunadha, “Vedi R Hadiz: Populisme Islam dan Kaum Oligarkis pada Pilpres 2019” di dalam <https://www.suara.com/wawancara/2019/02/25/072000/vedi-r-hadiz-populisme-islam-dan-kaum-oligarkis-pada-pilpres-2019>; baca juga Beby Pane, “Vedi Hadiz: Kuasa Oligarki Dilanggengkan lewat Populisme Islam” di dalam <http://www.balairungpress.com/2018/08/19211/> diakses pada 15 September 2019.

2014.⁵

Dalam hal ini, *good will* sang kampiun Pilpres 2019 untuk membersihkan hambatan-hambatan investasi dapat dicatat sebagai fondasi dasar bagi Kabinet Kerja jilid dua untuk mengekspansi lebih lanjut model pembangunan infrastruktur yang masif dan ramah investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) selama lima tahun mendatang. Sekilas menyimak data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), hingga triwulan III-2019 (akhir pemerintahan periode 2014-2019), Kabinet Kerja berhasil menyelesaikan 89 proyek infrastruktur yang tercantum di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).⁶ Sementara itu, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kebutuhan anggaran untuk infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mencapai sebesar Rp 6.421 triliun.⁷

Baru berselang dua bulan pasca pidato kemenangan Jokowi atau satu bulan menjelang dilantikannya Jokowi sebagai Presiden periode kedua, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengganggu investasi. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah

- 5 Baca A.B.Widyanta, "Menggapai Kesejahteraan Publik: Menyoal Ulang Demokrasi yang Menyejahterakan" di dalam https://www.academia.edu/12375823/Menggapai_Kesejahteraan_Publik_Menyoal_Ulang_Demokrasi_yang_Menyejahterakan diakses pada tanggal 15 September 2019.
- 6 Dari keseluruhan 245 proyek dan 2 program yang termasuk di dalam daftar PSN, dibutuhkan estimasi total pembiayaan sebesar Rp 4.197 triliun dengan sumber pendanaan dari APBN sebesar Rp 525 triliun, BUMN/D sebesar Rp 1.258 triliun, dan Swasta sebesar Rp 2.414 triliun. Namun terdapat perubahan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, diputuskan sebanyak 223 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 3 program, yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang serta pemerataan ekonomi. Baca KPPIP, "Proyek Strategis Nasional" dalam <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional>; baca juga Satyagraha, "KPPIP pastikan 89 Proyek Strategis Nasional selesai triwulan III-2019" dalam <https://www.anta-ranews.com/berita/890043/kppip-pastikan-89-proyek-strategis-nasional-selesai-triwulan-iii-2019> diakses pada 15 September 2019.
- 7 Baca Selfie Miftahul Jannah, "Jokowi Periode II: Genjot Infrastruktur Senilai Rp 6.421 triliun" di dalam <https://tir-to.id/jokowi-periode-ii-genjot-infrastruktur-senilai-rp6421-triliun-eiBJ> diakses pada 24 September 2019.

dan DPR sepakat merevisi UU KPK. “Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat,” ungkap Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).⁸ Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan itu mengemuka sebagai bentuk respons atas merebaknya aksi protes mahasiswa di berbagai kota di Indonesia⁹ yang serentak menyerukan mosi tidak percaya kepada DPR dan Elit Politik atas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), serta sejumlah RUU bermasalah lainnya.¹⁰

Terlepas dari logika akrobatik yang sarat dengan aneka kontradiksi internal,¹¹ konfigurasi politik nasional itu merupakan cerminan dari, meminjam istilah

8 Baca Ihsanuddin, “Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi” di dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/16490461/moeldoko-kpk-bisa-menghambat-investasi> diakses pada 23 September 2019.

9 Aksi demonstrasi mahasiswa serentak berlangsung di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Jember, Makasar, Lampung, dan Riau pada Senin, 23 September 2019. Baca Addi M Idhom, “Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini dan Respons Jokowi soal RUU KUHP” di dalam <https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV> diakses pada 23 September 2019.

10 RUU lainnya di antaranya adalah RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pemasarakatan, RUU Pertambangan Minerba, dan mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

11 Kontradiksi internal ini dapat dicermati dalam pro-kontra revisi UU KPK. Meskipun basis argumen dan artikulasi politiknya berbeda, namun pihak pro maupun kontra sesungguhnya tengah terkoneksi pada tujuan dan agenda yang sama, yaitu sama-sama berpikir dan bercita-cita tentang “Terwujudnya peningkatan Investasi Asing Langsung di Indonesia”. Simak berbagai ulasan dari para ahli anti-korupsi berikut (*kompas.com*): “Pengamat: KPK Hambat Investasi Sangat Tidak Mendasar”, “Ekonom Sebut Revisi UU KPK Malah Bikin Investor Kabur”, “Investasi Butuh Kepastian Hukum, Pengusaha Ingin KPK Diperkuat”, “Kata Pengusaha, Keberadaan KPK Beri Kepastian Hukum untuk Investasi”, “Indef: Revisi UU KPK Bikin Investor Makin Ogah Investasi di Indonesia”. Lebih lanjut baca Fika Nurul Ulya, “Benarkah KPK Hambat Investasi?” di dalam https://money.kompas.com/read/2019/10/02/064153626/benarkah-kpk-hambat-investasi#utm_source=insider&utm_medium=web_push&utm_campaign=benarkah_kpk_menghambat_investasi&webPushId=MjM0MDY= diakses pada 2 Oktober 2019.

Priyono (2014), ketidakpahaman dan kekurangcerdikan menyiasati kontradiksi kinerja kriteria validitas kembar yang bersarang dalam setiap tata negara modern, yaitu hukum-besi ekonomi politik. Menurut Priyono, prinsip validitas kinerja suatu tata negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan mandat konstitusi dan keadilan tapi juga oleh kondisi anggaran-pembiayaan suatu tata-negara dalam mekanika ekonomi pasar dan perdagangan.¹² Praktik tata negara dalam perangkap hukum besi ekonomi politik semacam ini sesungguhnya hanyalah fenomena “pucuk gunung es” dari proses panjang implementasi paket program liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi oleh kuasa elit oligarkis,¹³ sekurangnya dalam setengah abad terakhir —dari era Orde Baru (32 tahun) hingga era paska Orde Baru (21 tahun).

Inilah salah satu contoh paling khas dari apa yang disebut David Harvey (2014), neoliberalisme sebagai “proyek politik” di negara-negara kapitalisme pinggiran (negara sedang berkembang). Bermula sekitar akhir tahun 1960-an hingga 1970-an, “proyek politik” yang diusung kelas kapitalis korporasi ini berupaya mengekang kekuatan buruh. Meskipun tak pernah sepi perlawanan, namun kelas penguasa mengenali berbagai fron untuk memperjuangkan itu, baik melalui fron ideologi, politik, dan seluruh fron yang dapat mereka upayakan untuk mengekang kekuatan buruh dengan segala macam cara.¹⁴ Menurut Harvei (2005), neoliberalisasi bisa diinterpretasikan sebagai suatu proyek utopian untuk merealisasikan desain teoretis untuk mereorganisasi kapitalisme internasional ataupun sebagai suatu proyek politik untuk menyusun kembali kondisi-kondisi

12 Priyono, B. Herry, “Konstitusi vs Akuntansi: Hukum Besi Ekonomi Politik” di dalam *Basis* Nomor 03-04, Tahun ke-63, 2014, hlm. 5–17.

13 Sejak Orde Baru hingga era reformasi, berlangsung reorganisasi peran negara dalam era liberalisasi ekonomi, di mana keterlibatan negara terjadi dalam dua aktivitas utama, yaitu “deregulasi” dan “reformasi regulasi”. Baca lebih lanjut Andrew Rooser, *The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market, and Power*, Richmond: RoutledgeCurzon, 2002, hlm. 14.

14 Baca wawancara David Harvey dengan Bjarke Skærlund Risager, “Neoliberalism is a Political Project: An Interview with David Harvey” di dalam <https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance> diakses pada 15 September 2019.

bagi akumulasi kapital dan kembalinya kuasa elit-elit ekonomi.¹⁵

Dengan masih mengusung semangat politik “demokrasi yang menyejahterakan” pada periode pertama pemerintahannya (2014–2019),¹⁶ Jokowi kini kembali berkhidmat dalam devosi dan *credo*: “*a rising tide lifts all boats*” atau “*trickle down effect*” sebagai, meminjam istilah Tania Li (2012), “teknikalisasi permasalahan”¹⁷ dan solusi atas isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan sebagai taruhan politik dalam periode pemerintahan kedua mendatang (2019–2024). Persis di dalam surplus kepercayaan diri (pemerintahan) Jokowi itulah, tulisan ini akan memulai pokok kajian dengan melontarkan sebuah gugatan sebagai titik tolak dimulainya tulisan ini. Dalam blokade “proyek politik” neoliberalisme atau “fundamentalisme pasar”¹⁸ yang bias kepentingan kelas elit oligarkis se-

15 David Harvey, 2005, *A Brief History of Neoliberalism*, New York: Oxford University Press, hlm. 19.

16 Baca Fabian Januarius Kuwado, “Jokowi: Pilpres Harus Menggembirakan, Bukan Menakutkan”, *Kompas* 03/06/2014 di dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/2211060/Jokowi.Pilpres.Harus.Menggembirakan.Bukan.Ketakutan> diakses pada 15 September 2019.

17 Penjelasan Li tentang “teknikalisasi permasalahan” merujuk pada serangkaian praktik yang menampilkan “urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya... menentukan batas tepinya, agar nampak unsur-unsur di dalamnya, mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur tersebut dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur-unsur yang telah ditampilkan tadi. Teknikalisasi permasalahan inilah yang kemudian bermain sebagai penegas kepakaran dan memisahkan para wali masyarakat, yang punya kemampuan mendiagnosa kekurangan orang lain, dengan mereka yang menjadi objek kepengaturan. Baca “Tania Murray Li. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Marjin Kiri, hlm. 225–226.

18 Kuatnya pengaruh gagasan tentang “pasar bebas” telah memunculkan beragam pelabelan. Sebagian orang menggunakan terma “neoliberalism”, sebagian lain menyebutnya “laissez-faire,” dan sebagian lain lagi tetap mengistilahkan “ideologi pasar bebas”, tapi tidak sedikit pula yang menggunakan label “fundamentalisme pasar” salah satunya adalah George Soros (1998). Penggunaan label “fundamentalisme pasar” dikarenakan istilah itu memuat klaim kepastian kuasi-religius seperti yang ditunjukkan oleh para pembela akidah swa-regulasi pasar (*market self-regulation*), di

macam itu, apakah “eksperimentasi pemenuhan kontrak politik” dengan cara “mengundang investasi seluas-luasnya demi membuka lapangan kerja sebesar-besarnya” itu akan terealisasi dan benar-benar menjawab kebutuhan warga negara di Republik ini atas “pekerjaan” dan “kesejahteraan” dalam rentang waktu lima tahun mendatang?

Bertolak dari gugatan tersebut, lebih lanjut tulisan ini akan mengkaji lintasan dan rekam jejak “proyek politik” neoliberalisme atau “fundamentalisme pasar” sejak orde baru hingga saat ini, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Setelah itu, kajian akan melanjutkan pembahasan dengan menyajikan hasil investigasi lapangan tentang hidup dan penghidupan para buruh pertambangan nikel (*nickel pig iron*/NPI) di sebuah kawasan pesisir teluk Tolo di Sulawesi Tengah. Pemerintah nasional menjuluki kawasan itu sebagai “Kawasan Industri Morowali” (KIM) yang dikategorikan ke dalam klaster Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau “*Special Economic Zone* (SEZ)”.¹⁹ KIM adalah salah satu dari sekian “Proyek Strategis Nasional” (PSN) yang konon digadang-gadang akan menjadi kawasan industri hulu-hilir terbesar se-Asia, bahkan juga dunia.²⁰

mana pasar merupakan pondasi dasar bagi penataan atas seluruh aspek kehidupan manusia. Baca George Soros. 1998. *The Crisis of Global Capitalism*. New York: Public Affairs, hlm. xx; bdk. Fred Block and Margaret R. Somers. 2014. *The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi’s Critique*, Harvard University Press, hlm. 3.

19 PSN bernomor 222 ini termaktub di dalam Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, hlm. 11. Baca daftar resmi KPPIP tentang “Kawasan Industri Morowali” dalam <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khusus/kawasan-industri-morowali-sulawesi-tengah> diakses pada 25 September 2019.

20 Terhitung sejak diresmikannya industri bahan baku baterai lithium PT QMB New Energy Materials di Kawasan Industri Morowali pada 11 Januari 2019, pemerintah menargetkan selama 16 bulan ke depan industri sudah dapat beroperasi yang pada tahap pertama pabrik akan dapat memproduksi litium sejumlah 50.000 ton per tahun. Baca Aditya Bayu Pratama, “Kehadiran IMIP dan Transformasi Miskin Partisipasi” di dalam <https://kum-paran.com/paluposo/kehadiran-imip-dan-transformasi-miskin-partisipasi-1rZ1XhSdB14> diakses pada 25 September 2019.

Agar tersistematisasi dengan baik, penyajian gagasan akan terpilah ke dalam lima sub bahasan berikut: *pertama*, pembongkaran terhadap mitos “demokrasi yang menyejahterakan”; *kedua*, tilikan historis singkat tentang rekam jejak penyesuaian neoliberal sebagai proyek politik kelas atas di Indonesia, sejak era Orde Baru hingga era reformasi. *Ketiga*, ilustrasi singkat tentang salah satu register “proyek politik kelas atas” di sektor tambang bernama “Kawasan Industri Morowali” (KIM) yang merepresentasikan praktik *neo-extractivism*. Paparan dilanjutkan dengan menyajikan hasil investigasi lapangan tentang pergulatan hidup dan kehidupan buruh sektor tambang di KIM. *Keempat*, sajian daftar catatan dan posisi kritis yang dirangkum dari sebaran gagasan dalam empat sub bahasan terdahulu.

Membongkar Mitos “Demokrasi yang Menyejahterakan”

Sebagaimana telah diulas di bagian pengantar, sekuensi kontrak politik Jokowi pada periode pertama tentang “demokrasi yang menyejahterakan” dan periode kedua tentang “mengundang investasi yang seluas-luasnya, dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya” menjadi *raison d’etre* atau justifikasi dasar bagi dimulainya tulisan ini. Oleh karena itu, ijinakan penulis mengawali sub bagian ini dengan menyajikan kembali pokok-pokok pikiran penulis yang pernah tertuang di dalam artikel “Menggapai Kesejahteraan Publik: Menyoal Ulang Demokrasi yang Menyejahterakan” (Widyanta, 2014).

Meski berlatarkan antusiasme politik warga pada Pilpres 2014, namun Widyanta (2014) mengindikasikan keraguannya dengan menyajikan daftar persoalan dan hambatan sebagai tembok tebal yang menghadang Jokowi untuk memenuhi janji politik “demokrasi yang menyejahterakan” itu, sekurangnya dalam tiga catatan pokok berikut. *Pertama*, terpilihnya kepemimpinan nasional yang paling berkualitas dan mumpuni sekalipun, teramat jelas bukan jaminan tercapainya kesejahteraan publik. Terdapat tembok tebal bagi Jokowi untuk mewujudkan itu. Dengan merujuk artikel Priyono (2003) soal kepemimpinan republik yang mesti melampaui langgam-lama sindroma ratu adil (*messianic complex*), kajian menegaskan bahwa selain harus menyikapi warisan persoalan lima pemerintahan sebelumnya, Jokowi dihadapkan pada tantangan riil ke-

pemimpinan utamanya yang berkaitan dengan membangun perimbangan tiga poros Indonesia: komunitas, pasar, dan badan publik.²¹

Kedua, sistem demokrasi tidak memiliki hubungan liner-kausalistik dengan kesejahteraan. Bahkan pada sejumlah kasus empiris demokrasi bukanlah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan. Dengan merujuk argumen Alhumami (*Kompas*, 27/12/2007) tentang hubungan demokrasi dan kesejahteraan, kajian mengargumenkan bahwa hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan pada dasarnya bersifat non-linear-kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan, penduduk, penegakan hukum, kemantapan/kelembutan institusi politik, dan lain sebagainya.²²

Ketiga, kegagalan demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan warga mesti dirunut pangkal masalahnya pada kombinasi berbahaya antara kapitalisme (liberalisasi pasar) dan demokrasi yang diterapkan sejak tahun 1998. Dengan merujuk Wibowo & Priyono (2006) dan Petras & Veltmeyer (2001) tentang komplikasi demokrasi dan kapitalisme, kajian menegaskan bahwa kegagalan itu tidak bisa dibaca dengan memperbaiki iklim bisnis agar investor asing cepat masuk sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan. Tidak dapat pula mengatasinya dengan memperkuat otonomi daerah atau memperkuat parta-partai. Kegagalan itu mesti ditafsirkan karena salah menggabungkan dua obat mujarab yang mau ditenggak sekaligus. Dalam konteks ini, sejarah dua dekade reformasi menunjukkan bahwa dominasi “sistem pasar” atas “badan publik” dan hidup “komunitas” telah membawa brutalitas ketidakadilan dalam neoliberalisme. Selain telah menjadi preferensi politis pemerintah, meminjam terminologi Hardiman (2013), pasar telah mengkolonisasi wilayah masyarakat warga. Dengan kata lain, pasar telah menjadi skandal (*scandalum*) solidaritas di negeri ini.²³

21 A.B. Widyanta, *Menggapai Kesejahteraan Publik: Menyoal Ulang “Demokrasi yang Menyejahterakan”*, hlm. 5

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

Sejalan dengan ketiga catatan tersebut, hasil kajian lembaga independen International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan Oxfam Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan dampak serius dari kinerja “proyek politik” neoliberal di Indonesia. Alih-alih menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan buruh, investasi asing justru menyebabkan tingginya ketimpangan di Indonesia. Kondisi semacam ini seolah menjadi fakta-penjelaras atas peringatan seorang ekonom kesohor, Thomas Piketty (2013), yang menegaskan bahwa tanpa ada campur tangan pemerintah, ekonomi pasar cenderung menyebabkan kekayaan terkonsentrasi pada sedikit orang sehingga ketimpangan akan meningkat.²⁴

Hasil kajian INFID dan OXFAM (2017) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Indonesia menduduki peringkat enam terburuk dunia di bawah Rusia, Denmark, India, Amerika, dan Thailand. Data kajian juga menunjukkan bahwa 4 orang terkaya Indonesia menguasai setara kekayaan 100 juta penduduk termiskin.²⁵ Secara spesifik, kajian INFID dan OXFAM (2017) memerinci sekurangnya ada enam faktor yang menyebabkan tingginya ketimpangan di Indonesia, yaitu: (1) Fundamentalisme pasar (*market fundamentalism*) yang mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi; (2) *Political Capture* yang meningkat, yaitu orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka; (3) Ketidaksetaraan gender; (4) Upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan; (5) Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur; dan (6) Sistem perpajakan yang gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan.²⁶

24 Thomas Piketty (translated by Arthur Goldhammer), 2013, *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge-MA: Harvard University Press, hlm. 430–439.

25 INFID & Oxfam Indonesia, 2017, *Menuju Indonesia yang Lebih Setara: Laporan Ketimpangan Indonesia (Oxfam Briefing Paper)*. February, Jakarta: INFID, hlm. 1. Baca juga INFID, *Laporan Publik INFID 2017–2018*, Jakarta: INFID, 2018, hlm. 17.

26 INFID & Oxfam Indonesia. 2017. *Menuju Indonesia yang Lebih Setara: Laporan Ketimpangan Indonesia (Oxfam Briefing Paper)*. February, Jakarta: INFID, hlm. 14–27. Baca juga Redaksi INFID, “Lebarnya Ketimpangan Ekonomi di Indonesia” di dalam <https://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia> diakses pada 25 September 2019.

Hal yang menarik sekaligus relevan dari kajian itu untuk disajikan di sini adalah paparan mengenai ketimpangan yang diakibatkan liberalisasi pasar tenaga kerja, tepatnya fleksibilitas yang dipaksakan atas pasar tenaga kerja di Indonesia. Berbasis data ILO (2015 dan 2016), analisis kajian INFID & Oxfam bisa diringkas kedalam enam poin penting berikut: *pertama*, penyebab utama ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah kondisi pasar tenaga kerja yang sebagian besar tenaga kerjanya (sepertiga dari pekerja reguler) bekerja untuk pekerjaan berketerampilan rendah, berupah rendah, dan keamanan kerja yang tidak memadai (ILO, 2015). Lebih jauh, analisis kajian merinci bahwa kasus pekerja perempuan memiliki rasio yang lebih tinggi, dimana selama dua dekade terakhir menunjukkan proporsi karyawan perempuan yang menerima upah rendah semakin meningkat. Hal itu berarti jumlah perempuan yang beralih dari pekerjaan rumah tangga tak berbayar ke pekerjaan kontrak paruh waktu bertambah banyak. *Kedua*, ketimpangan pendapatan tenaga kerja itu tentu saja telah menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara bagian barat dan timur Indonesia. Pasalnya, mayoritas buruh berketerampilan bekerja untuk industri di kawasan perkotaan dan pinggiran kota di bagian barat Indonesia.²⁷

Ketiga, temuan kajian mendapati juga bahwa telah terjadi peningkatan ketimpangan upah antara buruh berketerampilan dan yang tidak berketerampilan. Implikasinya, buruh berketerampilan rendah memiliki peluang yang kecil untuk bisa naik ke jenjang pekerjaan berketerampilan lebih tinggi dengan upah tinggi. *Keempat*, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan buruh menunjukkan bahwa struktur tenaga kerja dan struktur ekonomi di Indonesia tidak sesuai. Meskipun struktur ekonomi Indonesia bergeser semakin menjauh dari sektor agraria informal ke sektor industri dan sektor jasa formal (teknik sipil, sektor bangunan dan konstruksi karena program infrastruktur pemerintah yang ambisius), namun struktur tenaga kerja Indonesia masih condong ke sektor agraria.²⁸

Kelima, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan bagi buruh tersebut merupakan batu sandungan Indonesia dalam me-

27 INFID & Oxfam Indonesia. 2017. *Menuju Indonesia yang Lebih Setara*, hlm. 23.

28 *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

menuhi permintaan berbagai industri yang sedang berkembang, dan beralih dari perekonomian yang didorong oleh industri ekstraktif dan sektor teknologi rendah ke industri manufaktur dan jasa teknologi tinggi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan pun berdampak besar pada prospek kerja bagi generasi muda. Mengutip penjelasan ILO (2016), kajian INFID dan Oxfam kembali mempertegas pengangguran di kalangan kaum muda merupakan masalah besar di Indonesia.²⁹

Menyoal pasar tenaga kerja yang tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki buruh sebagai penyebab ketimpangan, Laporan Publik INFID (2018) kembali menyorot lansiran data BPS (Februari 2018) bahwa dari jumlah tenaga kerja sebanyak 133,94 juta, 59,80% adalah mereka yang lulusan SMP ke bawah (lulus/tidak lulus SMP dan lulus/tidak lulus SD). Sehingga mereka sulit untuk diserap dalam pasar tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Kerentanan tenaga kerja ini semakin bertambah dengan hadirnya revolusi industri dan perkembangan ekonomi digital yang berpotensi menggeser tenaga kerja manusia dengan robot.³⁰

Masih timpangnya kesempatan kaum muda pada pendidikan dan pekerjaan yang layak (*decent work*) semacam itu jelas akan menjadi kendala besar bagi pemerintah Indonesia ke depan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan warganya. Di tengah perubahan profile industri di Indonesia yang semakin jauh condong ke arah industri padat modal demi mengejar komoditas ekspor yang menghasilkan devisa —seperti industri tambang (*extractive industry*), industri perkebunan (*palm oil industry*), dan industri pariwisata (*eco-tourism industry*)—niscaya janji politik Jokowi untuk penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan buruh tidak akan terealisasi dengan baik. Alih-alih menyejahterakan, opsi kebijakan yang kian bersekutu dengan pasar semacam itu justru berpotensi besar menciptakan kontradiksi, antagonisme, bahkan krisis yang tak terkalkulasikan sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan lonjakan tajam —untuk tidak menyebut ekstrim— dari, meminjam terminologi Habibi (2015), kombinasi antara pengangguran (*relative surplus population*) dan

29 *Op.Cit.*, hlm. 25.

30 INFID, *Laporan Publik INFID 2017–2018*, hlm. 17–18.

“ploretariat informal” atau “pekerja rentan” (*precariat*)³¹ tengah akan bermula dalam beberapa tahun mendatang.

Jejak “Proyek Politik” Neoliberal di Indonesia

Sub bab berikut akan menyajikan rekam jejak “proyek politik” neoliberal di Indonesia sejak Orde Baru hingga saat ini. Karena keterbatasan ruang, tilikan historis hanya akan disajikan dengan sangat ringkas. Proporsi terbesar paparan akan teralokasikan pada pencermatan terhadap fenomena “proyek politik” neoliberal selama lima tahun terakhir. Saat menjelaskan tentang “proyek politik” neoliberal di kapitalisme pinggiran, khususnya sub bahasan “*The Neoliberal State in Practice*”, David Harvey (2005) mengindikasikan watak negara neoliberal yang mengandalkan perencanaan sektor publik dan negara melalui kerjasama yang kuat dengan modal domestik dan korporasi untuk menggenjot akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks itu, Harvey menegaskan, “mereka konsisten neoliberalisasi sampai pada tataran dimana mereka memfasilitasi kompetisi di antara perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi, maupun entitas-entitas teritorial dan menerima aturan perdagangan bebas, serta mengandalkan pada pasar-pasar ekspor. Namun mereka adalah para intervensionis aktif dalam menciptakan infrastruktur-infrastruktur bagi suatu iklim bisnis yang baik.”³²

Tidak terlalu sulit bagi kita memahami ilustrasi Harvey itu untuk konteks Indonesia. Salah satu rujukan yang adekuat mendiskripsikan rekam jejak “proyek politik” neoliberal di Indonesia bisa dijumpai dalam karya Habibi (2015) berjudul *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran*. Habibi merinci penyesuaian neoliberal di Indonesia ke dalam empat tahapan: 1) Negara developmentalis-otoritarian di awal era Soeharto; 2) Liberalisasi 1980an dan Negara Neoliberal-Otoritarian; dan 3) Negara Neoliberal-Non Otoritarian Pasca Liberalisasi 1998.³³

31 Muhtar Habibi. 2015. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980-an*. Jakarta: Marjin Kiri, hlm. 15–16.

32 Dalam konteks ini, proses neoliberalisasi membuka berbagai kemungkinan negara untuk mendongkrak posisi tawar mereka dalam kompetisi internasional melalui struktur-stuktur baru dari intervensi negara semisal pemberian dukungan bagi riset dan pengembangan. Baca David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, hlm.71–72.

33 Paparan jejak penyesuaian neoliberal ini mengacu pada karya Muhtar Habibi, *Surplus*

Dalam negara *developmentalis-otoritarian*, Habibi (2015:49–58) memaparkan secara rinci bahwa pengambilalihan kekuasaan Sukarno oleh Soeharto melalui kudeta berdarah 1965 menjadi penanda awal pergeseran pembangunan Indonesia yang kapitalistik, berbasis akumulasi kapital dan berkiblat pada pasar komoditas ekspor. Paceklik pangan dan tingginya tingkat inflasi di Indonesia membuka peluang bagi Amerika Serikat (AS) dan lembaga multilateral Bank Dunia dan IMF untuk menyalurkan bantuan ekonomi dan pangan. Masuknya bantuan dan/atau modal asing, rezim Soeharto berhasil menggulirkan visi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara menguasai berbagai sumber daya alam strategis dan menjaga stabilitas politik melalui kontrol represif semua hal, baik di pedesaan dan perkotaan, utamanya kelompok massa yang dianggap radikal seperti serikat tani, serikat buruh, asosiasi pemuda, kelompok keagamaan, dll. Sejumlah kebijakan atau program pembangunan pro-pasar yang syarat dengan akumulasi kapital di era ini antara lain: UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (eksploitasi sumber daya alam minyak, gas, dan pertambangan), UU No.5/1967 tentang Kehutanan (kewenangan eksklusif atas “kawasan hutan”), program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang dikenal sebagai “Revolusi Hijau”, penyusutan arena politik dengan tiga partai yaitu PPP, PDI, dan Golkar sebagai partai bentukan negara yang berperan absolut, penjinakan serikat tani dari Barisan Tani Indonesia/BTI menjadi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI, dan penjinakan serikat buruh dari Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia/SOBSI ke Federasi Buruh Seluruh Indonesia/FBSI, hingga terakhir menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/SPSI.³⁴

Dalam liberalisasi 1980an dan negara *neoliberal-otoritarian*, Habibi (2015:58–61) menjelaskan, Soeharto harus menghadapi neoliberalisasi jilid 1 yang dipicu oleh terjun bebasnya harga minyak dunia pada tahun 1982. Kembali

Pekerja di Kapitalisme Pinggiran, hlm. 49–70.

34 Pada masa awal Soeharto (1965–1980) ini, Habibi menyertakan catatan kesimpulan yang menegaskan bahwa: “...orientasi pembangunan dalam negeri yang dibiayai bonanza minyak didedikasikan untuk melayani kepentingan kelas penguasa domestik, di mana kapital domestik berjaln erat dengan militer-politikus-birokrat mendominasi akses terhadap sumber daya yang dikuasai negara.”, baca Muhtar Habibi, *Op.Cit*, hlm. 58 Paparan di atas dirangkum dari Muhtar Habibi, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran*, hlm.49–58.

dipandu Bank Dunia dan IMF, pemerintah menempuh liberalisasi terbatas guna mendongkrak ekspor non-migas, yang meliputi: reformasi perbankan, pasar modal, perdagangan dan investasi, dan reformasi hak cipta intelektual.³⁵ Sejumlah kebijakan pun berubah seperti: perdagangan dan investasi menjadi fokus utama pembangunan sementara subsidi dan proteksi untuk petani dipangkas, pelonggaran syarat *joint venture* bagi masuknya modal asing, dan investasi asing langsung berperan dominan dalam industrialisasi. Sektor kehutanan menjadi sektor perkecualian dalam liberalisasi ini. Sebagai sumber pendapatan berlimpah bagi penguasa domestik, utamanya kroni keluarga Soeharto, sektor kehutanan justru diproteksi ketat. Liberalisasi jilid 1 menyebabkan kelas-kelas pekerja di sektor pertanian dan industri mesti menghadapi rezim Soeharto yang semakin represif hingga ketumbangannya pada 1998.³⁶

Dalam negara neoliberal-non otoritarian pasca liberalisasi 1998, Habibi (2015:61–68) menjelaskan di tengah pusaran persoalan krisis perekonomian, kuatnya tekanan internasional, dan perpecahan di lingkaran pendukungnya, Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan oposisi. Setahun berselang, “bayi kembar” demokratisasi dan liberalisasi pun lahir. Dalam kendali IMF, proses pemulihan perekonomian berujung pada “jalan tol” neoliberal: liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi demi mengejar kembali laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tidak signifikannya gerakan oposisi terhadap liberalisasi ekonomi membuat perekonomian Indonesia terliberalisasi secara jauh lebih masif. Indonesia mengadopsi beraneka kebijakan publik yang bias pasar. Misalnya, atas restu dan dukungan IMF, lahirlah sistem fleksibilitas pasar tenaga kerja berupa sistem kontrak dan *outsourcing* pada 2003. Tak ayal bila kehidupan perkotaan dihadapkan pada masalah ketidakpastian kerja dan lumpuhnya militansi buruh. Demikian pula, atas sponsor Bank Dunia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengembangan kebijakan pertanahan dan sertifikasi tanah secara

35 Muhtar Habibi, *Op.Cit.* hlm. 59.

36 Pada masa liberalisasi jilid 1 ini, Habibi menegaskan catatan: “...Kelas penguasa domestik, pemilik kapital yang tengah tumbuh sejak 1970-an dan militer-politikus-birokrat yang turut menegap manisnya akumulasi kapital dengan bantuan negara, kini tidak lagi bisa mengontrol sepenuhnya akses terhadap sumber daya negara”, baca Muhtar Habibi, *Op.Cit.* hlm. 61. Paparan di atas dirangkum dari Muhtar Habibi, *Op.Cit.* hlm. 60–61.

massif melalui pendaftaran sistematis, sejak Mei 2004–Desember 2019. “Proyek Manajemen Pertanahan dan Pengembangan Kebijakan” telah memosisikan pedesaan sebagai arena pertarungan sertifikasi tanah secara individu sebagai jaminan eksplisit/insentif bagi masuknya investasi, salah satu contohnya ekspansi korporasi agribisnis berskala besar untuk komoditas ekspor seperti *biofuel*.³⁷

Tak berhenti di situ, terdapat paket kebijakan lain yang didesain menjadi semacam “jejaring pengaman” (*safety net*) untuk mengantisipasi masyarakat yang terlempar dan tersingkir (*proletarianization*) akibat pemberlakuan sejumlah kebijakan yang berorientasi pasar. Paket proyek pembangunan sosial seperti “Program Pembangunan Kecamatan (PPK)” maupun juga sekuensi lanjutan “Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)” baik untuk kawasan pedesaan maupun perkotaan telah lama ditengarai, meminjam istilah John Harriss (2001) dan Toby Carrol (2009), semacam kerja-kerja depolitisasi dari “Kuda Troya” neoliberal.³⁸ Konsolidasi, ekspansi, dan eskalasi kebijakan neoliberal ini mendapati bentuknya yang paling solid dan

37 Pada masa liberalisasi jilid 2 ini, Habibi mempertegas lagi catatan: “...Liberalisasi politik tidak secara otomatis memperkuat kembali kekuatan kelas pekerja *vis a vis* pemilik modal. Agenda reforma agraria yang berupaya merombak ketimpangan struktural kepemilikan tanah sejak masa kolonial akhirnya kehilangan kekuatan pendorongnya. Dalam relasi kelas dan watak negara yang seperti inilah, sekarang kita perlu melihat bagaimana akumulasi ekonomi berjalan untuk melihat dampaknya dalam membentuk perkembangan laju pengangguran dan informal proletariat baik di pedesaan maupun perkotaan.” Baca Muhtar Habibi, *Op.Cit.* hlm. 70. Paparan di atas dirangkum dari Muhtar Habibi, *Op.Cit.* hlm. 61–68.

38 Baca John Harriss, 2001, *Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital*, New Delhi: Left Word Books; Toby Carroll, 2009, “‘Social Development’ as Neoliberal Trojan Horse: The World Bank and the Kecamatan Development Program in Indonesia”. *Development and Change* 40(3): 447–66; Toby Carroll, 2010, *Delusions of Development: The World Bank and the Post-Washington Consensus in Southeast Asia*, Palgrave Macmillan, hlm. xl, 84, 196; Toby Carroll, 2012, *Kebijakan Pembangunan Neoliberal di Asia Pasca-Konsensus Washington*, Jakarta: INFID, hlm. 63–84. Baca juga A.B. Widyanta, 2010. “Menelisik Ulang Community (Facilitator) Driven Development Bank Dunia di Indonesia” di dalam https://www.academia.edu/4890271/Menelisik_Ulang_Community_Facilitator_Driven_Development_World_Bank_di_Indonesia diakses pada 30 September 2019.

sistematis tatkala Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) pada tahun 2011.³⁹ MP3EI dan MP3KI terintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013.⁴⁰ Target ambisius MP3EI adalah “mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.”⁴¹

Di sini jelas, MP3EI adalah peta jalan pembangunan ekonomi untuk mengundang investasi asing.⁴² Pemahaman itu bisa ditafsir dari sejumlah kata kunci yang relevan seperti “koridor ekonomi”, “konektivitas”, “pembangunan infrastruktur”, dan “kawasan perhatian investasi”.⁴³ Kerangka desain pendekatan MP3EI menggunakan tiga strategi utama berikut: (1) pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; (2) penguatan konektivitas nasional; dan (3) penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Dari tiga strategi utama tersebut, MP3EI diarahkan pada tiga strategi inisiatif yaitu: (1) mendorong realisasi investasi skala besar pada 22 kegiatan ekonomi utama; (2) sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil; dan (3) pengembangan *center of excellence* di setiap koridor ekonomi.⁴⁴

39 Penjelasan implementasi MP3KI, baca Chris Manning and Riyana Miranti. “The Yudhoyono legacy on Jobs, Poverty and Income Distribution: A Mixed Record” di dalam Edward Aspinall, Marcus Mietzner, Dirk Tomsa. 2015. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation*, Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 303–322.

40 Baca penjelasan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana di dalam <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/mp3ei-dan-mp3ki-terintegrasi-dalam-rkp-2013> diakses pada 30 September 2019.

41 Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy. 2014b. hlm. 5.

42 Muhtar Habibi, *Op.Cit.*, hlm. 68.

43 Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, 2014b, *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*, Bogor: Sajogyo Institute, hlm.3.

44 Kementerian Koordinator Perekonomian (2011). *Masterplan Percepatan dan Perlu-*

Secara spesifik, MP3EI mendefinisikan Pembangunan koridor ekonomi (PKE) Indonesia sebagai “pengembangan kegiatan ekonomi utama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi disertai penguatan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dan lokasi kegiatan ekonomi utama serta fasilitas pendukungnya.”⁴⁵ Postur koridor ekonomi Indonesia terpilah kedalam enam kategori berikut: (1). Koridor Ekonomi Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”; (2). Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; (3). Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; (4). Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”; (5). Koridor Ekonomi Bali- Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”; (7). Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.⁴⁶

Pembentukan koridor ekonomi dilakukan dengan cara mengorganisasikan ulang kepulauan di Indonesia dengan mengidentifikasi komoditas-komoditas global yang bisa dihasilkan. Pada setiap koridor ekonomi Indonesia, yang berbasis kepulauan, kemudian dibentuk sebanyak mungkin Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).⁴⁷ Tahapan implementasi ditempuh melalui pembangunan lima hal berikut: (1) Konektivitas Utama Menghubungkan pusat pusat ekonomi (aktual dan potensial); (2) Pusat Ekonomi Pusat komersial dan perdagangan (ibukota provinsi); (3) Konektivitas pendukung Menghubungkan sektor fokus dengan infrastruktur pendukung; (4) Sektor-sektor fokus Sektor yang diprioritaskan dalam Koridor Ekonomi; (5) Infrastruktur Pendukung Pelabuhan, energi dan lain-lain.⁴⁸

asan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025. Jakarta: Kemenko Perekonomian, hlm. 24. Baca juga Wiko Saputra. 2014. *Pembangunan Ekonomi & Terancamnya Pembangunan Ekonomi & Terancamnya Hak Dasar Masyarakat: Kritik dan Kajian terhadap Kebijakan MP3EI 2011–2025*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, hlm. 8.

45 Kementerian Koordinator Perekonomian, *Op Cit.* hlm. 32.

46 Kementerian Koordinator Perekonomian, *Op Cit.* hlm. 46.

47 Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy. 2014b. hlm. 5.

48 Berikut ini daftar target infrastruktur yang harus dibangun dalam enam koridor

Tentu saja, desain MP3EI secanggih dan sesistematis itu bukanlah gagasan SBY, melainkan pengejawantahan dari kerangka pikir Geografi Ekonomi Baru (GEB) yang dielaborasi dalam Laporan Bank Dunia, *World Development Report 2009*, bertajuk “Reshaping Economic Geography” dan dokumen CADP (*Comprehensive Asia Development Plan*) 2010 yang dihasilkan lembaga think-tank bernama ERIA (*Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*) yang diinisiasi sejak 2006. Sebelum CADP lahir, ERIA telah menyusun terlebih dulu sebuah dokumen CEPEA (*The Comprehensive Economic Partnership for East ASIA*) yang dirancang sebagai cara bagi negara-negara ASEAN bekerjasama mewujudkan *East Asia Free Trade Area* (Kawasan Perdagangan Bebas AsiaTimur).⁴⁹

Begitu gamblang, pembentukan pasar bebas Asia menjadi target utama dari CADP-ERIA dan “Reshaping Economic Geography” Bank Dunia. Dengan keyakinan reorganisasi dan penataan geografi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi dan transaksi, serta meningkatkan pertumbuhan, SBY tanpa ragu mengesahkan MP3EI melalui Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011. Bahkan dalam Pidato Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan *Chief Executive Officer* [CEO] APEC, Nusa Dua, Bali, 6 Oktober 2013, SBY secara terang-terangan dan tanpa rasa malu menegaskan: “...Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (MP3EI). Dalam waktu 14 tahun ke depan, kami menargetkan 460 miliar US\$ untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Karena itu, masterplan ini memberikan kesempatan besar

ekonomi: (1) Pusat Ekonomi; (2) Klaster Industri; (3) Konektivitas Utama; (4) Konektivitas Pendukung; (5) Pembangkit Listrik; (6) Pengembangan Listrik, Air, dan Serat Optik; (7) Pelabuhan Laut dan Bandar Udara; dan (8) Kawasan Ekonomi Khusus. Baca Kementerian Koordinator Perekonomian, *Op Cit.* hlm. 32.

49 Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy. 2014a. MP3EI: Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang? Working Paper Sajogyo Institute No.17/2014, Bogor: Sajogyo Institute, hlm. 7–8; Baca juga Noer Fauzi Rachman. 2014c. “MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia”, Laporan Penelitian Sajogyo Institute 2014 “Proses-proses Kebijakan dan Konsekuensi dari MP3EI”), Bogor: Sajogyo Institute, hlm. 3.

bagi investor internasional. Akhirnya, dalam kapasitas saya sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia (*chief sales person of Indonesia Inc.*), saya mengundang anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia.”⁵⁰

Tampaknya, tongkat estafet MP3EI dalam genggamannya SBY berujung surplus kepercayaan dirinya telah bergulir ke dalam kendali pemerintahan Jokowi. Kendati berada dalam pusaran deras politik oligarkis maupun “kegaduhan politik” antar koalisi partai politik yang terbelah sejak Pilpres 2014,⁵¹ namun Jokowi berhasil menstabilkan politik pemerintahan untuk memuluskan pencapaian target-target percepatan MP3EI. Menurut tengarai Warburton (2016), stabilitas politik sejak pertengahan 2016 membuka kejelasan tentang gaya “pembangunanisme baru” (*new developmentalism*) ala Jokowi. Hanya saja, fokus pemerintah Jokowi sangat terbatas pada soal-soal infrastruktur, deregulasi, dan debirokratisasi, sementara isu-isu lain diposisikan di bawah agenda kebijakan ekonomi pragmatis layaknya program pembangunan teknokratis Orde Baru. Bagaimanapun, Warburton menegaskan, “modernisasi infrastruktur Indonesia menjadi komponen sentral agenda politik Jokowi.”⁵²

Tampak jelas bahwa jejak panjang “proyek politik” neoliberal telah tertanam sempurna dalam ambisi dan mimpi besar MP3EI ini. Persis pada titik inilah Indonesia tengah berada dalam pusaran kuasa-kuasa, meminjam Harvey (2003), “*accumulation by dispossession*” sebagai modus operandi imperialisme baru.⁵³ Nada

50 Dikutip dari Didi Novrian dan Dian Yanuardy, “Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!” di dalam Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy. 2014b. hlm. 1; baca juga Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy. 2014a, hlm. 1.

51 Burhanuddin Muhtadi. 2015. “Jokowi’s First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51 (3): 349–68.

52 Eve Warburton. 2016. “Jokowi and the New Developmentalism”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52:3, 297–320, hlm. 306–309. Bandingkan Jamie S. Davidson, 2015. *Indonesia’s Changing Political Economy: Governing the Roads*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

53 David Harvey. 2003. *The New Imperialism*, New York: Oxford University Press, hlm. 137.

keras serupa muncul dari Rachman (2014c) yang menegaskan: “Di atas kertas MP3EI yang indah, tersembunyi berbagai masalah agraria Indonesia yang kronis, akut dan berlangsung lama: perampasan tanah skala besar, kerusakan alam, eksploitasi tenaga kerja, rente dan korupsi, serta berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia.”⁵⁴ Namun demikian, Sangkoyo (2018) mengingatkan, “pembangunan koridor di seluruh wilayah daratan kepulauan Indonesia berlangsung kurang-lebih serempak dengan koridorisasi wilayah aliran sungai Mekong, Salween dan Irrawady, anak-benua India, seluruh Afrika, meso-Amerika, dan Amerika Latin.”⁵⁵

Nasib Buruh Tambang Nikel di Kawasan Industri Morowali (KIM)

Bertolak dari seluruh paparan panjang di atas, lantas bagaimana nasib buruh sektor tambang di sebuah kawasan industri terpadu *ala* MP3EI yang dibangun di tepian pantai Teluk Tolo, Morowali, ini? Pemaparan tentang nasib para buruh tambang nikel di Kawasan Industri Morowali (KIM) ini mesti diletakkan dalam latar historis modernisasi kawasan yang padat modal (asing), ekspansif, dan syarat dengan beragam persoalan terkait aktivitas industri pertambangan. Kurang dari satu dekade, kondisi hidup dan penghidupan warga di 12 desa lingkaran KIM berubah drastis paska hadirnya KIM sebagai proyek primadona MP3EI. Mayoritas masyarakat lokal (suku Bungku) yang semula bermata-pencarian sebagai nelayan dan 500 KK transmigran dari Jawa dan Bali (tahun 1992) yang semula berpenghidupan sebagai petani dan pemanfaat hasil hutan (seperti rotan, gaharu, cendana, madu hutan, merica, dll), akhirnya harus beralih penghidupan sebagai pekerja dalam beraneka jenis sektor jasa di antaranya: persewaan lahan kosong, persewaan kios/gudang, penyedia kos-kos-an, kios material, bengkel kendaraan bermotor, tempat pencucian motor/mobil, warung sembako, warung kelontong, warung makan/kuliner, kios pakaian/kecantikan, salon, laundry, jasa transportasi, sopir, ojek, jualan air isi ulang, jualan pulsa, dan sejumlah aktivitas lain seperti umumnya di kehidupan urban.

54 Noer Fauzi Rachman. 2014c, hlm. 4.

55 Hendro Sangkoyo. 2018. “Jalan Raya: Sandi-Ruang Waktu dari Perubahan Sosial-Ekologis di Bawah Kapitalisme” di dalam Muhammad Ridha, *Melawan Rezim Infrastruktur: Studi Ekonomi-Politik*, Makasar: Carabaca, hlm. xii.

Tentu saja, perubahan matapencaharian dari nelayan dan petani menjadi pekerja di sektor jasa bukanlah perkara semudah membalikkan telapak tangan. Selain tidak memiliki habitus “*entrepreneur*”, para nelayan dan petani itu membutuhkan “nyali-besar” untuk terjun ke usaha sektor jasa yang besaran modal dan tingkat spekulasinya relatif tinggi. Maka, tak heran bila medan pertarungan berebut peluang di sektor jasa itu mayoritas dikuasai dan didominasi para pendatang dari kota-kota kabupaten lain di Pulau Sulawesi. Hanya segelintir “warga lokal” saja, terutama tuan-tuan tanah, yang dihampiri nasib baik dari proses modernisasi di kawasan itu. Sedangkan mayoritas lainnya, utamanya nelayan dan petani transmigran dari Jawa-Bali, terhempas/terlempar ke pekerjaan di sektor-sektor jasa yang tingkat kerentanan dan risikonya tinggi lantaran volatilitas pasar.

Selain diposisikan dalam latar-historis perubahan drastis mata pencaharian masyarakat lokal karena aktivitas *neo-extractivism*⁵⁶ tersebut, kisah buruh tambang KIM juga penting didudukkan dalam latar ke-karut-marut-an tata ruang dan kawasan di lingkaran KIM. Karut-marutnya penataan kawasan itu tentu saja melahirkan “lingkaran setan” persoalan yang dari hari ke hari semakin kompleks. Berbagai persoalan tersebut di antaranya: konflik agraria, beragam persoalan pembebasan tanah (untuk area eksplorasi tambang, *jetty*, *stockpile* batubara, jalan *hauling*, bandara, dll), banjir, pencemaran lahan pertanian, pencemaran air sungai dan laut, pencemaran udara dari *stockpile* batubara untuk PLTU dan dari debu jalan *hauling*, hilang atau terhentinya aktivitas penghidupan masyarakat lokal (petani, nelayan, pengambil hasil hutan), tidak memadainya infrastruktur publik (jalan, listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, pasar, tempat rekreasi), kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, membludaknya parkir kendaraan bermotor buruh tambang sehingga menutupi kanan-kiri bahu jalan provinsi, lemahnya atuan dan penertiban ijin mendirikan bangunan (IMB), tidak adanya penataan kawasan pemukiman dan pengelolaan sampah/sanitasi lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat utamanya Inveksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan berbagai kasus penyakit kulit, meningkatnya kriminalitas dan konflik sosial, tidak

56 Baca K.M. Siegel. 2017. “From Neo-liberalism to Neo-extractivism” di dalam K.M. Siegel, “Regional Environmental Cooperation in South America”, *International Political Economy Series*. UK:Palgrave Macmillan, hlm. 33–61.

transparannya alokasi dan distribusi dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), hingga ragam kekerasan komunal warga sebagai strategi negosiasi terhadap miskinnya “*sense of crisis*” dan “*good will*” korporasi-korporasi maupun Pengelola KIM.⁵⁷

Ditopang oleh 16 korporasi swasta yang mayoritas berasal dari China,⁵⁸ KIM memperkerjakan 33 ribu buruh yang mana sepertiganya merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) China. Ditargetkan, penambahan bertahap hingga mencapai 100 ribu buruh akan terjadi pada tahun 2023.⁵⁹ Sedangkan jumlah pekerja tidak langsung di kawasan lingkaran tambang mencapai hampir 54 ribu orang. Berarea seluas 47 ribu hektar, KIM telah menyerap investasi sebesar US\$ 3,4 miliar pada tahun 2017 dan meningkat menjadi US\$ 5 miliar pada tahun 2018. Data per Februari 2019, KIM telah melakukan hilirisasi *nickel ore* menjadi *stainless steel*

57 Bambang Hidayana; Suharko, A.B. Widyanta. 2019. “Communal Violence as the Local Community’s Strategy to Negotiate with Nickel Mining Operations in Morowali, Central Sulawesi”, *paper* dipresentasikan pada International Symposium of Journal Antropologi Indonesia, Yogyakarta, 23–26 Juli 2019. Paparan mengenai beragam persoalan masyarakat lingkaran KIM ini bisa disimak dari Christopel Paino dan Sapariah Saturi, “Fokus Liputan: Morowali di Bawah Cengkeraman Tambang Para Jenderal”, 12 Mei 2014, di dalam <https://www.mong-abay.co.id/2014/05/12/fokus-liputan-morowali-di-bawah-cengkeraman-tambang-para-jenderal/> diakses pada 30 September 2019.

58 Sejumlah korporasi swasta Indonesia, kepemilikan sahamnya dimiliki oleh para elit politik-birokrat-pensiunan militer Orde Baru yang seorang di antaranya pejabat dalam “Kabinet Kerja” Jokowi. Baca Christopel Paino dan Sapariah Saturi, 2014, *Op Cit.*

59 Data internal, per Maret 2019. Ini tentu saja berbeda dengan rilis data dari para pejabat terkait —Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, dll— dalam berbagai pemberitaan media masa lokal dan nasional sejak Agustus 2018–Agustus 2019. Rilis di media masa bahwa proporsi TKA China hanya sebesar sepuluh persen bisa dibaca sebagai manuver pemerintah Jokowi untuk meredam “kegaduhan dari lawan politik” menjelang Pilpres 2019. TKA China yang berjumlah sepertiga ini bekerja dalam dua kategori sebagai buruh kontraktor dan buruh operasional (mulai dari buruh kasar hingga pucuk pimpinan korporasi). Antisipasinya, KIM mengintrodusir “*warning*” dan “*precautionary principle*” kepada para TKA China untuk tidak beraktivitas di luar kawasan.

berbentuk *hot rolled coil* maupun *cold rolled coil* dan telah mengekspornya ke Amerika Serikat dan China.⁶⁰

Jauh berbeda dengan nasib buruh korporasi tambang milik asing sebelum pemberlakuan renegotiasi kontrak tambang (kewajiban pembangunan smelter di 2014), sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2009,⁶¹ kondisi buruh tambang di Kawasan Industri primadona MP3EI ini menunjukkan tingkat kelayakan yang semakin merosot. Hal itu tercermin pada penerapan aturan dan prosedur yang semakin menyingkirkan hak-hak dasar buruh seperti: penerapan mekanisme fleksibilitas pasar tenaga kerja yang tercermin dalam ke-tidaktransparan-an proses rekrutmen buruh, ketidakjelasan kontrak kerja, rendahnya upah dan/atau tunjangan, pemberlakuan jam kerja fleksibel dan/atau pengurangan jam kerja, minimnya jaminan perlindungan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan buruh maupun anggota keluarganya. Demikian pula fasilitas penunjang di kawasan industri yang diwajibkan pemerintah pun belum ditanggapi secara sungguh-sungguh oleh pihak Pengelola KIM. Dua dari fasilitas penunjang di kawasan industri itu adalah fasilitas berupa tempat hunian/mess⁶² dan transportasi antar-jemput bagi para buruh.⁶³

60 Agung Hidayata, “Menperin: Industri di wilayah Indonesia Timur berpotensi tumbuh signifikan” 24/02/2019 di dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/menperin-industri-di-wilayah-indonesia-timur-berpotensi-tumbuh-signifikan> diakses pada 30 September 2019.

61 Baca A.B.Widyanta. 2013. “Sampyuh: Genealogi Konflik Industri Ekstraktif di Lanskap Masyarakat Agraris”, di dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol.2 No. 2 2013, hlm. 87–106.

62 Dalam kasus tempat hunian/mess buruh, Pengelola KIM baru bisa menyediakan asrama bagi buruh berupa 12 unit rumah susun warga (rusunawa) sejak awal tahun 2019. Tentu saja, rusunawa itu tidak akan sanggup menampung 33.000 buruh KIM. Lagi pula, antusiasme buruh untuk tinggal di rusunawa pun sangat rendah karena letaknya jauh dari tempat kerja. Sementara pengelola tidak menyediakan fasilitas transportasi antar-jemput untuk mereka.

63 Baca Lili Sunardi. 2015. “Fasilitas Penunjang untuk Buruh di Kawasan Industri Wajib Dibangun”, *Bisnis.com* 04 Mei 2015 dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150504/45/429535/fasilitas-penunjang-untuk-buruh-di-kawasan-industri-wajib-dibangun> diakses pada 30 September 2019.

Sebagian kasus dari daftar panjang persoalan buruh di atas akan tersaji pendalaman kasusnya melalui proses wawancara dengan sejumlah buruh tambang KIM.⁶⁴ *Pertama, ketidak-transparanan proses rekrutmen buruh.* Sejumlah buruh menyatakan bahwa pola rekrutmen tahun 2018, Pengelola KIM masih memberikan pelayanan dan akses yang memadai bagi calon buruh. Namun terhitung sejak awal tahun 2019, banyak tenaga kerja lokal yang berbekal ijazah sarjana pun, apalagi yang hanya berijazah SMA, tidak lolos seleksi meskipun sudah sampai tahapan wawancara. Sejumlah testimoni membeberkan proses rekrutmen Pengelola KIM telah dicemari oleh kasus suap-menyuap sejumlah oknum “orang dalam” Pengelola KIM. Alih-alih menaati sistem dan mekanisme rekrutmen yang transparan dan berbasiskan pada kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (terdidik atau terlatih), oknum-oknum Pengelola KIM justru memanipulasi sistem demi mengejar rente pribadi/kelompoknya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga, para pelamar kerja dari etnis Toraja dikenal paling berani melakukan praktik penyuapan agar lolos menjadi buruh tambang di KIM.

Praktik suap yang dilakukan Antok dan Bedu (bukan nama sebenarnya) bisa menjadi bukti atas itu. Antok (24 tahun), buruh asal Toraja yang bekerja sebagai tukang las di KIM, bisa masuk menjadi buruh lepas KIM berkat uang suap sebesar Rp 1 juta yang diberikannya kepada seorang oknum calo “orang dalam”.⁶⁵ Kesaksian serupa muncul dari Bedu (22 tahun). Buruh asal Kendari yang sejak awal 2019 bekerja di KIM sebagai kru harus membayarkan uang sogokan sebesar Rp 5 juta kepada seorang oknum calo berasal dari Poso yang konon memiliki relasi kuat dengan “orang dalam”. Menurut kesepakatan awal, Bedu mau membayar sogokan sebesar itu untuk posisi sebagai operator. Meskipun pada akhirnya hanya berposisi sebagai kru saja, namun Bedu tetap dituntut membayarkan uang sogokan sebesar kesepakatan awal.⁶⁶

64 Pemaparan potret buruh tambang nikel di Kawasan Industri Morowali (KIM) ini merupakan catatan kritis penulis yang pernah terlibat riset lapangan selama 2 bulan, Februari-Maret 2019, di desa-desa kawasan lingkar tambang Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Demi kaidah/etika akademik, nama-nama orang, perusahaan, sengaja dirahasiakan atau diganti dengan nama samaran.

65 Hasil wawancara Antok, buruh KIM berasal dari Sulawesi Selatan, 17 Februari 2019

66 Hasil wawancara Bedu (21 tahun), buruh KIM berasal dari Kendari, 17 Februari 2019.

Di tengah maraknya fenomena suap dalam proses rekrutmen buruh, Gito (19 tahun) dan Andika (20 tahun), menempuh jalur berbeda dari cara-cara “potong kompas” semacam itu. Gito, pencari kerja berasal dari Luwu Sulawesi Selatan, menceritakan telah mengirimkan surat lamaran kerja sebagai operator di KIM sejak Oktober 2018, namun hingga 4 bulan menunggu belum juga mendapatkan respons dari pihak Pengelola KIM.⁶⁷ Nasib serupa dialami Andika, pencari kerja berasal dari Palopo Sulawesi Selatan, mengisahkan telah memasukkan lamaran kerja sebagai kru di KIM sejak Agustus 2018, namun hingga 7 bulan menanti belum juga mendapatkan tanggapan dari Pengelola KIM.⁶⁸ Selama menunggu, keduanya bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sewa kamar kos yang paling murah sebesar Rp 400 ribu/bulan. Dua kasus ini memberikan catatan yang tak kalah tragis bahwa upaya menjalani prosedur legal perekrutan buruh di KIM tetap saja menuntut besaran “ongkos” yang boleh jadi tidak kalah kecil dari uang sogokan bagi para calo. “Ongkos” itu berwujud kesabaran menunggu nasib baik dalam keserbatidakpastian, se-tidak-pasti Pengelola KIM merespons lamaran para pencari kerja.

Kedua, hubungan kerja tanpa kontrak dan hubungan kerja kontrak pendek. Temuan riset lapangan mendapati kasus buruh yang tidak memilih hubungan kerja tanpa kontrak dan hubungan kerja kontrak pendek (*short-term contract workers* atau *temporary workers*) maupun *outsourcing* (*agency workers*). Dalam kasus hubungan kerja tanpa kontrak dialami oleh Antok, seorang buruh pengelas di KIM yang proses masuknya menggunakan uang sogokan kepada oknum “orang dalam”, seperti terkisahkan di atas. Berdasarkan pengakuannya ia dikontrak selama 3 tahun untuk bekerja sebagai buruh las. Hanya saja, kontrak tersebut hanya secara lisan, tidak ada bukti perjanjian kerja yang bisa menjamin dirinya akan benar-benar bekerja selama 3 tahun. Kendati tanpa ada surat, Antok memperoleh upah sebesar Rp 4,5 juta/bulan bila ia bisa bekerja penuh selama sebulan dan bisa mendapat tambahan upah lembur sebesar Rp 1,5 juta. Upah itu tergolong tinggi bagi buruh tanpa kontrak kerja. Di luar upah, Antok tidak

67 Hasil wawancara Gito, pencari kerja berasal dari Luwu Sulawesi Selatan, 17 Februari 2019.

68 Hasil wawancara Andika, pencari kerja berasal dari Palopo Sulawesi, 17 Februari 2019.

menerima fasilitas lainnya dari Pengelola KIM, semisal tunjangan tempat tinggal maupun jaminan BPJS ketenagakerjaan. Antok tinggal bersama sepupu yang menyewa 1 kamar kos berukuran kecil, berdinding triplek, berlantai tanah, dan beratap asbes, seharga Rp 400 ribu/bulan.

Sedangkan kasus hubungan kerja kontrak pendek dialami oleh Mardin (23 tahun) seorang pencari kerja dari Palopo yang memasukkan lamaran kerja pada pertengahan tahun 2018. Selang tiga bulan, ia dipanggil untuk mengikuti proses seleksi administrasi, wawancara, dan cek kesehatan. Setelah ketiganya lolos, Mardin diminta untuk menandatangani kontrak kerja untuk bekerja sebagai tenaga kru dalam masa ujicoba selama 3 bulan. Karena dinilai memiliki kinerja yang baik dalam 3 bulan, ia kembali diminta menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun yang akan berakhir pada Desember 2019.⁶⁹

Ketiga, ketidakjelasan mekanisme pembagian kerja dan kerentanan buruh terhadap pemecatan sepihak. Nasib Mardin bisa dibilang baik dibandingkan beberapa kawan tenaga kru lainnya. Ia mengisahkan beberapa kawannya dikontrak untuk bekerja di KIM selama 1 tahun. Namun baru beberapa bulan berjalan, mereka dipecat tanpa ada pemberlakuan surat peringatan terlebih dulu. Ketika kasus itu klarifikasi pada Pengelola KIM, mereka menyatakan tidak melakukan pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja/PHK), namun buruh itu sendirilah yang minta untuk mengundurkan diri. Dengan mengacu klausul aturan “pengunduran diri”, bukan PHK, Pengelola KIM secara sepihak memutuskan buruh yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pesangon dari perusahaan. Sementara buruh yang bersangkutan benar-benar tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri. Rupanya Pengelola KIM memiliki keleluasaan untuk mempekerjakan dan melepas tenaga kerja sesuai kebutuhannya atau seturut basis sentimen “suka-tidak suka” (*like and dislike*).⁷⁰

Tanpa prosedur dan alasan yang jelas, buruh rentan pemecatan sepihak dari perusahaan. Masalah itu terepresentasikan dalam beragam keluh kesah para buruh korporasi-korporasi di lingkup KIM. Dominasi korporasi Cina

69 Hasil wawancara Mardin, pencari kerja berasal dari Palopo Sulawesi, 17 Februari 2019.

70 *Ibid.*

terderivasi ke dalam mekanisme maupun praktik relasi kerja industrial yang represif. Melalui kelompok diskusi terarah (*Focus Group Discussion*), para buruh menyoroti perihal represif-nya mandor-mandor (supervisor/manajer) Cina. Tanpa *job discription* dan *division of labour* yang jelas, para mandor Cina suka “main perintah” sesukanya kepada para buruh “lokal” (dari Indonesia). Berbagai kesalahan kecil saja bisa mendatangkan omelan atau bahkan amarah hebat dari para mandor, tidak jarang berujung pada pemecatan karena alasan “sepele” (*trivial*). Alih-alih mendasarkan diri pada sistem dan mekanisme kerja yang baku dan terinternalisasikan kepada para buruh, para mandor lebih suka memainkan “gaya sipir” memperlakukan “kerumunan tawanan.” Kekilafan, kesalahan, dan kecatatan kecil di mata mandor adalah sinyalemen awal pemecatan bagi para buruh “lokal”. Testimoni para warga eks buruh yang berasal dari beberapa desa di lingkaran KIM menegaskan betapa kasus-kasus pemecatan Pengelola KIM tanpa prosedur baku sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan semacam itu telah menjadi cerita lazim keseharian warga. Tidak jarang warga sering berseloroh satir sebagai “kerja rodi” atau “kerja romusha” di zaman merdeka.⁷¹

Keempat, sistem pengupahan yang tidak adil bagi buruh “lokal”. Selain rentan terhadap perlakuan pengelola kawasan yang suka “main perintah” dan “main pecat”, para buruh juga menjadi korban dari sistem pengupahan yang tidak adil. Berdasarkan testimoni sejumlah buruh, sistem penggajian buruh tidak memenuhi unsur keadilan. Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina dengan kualifikasi pekerjaan yang sama mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dari buruh “lokal” asal Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia/TKI). Seorang buruh mengilustrasikan besaran selisih upah antara buruh Cina dengan buruh Indonesia sangat menyolok, hampir dua kali lipat. Kondisi tersebut apabila berlangsung terus menerus berpotensi untuk menimbulkan kecemburuan antara buruh asing dan buruh Indonesia. Perhitungan rata-rata upah buruh Indonesia mencapai sebesar Rp 2,9 juta/bulan. Besaran itu sesuai dengan standar Upah Minimum Sektoral Kabupaten Morowali (UMKs). Di luar upah, ada tambahan untuk tunjangan tempat tinggal sebesar Rp 500 ribu/bulan. Sehingga total upah buruh ditambah tunjangan mencapai Rp 3,4 juta/bulan. Bila buruh melakukan kerja lembur,

71 Diskusi Kelompok Terarah (FGD) buruh dan warga Desa Bahomakmur, 19 Februari 2019.

pendapatan mereka bisa bertambah hingga berkisar angka Rp 5 juta/bulan.⁷²

Dalam pandangan para buruh, upah senilai Rp 5 juta/bulan itu nampak terlihat besar, padahal sesungguhnya tergolong pas-pasan saja untuk menopang tingginya biaya hidup di kawasan industri. Sebut saja, biaya sewa kamar kos dalam kondisi standar minimal sudah mencapai sebesar Rp 850 ribu/bulan, sementara harga-harga kebutuhan pokok relatif mahal. Untuk bisa makan satu porsi makanan dengan menu standar di warung makan di wilayah kecamatan Bahodopi, seorang pekerja harus mengeluarkan uang sebesar Rp 25 ribu/porsi. Biaya lain seperti transportasi pun harus ditanggung sendiri oleh para buruh. Sekadar ilustrasi saja, harga bahan bakar minyak (BBM) per liter sebesar Rp 10 ribu/liter.⁷³ Harga itu tentu diandaikan jalan pasokan BBM menuju seputar kawasan tidak terhambat oleh terjangan banjir bandang saat musim penghujan, lantaran kawasan hutan di perbukitan Morowali telah diekstraksi dan dikonversi menjadi bijih nikel.⁷⁴

Kelima, rendahnya perlindungan K3 bagi buruh. Persoalan buruh KIM yang tidak kalah pentingnya untuk diungkapkan adalah soal rendahnya perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi buruh. Kurangnya penerapan prinsip-prinsip K3 ini diungkapkan oleh seorang warga Desa Siumbatu, salah satu dari 12 desa di lingkaran kawasan, yang pernah bekerja sebagai buruh KIM. Atas pertimbangan itulah ia kemudian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan karena sangat merasakan betapa perusahaan tidak bisa memberikan jaminan perlindungan keselamatan saat bekerja. Ia menyebutkan satu contoh kasus, saat kondisi tempat kerja licin karena guyuran hujan, mandor memaksanya untuk tetap bekerja. Menurutnya, kondisi ketika itu sangat berisiko bagi keselamatannya

72 Diskusi Kelompok Terarah (FGD) warga Kecamatan Bahodopi, 12 Februari 2019.

73 *Ibid.*

74 Baca Christophe Paino, Banjir Bandang yang Kian Akrab Menerjang Morowali. Mengapa Terjadi?, Morowali, Sulteng di 16 June 2015 dalam <https://www.mongabay.co.id/2015/06/16/banjir-bandang-yang-kian-akrab-menerjang-morowali-mengapa-terjadi> di akses pada 30 September 2019. Baca juga Newswire - Bisnis.com, "Banjir Morowali Rendam Jembatan dan Jalan Nasional, Kerugian Miliaran Rupiah", 11 Juni 2019, dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190611/45/932597/banjir-morowali-rendam-jembatan-dan-jalan-nasional-kerugian-miliaran-rupiah> diakses pada 30 September 2019.

maupun kawan-kawan buruh lainnya. Karena dibayang-bayangi kekhawatiran atas besarnya risiko itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih kerja serabutan di lingkup desanya, tanpa perlu kehilangan banyak waktu untuk keluarganya.⁷⁵

Menyoal kembali aspek keselamatan kerja, menurut salah seorang buruh senior dari Desa Lele yang masih bekerja di KIM, pengelola benar-benar harus serius memproteksi para buruhnya melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penguatan kesadaran buruh tentang K3. Ia menegaskan bahwa jumlah peralatan pelindung tubuh seperti kaos tangan, masker, dll, dari hari ke hari semakin jauh dari memadai. Dulu pernah berlaku di setiap bulannya setiap buruh mendapat jatah masker atau kaos tangan sebanyak 10 buah, namun saat ini mereka tinggal menerima separuhnya yaitu 5 buah/bulan.⁷⁶

Keenam, tidak sehatnya persaingan kerja dan rendahnya kualitas jatah makan buruh “lokal”. Selain kelima persoalan di atas, dua masalah lain yang juga dikeluhkan para buruh adalah soal persaingan tidak sehat yang terjadi di tempat kerja dan rendahnya kualitas jatah makan buruh. Pada kasus persaingan kerja, demi meraih peningkatan jenjang, posisi, jabatan yang lebih tinggi, antar sesama buruh lazim melakukan persaingan secara tidak sehat. Demi mendapatkan posisi itu, mereka tak segan-segan saling menjegal dan menjelekkkan satu sama lain saat di hadapan pimpinan. Mereka gemar mencari muka dan menjilat atasan ataupun bersikap “asal bapak senang” demi berebut pengakuan dan promosi jabatan dari atasannya. Salah satu contoh kasus, seorang buruh diganjar sangsi skorsing selama 2 bulan karena difitnah oleh sesama rekan kerjanya.⁷⁷

Soal kualitas jatah makan yang buruk, para buruh “lokal” sudah berulang kali melayangkan protes, namun pihak Pengelola KIM tidak menggubrisnya. Hal itu tercermin dalam kondisi dan kualitas makanan yang tidak kunjung mengalami perbaikan. Di setiap harinya, para buruh KIM mendapatkan satu kali jatah makan.

75 Diskusi Kelompok Terarah (FGD) buruh dan warga Desa Siumbatu, 16 Februari 2019.

76 Diskusi Kelompok Terarah (FGD) buruh dan warga Desa Lele, 16 Februari 2019.

77 Diskusi Kelompok Terarah (FGD) buruh dan warga Desa Bahomakmur, 19 Februari 2019.

Namun banyak pekerja yang tidak mau mengambil jatah makan itu karena mereka menilai bahwa makanan yang disediakan rasanya tidak enak lantaran dimasak ala kadarnya. Selain itu, higienitas makanannya pun buruk, seperti lauk pauk berupa daging ayam tidak dibersihkan dengan baik. Beberapa kali kasus juga dijumpai lauk daging ayam yang bahkan sudah dalam kondisi berulat. Pada umumnya buruh menilai makanan yang disajikan sangat membosankan karena sajian menunya selalu monoton dan tidak pernah ada variasi berarti.⁷⁸

Seluruh kisah di atas adalah penggalan nasib para buruh, anak-anak negeri, yang tengah meniti pergulatan hidup dan penghidupan di tengah pusaran gelombang blokade fundamentalisme pasar global. Keenam representasi kisah buruh di atas—berupa ketidak-transparanan proses rekrutmen buruh, hubungan kerja tanpa kontrak dan hubungan kerja kontrak pendek; ketidakjelasan mekanisme pembagian kerja dan kerentanan buruh terhadap pemecatan sepihak; sistem pengupahan yang tidak adil bagi buruh “lokal”; rendahnya perlindungan K3 bagi buruh; tidak sehatnya persaingan kerja dan rendahnya kualitas jatah makan buruh “lokal”—dapat menjadi bukti riil atas efek-efek “penghancuran kreatif” dari praktik “*accumulation by dispossession*” yang digulirkan para elit korporasi dan elit politik oligarkis ber-mazhab-kan “Geografi Ekonomi Baru”.

Persis dalam serangkaian cerita itulah, para buruh senyatanya tengah bergulat menyangga tingginya ongkos delusi peradaban (*civilization*) kaum elit oligarkis melalui derap dan gempita proyek CEPEA (*The Comprehensive Economic Partnership for East ASIA*), CADP (*Comprehensive Asia Development Plan*); hingga MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Muslihat “Pertumbuhan”: Sebuah Catatan Penutup

Pesta kemenangan Pilpres 2019 tengah mendekati usai pada 20 Oktober 2019. Jokowi dan sebarisan menteri Kabinet Kerja jilid 2 tengah bersiap meniti peta jalan konvensional untuk memenuhi “janji publik”-nya tentang “demokrasi yang menyejahterakan” berikut eksekusi akhirnya “mengundang investasi yang seluas-luasnya... dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya”.

78 *Ibid.*

Berbagi ruang dan cita-cita yang sama, rezimentasi “proyek politik” neo-liberalisme sebagai bentuk reorganisasi kelas kapitali global pun tengah berakselerasi mencapai target-target pasti dari rekonseptualisasi paham neo-klasik yang dikenal sebagai “geografi ekonomi baru”. Barbasis pada kuatnya akar pondasi penyesuaian neoliberalisme selama hampir setengah abad, era Orde Baru hingga era demokratisasi-liberalisasi, kaum elit oligarkis perlahan berhasil melakukan penyesuaian-penyesuaian melalui liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi di berbagai lini dan sektor kehidupan negeri ini. Mekanisme dan praktik-efektif “*accummulation by disspossession*” pun berlangsung dalam bingkai legal bernama “kemitraan” (*public private partnership*).

Pergeseran pendulum kebijakan publik negara yang semakin condong jauh ke arah pasar menjadi corak yang menyolok bahwa bekerjanya hukum-besi ekonomi politik telah melahirkan beraneka paradoks *ke-tata-negara-an* maupun *ke-tata-warga-negara-an* di sekujur negeri ini. Tak terkecuali sebuah kawasan bernama Morowali. Penyajian wajah-wajah muram buruh pertambangan di industri ekstraktif gaya baru (*neo-extractivism*) dalam tulisan ini hendak menegaskan bahwa “kepakam sayap kupu-kupu” neo-klasik di belahan dunia Barat itu telah menciptakan badai yang memporak-porandakan sebuah kawasan di pedalaman Sulawesi Tengah sana.

Deritan keluh-kesah para buruh menjadi penanda bahwa beraneka bentuk hubungan kerja yang semakin menjauhi hak-hak buruh, seperti hubungan kerja kontrak pendek, hubungan kerja tanpa kontrak, harian lepas ataupun magang adalah kisah nyata anak-anak negeri yang terhempas dan tersingkir dari arena pertarungan kuasa modal gigantik. Proses proletarianisasi informal para buruh maupun para warga desa yang semula berpenghidupan sebagai nelayan dan petani pada akhirnya sebatas kisah picisan di telinga kaum elit oligarkis dan para pemuja “akumulasi primitif”.

Tampaknya, janji publik tentang “demokrasi yang menyejahterakan” beserta praktik lanjutnya “mengundang investasi yang seluas-luasnya... dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya” tengah menjadi gimik (*gimmick*) yang memesona mayoritas publik di negeri ini. Sementara samar cerita buruh dari kejauhan di pedalaman Morowali sana menyodorkan realitas yang sebaliknya. Mungkin saja kita menyangsikannya, se-sangsi ketika muslihat “pertumbuhan” itu telah diam-diam meraja dalam hidup kita bersama.

Referensi

- Alhumami, Amich. 2007. “Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan” di dalam Opini *Kompas*, 27 Desember 2007.
- Alhumami, Amich. 2010. “Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi” di dalam <https://economy.okezone.com/read/2010/10/08/279/380384/demokrasi-dan-pertumbuhan-ekonomi>.
- Alisjahbana, Armida S (Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas).2012. “MP3EI dan MP3KI Terintegrasi dalam RKP 2013”, bappenas.go.id - 12/06/2012 dalam <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/mp3ei-dan-mp3ki-terintegrasi-dalam-rkp-2013> diakses pada 30 September 2019.
- Aspinall, Edward. Marcus Mietzner, Dirk Tomsa.2015. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation*, Institute of Southeast Asian Studies.
- BeritaSatu.com. 2019. “Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Hambatan-hambatan Investasi”, beritasatu.com 14/07/2019 di dalam <https://www.youtube.com/watch?v=qk4zMiei-8D0> diakses pada 15 September 2019.
- BeritaSatu.com.2019. “Pidato Pidato Lengkap Visi Jokowi untuk Indonesia 5 Tahun ke Depan”, beritasatu.com 14/07/2019, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=1M2nxjzWuM> diakses pada 15 September 2019.
- Block, Fred and Margaret R. Somers. 2014. *The power of market fundamentalism: Karl Polanyi’s Critique*, Harvard University Press.
- Carroll, Toby. 2009. “‘Social Development’ as Neoliberal Trojan Horse: The World Bank and the Kecamatan Development Program in Indonesia”. *Development and Change* 40(3): 447–66.
- Carroll, Toby. 2010. *Delusions of Development: The World Bank and the Post-Washington Consensus in Southeast Asia*, Palgrave Macmillan.
- Carroll, Toby. 2012. *Kebijakan Pembangunan Neo-liberal di Asia Pasca-Konsensus Washington*, Jakarta:INFID.
- Davidson, Jamie S. 2015. *Indonesia’s Changing Political Economy: Governing the Roads*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Gunadha, Reza. 2019. “Vedi R Hadiz: Populisme Islam dan Kaum Oligarkis pada Pilpres 2019”. suara.com – 25/02/2019, dalam <https://www.suara.com/>

- wawancara/2019/02/25/072000/vedi-r-hadiz-populisme-islam-dan-kaum-oligarkis-pada-pilpres-2019* diakses pada 15 September 2019.
- Habibi, Muhtar. 2015. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980-an*, Jakarta: Marjin Kiri.
- Hardiman, F. Budi. 2013. *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Harriss, John. 2001. *Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital*, New Delhi: Left Word Books.
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*, New York: Oxford University Press.
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*, New York: Oxford University Press.
- Hidayata, Agung. 2019. "Menperin: Industri di wilayah Indonesia Timur berpotensi tumbuh signifikan", nasional.kontan.co.id - 24/02/2019 di dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/menperin-industri-di-wilayah-indonesia-timur-berpotensi-tumbuh-signifi-kan> diakses pada 30 September 2019.
- Hudayana, Bambang; Suharko, AB. Widyanta. 2019. "Communal Violence as the Local Community's Strategy to Negotiate with Nickel Mining Operations in Morowali, Central Sulawesi", *paper* dipresentasikan pada International Symposium of Journal Antropologi Indonesia, Yogyakarta, 23–26 Juli 2019.
- Idhom, Addi M. 2019. "Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini dan Respons Jokowi soal RUU KUHP", tirta.id, 23/09/2019, dalam <https://tirta.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV> diakses pada 23 September 2019.
- Ihsanuddin. 2019. "Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi", Kompas.com - 23/09/2019, di dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/16490461/moeldoko-kpk-bisa-menghambat-investasi> diakses pada 23 September 2019.
- INFID & Oxfam Indonesia. 2017. Menuju indonesia yang lebih setara: Laporan Ketimpangan Indonesia (Oxfam Briefing Paper). February, Jakarta: INFID.
- INFID (Redaksi). 2017. "Lebarnya Ketimpangan Ekonomi di Indonesia", 10/08/2017 di dalam <https://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia> diakses pada 25 September 2019.
- INFID. 2018. *Laporan Publik INFID 2017–2018*, Jakarta: INFID.

- Jannah, Selfie Miftahul. 2019. “Jokowi Periode II: Genjot Infrastruktur Senilai Rp 6.421 Triliun”, *tirto.id* 24/09/2019, dalam <https://tir-to.id/jokowi-periode-ii-genjot-infrastruktur-senilai-rp6421-triliun-eiBJ> diakses pada 24 September 2019.
- Kementerian Koordinator Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). “Kawasan Industri Morowali” di dalam <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khusus/kawasan-industri-morowali-sulawesi-tengah> diakses pada 25 September 2019.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). “Proyek Strategis Nasional” di dalam <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional> diakses pada 15 September 2019.
- Kuwado, Januarius Fabian. 2014. “Jokowi: Pilpres Harus Menggembirakan, Bukan Menakutkan”, *Kompas* 03/06/2014 di dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/2211060/Jokowi.Pilpres.Harus.Menggembirakan.Bukan.Ketakutan> diakses pada 15 September 2019.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Marjin Kiri.
- Manning, Chris and Riyana Miranti. The Yudhoyono legacy on jobs, poverty and income distribution: a mixed record dalam Edward Aspinall, Marcus Mietzner, Dirk Tomsa. 2015. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation*, Institute of Southeast Asian Studies.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2015. “Jokowi’s First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51 (3): 349–68.
- Newswire-Bisnis.com. 2019. “Banjir Morowali Rendam Jembatan dan Jalan Nasional, Kerugian Miliaran Rupiah”, 11/06/2019 di dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190611/45/932597/banjir-morowali-rendam-jembatan-dan-jalan-nasional-kerugi-an-miliaran-rupiah> diakses pada 30 September 2019.
- Novrian, Didi dan Dian Yanuardy, “Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!” di dalam Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy. 2014b. *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*, Bogor: Sajogyo Institute.

- Paino, Christopel dan Sapariah Saturi. 2014. "Fokus Liputan: Morowali di Bawah Cengkeraman Tambang Para Jenderal", 12 Mei 2014, di dalam <https://www.mong-abay.co.id/2014/05/12/fokus-liputan-morowali-di-bawah-cengkeraman-tambang-para-jenderal/> diakses pada 30 September 2019.
- Paino, Christopel. 2015. "Banjir Bandang yang Kian Akrab Menerjang Morowali. Mengapa Terjadi?", [mongabay.com](http://www.mongabay.com) 16/06/2015 di dalam <https://www.mongabay.co.id/2015/06/16/banjir-bandang-yang-kian-akrab-menerjang-morowali-mengapa-terjadi> diakses pada 30 September 2019.
- Pane, Beby. 2018. "Vedi Hadiz: Kuasa Oligarki Dilanggengkan lewat Populisme Islam". [balairungpress.com](http://www.balairungpress.com) – 27/08/2018, di dalam <http://www.balairungpress.com/2018/08/19211/> diakses pada 15 September 2019.
- Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Petras, James & Henry Veltmeyer. 2001. *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, London: Zed Books.
- Piketty, Thomas (translated by Arthur Goldhammer). 2013. *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge-MA: Harvard University Press.
- Pratama, Aditya Bayu. 2019. "Kehadiran IMIP dan Transformasi Miskin Partisipasi", kumparan.com – 29/07/2019, di dalam <https://kumparan.com/paluposo/kehadiran-imip-dan-transformasi-miskin-partisipasi-1rZ1XhSdBl4> diakses pada 25 September 2019.
- Priyono, B. Herry. 2003. Kepemimpinan Republik dalam http://www.unisosdem.org/kum-tul_detail.php?aid=2769&coid=3&caid=22&auid=3
- Priyono, B. Herry. 2014. "Konstitusi vs Akuntansi: Hukum Besi Ekonomi Politik" di dalam *Basis* Nomor 03-04, Tahun ke-63, 2014.
- Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardy. 2014a. "MP3EI: Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?" *Working Paper* Sajogyo Institute No. 17/2014, Bogor: Sajogyo Institute.
- Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardy. 2014b. *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*, Bogor: Sajogyo Institute.
- Rachman, Noer Fauzi. 2014c. "MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia", Laporan Penelitian Sajogyo Institute 2014 "Proses-proses Kebijakan dan Konsekuensi dari MP3EI", Bogor: Sajogyo Institute.

- Ramadhan, Ardito. 2019. "Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Hajar Pungli dan Penghambat Investasi". *kompas.com* - 14/07/2019, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/20322301/pidato-visi-indonesia-jokowi-ancam-hajar-pungli-dan-penghambat-investasi> diakses pada 15 September 2019.
- Ridha, Muhammad. 2018. *Melawan Rezim Infrastruktur: Studi Ekonomi-Politik*, Makassar: Carabaca.
- Risager, Bjarke Skærlund. 2016. "Neoliberalism is a political project: an interview with David Harvey" (An Interview with David Harvey), *jacobinmag.com* – 23/07/2016 di dalam <https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance> diakses pada 15 September 2019.
- Rooser, Andrew. 2002. *The Politics of Economic: Liberalization in Indonesia: State, Market, and Power*, Richmond: RoutledgeCurzon.
- Sangkoyo, Hendro. 2018. "Jalan Raya: Sandi-Ruang Waktu dari Perubahan Sosial-Ekologis di Bawah Kapitalisme" di dalam Muhammad Ridha. 2018. *Melawan Rezim Infrastruktur: Studi Ekonomi-Politik*, Makassar: Carabaca.
- Saputra, Wiko. 2014. *Pembangunan Ekonomi & Terancamnya Pembangunan Ekonomi & Terancamnya Hak Dasar Masyarakat: Kritik dan Kajian terhadap Kebijakan MP3EI 2011–2025*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Satyagraha. 2019. "KPPIP pastikan 89 Proyek Strategis Nasional selesai triwulan III-2019", *antaranews.com* - 27/05/2019, di dalam <https://www.antaranews.com/berita/890043/kppip-pastikan-89-proyek-strategis-nasional-selesai-triwulan-iii-2019> diakses pada 15 September 2019.
- Siegel, K.M. 2017. "From Neo-liberalism to Neo-extractivism" di dalam K.M. Siegel, *Regional Environmental Cooperation in South America, International Political Economy Series*. UK: Palgrave Macmillan.
- Soros, George. 1998. *The Crisis of Global Capitalism*. New York: Public Affairs.
- Sunardi, Lili. 2015. "Fasilitas Penunjang untuk Buruh di Kawasan Industri Wajib Dibangun", *Bisnis.com* 04/05/2015, di dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150504/45/4295-35/fasilitas-penunjang-untuk-buruh-di-kawasan-industri-wajib-dibangun> diakses pada 30 September 2019.
- Ulya, Fika Nurul. 2019. "Benarkah KPK Hambat Investasi?", *Kompas.com* - 02/10/2019 dalam https://money.kompas.com/read/2019/10/02/064153626/benarkah-kpk-hambat-investasi#utm_source=insider&utm_medium=web_push&utm_campaign=benarkah_kpk_menghambat_investasi&webPushId=MjM0MDY= diakses pada 2 Oktober 2019.

- Warburton, Eve. 2016. "Jokowi and the New Developmentalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52:3, 297-320, hlm. 306–309.
- Wibowo, I. & B. Herry Priyono. 2006. *Sesudah Filsafat: Esai-Esai untuk Franz Magnis Suseno*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, I. 2010. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Widyanta, A.B. 2010. "Menelisik Ulang Community (Facilitator) Driven Development Bank Dunia di Indonesia" di dalam https://www.academia.edu/4890271/Menelisik_Ulang_Community_Facilitator_Driven_Development_World_Bank_di_Indonesia diakses pada 30 September 2019.
- Widyanta, A.B. 2013. "Sampyuh: Genealogi Konflik Industri Ekstraktif di Lanskap Masyarakat Agraris", di dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 2 No. 2 2013: 87–106.
- Widyanta, A.B. 2014. "Menggapai Kesejahteraan Publik: Menyoal Ulang Demokrasi yang Menyejahterakan" di dalam https://www.academia.edu/12375823/Menggapai_Kesejahteraan_Publik_Menyoal_Ulang_Demokrasi_yang_Menyejahterakan diakses pada 15 September 2019.

Daftar Wawancara

- FGD buruh dan warga Desa Bahomakmur, 19 Februari 2019.
- FGD buruh dan warga Desa Lele, 16 Februari 2019.
- FGD buruh dan warga Desa Siumbatu, 16 Februari 2019.
- FGD warga Kecamatan Bahodopi, 12 Februari 2019.
- Wawancara Andika, pencari kerja berasal dari Palopo Sulawesi, 17 Februari 2019.
- Wawancara Antok, buruh KIM berasal dari Sulawesi Selatan, 17 Februari 2019
- Wawancara Bedu (21 tahun), buruh KIM berasal dari Kendari, 17 Februari 2019.
- Wawancara Gito, pencari kerja berasal dari Luwu Sulawesi Selatan, 17 Februari 2019.
- Wawancara Mardin, pencari kerja berasal dari Palopo Sulawesi, 17 Februari 2019.





Tentang Para Kontributor & Penyunting



• A.B. Widyanta

A.B. Widyanta adalah staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini ia tengah merampungkan naskah disertasi bertajuk “Diskursus Politik NGO di Indonesia dalam Era Demokratisasi dan Liberalisasi” untuk program doktoral pada Departemen Sosiologi, Fisipol, UGM. Minat risetnya berkaitan dengan isu-isu NGO, gerakan sosial dan lingkungan, advokasi *disaster risk reduction*, dan kajian kritis atas pembangunanisme. Dalam 4 tahun terakhir, selain terlibat dalam kerja-kerja penelitian pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, ia juga berkegiatan dalam gerakan Critical Pedagogy for Future Indonesia (CPI). Ia dapat dihubungi melalui andrewwidyaanta1974@gmail.com.

• Ashadi Siregar

Akademisi kelahiran Prapat, Sumatra Utara ini sekaligus penulis novel populer dengan tokoh mahasiswa. Pendidikan menengahnya ditempuh di SMA Negeri Padang Sidempuan. Gelar sarjananya diperoleh dari Fakultas Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada tahun 1970. Ashadi Siregar juga pernah menjadi penanggung jawab majalah mingguan *Sendi* hingga tahun 1973. Karya-karya sastranya yakni: novel *Marini*, cerita *Warisan Sang Jagoan*, novel *Cintaku di Kampus Biru*, novel *Kugapai Cintamu*, dan novel *Terminal Cinta Terakhir*. Dengan cerita *Warisan Sang Jagoan*, Ashadi Siregar memenangi sayembara sastra sebagai Pemenang Harapan Sayembara Penulisan Roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1972.

• Arie Sujito

Arie Sujito adalah dosen sekaligus Ketua Departemen Sosiologi UGM periode 2016–2020. Bidang kajian yang ditekuni adalah Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Politik, dan Gerakan Sosial. Di luar kampus, beliau aktif di lembaga riset dan advokasi, IRE (Institute for Research and Empowerment), dan dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal pengurus pusat Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) periode 2019–2023. Arie Sujito juga aktif menulis di media, menjadi narasumber untuk isu-isu politik dan demokrasi kontemporer.

• Danang Purwanto

Pria kelahiran Wonogiri ini menjadi dosen FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sejak Juli 2019. Sebelumnya, bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Dalam Negeri pada Kantor Sosial Politik Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Di era otonomi daerah ia menjadi PNS pemerintah kabupaten Temanggung, yang bertugas di kecamatan Candiroto. Selanjutnya ia berkarya di Sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Temanggung, kemudian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan terakhir di bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Temanggung. Pengalaman sebagai birokrat menambah ketertarikannya pada bidang akademik, khususnya sosiologi politik dan kebijakan pemerintah daerah, khususnya tentang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pos-el: mdpur@staff.uns.ac.id

• Derajad S. Widhyharto

Derajad S. Widhyharto adalah pengajar dan peneliti senior Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, dengan mengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi, Kerja-Industri dan Masyarakat, Masyarakat Digital, Sosiologi Perkotaan dan Perencanaan Sosial Kota. Adapun risetnya dalam lima tahun terakhir adalah Kerjasama dan Kemitraan Strategis Perguruan Tinggi dengan Industri, Kesiapan Masyarakat dalam Pengembangan Sosio-teknologi Energi Terbarukan, Pengembangan Free Trade Agreement Center, Pemetaan Sosial Masyarakat Sekitar Pengembangan Kawasan PIK2, Ketenagakerjaan Inklusi, Kerja, Industri Digital dan Transisi Kaum Muda. Adapun minat riset yang sedang didalami saat ini adalah transisi kerja *on/off*, kerja dan hubungan industrial, serta sosiologi energi. Pos-el: derajad@ugm.ac.id

• Diah Ajeng Purwani

Dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi dan anggota Center Teaching for Staff Development (CTSD) UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini telah menghasilkan berbagai karya ilmiah di bidang Public Relations, Integrated Marketing Communication dan Development Communication. Tiga tahun terakhir ini ia banyak menulis tentang pemberdayaan melalui *new media*. Ia

juga kerap memberikan berbagai pelatihan ke seluruh Indonesia, terutama yang berkaitan dengan bidang *Public Speaking*, *Public Relations* dan *Entrepreneurship*, serta terlibat aktif di dalam komunitas Young Social Entrepreneurs Yogyakarta. Buku yang saat ini naik cetak untuk diterbitkan berkaitan dengan riset disertasinya bertema “Empowerment in Digital World”. Pos-el: ajeng.purwani@gmail.com

• **D.C. Mulyono**

Peneliti pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM ini memiliki minat riset di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Ia pernah terlibat dalam penelitian tentang Dampak Sosial Ekonomi Kawasan Industri Pertambangan di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah dan dalam penelitian tentang evaluasi dana desa di Indonesia, serta penelitian tentang Evaluasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) P.T. Sinar Mas di beberapa desa di sekitar area perkebunan sawit di kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah. Bersama rekan timnya, ia menulis artikel yang dimuat di dalam jurnal pengabdian pada masyarakat UGM dengan judul “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Termasuk Kelompok Rentan Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa di Desa Jomboran, Klaten”.

• **Desintha Dwi Asriani**

Staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fisipol, UGM ini terdaftar sebagai kandidat doktor di Ewha Womans University, Seoul, Korea Selatan. Minat kajian yang selama ini ditekuninya adalah gender, seksualitas dan tubuh sosial. Desi menekuni isu-isu spesifik seperti kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan remaja dan hak azasi perempuan. Ia memiliki sejumlah pengalaman dalam melakukan penelitian sosial dan memberikan pelatihan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Beberapa publikasi ilmiahnya telah diterbitkan dalam bentuk artikel di media masa, jurnal nasional dan internasional, serta buku. Penulis dapat dihubungi melalui desintha.dda@gmail.com dan desintha@ugm.ac.id

• **Erwan Agus Purwanto**

Erwan Agus Purwanto adalah Guru Besar dalam bidang Kebijakan Publik sekaligus Dekan Fisipol UGM periode 2012–2016 dan 2016–2020. Gelar Ph.D.

diperolehnya dari University of Amsterdam pada 2004. Buku dan artikel tentang kebijakan publik dan inovasi dalam pelayanan publik telah ditulisnya, baik buku berbahasa Indonesia maupun artikel berbahasa Inggris di berbagai jurnal akademik internasional.

• **Fina Itriyati**

Staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fisipol UGM ini tengah menyelesaikan studi di Women's Studies, School of Archaeology and Anthropology, CASS, The Australian National University (ANU). Minat risetnya berkaitan dengan topik gender, disaster dan disabilitas, *embodiment*, etnografi dan studi-studi pembangunan. Dalam 4 tahun terakhir, ia mengikuti beberapa konferensi internasional seperti ISA World Congress of Sociology di Yokohama Jepang, Women in Asia di Perth Australia, The Southeast Asian Studies Symposium di Malaysia, dll. Penulis saat ini juga menjadi salah satu editor pada Global Dialogue Newsletter International Sociological Association (ISA) wilayah Indonesia dengan tema spesifik mengenai gender. Penulis dapat dihubungi melalui itriyati.fina@ugm.ac.id atau fina.itriyati@anu.edu.au

• **Hakimul Ikhwan**

Dosen sekaligus Sekretaris Departemen Sosiologi Fisipil UGM periode 2016–2020 ini meraih Ph.D. di University of Essex, United Kingdom pada 2015. Pada periode 2013–2014, Hakim menjadi Research Fellow di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Dalam riset, pengajaran, dan publikasi, Hakim memfokuskan pada topik-topik seputar islamisme, demokrasi dan politik Islam, intoleransi dan multikulturalisme, serta kebijakan sosial dan kesejahteraan. Pos-el: hakimulikhwan@ugm.ac.id

• **Harmona Daulay**

Harmona Daulay adalah dosen di program studi Sosiologi Fisip (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) USU (Universitas Sumatera Utara) Medan sejak tahun 1994. Kini ia menjadi Ketua Program Studi Sosiologi Fisip USU periode 2017–2022. Ia menamatkan pendidikan S2 dan S3 di Fisipol UGM. Minatnya

adalah mendalami isu-isu feminitas, maskulinitas, gender dan gaya hidup. Ada 2 bukunya yang bertema perempuan. Satu bukunya berasal dari tesisnya yang membahas tenaga kerja wanita Indonesia dan satu lainnya berjudul *Perempuan dalam Kemelut Gender*. Penelitiannya 3 tahun terakhir ini seputar perempuan dan politik, serta isu maskulinitas. Prof. Dr. Partini adalah penguji tesis dan disertasinya.

• Hermin Indah Wahyuni

Staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Yogyakarta ini menyelesaikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM pada tahun 1996, lalu melanjutkan studi di S2 Ilmu Politik UGM hingga selesai pada tahun 1998, dengan tesis tentang kebijakan televisi. Tesis tersebut kemudian diterbitkan dengan judul *Televisi dan Intervensi Negara* (2000). Sekitar tahun 2002, penyuka bunga anggrek ini mendapat kesempatan melanjutkan program doktoralnya di Jerman dengan beasiswa DAAD sejak 2001 hingga berhasil mendapat gelar Ph.D. dari Institut Ilmu Media dan Ilmu Komunikasi Universitas Leipzig pada Februari 2006. Disertasinya berjudul “The Struggle to Create a Democratic Broadcasting System in Indonesia: Re-regulating Television after Political Transformation 1998”, dan diterbitkan menjadi buku dengan judul *Regulasi Media Penyiaran (Broadcasting Media Regulation)* pada tahun 2008. Bukunya yang paling akhir adalah *Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia)* (2013), dan dicetak kedua kalinya tahun 2018. Selain mengajar, ia melakukan penelitian bertema komunikasi ekologi, dan isu-isu kontemporer khususnya terkait kebijakan dan regulasi serta isu media dan komunikasi. Sumbangan pemikirannya banyak disampaikan di dalam berbagai seminar dan forum ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Saat ini ia diberi kepercayaan untuk mengelola Pusat Studi Sosial Asia Tenggara yang berhasil mendapat penghargaan sebagai salah satu Pusat Unggulan IPTEKS Perguruan Tinggi (PUI PT) bidang ilmu sosial di Indonesia. Hermin juga menjadi *country representative* untuk Asian Media Communication and Information (AMIC), yakni sebuah organisasi komunitas riset regional Asia-Pasifik di bidang komunikasi dan media, yang berpusat di Filipina. Saat ini ia juga menjadi anggota *editorial board* untuk jurnal internasional terindeks *Asian Journal for Public*

Opinion Research (Ajpor) yang berbasis di Korea Selatan, dan *Pacific Journalism Review (PJR)* yang berbasis di New Zealand. Hermin dapat dikontak melalui pos-el: hermin_iw@ugm.ac.id atau herminkilo12@gmail.com

• J. Kristiadi

J. Kristiadi adalah Peneliti Senior lembaga riset terkemuka CSIS (Centre for Strategic of International Studies) Jakarta. Ia dikenal luas sebagai kolumnis media massa yang sangat produktif, dan pengamat di Indonesia. J. Kristiadi mendapat gelar Doktor dari UGM pada 1994. Selain itu, dia mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta dan menjadi dosen tamu di Sesko (Sekolah Staf Komando) TNI (Tentara Nasional Indonesia).

• Muhamad Sulhan

Muhamad Sulhan adalah staf pengajar di almamaternya, yakni Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM sejak tahun 1999. Dia juga menulis beberapa buku terkait metode penelitian bidang komunikasi, konflik sosial, dan CSR. Beberapa karya telah dihasilkannya, seperti “Dayak Menang, Indonesia yang Malang: Representasi Identitas Etnik Dayak di Media Massa” (2006); *Demokrasi, Media Massa, dan Industri* (2010) sebagai penyunting; *Satu Dekade Film Indonesia* (2014); *Selayang Pandang Metode Digital dalam Penelitian Komunikasi* (2017); dan beberapa buku lain terkait problema sosial dan metode penelitian kualitatif. Doktor Sosiologi Media UGM ini aktif menulis di jurnal *Komunikator*, *International Journal of Arts Humanities and Social Sciences (IJAHSS)*, dan juga terlibat aktif di beberapa penelitian bertema opini dan persepsi masyarakat di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, seperti Sleman, Bantul, dan Gorontalo. Sosok ini bersedia berdiskusi atas tema-tema pemberdayaan masyarakat di hansul@ugm.ac.id, atau *add friends* di Facebook, serta hans15431@yahoo.com, dan *instagram @hansukma*

• Mochamad Sodik

Sosok kelahiran Kediri Jawa Timur 16 April 1968 ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016–2020, sekaligus Lektor Kepala/ Assoc. Prof.

(IV/c). Aktivitas lainnya adalah Peneliti dan Fasilitator P2GHA dan KIJ (PSW) UIN Sunan Kalijaga, dan Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Komprov DIY (2016–2021). Ia melaksanakan Visiting Research pada University of Goettingen Jerman (15 Juli sampai 14 Desember 2014). Riwayat studinya adalah sebagai berikut. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1987–1992) hingga mendapat gelar *doktorandus*; Fakultas Sastra UGM (1988–1989); Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM (1989–1995) hingga mendapat gelar S.Sos.; Lulus S2 Sosiologi UGM (1999) dengan gelar M.Si. dan berpredikat *cumlaude*; Gelar Doktor (Dr.) Sosiologi dari UGM (2015) dengan disertasi “Melawan Stigma Sesat”. Pos-el: mochamad_sodik@yahoo.com

• M. Falikul Isbah

M. Falikul Isbah adalah dosen pada Departemen Sosiologi UGM. Topik yang ditekuni meliputi Sosiologi Agama, Sosiologi Kerja dan Isu-isu Kesejahteraan. Memperoleh gelar Ph.D. dari University of New South Wales (UNSW), Australia pada 2016. Dalam dua tahun terakhir, Falik melakukan penelitian dan menghasilkan beberapa publikasi tentang kondisi dan hak-hak pekerja dalam industri transportasi berbasis daring.

• Nurul Hasfi

Nurul Hasfi adalah dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro, Semarang. Pada 2017, Nurul memperoleh gelar Doktor dari Departemen Sosiologi UGM. Minat utamanya adalah seputar *social media*, demokrasi dan komunikasi politik, serta mengajar mata kuliah semacam Jurnalisme Daring, dan Teknologi dalam Industri Media.

• Rama Kertamukti

Rama Kertamukti adalah dosen tetap pada Prodi (Program Studi) Ilmu Komunikasi dan Staf Ahli LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku yang telah diterbitkan sebanyak 3 judul, dan berkenaan dengan dunia Advertising, yaitu *Copywriting; Komunikasi Visual untuk Periklanan; Strategi Kreatif dalam Periklanan*. Ia juga Pengurus P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) dalam kerja

sama universitas. Lima tahun terakhir ia serius mendalami riset tentang New Media. Karya yang diterbitkan sebagai artikel terindeks Scopus berjudul “Build Design Introduction to University Profiles Using the Logo with the Augmented Reality Method” dan “Use of Local Wisdom (Purpusage) through Heart-to-Heart Communication in Settling of Social Conflicts in Karo”. Artikel terakhir di *Jurnal Nasional Sinta 2* (JKK) berjudul “Digital Life Middle-Class on Instagram: Like, Share and Comment”. Pos-el: rama.mukti@uin-suka.ac.id

• **Suharko**

Staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fisipol UGM ini berminat pada riset yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat sipil dan demokrasi, gerakan lingkungan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta dampak sosial pembangunan dan globalisasi. Publikasi yang berkaitan dengan dampak sosial pembangunan dan globalisasi antara lain: “Mempertahankan Budaya Pangan Lokal Berbasis Jagung: Studi Kasus di Desa Pagerejo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah”, *Sodality – Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2019), Vol. 7, No. 1; “Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013–2016”, *Jurnal Sosial dan Politik* (JSP) (2016), Vol. 20, No. 2. Penulis dapat dihubungi melalui suharko@ugm.ac.id

• **Sri Peni Wastutiningsih**

Sri Peni Wastutiningsih adalah dosen Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, UGM. Minat risetnya berkaitan dengan penyuluhan pertanian, sumberdaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan isu-isu yang berkaitan dengan era industri 4.0 di pertanian dan pedesaan. Dalam dua tahun terakhir, beberapa tulisan diterbitkan di dalam prosiding seminar nasional dan internasional, *book chapter*, serta jurnal. Tulisan tentang perempuan, belum lama dimuat di jurnal *Gender and Culture in Asia* (2019), (3), 13–24, dengan judul “STEM Education: Opportunity and Challenge for Women”. Pos-elnya: peni@ugm.ac.id

• **Triyono**

Triyono adalah peneliti ketenagakerjaan pada Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Penelitiannya meliputi isu serikat buruh, hubungan kerja, pengupahan dan jaminan sosial. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Sosiologi Fisipol (2005–2009) UGM. Kini sedang menempuh studi Master di Departemen Sosiologi Fisipol UGM. Pada tahun 2018 bersama tim LIPI berkesempatan melakukan penelitian di Jepang dengan dana hibah Sumitomo Foundation. Berbagai artikel telah dihasilkan dan tersebar di berbagai jurnal nasional, media massa. Ia kerap juga menjadi narasumber di media cetak, televisi, dan radio. Selain itu pernah menjadi presenter seminar internasional di Brussel tahun 2017 dan Jakarta tahun 2019. Pos-el: tri.lipi010@gmail.com



ISBN 978-602-6205-38-4

